



Pemerintah Kabupaten Brebes

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

KABUPATEN BREBES

Tahun

2025–2029



2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kabupaten Brebes



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional serta dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah, perlu perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan Daerah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 170);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan Daerah, tentara nasional indonesia, polisi republik indonesia, kejaksaan, akademisi, lembaga sosial masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat provinsi dan Daerah/desa, dunia usaha/investor, pemerintah

pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, organisasi kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
14. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
27. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
28. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

32. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
34. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
35. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
36. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
37. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
38. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
39. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
40. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
41. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
42. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
43. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam

dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

44. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
45. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah sampai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
46. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasi, mengadministrasi, serta mengolah data pembangunan daerah.
47. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
48. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
49. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
50. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
51. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJP Daerah dan RPJM Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
53. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
54. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
55. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
56. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
57. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
58. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
59. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
60. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
61. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
62. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
63. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2



- (1) Maksud penyusunan RPJM Daerah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan Visi dan Misi ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
 - b. menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Daerah selama kurun waktu 2025-2029;
 - c. mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
 - d. mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan Daerah antara Pemerintrah Daerah dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; dan
 - f. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III
RPJM DAERAH
Pasal 3

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambaran umum kondisi Daerah, gambaran keuangan Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, Visi dan Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan, program Pembangunan Daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, serta Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- b. bahan penyusunan dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029; dan
- c. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJM Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah.
- (3) Dalam hal pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Kepala Bapperida melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah kepada Gubernur.

- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJM DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan dalam hal sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain:
- a. terjadinya bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. Tahroni, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001
LEMBARAN DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2025

PURWANINGSIH SETYANI, S.H., M.H.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4-139/2025).



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, perlu disusun RPJM Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJM Daerah dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Daerah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJM Daerah digunakan

sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra-PD, Renja PD dan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	14
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	14
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	14
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	16
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	28
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.....	36
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	40
2.1.6 Persentase Aduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	43
2.1.7 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44
2.1.8 Demografi.....	47
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	51
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	51
2.2.2 Kesejahteraan untuk Semua.....	58
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	62
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	64
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	65
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	66
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	71
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	71

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	73
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.....	74
2.3.4 Transformasi Digital.....	77
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	77
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	79
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro.....	80
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	83
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	83
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	84
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	86
2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah.....	88
2.5 Gambaran Keuangan Daerah	116
2.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	120
2.5.2 Neraca Daerah.....	125
2.5.3 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah	129
2.6 Potensi, Permasalahan, dan Isu Strategis.....	134
2.6.1 Potensi Pembangunan.....	134
2.6.2 Permasalahan Pembangunan.....	144
2.6.3 Isu-Isu Strategis	159
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	176
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	176
3.1.1 Visi dan Misi.....	176
3.1.2 Tujuan dan Sasaran	179
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas.....	187
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan	187
3.2.2 Program Prioritas.....	202
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 242	
4.1 Program Perangkat Daerah.....	242
4.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	242
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	302
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	302
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	304

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	309
BAB V PENUTUP	320
5.1 Kaidah Pelaksanaan	320
5.2 Masa Transisi	321
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	321

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	5
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes.....	16
Gambar 2. 2 Peta Wilayah Aliran Sungai Kabupaten Brebes.....	17
Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Brebes	18
Gambar 2. 4 Peta Penutupan Lahan Kabupaten Brebes	24
Gambar 2. 5 Peta Potensi Cekungan Air Tanah (CAT)	26
Gambar 2. 6 Skenario Daya Dukung Air Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.....	32
Gambar 2. 7 Daya Dukung Pangan Kabupaten Brebes.....	35
Gambar 2. 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024	40
Gambar 2. 9 Volume Timbunan Sampah dan Persentase Timbulan Sampah Terolah Tahun 2020-2024	42
Gambar 2. 10 Tingkat Emisi GRK Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022	44
Gambar 2. 11 Potensi Penurunan GRK	45
Gambar 2. 12 Komposisi Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2024	48
Gambar 2. 13 Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024	49
Gambar 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	52
Gambar 2. 15 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024	55
Gambar 2. 16 Perkembangan Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Maret 2020 – Maret 2024.....	55
Gambar 2. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jawa Tengah Tahun 2024	57
Gambar 2. 18 Gini Rasio Kabupaten Brebes Tahun 2021-2024.....	58
Gambar 2. 19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes 2020-2024.....	59
Gambar 2. 20 Perkembangan Komposisi Pembentuk IPM Kabupaten Brebes 2020-2024.....	59
Gambar 2. 21 Perbandingan IPM Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024	60
Gambar 2. 22 Usia Harapan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024	61
Gambar 2. 23 Rata-Rata Lama Sekolah (dalam tahun) Tahun 2020-2024	62
Gambar 2. 24 Harapan Lama Sekolah (dalam tahun) Tahun 2020-2024	63
Gambar 2. 25 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Brebes 2020-2024.....	68
Gambar 2. 26 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2020-2023	68
Gambar 2. 27 Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) (dalam %) Kabupaten Brebes 2020-2024	71
Gambar 2. 28 Inflasi Kota Tegal 2020-2024.....	81
Gambar 2.29 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes 2022–2024.....	87
Gambar 2. 30 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2019-2024	116
Gambar 2. 31 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB ADHK	117
Gambar 2.32 Faktor-Faktor yang Menghambat Perekonomian Brebes	119
Gambar 2. 33 Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 2020-2024	123
Gambar 2. 34 Proporsi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah	123
Gambar 2. 36 Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2024.....	124
Gambar 2. 37 Proporsi Belanja Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024	125

Gambar 2. 38 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024	125
Gambar 2. 42 Gambar Potensi Pembangunan Kabupaten Brebes.....	134
Gambar 2. 43 Bagan Potensi Pondasi Budaya dan Pendidikan Kabupaten Brebes	135
Gambar 2.44 Bagan Potensi Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar Kabupaten Brebes	136
Gambar 2.45 Bagan Potensi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Brebes	138
Gambar 2.46 Bagan Potensi Ekonomi dan Akses Keuangan Kabupaten Brebes.....	140
Gambar 2.47 Potensi Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Fasilitas	141
Gambar 2.48 Bagan Potensi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.....	142
Gambar 2. 49 Gambar Permasalahan Pembangunan Kabupaten Brebes.....	144
Gambar 2. 50 Bagan Permasalahan Pondasi Budaya dan Pendidikan Kabupaten Brebes....	145
Gambar 2. 51 Bagan Permasalahan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar Kabupaten Brebes	147
Gambar 2. 52 Bagan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Brebes	150
Gambar 2. 53 Bagan Permasalahan Kesenjangan Ekonomi dan Akses Keuangan Kabupaten Brebes	153
Gambar 2. 54 Bagan Permasalahan Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Fasilitas Kabupaten Brebes	156
Gambar 2. 55 Bagan Permasalahan Penataan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Brebes.....	158
Gambar 2. 56 Bagan Isu-Isu Strategis Kabupaten Brebes	160

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 KESELARASAN DOKUMEN RPJMN DENGAN RPJMD KABUPATEN BREBES	7
TABEL 1. 2 KESELARASAN DOKUMEN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RPJMD KABUPATEN BREBES	8
TABEL 1. 3 KESELARASAN DOKUMEN RPJPD DAN RPJMD KABUPATEN BREBES.....	9
TABEL 1. 4 KESELARASAN DOKUMEN RTRW KABUPATEN BREBES DAN RPJMD KABUPATEN BREBES	10
TABEL 1. 5 KESELARASAN DOKUMEN KLHS KABUPATEN BREBES DAN RPJMD KABUPATEN BREBES..	11
TABEL 2. 1 BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BREBES	14
TABEL 2. 2 ADMINISTRATIF WILAYAH BREBES.....	14
TABEL 2. 3 RATA – RATA CURAH HUJAN DAN RATA – RATA HARI HUJAN PER BULAN (MM) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024	21
TABEL 2. 4 PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024	23
TABEL 2. 5 POTENSI SUMBER DAYA BATUAN DI KABUPATEN BREBES.....	25
TABEL 2. 6 KONDISI DANAU/WADUK/SITU/EMBUNG KABUPATEN BREBES	26
TABEL 2. 7 LUASAN HUTAN DI KABUPATEN BREBES	27
TABEL 2. 8 PRODUKSI TANAMAN PANGAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2024.....	28
TABEL 2. 9 DAYA DUKUNG AIR KABUPATEN BREBES.....	29
TABEL 2. 10 SKENARIO BUSINESS AS USUAL DAYA DUKUNG AIR KABUPATEN BREBES TAHUN 2030.	30
TABEL 2. 11 PERHITUNGAN SKENARIO DAYA DUKUNG AIR KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029	31
TABEL 2. 12 DAYA DUKUNG PANGAN KABUPATEN BREBES.....	32
TABEL 2. 13 PROYEKSI DAYA DUKUNG PANGAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2029	33
TABEL 2. 14 PROYEKSI DAYA DUKUNG PANGAN KABUPATEN BREBES	34
TABEL 2. 15 CAKUPAN RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM KABUPATEN BREBES 2020 - 2024 ..	37
TABEL 2. 16 RUMAH TANGGA BERAKSES AIR BERSIH KABUPATEN BREBES 2020 - 2024.....	37
TABEL 2. 17 DANAU, WADUK, DAN EMBUNG KABUPATEN BREBES	38
TABEL 2. 18 SKOR POLA PANGAN HARAPAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024.....	38
TABEL 2. 19 BANYAKNYA REALISASI PRODUKSI, KETERSEDIAAN, KEBUTUHAN PANGAN BEBERAPA KOMODITAS DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024	38
TABEL 2. 20 INDEKS KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024.....	39
TABEL 2. 21 KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN KABUPATEN BREBES 2020 - 2024	40
TABEL 2. 22 RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	41
TABEL 2. 23 TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITASI PENGOLAHAN SAMPAH DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	42
TABEL 2. 24 PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN LAYANAN PENUH PENGUMPULAN SAMPAH DI KABUPATEN BREBES 2020-2024 (PERSEN)	43
TABEL 2. 25 PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI DI KABUPATEN BREBES 2020-2024	43
TABEL 2. 26 CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN YANG DITANGANI DI KABUPATEN BREBES 2020-2024	44
TABEL 2. 27 INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	45
TABEL 2. 28 JUMLAH KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN BREBES 2020-2024.....	46
TABEL 2. 29 JUMLAH KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BREBES 2022-2024.....	46
TABEL 2. 30 INDEKS KETAHANAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024.....	47
TABEL 2. 31 ASPEK DEMOGRAFI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	47
TABEL 2. 32 ASPEK DEMOGRAFI KABUPATEN BREBES PER KECAMATAN TAHUN 2024.....	47
TABEL 2. 33 PROYEKSI ASPEK DEMOGRAFI KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029.....	50

TABEL 2. 34 PERTUMBUHAN EKONOMI EKS-KARISIDENAN PEKALONGAN TAHUN 2020-2024	52
TABEL 2. 35 LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2024 (%)	53
TABEL 2. 36 DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2024 (%)	53
TABEL 2. 37 KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024 (%)	56
TABEL 2. 38 PDRB PER KAPITA KABUPATEN BREBES 2020-2024	56
TABEL 2. 39 PENGANGGURAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	57
TABEL 2. 40 PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DAN JENIS KEGIATAN SEMINGGU TERAKHIR DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024.....	57
TABEL 2. 41 INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	61
TABEL 2. 42 PREVALENSI GIZI BURUK DAN STUNTING KABUPATEN BREBES 2020-2024	62
TABEL 2. 43 HASIL ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022-2024	64
TABEL 2. 44 PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JAMINAN KESEHATAN YANG DIMILIKI DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2017-2019	65
TABEL 2. 45 JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2024	65
TABEL 2. 46 PERSENTASE PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN SEJARAH DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	66
TABEL 2. 47 PERSENTASE KELOMPOK SENI BUDAYA YANG AKTIF TERLIBAT/MENGADAKAN PERTUNJUKAN Kesenian dalam 1 tahun terakhir di Kabupaten Brebes tahun 2020-2024 ..	66
TABEL 2. 48 JUMLAH PENGUNJUNG TEMPAT BERSEJARAH (ORANG) DI KABUPATEN BREBES	66
TABEL 2. 49 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	67
TABEL 2. 50 INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	67
TABEL 2. 51 JUMLAH PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN BREBES.....	69
TABEL 2. 52 REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LUAR PANTI SOSIAL DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	69
TABEL 2. 53 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN BREBES 2020-2024	70
TABEL 2. 54 UMUR HARAPAN HIDUP, HARAPAN LAMA SEKOLAH, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN PENGELUARAN PER KAPITA PEREMPUAN DI KABUPATEN BREBES 2020-2022.....	72
TABEL 2. 55 ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI KABUPATEN BREBES 2020-2024	72
TABEL 2. 56 KONTRIBUSI SEKTOR PERINDUSTRIAN DI KABUPATEN BREBES 2020-2024	73
TABEL 2. 57 KONTRIBUSI SEKTOR AKOMODASI MAKAN DAN MINUM DI KABUPATEN BREBES 2020-2024	73
TABEL 2. 58 TPT, TPAK, AK DI KABUPATEN BREBES 2020-2024.....	74
TABEL 2. 59 INDEKS INOVASI DAERAH DAN INDEKS SPBE.....	74
TABEL 2. 60 INDEKS EKONOMI HIJAU INDONESIA TAHUN 2017-2020.....	75
TABEL 2. 61 INDEKS EKONOMI BIRU INDONESIA TAHUN 2023.....	76
TABEL 2. 62 JUMLAH INFRASTRUKTUR ENERGI BARU TERBARUKAN KABUPATEN BREBES.....	76
TABEL 2. 63 INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN BREBES	77
TABEL 2. 64 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) KABUPATEN BREBES (MILIAR RUPIAH) .	78
TABEL 2. 65 PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR ANTAR DAERAH KABUPATEN BREBES 2020-2024	79
TABEL 2. 66 INDEKS INFRASTRUKTUR KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024.....	80
TABEL 2. 67 RUMAH LAYAK HUNI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	80
TABEL 2. 68 KLASIFIKASI DESA BERDASARKAN IDM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	80
TABEL 2. 69 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	81
TABEL 2. 70 INDEKS AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024.....	82
TABEL 2. 71 INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2024.....	83
TABEL 2. 72 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2020-2024	84
TABEL 2. 73 INDEKS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020-2024.....	84

TABEL 2. 74 INDEKS INTEGRITAS TAHUN 2020-2024.....	84
TABEL 2. 75 CAKUPAN PENEGAKAN PERDA DAN PERBUP DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	85
TABEL 2. 76 PERSENTASE PEMILIH DALAM PEMILU KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	85
TABEL 2. 77 CAKUPAN PATROLI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024	86
TABEL 2. 78 INDEKS DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BREBES 2022-2024	87
TABEL 2. 79 INDIKATOR URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2020-2024	88
TABEL 2. 80 INDIKATOR URUSAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024	90
TABEL 2. 81 INDIKATOR URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020-2024 ..	91
TABEL 2. 82 INDIKATOR URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2020-2024 .	91
TABEL 2. 83 INDIKATOR URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2020-2024.....	92
TABEL 2. 84 INDIKATOR URUSAN SOSIAL TAHUN 2020-2024	93
TABEL 2. 85 INDIKATOR URUSAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024	94
TABEL 2. 86 INDIKATOR URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	95
TABEL 2. 87 INDIKATOR URUSAN PANGAN TAHUN 2020-2024	96
TABEL 2. 88 INDIKATOR URUSAN PERTANAHAN TAHUN 2020-2024	96
TABEL 2. 89 INDIKATOR URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020-2024	97
TABEL 2. 90 INDIKATOR URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	98
TABEL 2. 91 INDIKATOR URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2020-2024	98
TABEL 2. 92 INDIKATOR URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	99
TABEL 2. 93 INDIKATOR URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.....	99
TABEL 2. 94 INDIKATOR URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2024	100
TABEL 2. 95 INDIKATOR URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024...	100
TABEL 2. 96 INDIKATOR URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2024	101
TABEL 2. 97 INDIKATOR URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024	101
TABEL 2. 98 INDIKATOR URUSAN STATISTIK TAHUN 2020-2024	101
TABEL 2. 99 INDIKATOR URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2020-2024	102
TABEL 2. 100 INDIKATOR URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024	102
TABEL 2. 101 INDIKATOR URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2020-2024	103
TABEL 2. 102 INDIKATOR URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2020-2024	104
TABEL 2. 103 INDIKATOR URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024	104
TABEL 2. 104 INDIKATOR URUSAN PARIWISATA TAHUN 2020-2024	105
TABEL 2. 105 INDIKATOR URUSAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024.....	106
TABEL 2. 106 INDIKATOR URUSAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024	107
TABEL 2. 107 INDIKATOR URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2020-2024	108
TABEL 2. 108 INDIKATOR URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024.....	108
TABEL 2. 109 INDIKATOR URUSAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024	109
TABEL 2. 110 INDIKATOR URUSAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020-2024.....	110
TABEL 2. 111 INDIKATOR URUSAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020-2024	110
TABEL 2. 112 INDIKATOR URUSAN PERENCANAAN TAHUN 2020-2024.....	111
TABEL 2. 113 INDIKATOR URUSAN KEUANGAN TAHUN 2020-2024.....	112
TABEL 2. 114 INDIKATOR URUSAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2020-2024	112
TABEL 2. 115 INDIKATOR URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2020-2024.....	113
TABEL 2. 116 INDIKATOR URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2020-2024.....	114
TABEL 2. 117 INDIKATOR URUSAN PENGAWASAN TAHUN 2020-2024.....	114
TABEL 2. 118 INDIKATOR URUSAN PEMERINTAH UMUM TAHUN 2020-2024	115
TABEL 2. 119 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 - 2024 KABUPATEN BREBES	121
TABEL 2. 120 NERACA DAERAH TAHUN 2020-2024 KABUPATEN BREBES.....	127

TABEL 2. 121 PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030	132
TABEL 2. 122 INTEGRASI POTENSI, MASALAH, DAN ISU DAERAH KABUPATEN BREBES	174
TABEL 3. 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029.....	182
TABEL 3. 2 HUBUNGAN TUJUAN RPJMD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030 DENGAN SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045	185
TABEL 3. 3 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI RPJMD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029	187
TABEL 3. 4 TABEL PENAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029	197
TABEL 3.5 TABEL PENAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029...	197
TABEL 3.6 ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029.....	200
TABEL 3.7 PROGRAM PRIORITAS RPJMD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029	203
TABEL 3. 8 SANDINGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN BREBES	211
TABEL 4. 1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030	243
TABEL 4. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030	303
TABEL 4. 3 INDIKATOR KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030	304
TABEL 4. 4 INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030	309

Pendahuluan

- Latar Belakang
- Dasar Hukum
- Hubungan Antar Dokumen
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan



01

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan akan menjelaskan beberapa pembahasan yaitu latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan urgensi penyusunan dokumen RPJMD yang disertai dengan data pendukung. Sementara itu, dasar hukum penyusunan berisi peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dari masing-masing bahasan tersebut.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diamanatkan pasal 260 ayat (1) bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 menjadi suatu kewajiban. Adapun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.

Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025–2045 dengan mengusung visi **“Menuju Brebes 2045 Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**. Fokus pembangunan tahap ini yaitu penerapan pondasi transformasi pada berbagai daerah di Kabupaten Brebes. Beberapa arahan kebijakan yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu penguatan pondasi budaya dan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, pengurangan kesenjangan ekonomi dan akses keuangan, perbaikan infrastruktur dasar dan penyediaan fasilitas, serta penataan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

Apabila dilihat dari aspek ekonomi, Kabupaten Brebes masih bergantung pada 3 (tiga) sektor unggulan yaitu sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Pada sektor pertanian, Kabupaten Brebes dikenal sebagai sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia dengan luas lahan bawang merah mencapai puluhan ribu hektare. Namun demikian, dalam sepuluh tahun terakhir sektor pertanian menunjukkan penurunan distribusi dari tahun 2013 sebesar 41,98% menjadi 33,28% pada tahun 2024. Sementara itu, sektor industri justru menunjukkan adanya pertumbuhan dari tahun 2013 sebesar 13,06% menjadi 19,31% pada 2024.

Selain itu, beberapa isu di Kabupaten Brebes yang perlu menjadi perhatian antara lain kemiskinan dan kesenjangan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes masih berada di atas rata-rata provinsi dengan sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan. Adapun isu kesenjangan sudah mulai berkurang dengan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa serta pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, maupun sekolah di beberapa kecamatan. Namun demikian, kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta antara Kabupaten Brebes sebelah utara, tengah, dan selatan harus terus menjadi perhatian mengingat perbedaan topografi serta bentang alam antar daerah di Kabupaten Brebes.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan sumber hukum yang menjadi dasar penyusunan. Penyusunan dasar hukum ini mengikuti dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan **RPJMD Tahun 2025-2029** dilakukan dengan memperhatikan beberapa regulasi yaitu:

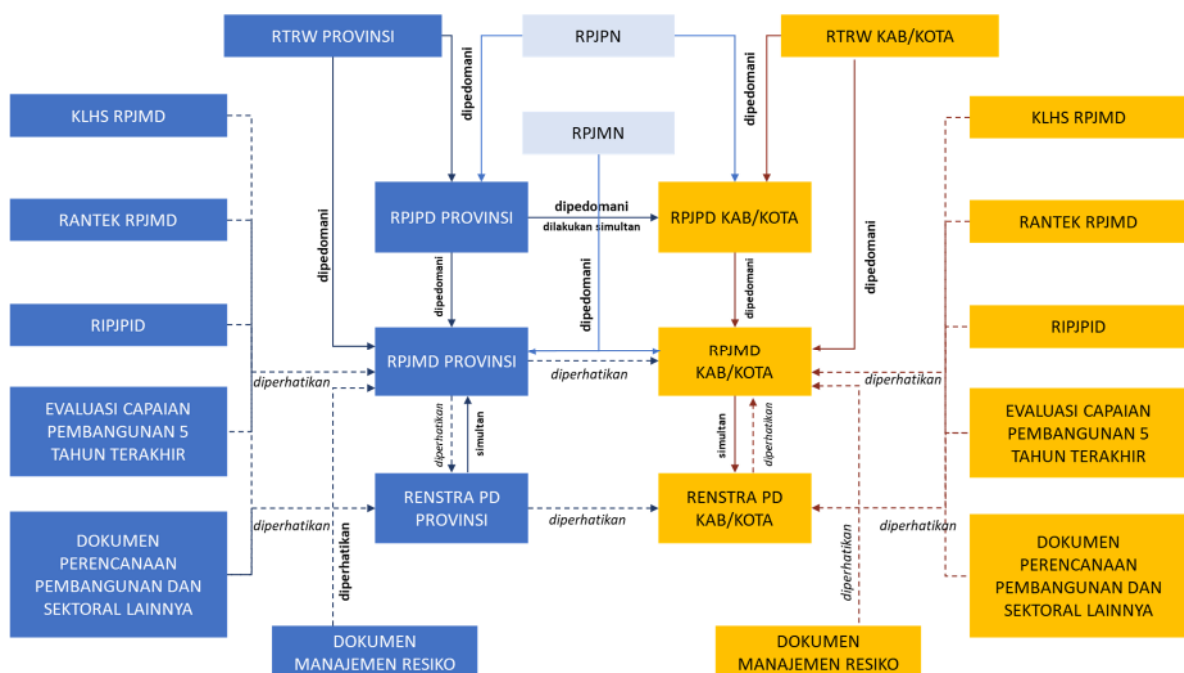
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 19. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
25. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Menteri Dalam Negeri;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 10).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu proses dalam perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJMD ini terdapat kompilasi dan analisis secara ilmiah terhadap kondisi, potensi, permasalahan, dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada kebijakan perencanaan lain seperti RPJPN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD daerah lain yang berbatasan, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW daerah lain yang berbatasan. Hubungan antar dokumen tersebut dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup perencanaan terpadu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga serta perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Proses ini menghasilkan tiga jenis dokumen perencanaan, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perbedaan utama antara ketiganya terletak pada rentang waktu perencanaannya.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

RPJP merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku selama 20 tahun. RPJP terdiri atas RPJP Nasional yang merupakan perwujudan tujuan pemerintahan Indonesia dalam bentuk visi, misi, serta arah pembangunan nasional, serta RPJP

Daerah yang mencakup tingkat provinsi dan kabupaten/kota. RPJP Daerah merinci visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang selaras dengan RPJP Nasional.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM memiliki periode perencanaan selama 5 tahun dan terbagi menjadi RPJM Nasional dan RPJMD untuk tingkat provinsi serta kabupaten/kota. RPJM sering disebut sebagai agenda pembangunan karena selaras dengan program pemerintahan yang sedang berjalan. Selain RPJM, terdapat pula Rencana Strategis (Renstra), yaitu dokumen yang merinci visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah (PD). Renstra disusun dengan mengacu pada RPJM dan bersifat indikatif.

3. Rencana Pembangunan Tahunan (RKP)

Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan dengan jangka waktu satu tahun, baik di tingkat nasional (RKP Nasional) maupun di tingkat daerah (RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Dokumen RKP menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, yaitu Rancangan APBN untuk tingkat nasional dan Rancangan APBD untuk tingkat daerah. Selain RKP, terdapat pula dokumen Rencana Kerja (Renja), yang juga memiliki cakupan perencanaan tahunan dan disusun berdasarkan Renstra serta mengacu pada RKP.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, seluruh dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan, saling terkait dan membentuk suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045. Sehingga, penyusunan RPJMD berpedoman pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pengaturan ruang yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes 2019-2039 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, terutama yang berkaitan dengan struktur dan pola ruang serta tetap memperhatikan kebijakan penataan ruang di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan dalam waktu 5 tahun kedepan. Selanjutnya, RPJMD akan dijabarkan dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan serta sub-kegiatan dari Renja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 yang berkaitan dengan aspek kewilayahan, prosesnya juga berpedoman pada RTRW Tahun 2019–2039. Perumusan RPJMD ini dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen RTRW sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

TABEL 1. 1 KESELARASAN DOKUMEN RPJMN DENGAN RPJMD KABUPATEN BREBES

RPJMN 2025-2029		RPJMD KABUPATEN BREBES 2025-2029	
VISI		"BREBES BERES"	
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045		<i>Mewujudkan Brebes sebagai kabupaten yang:</i> Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat dan Sejahtera	
MISI			
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM) .		1. Mewujudkan masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah .	
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru .		2. Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi , dengan pembangunan untuk seluruh masyarakat.	
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.		3. Mengurangi pengangguran, dan kemiskinan, memperkuat ekonomi kreatif .	
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.		4. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus .	
5. Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Aiam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.		5. Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat.	
6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan .		6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna .	
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi , Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.		7. Memajukan potensi yang dimiliki oleh Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan Alam Dan Budaya , serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.			

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029, baik dari segi visi maupun misi pembangunan. Visi nasional secara kontekstual oleh Kabupaten Brebes melalui visi "BREBES BERES" yang mencerminkan Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat dan Sejahtera. Keselarasan juga tampak dalam misi pembangunan yang mencakup penguatan ideologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik yang inklusif, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Misi RPJMD Brebes mengadopsi dan mengimplementasikan semangat RPJMN melalui fokus pada pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan berbasis potensi wilayah, yang semuanya mengarah pada tercapainya tujuan pembangunan nasional secara holistik dan terintegrasi.

TABEL 1. 2 KESELARASAN DOKUMEN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RPJMD KABUPATEN BREBES

RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2025-2029		RPJMD KABUPATEN BREBES 2025-2029	
VISI			
Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang Maju, Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045		“BREBES BERES” <i>Mewujudkan Brebes sebagai kabupaten yang: Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat dan Sejahtera</i>	
MISI			
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan.3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas.4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.		<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah.2. Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan untuk seluruh masyarakat.3. Mengurangi pengangguran, dan kemiskinan, memperkuat ekonomi kreatif.4. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus.5. Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat.6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna.7. Memajukan potensi yang dimiliki oleh Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	

Sumber: Hasil Analisis Baperida Kabupaten Brebes, 2025

Misi pembangunan nasional mencakup delapan aspek utama, mulai dari penguatan ideologi dan demokrasi, kemandirian ekonomi, pembangunan SDM, hilirisasi industri, pembangunan berbasis desa, hingga reformasi hukum dan birokrasi. Sejalan dengan itu, Provinsi Jawa Tengah mengusung enam misi utama, di antaranya peningkatan layanan dasar inklusif, pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, tata kelola pemerintahan yang responsif, pembangunan infrastruktur yang merata, stabilitas daerah berbasis budaya, serta iklim investasi yang kondusif. Kabupaten Brebes turut menyelaraskan misi pembangunannya dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah melalui tujuh misi utama, seperti mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah, meningkatkan kualitas SDM, pembangunan yang berkeadilan, kesejahteraan masyarakat dengan memangkas kesenjangan ekonomi, optimalisasi potensi daerah, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang ramah bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

TABEL 1. 3 KESELARASAN DOKUMEN RPJPD DAN RPJMD KABUPATEN BREBES

RPJPD KABUPATEN BREBES 2025-2045		RPJMD KABUPATEN BREBES 2025-2029	
VISI			
Menuju Brebes 2045: Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan		“BREBES BERES” <i>Mewujudkan Brebes sebagai kabupaten yang: Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat dan Sejahtera</i>	
		MISI	
<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, budaya dan kearifan lokal.2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, demokratis, partisipatif dan adaptif.4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya pertanian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan. infrastruktur pembangunan daerah6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan.		<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah.2. Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan untuk seluruh masyarakat.3. Mengurangi pengangguran, dan kemiskinan, memperkuat ekonomi kreatif.4. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus.5. Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat.6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna.7. Memajukan potensi yang dimiliki oleh Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan RPJPD 2025–2045 yang difokuskan pada kebijakan “Penerapan Pondasi Transformasi”. Pada periode ini, pembangunan diarahkan untuk membangun fondasi yang kokoh melalui enam agenda utama, yaitu: Penguatan Fondasi Budaya dan Pendidikan, Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Integritas, Pengurangan Kesenjangan Ekonomi dan Akses Keuangan, Perbaikan Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Fasilitas, serta Penataan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Melalui visi “Brebes BERES”, RPJMD memberikan penekanan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dan pelestarian budaya lokal, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi lokal terutama berbasis pertanian dan UMKM, serta pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Keseluruhan arah kebijakan ini menunjukkan keselarasan yang kuat antara rencana pembangunan jangka menengah dan tujuan jangka panjang RPJPD, dengan menempatkan fase awal ini sebagai pondasi penting bagi transformasi Brebes menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

TABEL 1. 4 KESELARASAN DOKUMEN RTRW KABUPATEN BREBES DAN RPJMD KABUPATEN BREBES

RTRW KABUPATEN BREBES 2019-2039		RPJMD KABUPATEN BREBES 2025-2029	
TUJUAN		VISI	
<p>Penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Brebes sebagai gerbang pembangunan di bagian barat Jawa Tengah berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.</p>		<p>“BREBES BERES” <i>Mewujudkan Brebes sebagai kabupaten yang: Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat dan Sejahtera</i></p>	
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG		MISI	
<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan. • Peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah. • Peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain. • Kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. • Pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. • Pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan atau pertumbuhan sosial budaya tinggi. • Pengembangan kawasan yang memiliki pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. • Pengembangan kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah. 2. Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan untuk seluruh masyarakat. 3. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan, memperkuat ekonomi kreatif. 4. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. 5. Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat. 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna. 7. Memajukan potensi yang dimiliki oleh Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 	

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2019–2039, terutama dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis potensi wilayah. Tujuan RTRW untuk menjadikan Brebes sebagai gerbang pembangunan di bagian barat Jawa Tengah yang berbasis pertanian, industri, dan jasa sejalan dengan visi “Brebes BERES” yang mengedepankan ketangguhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misi dalam RPJMD yang mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif, turut mendukung kebijakan RTRW dalam mengembangkan kawasan berdaya saing ekonomi tinggi dan mewujudkan keterpaduan antarwilayah. Selain itu, pendekatan RPJMD yang berwawasan lingkungan juga mendukung kebijakan pola ruang RTRW terkait pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, sehingga arah pembangunan jangka menengah

berjalan harmonis dengan rencana tata ruang jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan wilayah.

TABEL 1. 5 KESELARASAN DOKUMEN KLHS KABUPATEN BREBES DAN RPJMD KABUPATEN BREBES

ARAH KEBIJAKAN KLHS (2025 – 2029)	RPJMD KABUPATEN BREBES 2025-2029
ARAH KEBIJAKAN	MISI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan produktivitas sektor-sektor unggulan agribisnis dan pariwisata dengan dukungan riset serta memperkuat usaha kecil menengah yang dapat membuka lapangan pekerjaan. 2. Peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas dan pendidikan yang inklusif untuk peningkatan kualitas hidup dalam keluarga berkualitas. 3. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan dan distribusi kesejahteraan serta pemberdayaan dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak. 4. Peningkatan upaya promotif-preventif dan budaya perilaku hidup sehat melalui pemenuhan sanitasi, layanan sampah, dan air bersih aman, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 5. Peningkatan upaya pengurangan risiko bencana, perlindungan kaum rentan, pengembangan sistem peringatan dini dan upaya adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi dampak dan kerugian bencana. 6. Pengembangan sistem digitalisasi pelayanan publik didukung kualitas infrastruktur Teknologi Informasi dan SDM profesional serta inovasi peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah. 2. Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan untuk seluruh masyarakat. 3. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan, memperkuat ekonomi kreatif. 4. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. 5. Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat. 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna. 7. Memajukan potensi yang dimiliki oleh Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

Dokumen KLHS Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan RPJMD, dan secara substantif memiliki arah kebijakan yang selaras dan mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. Fokus KLHS pada penguatan sektor agribisnis dan pariwisata sejalan dengan misi RPJMD untuk memajukan potensi sektor unggulan dan memperkuat ekonomi kreatif. Upaya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan dalam KLHS juga mendukung misi RPJMD dalam menjamin layanan dasar yang merata dan berkualitas. Komitmen KLHS terhadap pemberdayaan perempuan, pengurangan kemiskinan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan memperkuat misi RPJMD yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Selain itu, strategi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam KLHS turut memperkuat upaya RPJMD dalam menciptakan pembangunan yang tangguh dan inklusif. Pengembangan sistem digitalisasi pelayanan publik yang tercantum dalam KLHS juga mendukung misi peningkatan kualitas birokrasi dan inovasi

layanan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan KLHS menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Brebes berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud merupakan suatu kehendak yang menjadi dasar dalam melakukan suatu tindakan. Sementara itu, tujuan merupakan arah yang dituju untuk mencapai kehendak tersebut. Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Selain itu, maksud dari penyusunan RPJMD ini yaitu sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Selanjutnya, maksud ini diuraikan pada beberapa tujuan.

b. Tujuan

Sebagai penjabaran dari maksud penyusunan RPJMD, tujuan terdiri dari beberapa poin yang menjelaskan arahan untuk mencapai maksud tersebut. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029, disusun 6 tujuan yang menjadi penjabaran maksud tersebut. Berikut merupakan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Brebes selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Brebes selama kurun waktu 2025-2029;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; serta
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- 7.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan alur penulisan yang dilakukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Sesuai dengan arahan Instruksi menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025, terdapat 5 bab dalam dokumen RPJMD. Lebih lanjut, berikut merupakan sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD. Latar belakang menjelaskan urgensi penyusunan dokumen RPJMD yang disertai dengan data pendukung. Sementara itu, dasar hukum penyusunan berisi peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada Bab II menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis. Sub bab gambaran umum kondisi daerah berisi pembahasan mengenai aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Selanjutnya, sub bab gambaran keuangan daerah berisi pembahasan mengenai realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 serta proyeksi APBD Tahun Anggaran 2025-2029. Terakhir, sub bab permasalahan dan isu strategis berisi pembahasan mengenai permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada BAB III menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Sub bab visi, misi, tujuan dan sasaran berisi pembahasan mengenai visi misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Selanjutnya, sub bab strategi, arah kebijakan dan program prioritas berisi pembahasan mengenai strategi dan arah kebijakan serta program-program prioritas daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada BAB IV menguraikan tentang program perangkat daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab program perangkat daerah berisi pembahasan mengenai daftar program perangkat daerah serta indikator program, target, dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya, sub bab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berisi pembahasan mengenai indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja daerah (IKD), dan indikator kinerja kunci (IKK). Namun demikian, dalam satu dekade terakhir sektor pertanian menunjukkan penurunan

BAB V PENUTUP

Pada BAB V menguraikan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, masa transisi, serta pengendalian dan evaluasi. Kesimpulan berisi dari pokok pembahasan pada semua bab dalam RPJMD. Sementara itu, kaidah pelaksanaan, masa transisi, serta pengendalian dan evaluasi menjelaskan mengenai teknis operasionalisasi dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.

Gambaran Wilayah

- Aspek Geografi dan Demografi
- Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- Aspek Daya Saing Daerah
- Aspek Pelayanan Umum
- Gambaran Keuangan Daerah
- Permasalahan dan Isu Strategis



02

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menyajikan kondisi umum Kabupaten Brebes sebagai landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah. Analisis dalam bab ini mencakup gambaran geografis, demografis, serta potensi dan permasalahan yang berkembang di Kabupaten Brebes. Pemahaman terhadap kondisi daerah secara menyeluruh penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan lima tahunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi digambarkan melalui analisis deskriptif dan analisis diagnostik dengan menggunakan data lima tahun terakhir. Aspek geografi menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS, serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. Sedangkan aspek demografi menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lain yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Brebes.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Brebes merupakan wilayah administratif bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki letak strategis karena berada di wilayah barat Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Secara astronomi, Kabupaten Brebes berada di 6°44'-7°21' LS dan antara 108°41'-109°11' BT dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sejauh 87 km dan dari barat ke timur sejauh 50 km terdapat garis pantai sepanjang 55 km yang membentang dari Kecamatan Losari sampai dengan Kecamatan Brebes. Luas Kabupaten Brebes tercatat 175.904,57 ha atau 1.759,04 km² dengan batas administrasi seperti [Tabel 2.1](#).

TABEL 2. 1 BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BREBES

Arah Angin	Batas	Kecamatan yang Berbatasan
Utara	Laut Jawa	Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Losari
Selatan	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap	Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung
Timur	Kota Tegal dan Kabupaten Tegal	Brebes, Jatibarang, Songgom, Larangan, Tonjong, Sirampog
Barat	Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan	Losari, Banjarharjo, Salem, Bantarkawung

Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039

Kabupaten Brebes mempunyai 17 Kecamatan, 292 Desa, dan 5 Kelurahan dengan pusat ibukota berada di Kecamatan Brebes. Berdasarkan luas wilayahnya, Kecamatan Bantarkawung merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 208,18 km² sedangkan Kecamatan Kersana merupakan wilayah terkecil seluas 26,97 km². Sebaran wilayah yang beragam ini mencerminkan tantangan dan potensi pembangunan yang berbeda-beda di setiap kecamatan.

TABEL 2. 2 ADMINISTRATIF WILAYAH BREBES

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Salem	167,21	21	-
2	Bantarkawung	208,18	18	-
3	Bumiayu	82,09	15	-
4	Paguyangan	108,17	12	-
5	Sirampog	74,19	13	-
6	Tonjong	86,55	14	-
7	Larangan	160,25	11	-
8	Jatibarang	36,39	22	-
9	Wanasari	75,34	20	-
10	Brebes	92,23	23	5
11	Songgom	52,65	10	-
12	Kersana	26,97	13	-
13	Losari	91,79	22	-
14	Tanjung	72,09	18	-
15	Bulakamba	120,36	19	-
16	Ketanggungan	153,41	21	-
17	Banjarharjo	161,75	25	-
KAB. BREBES		1.759,04	292	5

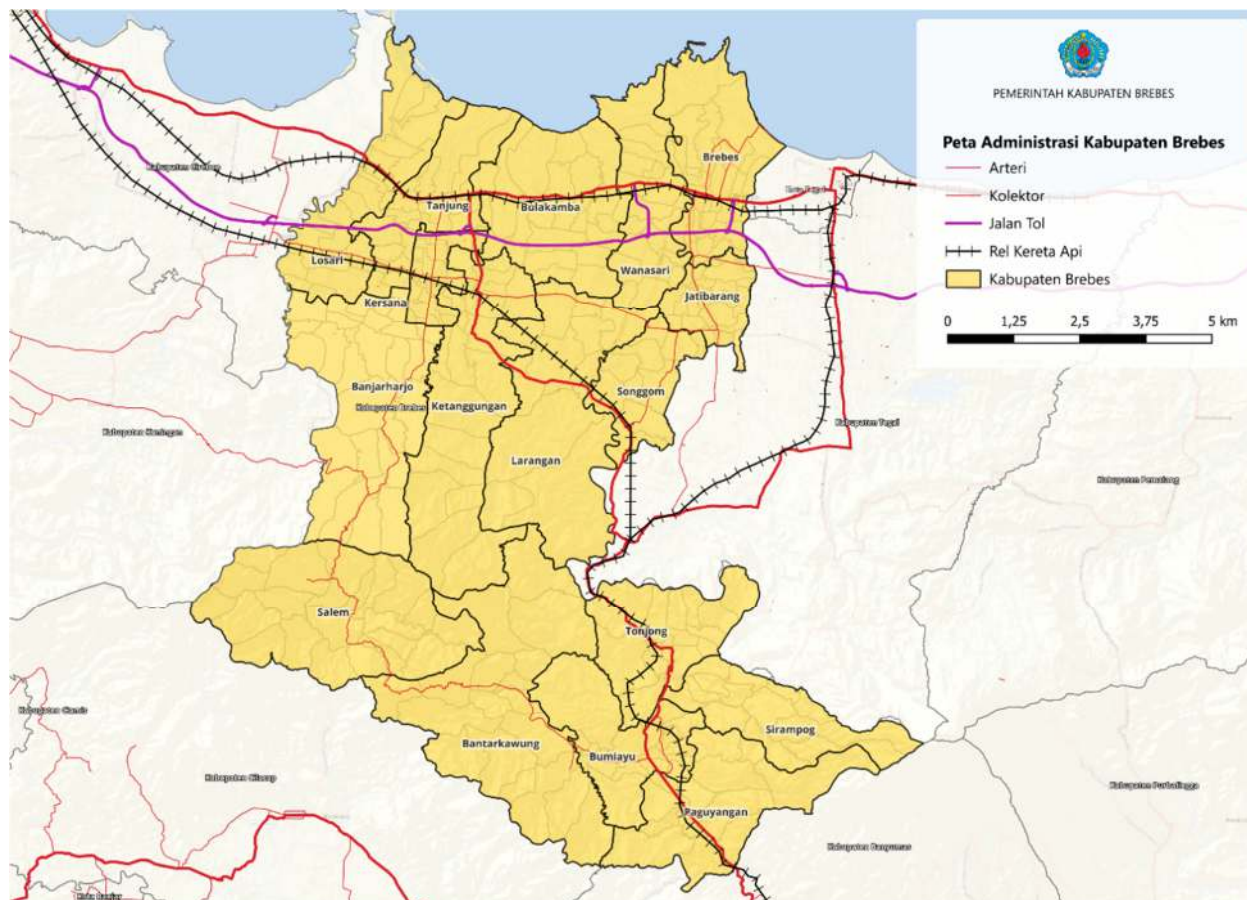
Sumber: Kabupaten Brebes Dalam Angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Brebes berada dalam sistem perwilayahan (regionalisasi) Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang) dan berperan sebagai pusat industri rumah tangga. Selain itu, Kabupaten Brebes juga diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan regional. Peran strategis ini didukung oleh konektivitas wilayah yang baik serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Selain itu, Kabupaten Brebes termasuk dalam kawasan peruntukan industri dan menjadi salah satu daerah kawasan strategis provinsi (KSP) Industri Prioritas Provinsi. Di sektor pertanian dan pangan, Kabupaten Brebes menjadi salah satu kawasan pendukung terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Jawa Tengah. Posisi strategis wilayah Kabupaten Brebes dapat dilihat dari segi konektivitas antarwilayah. Wilayah Kabupaten Brebes berada di lokasi strategis yang mampu menjangkau simpul-simpul utama infrastruktur perhubungan. Di sektor perhubungan darat, terdapat tiga akses pintu tol yang mampu memudahkan mobilitas barang dan orang yaitu melalui Gerbang Tol Brebes Timur, Gerbang Tol Brebes Barat, dan Gerbang Tol Pejagan. Selain itu, terdapat stasiun kereta api Brebes yang menghubungkan lalu lintas kereta api di wilayah utara, serta stasiun kereta api Bumiayu dan Tanjung di wilayah selatan.

Di sektor perhubungan udara, Kabupaten Brebes berjarak sekitar 117 km dari Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati, dan sekitar 172 km dari Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Sementara itu, dari sektor perhubungan laut, Kabupaten Brebes berjarak sekitar 70 km dari Pelabuhan Cirebon, sekitar 175 km dari pelabuhan Patimban di Subang, dan sekitar 177 km dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, serta sekitar 13 km dari Pelabuhan Tegal.

Sebagai konektivitas jalur laut, Pelabuhan Cirebon berperan sebagai pintu gerbang kegiatan usaha bagi Provinsi Jawa Barat dan sebagian Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 2024

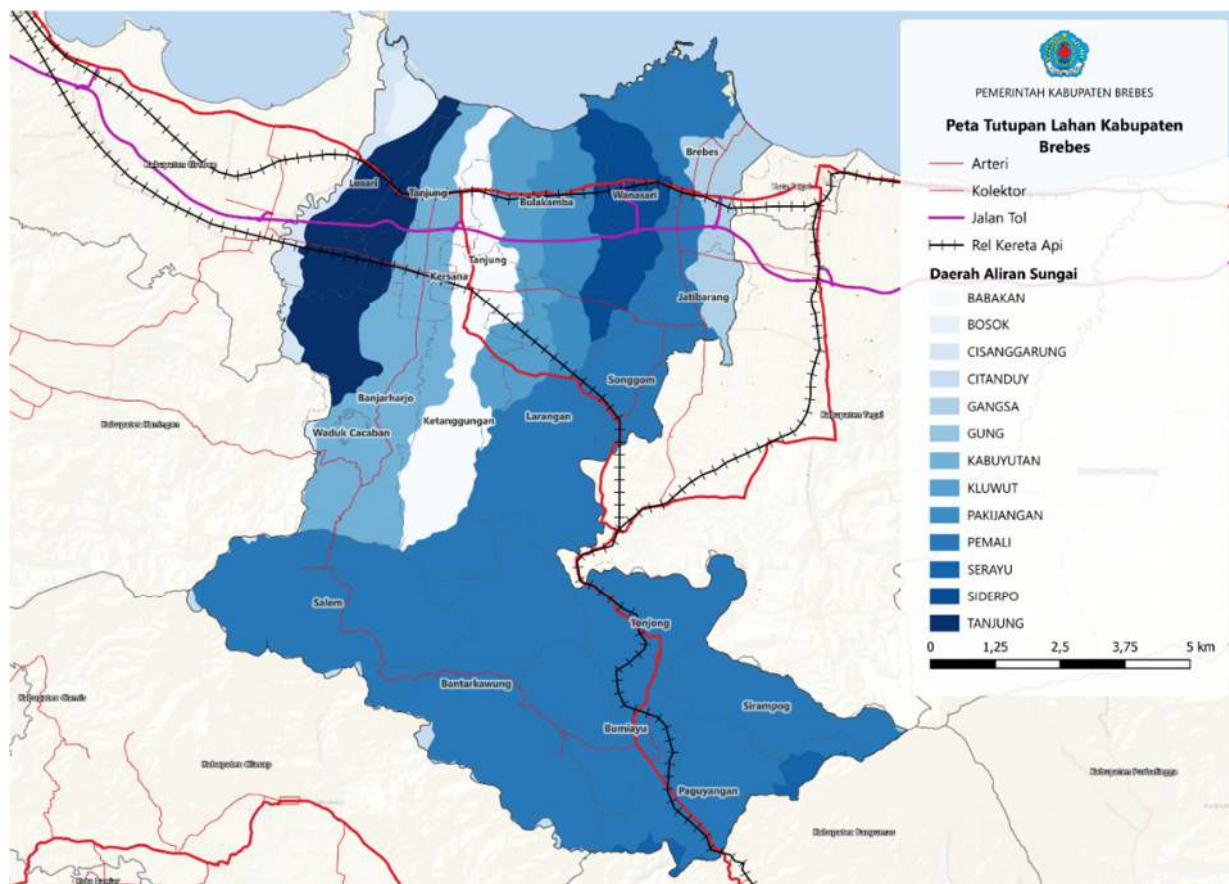
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah. Kabupaten Brebes memiliki beragam sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik geografis yang berbeda. Pengelolaan potensi ini secara optimal sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

2.1.2.1 Hidrologi

Kondisi hidrologi dapat dilihat dari keberadaan air permukaan di suatu daerah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai, dan rawa. Karena kuantitas dan kualitas air tanah (*ground water*) semakin merosot, penyediaan air bersih di masa depan tergantung pada ketersediaan air permukaan (*surface water*). Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di daerah penyelidikan, air permukaan umumnya dijumpai berupa sungai utama dengan cabang sungainya, sedangkan ranting sungai yang terutama

berada di daerah perbukitan umumnya berupa sungai musiman atau kering di musim kemarau dan hanya berair di musim hujan.



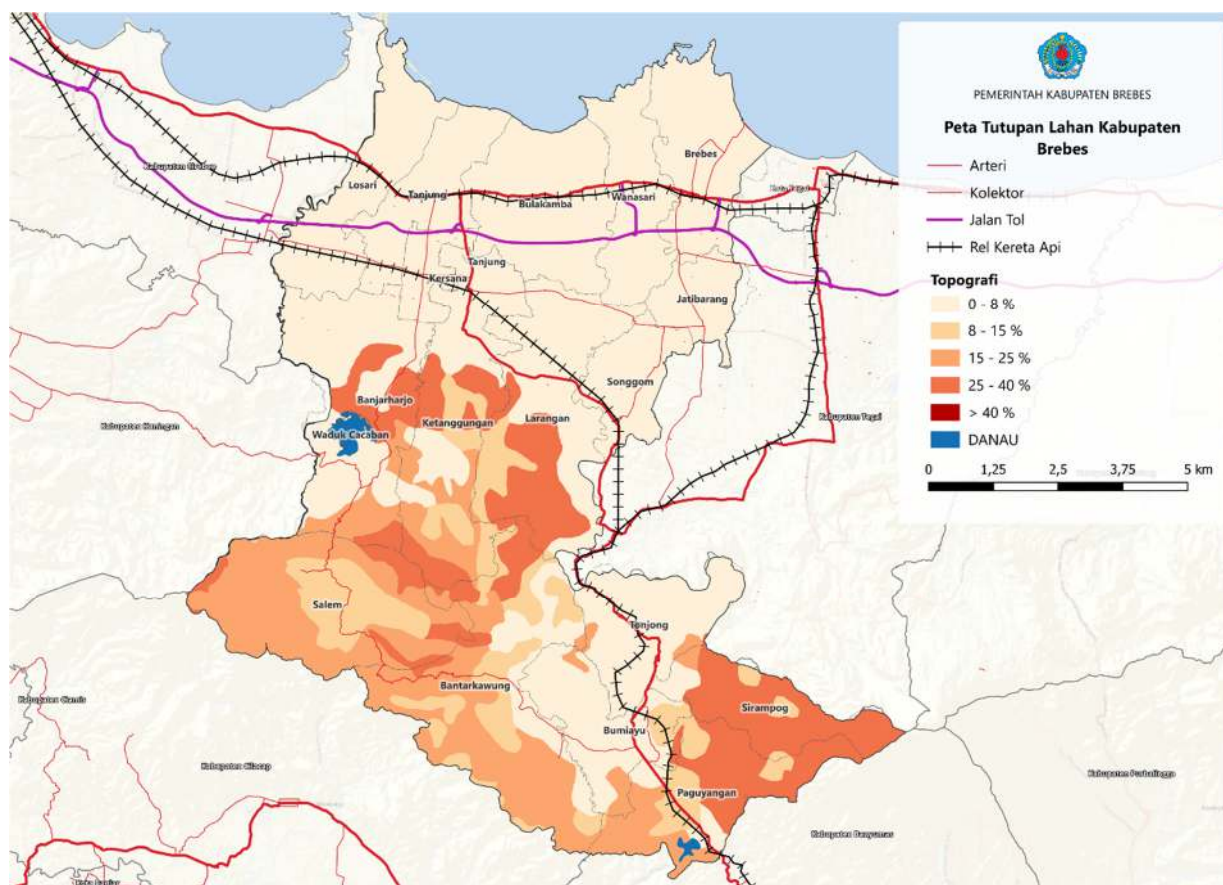
Gambar 2. 2 Peta Wilayah Aliran Sungai Kabupaten Brebes

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 2024

Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi hal yang harus diperhitungkan mengingat adanya keterkaitan dalam aspek hidrologi khususnya curah hujan. Daya tampung dan tingkat peresapan DAS di Kabupaten Brebes dibagi menjadi dua Wilayah Sungai antara lain WS Cimanuk-Cisanggarung dan WS Pemali-Comal. Dari dua bagian WS tersebut, DAS pada WS Pemali-Comal adalah yang dominan dua Wilayah Sungai antara lain WS Cimanuk-Cisanggarung dan WS Pemali-Comal dengan jumlah luasan mencakup 119.559,34 hektar atau sekitar 68% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk luasan DAS pada WS Cimanuk-Cisanggarung seluas 56.177,96 hektar atau sekitar 32% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes.

2.1.2.2 Topografi dan Morfologi

Wilayah Kabupaten Brebes memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah. Luas wilayah dengan kondisi topografi sangat rendah seluas 84.262,35 hektar atau sekitar 48% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Untuk wilayah dengan kondisi topografi tinggi seluas 20.203,67 hektar atau sekitar 11% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yang tersebar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan, dan Banjarharjo.



Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Brebes

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 2024

Dilihat dari ketinggian dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kecamatan Salem dengan ketinggian 500 mdpl, dan Kecamatan Paguyangan dengan ketinggian 342 mdpl. Sedangkan untuk Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, dan Kecamatan Ketanggungan tingginya berkisar antara 23 mdpl, 22 mdpl, dan 17 mdpl. Selain itu wilayah kecamatan lain rata-rata berada pada ketinggian 1-5 mdpl yang tersebar di wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes yang memiliki wilayah pesisir di bagian utara.

Jika dilihat dari segi morfologi atau bentuk kenampakan alam di Kabupaten Brebes dibagi menjadi 4 (empat) yakni datar, bergelombang, berbukit, dan bergunung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes berbentuk datar dengan luas 84.262,34 hektar atau 48% dari total wilayah yang tersebar di semua kecamatan selain Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Sirampog. Luas wilayah dengan kategori bentuk bergelombang seluas 34.966,801 hektar atau sekitar 20% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yakni di Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo. Wilayah dengan morfologi berbukit dan bergunung tersebar di bagian selatan Kabupaten Brebes, khususnya di Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, dan Sirampog, yang memiliki kemiringan lereng cukup curam dan potensi rawan longsor.

2.1.2.3 Geologi

Keadaan geologi wilayah Kabupaten Brebes diketahui merupakan vulkanik kuartir muda yakni batuan induk yang membentuk lapisan tanah. Jenis batuan yang ada merupakan batuan gunung api merapi. Wilayah Kabupaten Brebes jika dilihat dari aspek geologinya, dibagi menjadi 21 jenis meliputi:

- a. Aluvial. Tersebar hampir di semua kecamatan di Kabupaten Brebes selain Kecamatan Salem dan Sirampog. Wilayah dengan jenis tanah aluvial seluas 75.089,45 hektar atau sekitar 42,7% dari total keseluruhan luas yang ada di Kabupaten Brebes;
- b. Produk Batuan Erupsi Tua Slamet. Persebarannya berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, dan Larangan dengan jumlah keseluruhan seluas 3.799,83 hektar atau 2,2% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes;
- c. Endapan Lahar Gunung Slamet. Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Songgom, dan Jatibarang dengan total luas 12.107,92 hektar atau sekitar 6,9% dari luas Kabupaten Brebes;
- d. Formasi Gintung. Formasi Gintung memiliki luas 2.326,48 hektar atau 1,3% dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Persebarannya meliputi sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Tonjong, dan Banjarharjo;
- e. Formasi Linggopodo. Berada di Kecamatan Salem dengan luas 1.157,59 hektar dan Kecamatan Tonjong dengan luas 1.592,82 hektar;
- f. Formasi Mengger. Berada di sebagian kecil Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, dan Tonjong dengan total luas 649,02 hektar atau hanya sekitar 0,4% dari jumlah luas Kabupaten Brebes;
- g. Hasil Gunung Api Tua Jenis geologi ini hanya ada di Kecamatan Bantarkawung dengan luas 0,47 hektar;
- h. Lava Gunung Slamet. Jumlah luas lava Gunung Slamet sebesar 3,12 hektar yang berada di sebagian kecil Kecamatan Sirampog atau sekitar 0,018% dari luas wilayah Kabupaten Brebes;
- i. Batuan Gunung api Slamet Tidak Terdiferensiasi. Berada di sebagian Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong dengan jumlah luas 12.556,280 hektar atau 7,1% dari luas wilayah Kabupaten Brebes;
- j. Produk Erupsi Muda Ciremai. Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo dengan jumlah luas 14.440,87 hektar atau sekitar 8,2% dari luas wilayah Kabupaten Brebes;
- k. Batuan Beku Tak Teruraikan. Berada di wilayah Kecamatan Bantarkawung dengan luas 212,09 hektar;
- l. Formasi Lawak. Jumlah luas 358,46 hektar di sebagian wilayah Kecamatan Ketanggungan dan Larangan;
- m. Formasi Pemali. Terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Bantarkawung, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, dan Songgom dengan luas 5.218,59 hektar;
- n. Formasi Halang. Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo dengan luas 10.836,57 hektar;
- o. Formasi Kumbang. Memiliki luas 19.170,79 hektar atau 10,9% dari luas wilayah Kabupaten Brebes yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Salem, Bantarkawung, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo;

- p. Formasi Rambatan. Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, dan Ketanggungan dengan luas 6.754,33 hektar;
- q. Formasi Kalibiuk. Berada di sebagian Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Tonjong, dan Banjarharjo dengan luas 1.644,24 hektar;
- r. Anggota Indrawangi. Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung dengan luas 22,52 hektar;
- s. Formasi Kaliglagah. Berada di sebagian Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, dan Tonjong dengan luasan 5.316,10 hektar;
- t. Formasi Tapak. Berada di sebagian Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Tonjong, Larangan, dan Songgom dengan luas 2.368,41 hektar;
- u. Anggota Batu gamping. Berada di sebagian Kecamatan Songgom dengan luas 111,34 hektar.

Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah atau batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah atau batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Salah satu hal yang mencerminkan kondisi geologi permukaan yaitu jenis tanah yang membentuk kawasan. Kandungan mineral yang terdapat dalam tanah dapat untuk menduga kemampuan tanah dan kandungan unsur tanah. Sesuai karakteristik geologinya, potensi sumber daya mineral yang ada merupakan sumber daya mineral dengan cadangan tereka meliputi 8 jenis yaitu pasir sungai, tras, batu pasir, andesit, lempung gerabah, bentonit, gipsum, dan batu gamping. Berdasarkan cadangan tereksplorasi meliputi 3 jenis yaitu pasir sungai, andesit, dan lempung gerabah. Sebaran batu pasir berasal dari endapan sungai berada di sepanjang alur sungai Cisanggarung, sungai Pemali, sungai Keruh, sungai Pedes, dan beberapa sungai lainnya. Batu pasir berasal dari endapan vulkanik berada di wilayah sekitar kaki lereng Gunung Slamet. Berdasarkan cadangan terindikasi, Kabupaten Brebes juga memiliki cadangan sumber daya mineral berupa batu gamping (batu kapur) di Kecamatan Songgom.

Keragaman dan kekayaan sejarah geologis yang ditemukan pada struktur batuan di Kabupaten Brebes, terutama Kecamatan Bumiayu. Kawasan yang tergabung dalam Situs Bumiayu menyimpan harta karun geologi berupa fosil-fosil purba. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes No. 81 Tahun 2022 tentang Pelestarian Keragaman Geologi Situs Bumiayu, diketahui bahwa Situs Bumiayu terbagi atas enam kawasan, yakni: (1) Kawasan Hominid Kalibodas di Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu; (2) Kawasan Artefak dan Hutan Purba Kaligintung di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong; (3) Kawasan Gajah Purba Kaliglagah di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong; (4) Kawasan Sungai Purba Kalijurang di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong; (5) Kawasan Pesisir Purba Kedungbukur di Desa Bantarwaru, Kecamatan Bantarkawung; dan (6) Kawasan Karnivora Purba Kalipetujuh di Desa Kalinsu, Kecamatan Bumiayu. Enam kawasan di Situs Bumiayu diusulkan menjadi *geoheritage*, yang lebih lanjut direncanakan sebagai *Geopark* Nasional. Hal tersebut menjadi dasar pelestarian yang menekankan potensi sosial, ekonomi, edukasi, konservasi, dan wisata berbasis kekayaan sejarah geologis dengan tetap menjaga keberlanjutan pelestarian.

2.1.2.4 Klimatologi

Faktor-faktor penting dan berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah antara lain adalah temperatur (suhu udara), curah hujan, penguapan, dan penyinaran matahari. Pada

tahun 2023 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu dengan rata-rata curah hujan sebanyak 13,553 mm dengan rata-rata hari hujan selama 31 hari. Sedangkan jumlah curah hujan tertinggi berdasarkan kecamatan terjadi di Kecamatan Salem sebanyak 279 mm yang berasal dari pengamatan di satu stasiun pengukuran. Untuk lebih jelasnya curah hujan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

TABEL 2. 3 RATA – RATA CURAH HUJAN DAN RATA – RATA HARI HUJAN PER BULAN (MM) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

No	Kecamatan	Rata – rata curah hujan per bulan (mm)	Rata – rata Hari hujan per bulan (hari)
1	Salem	279	14
2	Bantarkawung	147	12
3	Bumiayu	158	9
4	Paguyangan	212	11
5	Sirampog	238	17
6	Tonjong	119	9
7	Larangan	150	9
8	Ketanggungan	178	11
9	Banjarharjo	130	11
10	Losari	117	8
11	Tanjung	104	9
12	Kersana	175	8
13	Bulakamba	144	9
14	Wanasari	107	8
15	Songgom	140	10
16	Jatibarang	163	8
17	Brebes	112	7
Rata-Rata		157	16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes , 2024

Rata-rata curah hujan per bulan Kabupaten Brebes Tahun 2024 yaitu 157 mm yang menunjukkan rata-rata yang lebih rendah dibandingkan rata-rata curah hujan per bulan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang berada pada angka 287,55 mm. Adapun untuk rata-rata hari hujan Kabupaten Brebes Tahun 2024 yaitu 16 hari yang menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan rata-rata hari hujan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu 14 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa dari segi volume, Kabupaten Brebes memiliki volume yang lebih kecil. Namun demikian, memiliki rata-rata hari hujan yang lebih lama.

2.1.2.5 Jenis Tanah

Jenis tanah di kabupaten Brebes secara garis besar terbagi menjadi 19 (sembilan belas) jenis tanah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes. Sebagian besar jenis tanah pada Kabupaten Brebes adalah Aluvial Kelabu. Tekstur tanah Kabupaten Brebes terdiri dari fraksi liat, debu dan pasir membentuk tanah, dari ketiga tekstur tanah tersebut dikelompokkan dalam 3 kelas, yaitu halus, sedang dan kasar. Berikut rincian luasan:

- a. Jenis tanah aluvial kelabu bercampur dengan aluvial coklat tua tersebar hanya pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Salem dan Kecamatan Bantarkawung dengan luasan masing-masing 1.488 ha dan 1.792 ha;
- b. Jenis tanah latosol tua kecoklatan dan kemerahan tersebar pada Kecamatan Salem (6.090 ha), Bantarkawung (9.332 ha), dan Bumiayu (1.352 ha);
- c. Asosiasi aluvial kelabu dan coklat kelabu tersebar hanya pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Salem dan Kecamatan Bantarkawung dengan luasan masing-masing 1.488 ha dan 1.792 ha;
- d. Asosiasi gromosol kelabu kekuningan dan regosol kelabu hanya berada pada Kecamatan Salem dengan luasan 5.828 ha;
- e. Asosiasi latosol coklat kemerahan dan latosol coklat tersebar pada 4 Kecamatan, Kecamatan Bantarkawung (3.488 ha), Kecamatan Larangan (6.832 ha), Kecamatan Ketanggungan (4.740 ha) dan Kecamatan Banjarharjo (5.536 ha);
- f. Komplek latosol coklat merak kekuningan dan litosol tersebar pada Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong dengan luasan secara berturut-turut 5.824 ha, 1.552 ha, 5.419 ha, 380 ha, dan 2.714 ha;
- g. Asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu tersebar pada Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, dan Tonjong dengan luasan berturut-turut 3.457 Ha, 4.023 Ha, dan 3.540 ha;
- h. Jenis tanah latosol tersebar pada Kecamatan Bumiayu, Paguyangan dan Tonjong dengan luasan berturut-turut 1.008 ha, 208 ha, dan 1.424 ha;
- i. Jenis tanah latosol coklat tersebar pada Kecamatan Paguyangan (526 ha) dan Kecamatan Sirampog (1.617 ha);
- j. Asosiasi andosol coklat dan regosol coklat tersebar pada Kecamatan Paguyangan (321 ha) dan Kecamatan Sirampog (1.577 ha);
- k. Jenis tanah latosol coklat tua kemerahan tersebar pada Kecamatan Sirampog yaitu seluas 1.670 ha;
- l. Jenis tanah aluvial kelabu merupakan jenis tanah yang penyebarannya paling luas di Kabupaten Brebes dengan rincian; Kecamatan Larangan 8.776 Ha, Kecamatan Ketanggungan 5.524 ha, Kecamatan Banjarharjo 5.977 ha, Kecamatan Losari 4.427 ha, Kecamatan Tanjung 1.136 ha, Kecamatan Kersana 1.307 ha, Kecamatan Bulakamba 5.360 ha, Kecamatan Wanasari 1.552 ha, Kecamatan Jatibarang 2.585 ha, Kecamatan Songgom 3.105 ha, dan Kecamatan Brebes 2.667 ha. Dari uraian tersebut sebaran aluvial kelabu terluas berada pada Kecamatan Larangan;
- m. Aluvial kelabu dan aluvial coklat kelabu tersebar pada Kecamatan Tonjong (448 ha), Kecamatan Larangan (408 ha), Kecamatan Ketanggungan (994 ha), Kecamatan Banjarharjo (896), Kecamatan Wanasari (3.029 ha), Kecamatan Jatibarang (932 ha), Kecamatan Songgom (1.056 ha), dan Kecamatan Brebes (1.708 ha);
- n. Gromosol kelabu tua tersebar pada Kecamatan Larangan dan Kecamatan Ketanggungan, dengan luasan masing-masing (452 ha) dan (2.550 ha);
- o. Asosiasi gley humus dan aluvial kelabu tersebar pada Kecamatan Ketanggungan, Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, dan Wanasari, dengan luasan secara berturut-turut 1.099 ha, 832 ha, 3428 ha, 1216 ha, 903 ha, dan 1.688 ha;
- p. Andosol coklat dan andosol coklat kemerahan tersebar pada Kecamatan Banjarharjo (1.616 ha) dan Kecamatan Losari (3.674 ha);
- q. Aluvial hidromorf tersebar pada Kecamatan Tanjung, Bulakamba, dan Wanasari dengan luasan berturut-turut 2.255 ha, 3.892 ha, dan 957 ha;
- r. Regosol kelabu hanya terdapat pada Kecamatan Songgom seluas 4.069 ha;

- s. Kompleks latosol merah kekuningan dan litosol tersebar pada 2 Kecamatan,
- t. Kecamatan Sirampog (1.459 ha) dan Kecamatan Brebes (528 ha).

2.1.2.6 Tutupan Lahan

Berdasarkan interpretasi peta tutupan lahan Kabupaten Brebes, tutupan lahan di Kabupaten Brebes meliputi hutan jati, hutan lahan tinggi, hutan mangrove, hutan rakyat, jaringan jalan aspal/beton/tanah, kebun campuran, ladang/tegalan, pasir/bukit pasir darat, perkebunan teh, permukiman, sabana, sawah irigasi, sawah tadah hujan, semak belukar, sungai, tambak, telaga, waduk. Keragaman tutupan lahan tersebut mencerminkan karakteristik geografis dan aktivitas ekonomi masyarakat yang beragam, mulai dari sektor pertanian hingga perikanan dan kehutanan. Data penggunaan lahan di Kabupaten Brebes Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

TABEL 2. 4 PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

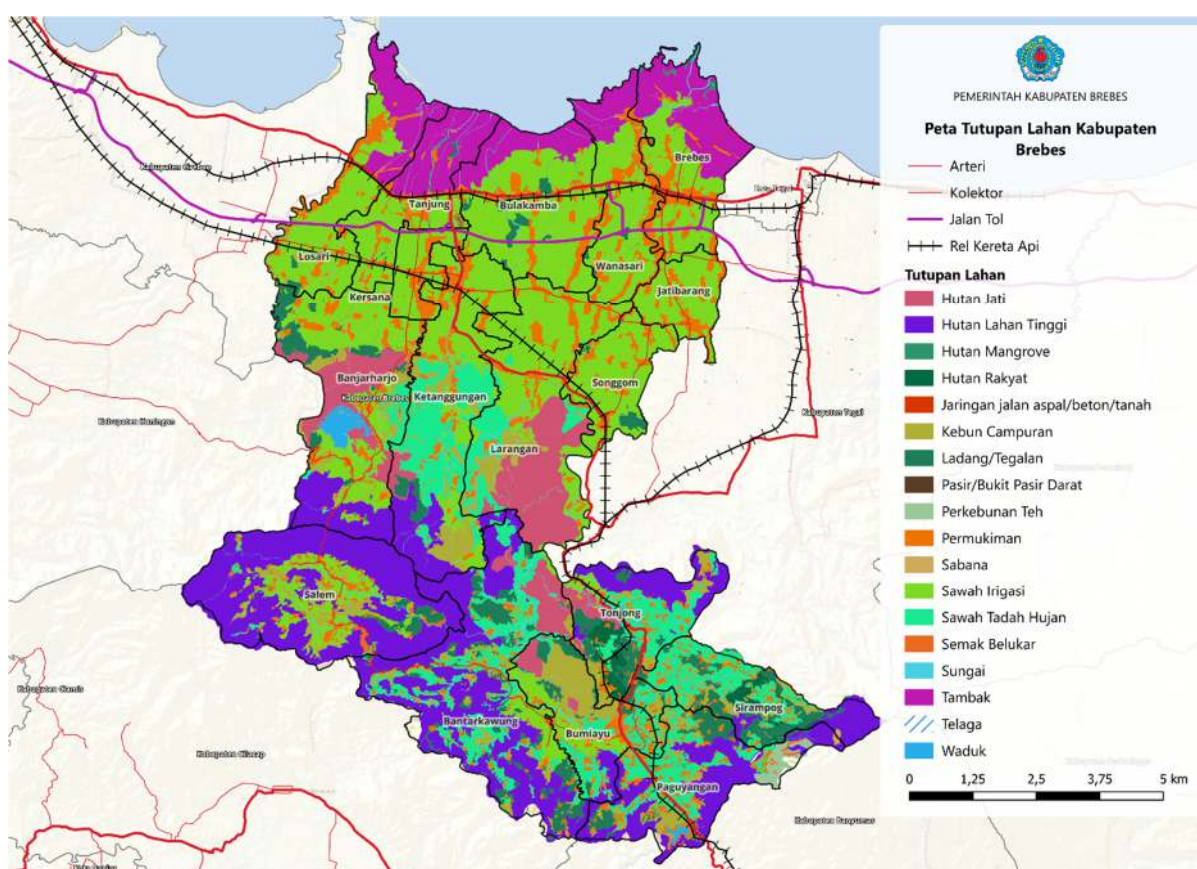
No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Jati	13.609,79	7,81
2	Hutan Lahan Tinggi	34.373,16	19,72
3	Hutan Rakyat	590,64	0,34
4	Jalan Tol	96,04	0,06
5	Kebun Campuran	8.414,76	4,83
6	Ladang/Tegalan	10.664,20	6,12
7	Mangrove	229,00	0,13
8	Pasir/Bukit Pasir Darat	11,85	0,01
9	Perkebunan Teh	571,53	0,33
10	Permukiman	22.068,73	12,66
11	Pesisir	24,62	0,01
12	Sabana	37,89	0,02
13	Sawah Irigasi	61.080,33	35,04
14	Sawah Tadah Hujan	7.840,32	4,50
15	Semak Belukar	3,25	0,00
16	Sungai	2.377,86	1,36
17	Tambak	11.536,82	6,62
18	Telaga	7,40	0,00
19	Waduk	765,65	0,44
KABUPATEN BREBES		174.303,84	100

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2024-2044

Dalam hal penggunaan lahan, Data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Brebes tahun 2024 menunjukkan adanya lahan seluas 68.920,65 Ha atau 39,54 persen lahan di Kabupaten Brebes merupakan lahan sawah. Data ini selaras dengan sektor perekonomian Kabupaten Brebes yang terkenal sebagai penghasil Bawang Merah terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Brebes guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Selain lahan sawah, lima peruntukan pemanfaatan lahan tertinggi lainnya adalah untuk hutan lahan tinggi seluas 34.373,16 Ha (19,72 persen), ladang/tegalan seluas 10.664,20 Ha (6,12 persen), permukiman seluas 22.068,73 Ha (12,66 persen), lahan tambak seluas 11.536,82 Ha

(6,62 persen), serta pemanfaatan lahan untuk kebun campuran seluas 8.414,76 (4,83 persen). Selain itu, terdapat potensi mangrove/ekosistem mangrove yang cukup luas dengan kelembagaan pengelolaan tingkat tapak yang cukup baik. Hal ini dapat lebih lanjut didukung dengan intervensi pemerintah, seperti: pembentukan kelompok kerja mangrove, pelatihan/peningkatan kapasitas kelompok pengelola mangrove, dan pemberian bantuan sarpras ekonomi produktif. Sumber Daya Hutan di Kabupaten Brebes mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 luasan kawasan hutan di Kabupaten Brebes seluas 50.030,19 hektar dan pada tahun 2021 menurun menjadi 50.009,40 hektar. Penurunan luasan ini terjadi karena adanya perubahan luasan kawasan hutan produksi sebagai hutan dengan proporsi terluas di Kabupaten Brebes. Kondisi hutan dapat memengaruhi terhadap kondisi keanekaragaman makhluk hidup yang ada di hutan. Terdapat dua fauna yang terancam punah, yaitu elang Brontok, ceret Jawa, dan kipasan belang yang ada di Konservasi Cagar Alam Tlogoranjeng dan beberapa fauna endemik seperti cekakak Jawa dan takur tohtor.



Gambar 2. 4 Peta Penutupan Lahan Kabupaten Brebes

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 2024

Pemanfaatan lahan juga berkaitan erat dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup dapat dilihat dari daya dukung air dan daya dukung pangan. Berdasarkan data KLHS RPJPD Kabupaten Brebes tahun 2025-2045, ketersediaan air di Kabupaten Brebes mencapai 2.225.078.376,62 m³/tahun dan mampu memenuhi kebutuhan air sebesar 1.810.067.034,40 m³/tahun, sehingga daya dukung air di Kabupaten Brebes masih dalam kondisi surplus sebesar 415.011.342,21 m³/tahun. Daya dukung air yang melimpah salah satunya dipengaruhi sumber daya air yang didukung adanya 2 (dua) waduk yang mampu menyimpan volume air yang cukup tinggi. Waduk Malahayu dengan luas 925 Ha dapat menampung air dengan volume sebesar 28.685.960 m³, sedangkan

Waduk Penjalin dengan luas 125 Ha mampu menampung air dengan volume sebesar 7.755.000 m³. Kondisi daya dukung air Kabupaten Brebes pada tahun 2045 masih pada status surplus sebesar 345.464.168,93 m³/tahun. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa ketersediaan air di Kabupaten Brebes masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air baik kebutuhan domestik maupun kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi.

Sementara itu, dari aspek daya dukung pangan jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Brebes mencapai 370.226,00 ton/tahun dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sebesar 151.600,52 ton/tahun, sehingga daya dukung pangan secara keseluruhan dalam kondisi surplus sebesar 218.625,48 ton/tahun. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, daya dukung pangan Kabupaten Brebes tahun 2045 diproyeksikan masih surplus sebesar 169.720,43 ton/tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Brebes lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Dengan rincian ketersediaan pangan sebesar 348.841,27 ton/tahun dan kebutuhan pangan di Kabupaten Brebes mencapai 179.120,84 ton/tahun.

2.1.2.7 Sumber Daya Alam (Mineral Non Logam)

Kondisi sumber daya alam untuk mendukung kegiatan pembangunan berhubungan dengan sumber daya batuan. Kabupaten Brebes memiliki potensi bahan tambang non logam yang dapat mendukung kegiatan pembangunan. Dilihat dari potensi persebarannya, menunjukkan bahwa pasir, tanah liat, batu belah, dan tras memiliki potensi di Kabupaten Brebes. Berikut merupakan luasan jenis batuan mineral non logam yang ada di Kabupaten Brebes. Berdasarkan **Tabel 2.5**, mineral non logam yang memiliki potensi terbesar di Kabupaten Brebes adalah tras. Tras adalah batuan gunung api yang telah mengalami perubahan komposisi kimia yang disebabkan oleh pelapukan dan pengaruh kondisi air bawah tanah. Dari 880,74 luas wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam non logam, 461,91 Ha diantaranya merupakan wilayah yang memiliki potensi tras yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog.

TABEL 2. 5 POTENSI SUMBER DAYA BATUAN DI KABUPATEN BREBES

No.	Kecamatan	Luas Jenis Batuan Tambang (Ha)				Total Luas (Ha)
		Batu Belah	Pasir	Tanah Liat	Tras	
1	Brebes	-	9,12	18,38	-	27,50
2	Bulakamba	-	-	1,81	-	1,81
3	Bumiayu	6,79	-	-	186,97	193,76
4	Jatibarang	-	1,62	-	-	1,62
5	Larangan	-	79,23	-	-	79,23
6	Paguyangan	34,11	-	-	175,61	209,72
7	Salem	-	-	125,31	-	125,31
8	Sirampog	0,02	-	-	99,34	99,36
9	Songgom	-	10,12	-	-	10,12
10	Tanjung	-	-	44,78	-	44,78
11	Wanasari	-	87,53	-	-	87,53
Kabupaten Brebes		40,92	187,63	190,28	461,91	880,74

Sumber: Data Sebaran Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, 2021

2.1.2.8 Sumber Daya Alam (Air)

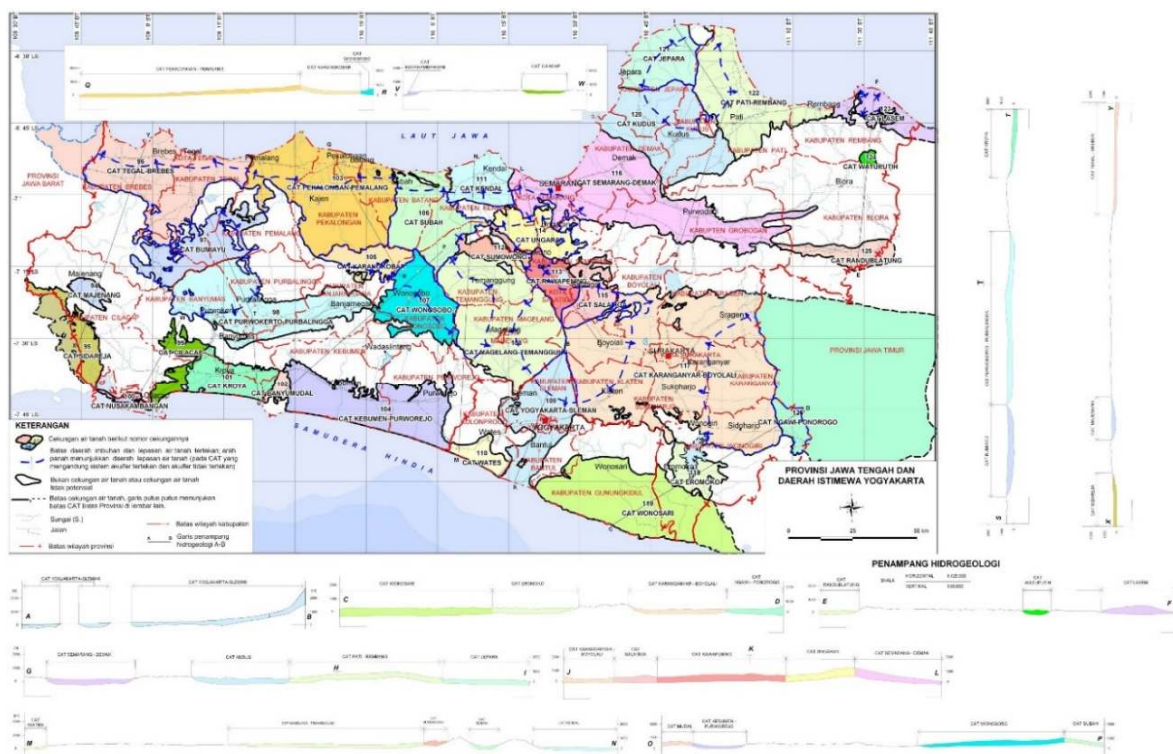
Sumber daya air terdiri dari air, sumber air, dan daya air yang dikandung di dalamnya. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Sementara itu, daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberi manfaat dan atau kerugian bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Sumber daya air terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Air permukaan dapat berasal dari sungai ataupun sumber lain seperti danau/waduk/situ/embung. Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) sumber air permukaan danau/waduk/situ/embung yang ada di Kabupaten Brebes yaitu waduk Malahayu dan Penjalin. Adapun kondisi dari masing-masing danau/waduk/situ/embung tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

TABEL 2. 6 KONDISI DANAU/WADUK/SITU/EMBUNG KABUPATEN BREBES

No.	Nama Danau/Waduk/ Situ/Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Waduk Malahayu	Banjarharjo	925	31.000.000
2	Waduk Penjalin	Paguyangan	125	7.755.000

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Brebes, 2023

Hidrogeologi atau air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat diklasifikasikan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masing-masing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) menjadi dasar perhitungan untuk mengetahui mengenai pengelolaan air tanah di Kabupaten Brebes. Terdapat 3 (tiga) CAT di Kabupaten Brebes yakni CAT Tegal – Brebes, CAT Lebaksiu, dan CAT Purwokerto – Purbalingga. Jumlah luas ketiga CAT tersebut sebanyak 55% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes atau sekitar 97.290,18 hektar.



Gambar 2. 5 Peta Potensi Cekungan Air Tanah (CAT)

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 2024

CAT Tegal – Brebes seluas 73.800,48 hektar yang mencakup hampir semua kecamatan selain Kecamatan Salem, Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog. Untuk kawasan pada CAT Lebaksiu seluas 22.767,05 hektar meliputi wilayah Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong. Sedangkan wilayah CAT Purwokerto – Purbalingga seluas 722,66 hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Sirampog.

2.1.2.9 Sumber Daya Alam (Hutan)

Hutan didefinisikan sebagai sebuah tempat yang berupa lahan luas dan terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang didalamnya terdapat ekosistem yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini setara dengan yang tercantum pada UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 yang mendefinisikan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.

TABEL 2. 7 LUASAN HUTAN DI KABUPATEN BREBES

No.	Jenis Hutan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Hutan Konservasi	Ha	53,56	53,56	-	-	-
2	Luas Hutan Lindung	Ha	6.177,11	6.177,11	2.434,98	6.252,88	6.252,88
3	Luas Hutan Produksi	Ha	23.128,28	23.128,28	17.760	23.450,07	23.449,72
4	Luas Hutan Produksi Terbatas	Ha	20.650,45	20.650,45	2.702	20.399,61	20.399,61
Total Kawasan Hutan			50.009,40	50.009,40	22.896,31	50.102,56	50.102,21

Sumber: Data Kawasan Hutan Nomor SK 9406/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai Tahun 2018 tanggal 6 November 2019

Berdasarkan **Tabel 2.7**, terlihat adanya penurunan luasan kawasan hutan di Kabupaten Brebes sejak tahun 2018 – 2021 dimana pada tahun 2018 luasan kawasan hutan di Kabupaten Brebes seluas 50.030,19 ha dan pada tahun 2021 menurun menjadi 50.009,40 ha. Penurunan luasan ini terjadi karena adanya perubahan luasan kawasan hutan produksi sebagai hutan dengan proporsi terluas di Kabupaten Brebes, dimana pada tahun 2018 luasan hutan produksi seluas 23.133,03 ha dan pada tahun 2021 menurun menjadi 23.128,28 ha. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap kawasan hutan, yang kemungkinan disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk kebutuhan pembangunan, pertanian, atau aktivitas ekonomi lainnya. Penurunan ini juga memerlukan perhatian agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik.

2.1.2.10 Sumber Daya Alam (Pertanian)

Salah satu sumber daya yang ada di Kabupaten Brebes adalah sumber daya pertanian mengingat 36,18% atau 63.642,27 ha lahan di Kabupaten Brebes merupakan lahan sawah. Hasil produksi pertanian yang ada di Kabupaten Brebes berupa padi, jagung, dan juga kedelai. **Tabel 2.8** merupakan tabel jumlah produksi padi, jagung, dan kedelai di Kabupaten Brebes.

TABEL 2. 8 PRODUKSI TANAMAN PANGAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Produksi Padi (ton GKG)	Produksi Jagung (ton)	Produksi Kedelai (ton)
1	Salem	39.521	312	-
2	Bantarkawung	65.413	24.838	-
3	Bumiayu	40.581	1.794	-
4	Paguyangan	31.105	6.561	-
5	Sirampog	16.800	5.439	-
6	Tonjong	30.966	14.565	-
7	Larangan	39.242	32.890	3.034
8	Ketanggungan	60.128	65.082	5.174
9	Banjarharjo	57.721	20.386	450
10	Losari	44.377	-	5.459
11	Tanjung	17.867	-	1.836
12	Kersana	12.929	3.562	-
13	Bulakamba	38.077	1.797	-
14	Wanasari	16.889	-	-
15	Songgom	39.840	11.011	-
16	Jatibarang	20.196	3.958	-
17	Brebes	8.276	1.573	-
Kabupaten Brebes		579.927	193.768	15.953

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2023

Berdasarkan tabel di atas, produksi padi di Kabupaten Brebes mencapai 579.927 ton dan menjadi komoditas tanaman pangan yang mendominasi di Kabupaten Brebes. Setelah itu tanaman jagung dengan total produksi mencapai 193.768 ton, sedangkan untuk kedelai hanya 15.953 ton. Salah satu kecamatan dengan produksi pertanian tanaman pangan yang tinggi adalah Kecamatan Ketanggungan dimana total produksi padi sebesar 60.128 ton, jagung sebesar 65.082 ton, dan kedelai 5.174 ton. Sedangkan kecamatan dengan produksi paling sedikit adalah Kecamatan Brebes dengan produksi padi sebesar 8.276 ton, dan jagung 1.573 ton. Sedikitnya produksi tanaman pangan di Kecamatan Brebes mengingat proporsi lahan sawah yang kecil dan didominasi oleh lahan terbangun. Perlu adanya intervensi agar produksi sektor pertanian tetap terjaga, terutama dengan pengendalian alih fungsi lahan. Selain itu juga terdapat potensi untuk mengembangkan hilirisasi industri pengolahan pangan dengan mengutamakan potensi lokal.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana kondisi lingkungan mampu mendukung aktivitas pembangunan secara berkelanjutan. Penilaian ini mencakup kemampuan lingkungan dalam menyediakan jasa ekosistem serta kapasitasnya dalam menyerap limbah atau tekanan pembangunan lainnya. Dalam konteks RPJMD, analisis daya dukung dan daya tampung digunakan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.1 Daya Dukung Air

Status daya dukung dan daya tampung (D3T) penyedia air Kabupaten Brebes dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan jasa lingkungannya melebihi ketersediaan. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang berarti daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung air tiap *grid* dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap *grid*. Perhitungan daya dukung dan status daya dukung air per Kecamatan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Tabel 2.9**.

TABEL 2. 9 DAYA DUKUNG AIR KABUPATEN BREBES

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Status	Persentase luas (%) Belum Terlampaui	Persentase luas (%) Terlampaui
1	Banjarharjo	257.026.331,81	158.336.458,65	98.689.873,16	Surplus	64,52	35,48
2	Bantarkawung	231.926.439,48	141.412.370,48	90.514.069,00	Surplus	72,92	27,08
3	Brebes	103.678.721,76	84.090.049,82	19.588.711,95	Surplus	62,18	37,82
4	Bulakamba	192.624.123,13	175.373.007,18	17.251.115,95	Surplus	39,89	60,11
5	Bumiayu	80.673.297,56	91.249.388,73	- 10.576.091,17	Defisit	55,91	44,09
6	Jatibarang	41.283.246,23	62.881.816,24	- 21.048.700,01	Defisit	21,84	78,16
7	Kersana	43.783.816,24	44.796.326,16	- 1.012.509,91	Defisit	34,81	65,19
8	Ketanggungan	222.214.316,15	221.613.018,20	601.297,95	Surplus	39,81	60,19
9	Larangan	194.128.646,57	189.033.525,70	5.095.120,88	Surplus	47,83	52,17
10	Losari	146.297.730,19	111.440.697,12	34.857.033,07	Surplus	51,73	48,27
11	Paguyangan	115.210.856,24	73.182.085,37	42.028.770,87	Surplus	73,9	26,1
12	Salem	182.953.337,14	76.046.706,19	106.096.631,95	Surplus	80,93	19,07
13	Sirampog	79.048.821,93	72.957.190,08	6.091.631,85	Surplus	58,43	41,57
14	Songgom	57.132.672,79	89.826.083,25	- 32.694.010,46	Defisit	16,9	83,1
15	Tanjung	104.855.426,42	61.717.976,98	43.137.449,43	Surplus	63,52	36,48
16	Tonjong	89.665.739,47	64.328.832,45	23.265.887,16	Surplus	69,08	30,92
17	Wanasari	82.025.153,51	92.234.285,59	- 10.299.132,08	Defisit	40,31	59,69
Total		2.224.528.676,62	1.810.519.818,19	411.587.149,59	Surplus	52,61824	47,38176

Sumber : Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Brebes 2025 - 2029

Kondisi daya dukung air di Kabupaten Brebes secara keseluruhan dalam kondisi surplus sebesar 415.011.342,21 m³/tahun dengan total ketersediaan airnya sebesar 2.225.078.376,62 m³/tahun sementara kebutuhan air mencapai 1.810.067.034,40 m³/tahun. Jika dilihat per kecamatan terdapat 5 (lima) kecamatan yang memiliki daya dukung air dengan status defisit atau terlampaui sedangkan 12 (dua belas) kecamatan lainnya berstatus surplus atau belum terlampaui. Wilayah dengan kondisi defisit tertinggi berada di Kecamatan Songgom sebesar -32.150.933,84m³ dengan 83,10% wilayahnya memiliki status daya dukung air terlampaui (defisit) dan Kecamatan Jatibarang sebesar -21.048.870,01 m³ dengan 78,16% wilayahnya memiliki status daya dukung air terlampaui (defisit). Sedangkan wilayah dengan surplus air tertinggi yaitu pada Kecamatan Salem dengan surplus air sebesar 106.906.957,96 m³ dengan 80,93% wilayahnya memiliki status daya dukung air belum terlampaui (surplus).

Kondisi daya dukung air Kabupaten Brebes pada tahun 2029 masih pada status surplus sebesar 495.254.583,48 m³/tahun. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa ketersediaan air di Kabupaten Brebes masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air baik kebutuhan domestik, maupun kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi. Ditinjau secara spasial, sebesar

60,63% wilayah berada pada daya dukung air belum terlampaui atau surplus dan 39,37% wilayah berada pada daya dukung air terlampaui atau defisit.

TABEL 2. 10 SKENARIO BUSINESS AS USUAL DAYA DUKUNG AIR KABUPATEN BREBES TAHUN 2030

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Status DDA	Surplus (%)	Defisit (%)
1	Banjarharjo	265.455.417,77	151.737.777,91	113.717.639,86	Surplus	65,17%	34,83%
2	Bantarkawung	231.207.849,62	160.762.830,87	7.044.510.187,50	Surplus	66,54%	33,46%
3	Brebes	93.132.417,17	54.814.699,51	38.947.717,66	Surplus	79,72%	20,28%
4	Bulakamba	187.220.937,81	166.327.691,70	20.893.246,11	Surplus	44,69%	55,31%
5	Bumiayu	79.759.757,08	80.606.106,83	- 308.349,76	Defisit	39,62%	60,38%
6	Jatibarang	38.949.765,73	53.386.217,24	- 1.436.451,51	Defisit	35,33%	64,67%
7	Kersana	40.803.035,63	30.385.416,82	9.927.618,81	Surplus	67,39%	32,61%
8	Ketanggungan	222.669.459,39	185.072.618,70	37.596.840,69	Surplus	60,32%	39,68%
9	Larangan	192.161.979,19	164.042.279,40	28.119.699,79	Surplus	54,54%	45,46%
10	Losari	140.763.084,14	104.855.847,28	35.907.236,86	Surplus	53,58%	46,42%
11	Paguyangan	113.322.792,19	78.439.166,07	34.883.226,12	Surplus	69,71%	30,29%
12	Salem	178.156.376,30	104.125.171,93	74.031.024,37	Surplus	73,45%	26,55%
13	Sirampog	81.372.179,01	65.986.157,23	15.386.201,78	Surplus	56,23%	43,77%
14	Songgom	55.618.372,50	75.765.791,47	- 20.147.418,97	Defisit	29,26%	70,74%
15	Tanjung	85.785.356,70	55.654.836,02	30.130.520,68	Surplus	72,60%	27,40%
16	Tonjong	84.714.452,23	65.079.874,94	19.694.577,29	Surplus	69,18%	30,82%
17	Wanasari	77.052.965,06	76.356.976,35	695.988,71	Surplus	52,84%	47,16%
KAB. BREBES		2.167.484.242,05	1.672.229.658,57	495.254.583,48	Surplus	60,63%	39,37%

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029

Kondisi daya dukung air Kabupaten Brebes pada tahun 2029 masih pada status surplus sebesar 495.254.583,48 m³/tahun. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa ketersediaan air di Kabupaten Brebes masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air baik kebutuhan domestik, maupun kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi. Ditinjau secara spasial, sebesar 60,63% wilayah berada pada daya dukung air belum terlampaui atau surplus dan 39,37% wilayah berada pada daya dukung air terlampaui atau defisit. Untuk mempertahankan kondisi ini dibutuhkan skenario dengan mempertimbangkan rencana pola ruang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menentukan kebutuhan air rumah tangga (domestik) dan pertanian di tahun rencana menggunakan metode pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Dalam perhitungan daya dukung air di Kabupaten Brebes mempertimbangkan 2 (satu) skenario yaitu business as usual (BAU) dan skenario dengan upaya tambahan sebagai berikut.

- Business as usual (BAU) : skenario BAU artinya perhitungan daya dukung air tanpa upaya tambahan, sehingga pada tahun rencana (2029) daya dukung air akan semakin menurun. Penurunan ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh kondisi JLH pengatur tata air yang mengalami penurunan. Sementara itu kebutuhan air di tahun rencana cenderung menurun karena luasan lahan pertanian berkurang. Kebutuhan air untuk pertanian di tahun eksisting mencapai 90,40% dari total kebutuhan sementara di

tahun rencana menurun menjadi 88,81% dari total kebutuhan. Terjadi penurunan kebutuhan air untuk lahan pertanian sebesar 1,59%, sementara untuk kebutuhan domestik di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan sebesar 1,59% dari kebutuhan air di tahun eksisting sebesar 9,60% menjadi 11,19% di tahun rencana.

- b. Skenario 1 Mempertahankan JLH: Kondisi JLH pada tahun 2029 mengalami penurunan, sehingga debit air yang masuk ke WS akan berkurang dan mempengaruhi jumlah ketersediaan air. Dengan mempertahankan JLH pengatur tata air seperti pada kondisi eksisting maka di tahun rencana ketersediaan air tidak akan mengalami penurunan. Mempertahankan JLH pengatur air yaitu dengan upaya pelestarian dan perlindungan Kawasan dengan jasa lingkungan hidup pengatur air kelas tinggi dan sangat tinggi.

TABEL 2. 11 PERHITUNGAN SKENARIO DAYA DUKUNG AIR KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029

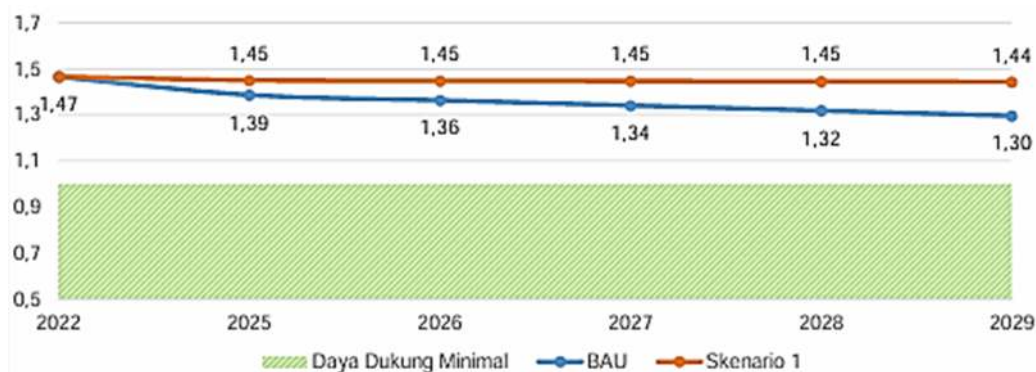
Uraian (m3/tahun)	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Business As Usual (BAU)					
Ketersediaan Air	2.308.686.182	2.273.385.697	2.238.085.212	2.202.784.727	2.167.484.242
Kebutuhan Air (Domestik & Pertanian)	1.665.469.204	1.667.136.032	1.668.818.237	1.670.516.807	1.672.229.658
Selisih	643.216.978	606.249.664	569.266.984	532.268.639	495.254.583
Daya Dukung Air BAU	1,39	1,36	1,34	1,32	1,30
Skenario 1 Mempertahankan JLH Tata Air					
Ketersediaan Air	2.414.587.638	2.414.587.638	2.414.587.638	2.414.587.638	2.414.587.638
Kebutuhan Air (Domestik & Pertanian)	1.665.469.204	1.667.136.032	1.668.818.237	1.670.516.807	1.672.229.658
Selisih	749.118.433	747.451.605	745.769.310	744.071.550	742.357.979
Daya Dukung Air Skenario 1	1,45	1,45	1,45	1,45	1,44

Sumber : Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Brebes 2025 – 2029

Upaya tambahan yang harus dilakukan dalam mencapai skenario daya dukung air di Kabupaten Brebes, maka perlu untuk melestarikan kawasan yang memiliki fungsi tinggi sebagai jasa lingkungan hidup pengatur air melakukan beberapa hal berikut.

- 1) Pengelolaan Lahan Berkelanjutan, beberapa hal yang dapat dilakukan:
 - a. Perlindungan hutan untuk memastikan hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air tetap terjaga. Mengimplementasikan kebijakan konservasi dan reboisasi di wilayah-wilayah kritis.
 - b. Pengendalian alih fungsi lahan melalui pengaturan secara ketat alih fungsi lahan terutama kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau permukiman serta kawasan terbangun lainnya
 - c. Penetapan zona perlindungan di wilayah yang memiliki jasa lingkungan tinggi, seperti daerah tangkapan air, kawasan hutan lindung, dan daerah aliran sungai.
- 2) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Hijau, beberapa hal yang dapat dilakukan:
 - a. Membangun infrastruktur penyimpanan air untuk mengelola aliran air dan menjaga ketersediaan air di musim kemarau seperti bendungan dan waduk atau infrastruktur penyimpanan air lainnya
 - b. Rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman vegetasi yang mampu menyimpan air, seperti tanaman endemi yang tahan kekeringan
 - c. Menambah jumlah taman kota dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai area resapan air
- 3) Partisipasi dan Edukasi Masyarakat, melalui kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga sumber daya air dan peran ekosistem dalam mengatur ketersediaan air serta masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya air, seperti program adopsi pohon dan patroli lingkungan

- 4) Penguatan Kebijakan dan Penegakan Hukum, beberapa hal yang dapat dilakukan:
- Penelitian dan monitoring secara berkelanjutan untuk mendeteksi perubahan dan menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan
 - Kolaborasi dan kemitraan baik antar daerah maupun LSM dan sektor swasta dalam mendukung program konservasi dan pengelolaan air.



Sumber : Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Brebes 2025 – 2029

Gambar 2. 6 Skenario Daya Dukung Air Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029

2.1.3.2 Daya Dukung Pangan

Status daya dukung dan daya tampung (D3T) penyedia air Kabupaten Brebes dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung air tiap *grid* dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap *grid*. Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Brebes masih dalam kondisi surplus, mengingat Kabupaten Brebes masih mempunyai potensi sawah yang luas. Hasil perhitungan daya dukung pangan per kecamatan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada [Tabel 2.12](#).

TABEL 2. 12 DAYA DUKUNG PANGAN KABUPATEN BREBES

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Ton/tahun)	Kebutuhan Pangan (Ton/tahun)	Selisih (Ton/tahun)	Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	Banjarharjo	32.897,92	12.147,72	20.750,21	Surplus	91,03	8,97
2	Bantarkawung	36.653,36	10.637,67	26.018,66	Surplus	95,76	4,22
3	Brebes	23.574,35	11.401,01	12.173,34	Surplus	81,63	18,37
4	Bulakamba	31.385,09	13.655,53	17.729,56	Surplus	86,66	13,04
5	Bumiayu	15.885,35	8.255,91	7.629,44	Surplus	84,88	15,12
6	Jatibarang	9.094,88	5.424,48	3.670,40	Surplus	74,31	25,69
7	Kersana	6.736,96	4.373,38	2.363,57	Surplus	69,07	30,93
8	Ketanggungan	33.517,01	13.661,47	19.855,54	Surplus	90,76	9,22
9	Larangan	32.892,24	13.392,85	19.499,39	Surplus	89,45	10,55
10	Losari	23.657,66	10.763,04	12.894,62	Surplus	84,91	15,09
11	Paguyangan	19.598,26	7.652,89	11.945,39	Surplus	88,45	11,55
12	Salem	27.519,11	7.173,37	20.345,74	Surplus	95,36	4,64
13	Sirampog	14.732,57	5.595,90	9.136,67	Surplus	91,01	8,19
14	Songgom	12.694,61	5.871,81	6.822,79	Surplus	85,65	14,35
15	Tanjung	16.864,49	7.318,35	9.546,14	Surplus	85,37	14,63
16	Tonjong	15.305,12	5.314,21	7.990,90	Surplus	92,4	7,6
17	Wanasari	17.215,04	8.960,92	8.254,12	Surplus	78,94	21,06
Total		370.224,02	151.600,51	216.626,48	Surplus	88,83	11,17

Sumber : Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Brebes 2025 - 2029

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Brebes secara keseluruhan masih surplus sebesar 218.625,48 ton dengan ketersediaan pangan mencapai 370.226,00 ton dan kebutuhan pangan hanya 151.600,52 ton. Dalam kondisi surplus tersebut juga terdapat 11,17% wilayah yang sudah terlampaui untuk kondisi daya dukung pangannya. Jika dilihat per kecamatan, seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes masuk ke dalam status daya dukung surplus. Kecamatan dengan persentase belum terlampaui tertinggi yaitu Kecamatan Bantarkawung dengan nilai persentase belum terlampaui sebesar 95,78%. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan untuk sawah masih mendominasi wilayah dan juga jumlah penduduknya tidak setinggi kecamatan lainnya.

Berdasarkan proyeksi daya dukung pangan Kabupaten Brebes tahun 2029 maka kondisinya masih surplus sebesar 185.556,76 ton/tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Brebes lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Dengan rincian ketersediaan pangan sebesar 348.841,27 Ton/Tahun dan kebutuhan pangan di Kabupaten Brebes mencapai 163.284,51 Ton/Tahun. Berikut ditampilkan rincian perhitungan proyeksi daya dukung pangan di Kabupaten Brebes tahun 2029.

TABEL 2. 13 PROYEKSI DAYA DUKUNG PANGAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2029

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan			Status DDP	Persentase Luas Wilayah	
		Ketersediaan (Ton/Tahun)	Kebutuhan (Ton/Tahun)	Selisih (Ton/Tahun)		Surplus (%)	Defisit (%)
1	Banjarharjo	32.287,51	11.084,25	21.203,26	Surplus	89,68	10,32
2	Bantarkawung	37.069,65	10.049,05	27.020,60	Surplus	95,05	4,95
3	Brebes	20.666,78	13.984,64	6.682,15	Surplus	61,8	38,2
4	Bulakamba	29.343,34	15.711,47	13.631,87	Surplus	74,68	25,32
5	Bumiayu	14.770,18	8.303,24	6.466,94	Surplus	78,01	21,99
6	Jatibarang	8.463,47	5.779,83	2.683,64	Surplus	69,31	30,69
7	Kersana	5.715,05	5.312,45	402,61	Surplus	43,91	56,09
8	Ketanggungan	31.230,20	13.553,18	17.677,33	Surplus	84,4	15,6
9	Larangan	31.610,29	13.073,78	18.536,54	Surplus	86,1	13,9
10	Losari	21.638,53	12.846,78	8.791,75	Surplus	69,21	30,79
11	Paguyangan	19.311,41	7.274,41	12.037,00	Surplus	86,18	13,82
12	Salem	28.066,65	6.814,74	21.251,92	Surplus	94,79	5,21
13	Sirampog	14.251,52	5.327,93	8.923,59	Surplus	88,88	11,12
14	Songgom	11.991,48	5.601,23	6.390,24	Surplus	81,66	18,34
15	Tanjung	12.090,31	13.612,93	- 1.522,62	Defisit	33,17	66,85
16	Tonjong	14.330,89	5.119,29	9.211,60	Surplus	87,52	12,48
17	Wanasari	16.003,70	9.835,34	6.168,35	Surplus	67,63	32,37
KAB. BREBES		348.841,27	163.284,51	185.556,76	Surplus	80,92	19,08

Sumber : Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Brebes 2025 – 2029

Perhitungan skenario daya dukung pangan di Kabupaten Brebes pada tahun rencana mengacu pada penggunaan lahan sawah di pola ruang untuk ketersediaan pangan. Sementara itu untuk kebutuhan pangan menggunakan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2029. Berikut dirincikan kondisi daya dukung pangan dengan perhitungan Business As Usual (BAU) atau tanpa upaya tambahan dan perhitungan daya dukung pangan dengan skenario peningkatan produktivitas padi Kabupaten Brebes.

- a. *Business As Usual* daya dukung pangan: Proyeksi daya dukung pangan Kabupaten Brebes pada tahun 2029 masih surplus sebesar 185.556,76 Ton/Tahun, tetapi jika dibandingkan dengan tahun eksisting maka kondisi di tahun 2029 sudah terjadi penurunan daya dukung pangan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang semakin menurun, sebanding dengan penurunan luas lahan pertanian di tahun rencana. Sementara itu untuk kebutuhan pangan juga terjadi peningkatan karena adanya peningkatan penduduk. Sehingga daya dukung pangan terjadi penurunan dari 2,44 di tahun 2022 menjadi 2,14 di tahun 2029.
- b. Skenario meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan indeks penanaman. Skenario ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Brebes dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan juga meningkatkan indeks penanaman.

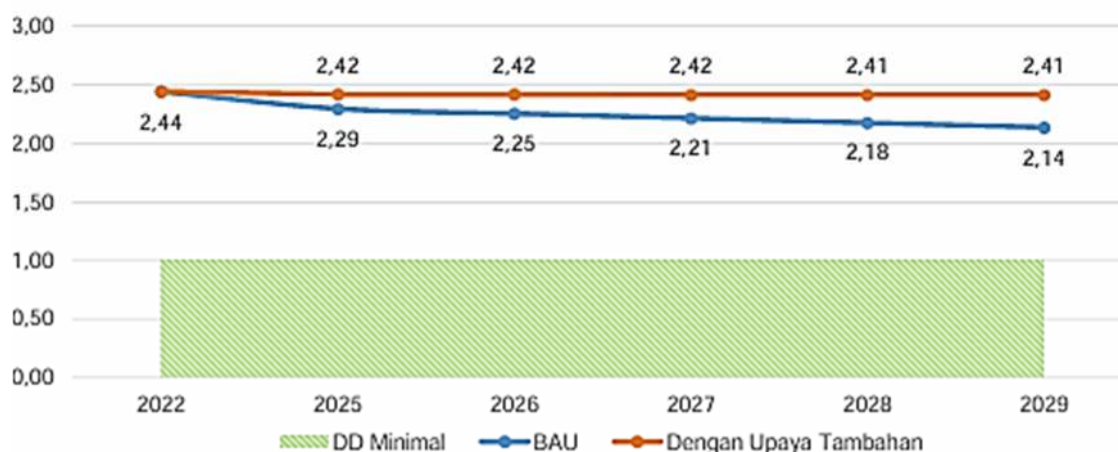
TABEL 2. 14 PROYEKSI DAYA DUKUNG PANGAN KABUPATEN BREBES

Uraian	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Business As Usual (BAU)					
Ketersediaan (Ton/Tahun)	361.061,12	358.006,15	354.951,19	351.896,23	348.841,27
Kebutuhan (Ton/Tahun)	157.384,76	158.839,37	160.307,49	161.789,10	163.284,51
Selisih (Ton/Tahun)	203.676,36	199.166,78	194.643,71	190.107,13	185.556,76
Daya Dukung Pangan	2,29	2,25	2,21	2,18	2,15
Skenario 1 Mempertahankan JLH Tata Air					
Ketersediaan (Ton/Tahun)	380.472,67	383.888,22	387.303,78	390.719,33	394.134,89
Kebutuhan (Ton/Tahun)	157.384,76	158.839,37	160.307,49	161.789,10	163.284,51
Selisih (Ton/Tahun)	223.087,91	225.048,85	226.996,29	228.930,23	230.850,38
Daya Dukung Pangan	2,42	2,42	2,42	2,41	2,41

Sumber : Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Brebes 2025 – 2029

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya dukung pangan maka perlu melakukan beberapa hal berikut.

- 1) Pengendalian untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - a. Penetapan dan perlindungan terhadap tata ruang terhadap LP2B sesuai dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Brebes dan mempertahankan dan/atau meningkatkan indeks penanaman yang ada saat ini.
 - b. Revitalisasi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi pada lahan sawah irigasi dan pembukaan jaringan baru pada lahan sawah tadah hujan atau pertanian lahan kering
- 2) Peningkatan tingkat rendemen dari Gabah Kering Panen menjadi Gabah Kering Giling
 - a. Pengaturan ketersediaan air yang tepat pada saat usia tanaman memasuki masa pengisian bulir Pemberian unsur hara yang tepat dengan memberikan material organik yang lebih besar
 - b. Pengendalian hama dan penyakit untuk memastikan bulir padi tidak terganggu
 - c. Penggunaan varietas padi yang unggul agar hasil panen maksimal
 - d. Pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sesuai ciri fisiologisnya dan selanjutnya dilakukan pengeringan yang efektif
- 3) Penurunan tingkat penyusutan saat penggilingan
 - a. Memastikan tingkat GKG memiliki rendemen yang baik
 - b. Perbaikan teknik pengolahan dalam penggilingan Gabah Kering Giling menjadi beras
 - c. Efisiensi dalam pewadahan



Sumber : Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Brebes 2025 – 2029

Gambar 2. 7 Daya Dukung Pangan Kabupaten Brebes

2.1.3.3 Jasa Lingkungan

Dari aspek daya dukung dan daya tampung berbasis jasa lingkungan hidup, terdapat tujuh jenis jasa yang meliputi; (1) jasa lingkungan hidup penyedia pangan; (2) jasa lingkungan hidup penyedia air; (3) jasa lingkungan hidup pengatur iklim; (4) jasa lingkungan hidup pengatur air; (5) jasa lingkungan hidup mitigasi bencana longsor; (6) jasa lingkungan hidup mitigasi bencana banjir; (7) jasa lingkungan hidup mitigasi kebakaran hutan. Dalam pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan hidup, rata-rata wilayah kabupaten Brebes memiliki kelas jenis lingkungan hidup kategori sedang hingga sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki potensi ekosistem yang relatif baik dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Jasa lingkungan hidup penyedia pangan berkaitan erat dengan kemampuan ekosistem secara alamiah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi manusia. Secara umum, hampir separuh wilayah Kabupaten Brebes memiliki kelas/kategori tinggi dan sangat tinggi. Terdapat 67.124,31 Ha atau 38 persen luasan jasa lingkungan hidup penyedia pangan dengan kategori sangat tinggi. Sementara itu, sebesar 11 persen atau 19.410,49 Ha wilayah memiliki kategori tinggi. Hanya 21 persen luasan yang memiliki kategori rendah, 1 persen sangat rendah dan 29 persen luasan dengan kategori sedang.

Di bidang **jasa lingkungan hidup penyedia air** yang mengukur ketersediaan semua jenis sumber air yang dapat digunakan untuk manusia, sebagian besar luasan (54 persen) wilayah Kabupaten Brebes memiliki kelas/kategori sedang. Hanya 20 persen luasan yang memiliki kategori tinggi, dan 1 persen luasan dengan kategori sangat tinggi. Sebesar 23 persen luasan memiliki kategori rendah dan 2 persen luasan dengan kategori sangat rendah. Dengan kategori sedang yang mencapai 54 persen, pemerintah Kabupaten Brebes perlu memprioritaskan ketersediaan air bersih dan perlu mengantisipasi potensi kekurangan air bersih di Kabupaten Brebes.

Dalam hal **jasa lingkungan hidup pengatur iklim**, secara umum Kabupaten Brebes memiliki kemampuan untuk memberikan jasa pengaturan iklim dengan kelas/kategori sedang. Luasan dengan kategori sedang mencapai 99.007,78 Ha atau 56 persen luasan total. Sementara itu, wilayah dengan luasan kategori sangat tinggi berada di sebagian wilayah Kecamatan Salem,

Banjarharjo, Bantarkawung, Brebes, Bumiayu, Ketanggungan, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, dan Larangan. Wilayah tersebut pada umumnya memiliki karakteristik vegetasi yang masih rapat.

Kemampuan wilayah untuk menampung air yang tergambar dalam **jasa lingkungan hidup pengatur air** menunjukkan bahwa secara umum wilayah Kabupaten Brebes memiliki kategori sedang. Luasan dengan kategori sedang mencapai 86.522,28 Ha atau 52 persen dari total wilayah. Sementara itu, 53.218,13 Ha (32 persen) luasan memiliki kategori rendah. Hanya 15 persen luasan atau sekitar 25.177,41 Ha luasan dengan kategori/kelas sangat tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Brebes.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga tidak terlepas dari aspek **jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana tanah longsor**. Sebanyak 95.642,74 Ha luasan (54 persen) merupakan luasan dengan kategori/ kelas sedang. Selain itu, terdapat 46.356,10 Ha (26 persen) luasan kelas sangat tinggi, 22.842,44 Ha (13 persen) rendah, 9.947,53 Ha (6 persen) luasan kelas tinggi, dan 1.028,20 Ha atau 1 persen luasan dengan kategori/kelas sangat rendah. Untuk meningkatkan kapasitas lingkungan hidup dalam hal mitigasi bencana tanah longsor, diperlukan upaya penanaman vegetasi dan penutupan lahan.

Dalam hal banjir, kemampuan **jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir** di Kabupaten Brebes cenderung rendah. Luasan dengan kategori rendah mencapai 91.970,47 Ha atau (52,31 persen). Hanya 32.383,95 Ha atau 19 persen luasan yang memiliki kategori sangat tinggi, dan 13.952,60 atau 8 persen luasan dengan kategori tinggi. Sementara itu, masih terdapat 4.147,30 atau 2 persen luasan dengan kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa banjir merupakan ancaman bencana yang potensi di Kabupaten Brebes.

Selain tanah longsor dan banjir, potensi bencana yang ada di Kabupaten Brebes adalah Kebakaran Hutan. Di bidang **jasa lingkungan hidup mitigasi dan perlindungan bencana kebakaran hutan dan lahan** (karhutla), secara umum berada dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Luasan dengan kategori sangat tinggi mencapai 121.194,49 Ha atau 69 persen dari total luas wilayah. Sementara itu, terdapat 36.269,46 Ha atau 21 persen luasan termasuk dalam kategori tinggi, 18.004,56 atau 10 persen luasan yang termasuk kategori sedang dan hanya 348 Ha kategori rendah.

2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Aspek ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi ketahanan energi, akses air bersih, dan kemampuan produksi pangan lokal di Kabupaten Brebes menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

2.1.4.1 Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) diperoleh dengan cara membagi total penjumlahan konsumsi energi listrik PLN dan konsumsi energi listrik non-PLN (yang terdiri dari konsumsi energi listrik pada perusahaan *Private Power Utility* (PPU) dan perusahaan Izin Operasi (IO)) dengan jumlah populasi penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pada tahun 2020, jumlah daya terpasang pada PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan (ULP) mencapai 497.146.779 Kwh yang tersebar di Kecamatan Brebes, Jatibarang, dan Bumiayu.

Daya yang terpasang pada masing-masing kecamatan tersebut yaitu 169.087.925 KWh, 211.678.119 KWh, serta 116.380.735 KWh. Apabila jumlah daya terpasang tersebut dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Brebes tahun 2020 yang mencapai 1.978.759 jiwa, maka konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Brebes pada tahun tersebut yaitu 242,145 KWh Per Kapita.

2.1.4.2 Cakupan Rumah Tangga Berakses Air Minum

Cakupan Rumah Tangga Berakses Air Minum adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak dan aman. Cakupan ini mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak. Jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan. Cakupan Rumah Tangga Berakses Air Minum pada tahun 2024 meningkat menjadi 98.238 rumah tangga, dari 95.095 rumah tangga pada tahun 2023.

TABEL 2. 15 CAKUPAN RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM KABUPATEN BREBES 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga	72.821	79.026	86.196	95.095	98.238
Akses Air Minum Layak (Persen)	93,17	92,6	89,67	88,78	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, 2025

2.1.4.3 Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Rumah Tangga Berakses Air Bersih merujuk pada rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air yang memenuhi standar kesehatan dan layak untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Akses air bersih mencakup ketersediaan air yang aman dan cukup untuk keperluan rumah tangga, seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Diketahui bahwa rumah tangga dengan akses air bersih di Kabupaten Brebes meningkat seiring waktu. Peningkatan rumah tangga berakses air bersih sejak 2020 hingga 2024 mencapai nyaris 200 persen, yakni 346.440 menjadi 692.180, sebagaimana tertera pada [Tabel 2.16](#).

TABEL 2. 16 RUMAH TANGGA BERAKSES AIR BERSIH KABUPATEN BREBES 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Berakses Air Bersih	346.440	347.525	400.331	696.269	692.180

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, 2025

2.1.4.4 Cekungan Air Tanah

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang dikandung di dalamnya. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Kemudian, daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberi manfaat dan atau kerugian bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Sumber daya air terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Air permukaan dapat berasal dari sungai ataupun sumber lain seperti danau/waduk/situ/embung. Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) sumber air permukaan

danau/waduk/situ/embung yang ada di Kabupaten Brebes yaitu waduk Malahayu dan Penjalin. Adapun kondisi dari masing-masing danau/waduk/situ/ embung tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.17**.

TABEL 2. 17 DANAU, WADUK, DAN EMBUNG KABUPATEN BREBES

No.	Nama Danau/Waduk/ Situ/Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume
1	Waduk Malahayu	Bandarharjo	925	28.685.960
2	Penjalin	Paguyangan	125	7.755.000

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Brebes, 2023

Hidrogeologi atau air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat diklasifikasikan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masing-masing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) menjadi dasar perhitungan untuk mengetahui mengenai pengelolaan air tanah di Kabupaten Brebes. Terdapat 3 (tiga) CAT di Kabupaten Brebes yakni CAT Tegal–Brebes, CAT Lebaksiu, CAT Purwokerto–Purbalingga. Jumlah luas ketiga CAT tersebut sebanyak 55% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes atau sekitar 97.290,18 hektar. CAT Tegal–Brebes seluas 73.800,48 hektar yang mencakup hampir semua kecamatan selain Kecamatan Salem, Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog. Untuk kawasan pada CAT Lebaksiu seluas 22.767,05 hektar meliputi wilayah Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong. Sedangkan wilayah CAT Purwokerto–Purbalingga seluas 722,66 hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Sirampog.

2.1.4.5 Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas dan keragaman konsumsi pangan suatu populasi. Skor PPH merupakan alat untuk menilai mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Ini mencerminkan seberapa baik pola konsumsi pangan suatu populasi dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Dengan memahami skor PPH, kita dapat lebih baik menilai dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

TABEL 2. 18 SKOR POLA PANGAN HARAPAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Skor PPH (Reguler)	77,5	78,48	87,92	N/A	N/A
Skor PPH (Susenas)	86,7	84,93	95,5	95,7	90,42

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, 2025

2.1.4.6 Realisasi Produksi, Ketersediaan, dan Kebutuhan Pangan

Realisasi produksi, ketersediaan, dan kebutuhan pangan adalah tiga pilar penting dalam sistem ketahanan pangan suatu negara.

TABEL 2. 19 BANYAKNYA REALISASI PRODUKSI, KETERSEDIAAN, KEBUTUHAN PANGAN BEBERAPA KOMODITAS DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Perimbangan (+/-) (Ton)
Padi	99.889,87	575.513,73	339.553,10	240.042,06	99.511,04
Jagung	27.092,50	195.056,83	173.600,58	79,57	173.521,01
Kedelai	1.090,00	1.423,10	1.380,41	17.270,40	- 15.889,99

Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Perimbangan (+/-) (Ton)
Kacang tanah	48,00	159,80	151,27	536,41	- 385,14
Kacang hijau	3.383,00	4.451,07	4.228,52	167,43	4.061,09
Ubi Kayu	408,00	7.326,70	6.935,45	9.670,87	- 2.735,42
Ubi Jalar	41,00	377,90	357,72	6.124,89	- 5.767,17
Tebu	1.129,94	5.694,80	5.694,80	21.904,12	- 16.209,32
Cabai Merah	2.682,00	7.327,20	7.107,38	5.716,00	1.391,38
Bawang merah	2.8964,00	409.106,90	396.833,69	7.211,97	389.621,72
Jumlah 2024	164.728,31	1.206.438,03	935.842,92	308.723,71	627.119,21
2023	159.067,61	1.088.627,05	823.159,70	199.740,71	590.941,74
2022	172.182,40	1.296.046,02	977.346,04	254.707,05	722.638,99
2021	178.771,60	1.213.251,21	929.315,06	275.068,56	654.246,50
2020	177.042,90	1.232.016,99	954.696,26	242.786,89	711.909,36

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, 2025

Realisasi produksi pangan mengacu pada jumlah aktual pangan yang dihasilkan dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan sumber-sumber lainnya dalam suatu periode waktu tertentu. Ketersediaan pangan mengacu pada jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah atau negara. Kebutuhan pangan mengacu pada jumlah pangan yang dibutuhkan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.

2.1.4.7 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan suatu wilayah, baik di tingkat nasional maupun regional. IKP adalah ukuran komposit yang menggabungkan berbagai indikator untuk menilai kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Dengan memahami IKP, kita dapat lebih baik memahami kondisi ketahanan pangan suatu wilayah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkannya.

TABEL 2. 20 INDEKS KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	75,73	76,91	76,74	77,21	78,79

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, 2025

2.1.4.8 Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketidacukupan Konsumsi Pangan menunjukkan kondisi di mana seseorang secara rutin mengonsumsi makanan yang tidak cukup memenuhi kebutuhan energi untuk hidup sehat dan aktif. Ini berarti seseorang tidak mendapatkan cukup kalori yang dibutuhkan untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data indeks ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024, diketahui bahwa terjadi penurunan ketidacukupan konsumsi pangan secara drastis pada 2024. Meskipun demikian, indeks ketidacukupan konsumsi pangan terbilang fluktuatif dengan puncak pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Ketidacukupan konsumsi pangan melandai pasca pandemi COVID-19 hingga mencapai titik terendah pada 2024 di angka 9,37.

TABEL 2. 21 KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN KABUPATEN BREBES 2020 - 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	11,30	11,22	11,00	9,37	7,90

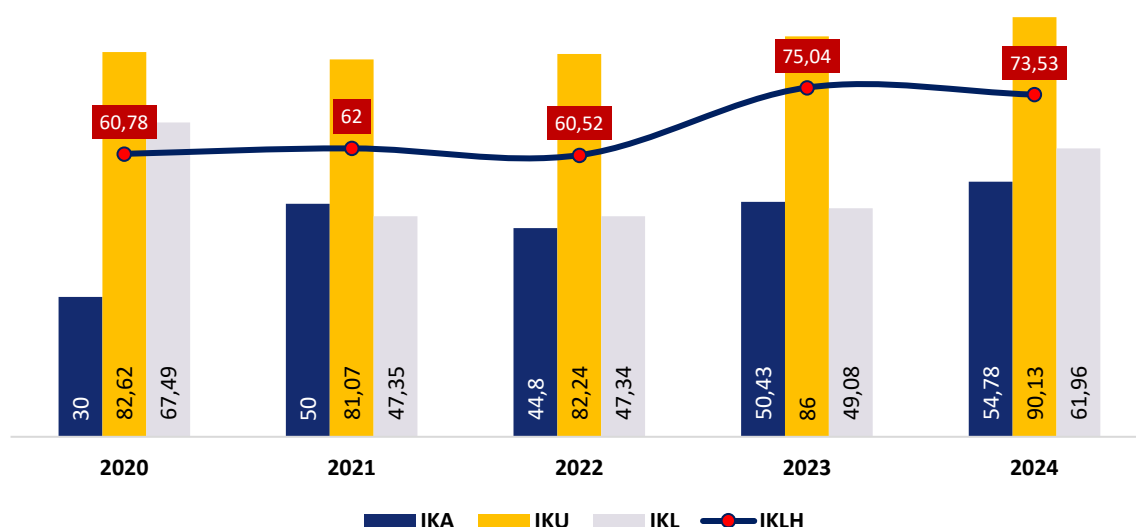
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2025

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kualitas lingkungan yang baik mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memberikan ruang hidup yang sehat bagi masyarakat. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kualitas udara, air, dan lahan.

2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH Kabupaten Brebes di tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025, nilai IKLH Kabupaten Brebes tahun 2024 adalah 73,53. Capaian nilai IKLH tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yang mencapai 75,04. Menurunnya nilai IKLH di tahun 2024 berbanding terbalik dengan meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

**Gambar 2. 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045, terdapat tiga strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu; (1) peningkatan kualitas air melalui pengendalian kerusakan lingkungan disertai penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum; (2) Peningkatan kualitas udara melalui peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan, terutama dari pengendalian SO² dan NO², baik dari kendaraan bermotor dan industri, serta penggunaan mesin dengan bahan bakar

fosil; dan (3) Mempertahankan kualitas lahan melalui pelestarian dan perlindungan terhadap tutupan vegetasi hutan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, meningkatkan luas tutupan lahan terutama pada lahan kritis, dan menambahkan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Strategi-strategi tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan wilayah dan kelestarian lingkungan. Dengan implementasi yang konsisten, diharapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Brebes dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (*safely managed*) yaitu apabila fasilitas sanitasi hanya digunakan oleh anggota rumah tangga sendiri dengan jenis kloset berupa leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Akses sanitasi aman ini menjadi indikator penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan penurunan risiko penyebaran penyakit berbasis air di wilayah Kabupaten Brebes. **Tabel 2.22** merupakan persentase rumah tangga akses sanitasi aman di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

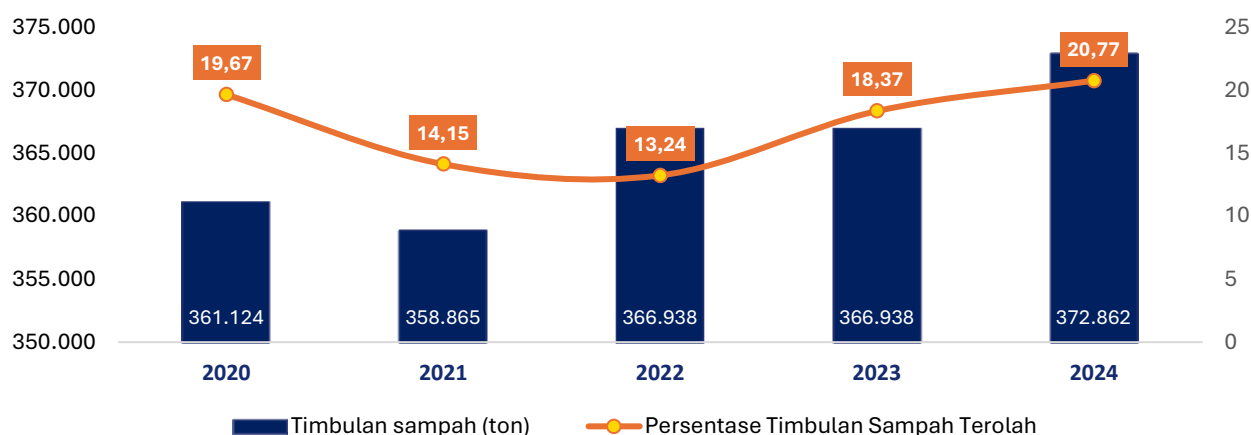
TABEL 2. 22 RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	73,81	80,10	80,72	82,80	N/A

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Brebes, 2025

2.1.5.3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk- produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Secara umum, timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan, serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Pada sumber pengumpulan sampah, sampah terpilah menjadi organik dan non organik. Sampah organik dikompos menjadi pupuk organik atau kompos, sampah organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plastik belanja dll. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau kontainer sampah untuk diangkut atau dikelola di TPA. Pengelolaan sampah pada sumber sampah melibatkan peran serta masyarakat secara setara dan berkeadilan gender. Peran serta masyarakat dilaksanakan dalam wujud akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pengelolaan sampah bagi laki-laki dan Perempuan.



Gambar 2. 9 Volume Timbunan Sampah dan Persentase Timbulan Sampah Terolah Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024, timbulan sampah di Kabupaten Brebes mencapai lebih dari 300.000 ton setiap tahunnya. Di tahun 2024, timbulan sampah di Kabupaten Brebes mencapai 372.861,55 ton pada tahun 2024. Yang menjadi persoalan, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2024 baru mencapai 20,77 persen, meskipun capaian tersebut lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya.

TABEL 2. 23 TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITASI PENGOLAHAN SAMPAH DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pendaوران Ulang Sampah (Ton)	2,67	N/A	6,99	6.048,11	6.075,32
Pengolahan (Ton)	71.043,60	50.767,85	48.577,85	61.352,85	6.775,87
Timbulan Sampah (Ton)	361.123,52	358.865,26	366.937,60	366.937,60	372.861,55
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19,67	14,15	13,24	18,37	1,82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, 2024

2.1.5.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah merupakan perhitungan terkait cakupan layanan pengumpulan sampah pada setiap rumah tangga di Kabupaten Brebes. Secara operasional, indikator ini didefinisikan sebagai persentase jumlah rumah tangga yang secara rutin menerima layanan pengumpulan sampah, meliputi jenis sampah rumah tangga baik organik dan anorganik, dengan frekuensi dan jangkauan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Angka dalam indikator ini adalah Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Layanan Penuh Pengumpulan Sampah yang disandingkan dengan Total Jumlah Rumah Tangga. Indikator ini penting dalam evaluasi efektivitas sistem pengelolaan persampahan, terutama di kawasan perkotaan, serta kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi nilai proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, semakin tinggi pula kualitas hidup masyarakat.

TABEL 2. 24 PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN LAYANAN PENUH PENGUMPULAN SAMPAH DI KABUPATEN BREBES 2020-2024 (PERSEN)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	63,66	64,34	65,45	66,32	67,85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.24**, diketahui bahwa proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Brebes senantiasa mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sejak 2020 hingga 2024. Diketahui bahwa peningkatan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah yaitu sebesar 4,19% dari yang semula berada pada angka 63,66% pada 2020 menjadi 67,85% pada 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan peningkatan cakupan layanan pengumpulan sampah rumah tangga di Kabupaten Brebes. Lebih lanjut, angka tersebut mengindikasikan pemanfaatan fasilitas pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh masyarakat Kabupaten Brebes. Bukan hanya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberadaan layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Brebes yang membaik menunjukkan upaya konkret untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

2.1.6 Persentase Aduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan juga dapat diartikan sebagai berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982). Perusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.

TABEL 2. 25 PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI DI KABUPATEN BREBES 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Lingkungan Ditindaklanjuti	10	7	8	12	16
Jumlah Total Kasus Lingkungan	10	7	8	12	16
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, 2024

2.1.6.1 Cakupan Pelayanan Persampahan

Persentase cakupan layanan area persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui pemda dan swasta terhadap jumlah keseluruhan desa dan kelurahan. Tujuan disusunnya persentase penanganan sampah adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi tingkat layanan persampahan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang pengelolaan persampahan. Rumus untuk menghitung cakupan area layanan sampah adalah jumlah desa dan kelurahan terlayani dibagi dengan jumlah desa dan kelurahan se-kabupaten dikalikan 100%.

TABEL 2. 26 CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN YANG DITANGANI DI KABUPATEN BREBES 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Pemda	74	76	76	76	76
Jumlah Desa/ Kelurahan	297	297	297	297	297

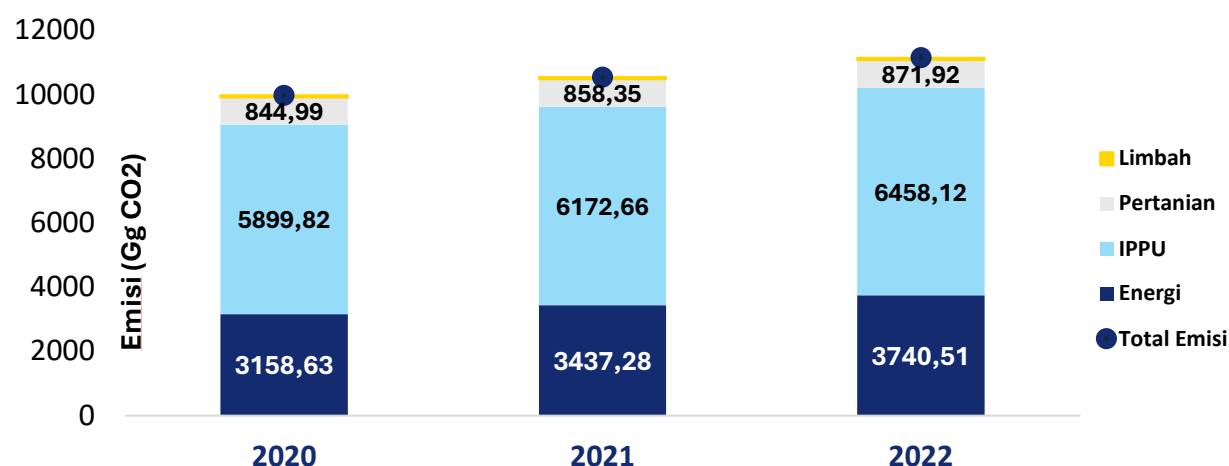
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, 2024

2.1.7 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan salah satu prioritas dalam RPJMD Kabupaten Brebes sebagai respons terhadap meningkatnya risiko iklim yang berdampak pada sektor pertanian, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat ketahanan wilayah dan masyarakat melalui strategi adaptasi berbasis ekosistem serta penguatan sistem peringatan dini. Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

2.1.7.1 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

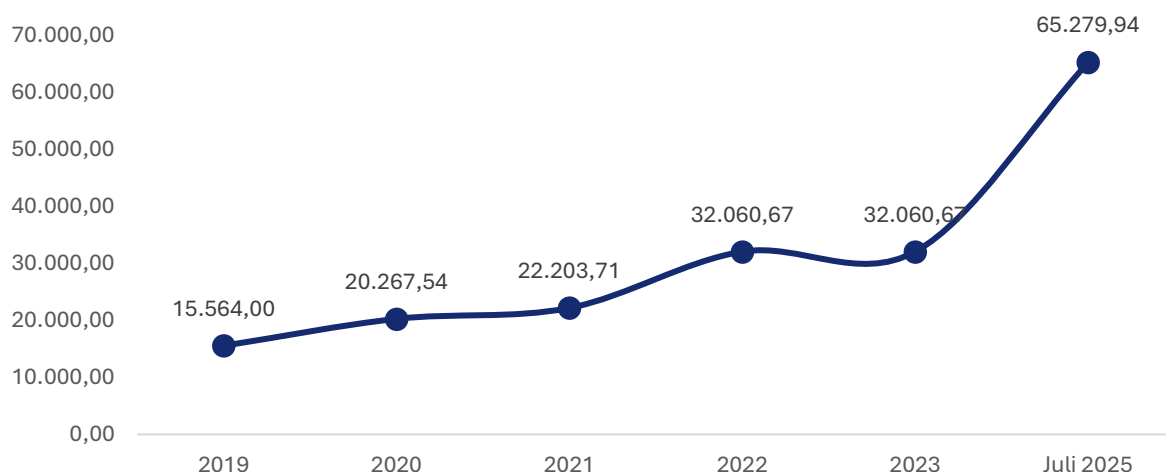
Data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIDIK KLHK) tahun 2023 mengungkapkan bahwa 272 (91,58 persen) desa di Kabupaten Brebes memiliki tingkat kerentanan sedang dalam hal perubahan iklim. Di sisi lain, terdapat 24 desa memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi, dan hanya 1 desa dengan tingkat kerentanan rendah. Kerentanan terhadap perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Brebes di tahun 2020-2022 mengalami tren peningkatan dari 9.969,28 Gg CO₂eq di tahun 2020 menjadi 11.142,58 Gg CO₂eq di tahun 2022. Kontribusi emisi GRK pada tahun 2022 tertinggi di sektor IPPU (*Industrial Processes and Product Use*) sebesar 6.458,12 Gg CO₂eq.



Gambar 2. 10 Tingkat Emisi GRK Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 2024

Berdasarkan data Bappenas, selama tahun 2020-2023 terdapat 37 total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan di Kabupaten Brebes. Kegiatan tersebut berpotensi menurunkan 32.060,67 ton CO₂EQ emisi kumulatif. Meskipun demikian, selama 2020-2023 upaya pembangunan rendah karbon di Kabupaten Brebes baru berkontribusi sebesar 0,26 persen terhadap capaian pembangunan rendah karbon di tingkat Provinsi.



Gambar 2. 11 Potensi Penurunan GRK

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 2025

2.1.7.2 Indeks Risiko Bencana

Mengukur risiko bencana di suatu daerah dapat dilakukan dengan melihat indeks risiko bencana yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia. Indeks ini dihitung dengan mempertimbangkan aspek bahaya, kapasitas, dan juga kerentanan daerah terhadap suatu bencana. Nilai indeks risiko bencana (IRB) Kabupaten Brebes tercatat mengalami penurunan dan kenaikan sejak tahun 2020–2024. Tercatat di 2020 nilai IRB Kabupaten Brebes sebesar 189,94 sedangkan pada tahun 2024 sudah mengalami penurunan menjadi 143,69. Nilai IRB pada tahun 2024 ini menggolongkan Kabupaten Brebes ke dalam daerah dengan risiko bencana sedang.

TABEL 2. 27 INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana	189,94	189,94	171,01	155,35	143,69

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Brebes 2025 – 2029

Terdapat beberapa bencana yang sering terjadi di Kabupaten Brebes seperti banjir, tanah longsor, tanah gerak, angin ribut, dan beberapa bencana lainnya. Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Brebes meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir, dimana kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan juga angin ribut. Geomorfologi Kabupaten Brebes yang beragam menyebabkan banyaknya jenis bencana yang sering terjadi. Bencana banjir banyak terjadi di wilayah utara Kabupaten Brebes seperti Kecamatan Brebes dan Losari yang mana secara geomorfologi merupakan daerah fluvial dan relatif datar. Bencana tanah longsor banyak ditemui di wilayah selatan seperti Kecamatan Bantarkawung, Sirampog, Bumiayu, dan Paguyangan yang mana bentuk lahannya berupa perbukitan dan pegunungan serta memiliki topografi yang beragam. Selain itu, keberadaan

Gunung Slamet di bagian selatan juga menyebabkan Kabupaten Brebes memiliki risiko terhadap bencana gunung meletus.

TABEL 2. 28 JUMLAH KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN BREBES 2020-2024

No	Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banjir	72	52	76	19	86
2	Tanah Longsor	176	53	130	22	80
3	Tanah Gerak	4	9	5	2	4
4	Angin Ribut	33	20	33	2	80
5	Kebakaran	11	2	0	0	16
6	Kekeringan	0	0	0	38	20
7	Gempa Bumi	0	0	0	2	0
8	Bencana Lainnya	23	65	15	109	30
Jumlah Kejadian		319	201	259	189	316

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Brebes 2025 – 2029

Selanjutnya, apabila melihat data mengenai jumlah korban bencana yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini menandakan sikap kewaspadaan dan kesiapan penduduk berjenis kelamin perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. **Tabel 2.29** menunjukkan jumlah korban bencana di Kabupaten Brebes Tahun 2022-2024.

TABEL 2. 29 JUMLAH KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BREBES 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Korban		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2022	446	452	898
2	2023	446	432	878
3	2024	1.600	1.552	3.152
Jumlah		2.492	2.436	4.928

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

2.1.7.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Selama lima tahun terakhir, indeks ketahanan daerah di Kabupaten Brebes terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Brebes lebih baik dari tahun ke tahun. Upaya yang telah dilakukan pada ketahanan bencana dengan membentuk KENCANA (Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana), dimana diharapkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Brebes paham dan sigap dalam menangani bencana. Selain itu, Kabupaten Brebes juga memfokuskan pembangunan irigasi perpompaan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes juga mengadakan festival bawang merah yang diharapkan dapat memperluas pasar, agar ketahanan pangan dan ekonomi tetap stabil. Penanganan terkait dengan ketahanan sosial juga menjadi perhatian Kabupaten Brebes, Kabupaten Brebes memberikan bantuan sosial terhadap penduduk kurang mampu. Selain itu, terkait dengan ketahanan lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan aksi “Mageri Segoro” yaitu penanaman tanaman mangrove sebanyak 25.200 batang di Pantai Randusanga. Lebih lanjut, **Tabel 2.30** merupakan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

TABEL 2. 30 INDEKS KETAHANAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0,41	0,49	0,54	0,57	0,58

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Kabupaten Brebes memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim, terutama di wilayah pesisir yang rawan rob dan abrasi, serta daerah hulu yang berpotensi mengalami banjir bandang dan longsor. Perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu juga mempengaruhi sektor pertanian, perikanan, ketersediaan air bersih, dan kesehatan masyarakat. Upaya adaptasi dilakukan melalui penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi pantai, rehabilitasi mangrove, pembangunan tanggul laut, serta penerapan sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat.

2.1.8 Demografi

Aspek demografi Kabupaten Brebes digambarkan dengan melihat beberapa indikator seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, *sex ratio*, kepadatan, dan komposisi penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Brebes dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Brebes sebanyak 2.043.077 jiwa meningkat menjadi 2.065.501 jiwa pada tahun 2024. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Brebes sebanyak 189.243 jiwa atau 9,26 persen dari total populasi penduduk. Laju pertumbuhan penduduk juga menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Pada tahun 2024 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dari 1,28% di tahun 2023 menjadi 1,15% di tahun 2024. Ini menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

TABEL 2. 31 ASPEK DEMOGRAFI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk per km ²
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
2020	998.614	967.771	1.978.759	1,29	102,90	1.118
2021	1.015.848	985.805	1.992.685	1,26	102,83	1.126
2022	1.035.491	1.005.961	2.010.617	0,90	103,00	1.136
2023	1.043.406	1.010.872	2.043.077	1,28	103,00	1.155
2024	1.049.539	1.016.887	2.065.501	1,15	103,00	1.167

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Apabila dilihat dari *sex ratio* atau rasio jenis kelamin, struktur penduduk di Kabupaten Brebes cenderung seimbang. Pada tahun 2024, *sex ratio* berada pada angka 103,00 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah laki-laki di Kabupaten Brebes secara proporsional lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

TABEL 2. 32 ASPEK DEMOGRAFI KABUPATEN BREBES PER KECAMATAN TAHUN 2024

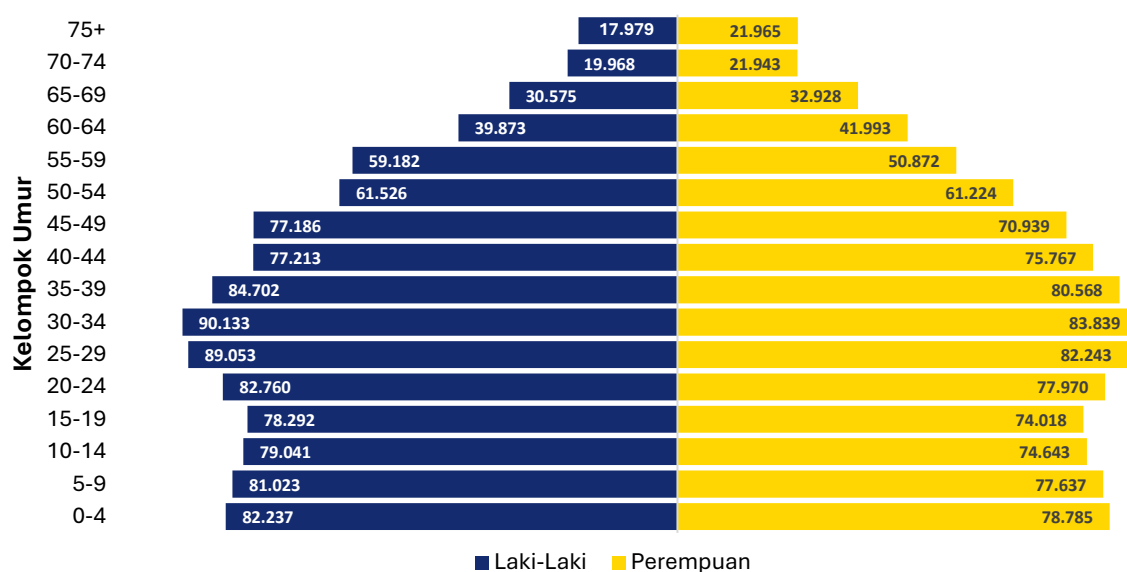
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²
1	Salem	65.650	3,18	393
2	Bantarkawung	108.489	5,25	521
3	Bumiayu	118.772	5,75	1.447

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²
4	Paguyangan	118.001	5,71	1.091
5	Sirampog	72.742	3,52	981
6	Tonjong	80.640	3,9	932
7	Larangan	164.908	7,98	1.029
8	Ketanggungan	147.647	7,15	962
9	Banjarharjo	133.476	6,46	825
10	Losari	145.107	7,03	1.581
11	Tanjung	109.953	5,32	1.525
12	Kersana	70.782	3,43	2.624
13	Bulakamba	188.204	9,11	1.564
14	Wanasari	169.490	8,21	2.250
15	Songgom	91.867	4,45	1.745
16	Jatibarang	88.158	4,27	2.423
17	Brebes	191.615	9,28	2.078
Kabupaten Brebes		2.065.501	100	1.167

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.8.1 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten Brebes dapat dilihat dari jenis kelamin dan kelompok umur. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Brebes tahun 2023 terdiri dari 1.035.743 (50,69 persen) laki-laki dan 1.007.334 (49,30 persen) perempuan. Sementara itu, berdasarkan kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Brebes berada pada usia produktif (15-64 tahun). Kelompok usia penduduk produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Brebes di tahun 2023 mencapai 1.424.353 atau 69,71 persen dari total penduduk di Kabupaten Brebes.



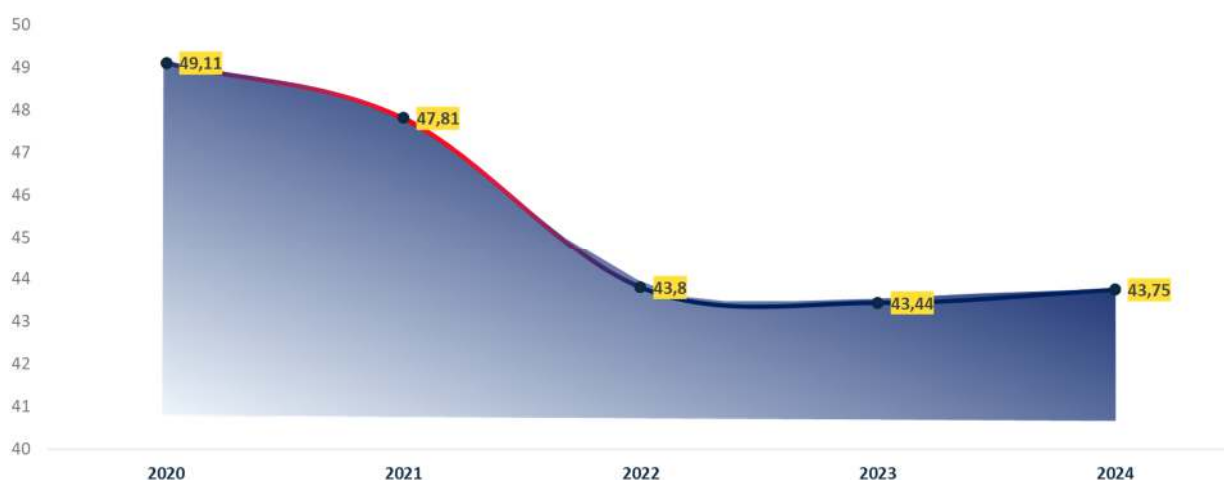
Gambar 2. 12 Komposisi Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

2.1.8.2 Angka Ketergantungan

Jumlah penduduk usia produktif yang dominan menyebabkan angka ketergantungan semakin menurun. Dalam kurun waktu 2020-2024, angka beban ketergantungan secara konsisten mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan terjadi di tahun 2022, dimana angka beban ketergantungan Kabupaten Brebes berada di angka 43,80. Di tahun 2024, angka beban ketergantungan Kabupaten Brebes menurun menjadi 43,44. Menurunnya rasio ketergantungan tersebut mengindikasikan bahwa beban yang ditanggung oleh usia produktif terhadap usia non produktif semakin menurun. Selain itu, meningkatnya jumlah usia produktif berpotensi menghasilkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Lebih lanjut, data ini didukung dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Angka Putus Sekolah (APTs) Kabupaten Brebes yang terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.

Kabupaten Brebes berdasarkan tren rasio ketergantungan berada di fase *windows of opportunity* yang juga berpotensi terjadinya peluang bonus demografi yang ditandai dengan rasio ketergantungan yang terendah di tahun 2024 (43,75 persen). Potensi bonus demografi bisa mendorong percepatan dan peningkatan pembangunan daerah. Rasio ketergantungan rendah mengisyaratkan melimpahnya penduduk usia produktif yang perlu disediakan/terserap di lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia di kelompok usia produktif agar mempunyai keunggulan dan keahlian khusus agar mampu berkompetisi di pasar tenaga kerja. Diperkirakan rasio ketergantungan bergerak naik kembali dan peluang bonus demografi akan menutup. Sehingga Kabupaten Brebes perlu mengupayakan peningkatan perekonomian.



Gambar 2. 13 Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

2.1.8.3 Proyeksi Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Brebes tahun 2025-2029, jumlah penduduk usia produktif semakin meningkat. Hal tersebut mengindikasikan angka ketergantungan atau *dependency ratio* semakin meningkat yang berarti bahwa jumlah penduduk yang tidak produktif (anak-anak di bawah 15 tahun dan lansia di atas 65 tahun) semakin besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang produktif (usia 15- 64 tahun). Implikasi rasio

ketergantungan yang meningkat adalah meningkatnya beban ekonomi yang ditanggung penduduk produktif untuk memenuhi kebutuhan penduduk tidak produktif.

TABEL 2. 33 PROYEKSI ASPEK DEMOGRAFI KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029

Proyeksi Penduduk						
Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	>65 Tahun	Jumlah	Dependency Ratio	Kepadatan Penduduk
2025	478.174	1.449.104	160.053	2.087.331	44,04	1.180
2026	479.733	1.461.018	167.751	2.108.502	44,32	1.191
2027	480.766	1.472.516	175.647	2.128.929	44,58	1.203
2028	481.257	1.483.595	183.738	2.148.590	44,82	1.214
2029	481.161	1.494.301	192.014	2.167.476	45,05	1.225

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes diolah, 2024

Dari aspek sosio kultural, penduduk Kabupaten Brebes terdiri dari berbagai macam suku. Suku terbanyak adalah suku Jawa dan sebagian suku Sunda. Di Kabupaten Brebes terdapat kelompok masyarakat adat kampung dan hutan Jalawastu Brebes. Masyarakat adat Jalawastu merupakan masyarakat adat yang terletak dusun Jalawastu, Desa Cisereuh, Kecamatan Ketanggungan. Berdasarkan data Pemerintah Desa Cisereuh tahun 2024, masyarakat adat Jalawastu terdiri dari 316 jiwa.

Sampai saat ini, masyarakat adat Jalawastu masih mempertahankan kegiatan adat seperti Ngasa, Babarit, Tundan, Sedekah Bumi, Tutulak, Tong-Tong Breng, Cako, dan Ngaguyang Kuwi. Salah satu tradisi yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya adalah tradisi Ngasa. Tradisi Ngasa merupakan kegiatan budaya yang digelar setiap Selasa Kliwon mangsa Kasangan setiap tahunnya. Kegiatan adat Ngasa merupakan ekspresi ucapan syukur masyarakat adat di kampung dan hutan Jalawastu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam hal agama dan kepercayaan yang dianut, sebagian besar penduduk Kabupaten Brebes memeluk agama Islam, diikuti dengan agama Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan lainnya. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang memeluk masing-masing agama pada tahun 2024 yaitu 2.061.254 jiwa, 3.417 jiwa, 1.392 jiwa, 212 jiwa, 15 jiwa, dan 136 jiwa. Antar pemeluk agama di Kabupaten Brebes dapat hidup berdampingan dan saling menghargai antar pemeluk agama

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Brebes, kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan, dan akses terhadap pelayanan dasar. Indikator kesejahteraan ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada kelompok rentan. Salah satu komponen utama dari kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan ekonomi.

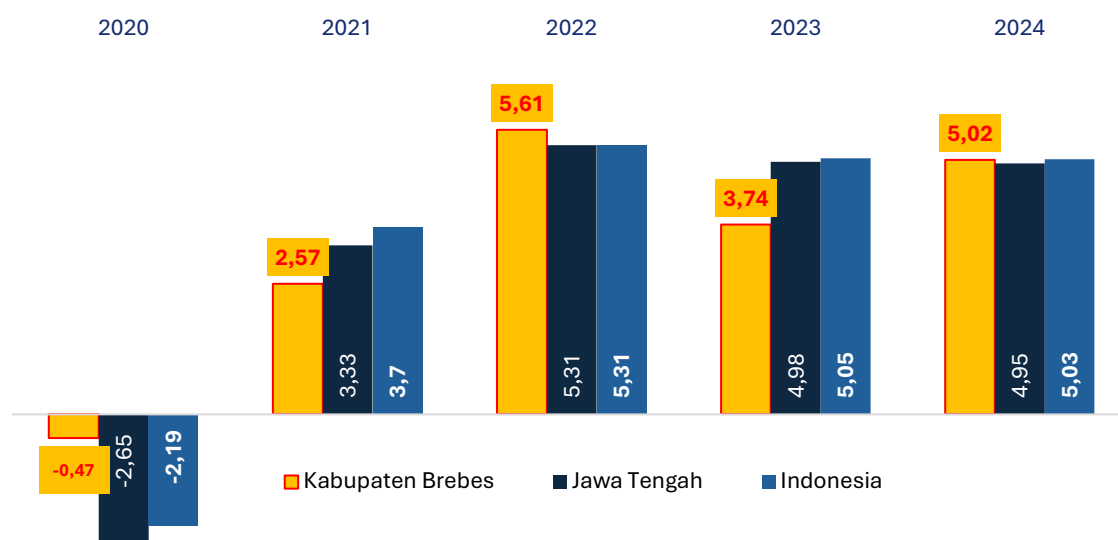
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kinerja kesejahteraan ekonomi yang dicapai Kabupaten Brebes menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan aspek kesejahteraan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Meskipun masih terdapat tantangan akibat fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan pada sektor primer, upaya diversifikasi ekonomi dan peningkatan kualitas SDM terus didorong dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi Kabupaten Brebes dapat dilihat dari capaian indikator makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, gini rasio, laju inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. Secara umum, lima indikator kesejahteraan ekonomi tersebut menunjukkan Kabupaten Brebes berada dalam tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi berada pada angka -0,47 persen. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Namun, setelah berakhirnya pandemi COVID-19, perekonomian mulai menunjukkan resiliensi yang baik dengan tumbuh 2,57 persen pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 5,61 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes mengalami penurunan diangka 3,74 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang menurun salah satunya disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 37,51 persen dan menurun pada tahun 2023 menjadi 34,28 persen. Laju pertumbuhan pada sektor ini juga menurun pada tahun 2023 sebesar -2,11 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan hingga di angka 5,02.



Gambar 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2024

Jika dibandingkan secara regional di eks-Karisidenan Pekalongan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang paling lambat dengan tumbuh sebesar 3,74 persen. Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,61 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi 5,37 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi se-Eks Karisidenan Pekalongan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada [Tabel 2.34](#).

TABEL 2. 34 PERTUMBUHAN EKONOMI EKS-KARISIDENAN PEKALONGAN TAHUN 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Brebes	-0,47	2,33	5,61	3,74	5,37
2	Kab. Batang	-1,29	4,88	5,97	5,53	6,12
3	Kab. Pekalongan	-1,89	3,54	5,11	5,14	4,93
4	Kab. Pemalang	-0,66	4,19	5,08	4,14	4,28
5	Kab. Tegal	-1,48	3,72	5,14	4,93	5,65
6	Kota Pekalongan	-1,87	3,59	5,76	5,44	5,80
7	Kota Tegal	-2,29	3,12	5,16	5,01	2,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes salah satunya disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan PDRB di sektor transportasi dan perdagangan. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan sektor transportasi dan perdagangan meningkat menjadi 55,50 persen namun pada tahun 2023 menurun hingga 7,58 persen (turun -47,92 persen). Selain itu sektor pertanian sebagai sektor unggulan Kabupaten Brebes juga menurun dari 3,57 persen (tahun 2022) menjadi -2,11 persen pada tahun 2023. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sektor informasi dan komunikasi meningkat sebesar 7,96 persen serta pertambangan dan penggalan sebesar 6,72 persen. Namun, terlihat

peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan atau pertumbuhan pada beberapa sektor.

TABEL 2. 35 LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2024 (%)

No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,35	3,57	-2,11	0,81
2	Pertambangan dan Penggalian	3,40	-3,12	3,6	6,58
3	Industri Pengolahan	4,86	7,36	6,06	6,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,57	4,24	8,18	9,68
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,94	10,49	8,49	4,78
6	Konstruksi	6,12	1,98	7,97	7,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,79	4,50	8,49	6,61
8	Transportasi dan Pergudangan	2,59	53,98	7,58	8,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,94	14,88	11,4	9,55
10	Informasi dan Komunikasi	0,16	2,94	10,9	8,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,49	0,86	1,93	0,66
12	Real Estate	1,80	3,75	7,57	5,55
13	Jasa Perusahaan	1,58	4,62	7,58	5,24
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,54	1,90	3,3	5,56
15	Jasa Pendidikan	0,12	1,46	5,52	7,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	0,66	5,68	4,42
17	Jasa Lainnya	0,63	1,72	7,59	9,76
Produk Domestik Regional Bruto		2,57	5,61	3,74	5,02

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2025

Meskipun laju pertumbuhan PDRB mengalami fluktuasi, sektor pertanian tetap menjadi kontributor terbesar terhadap distribusi PDRB Kabupaten Brebes tahun 2023. Sektor industri pengolahan dan perdagangan besar serta eceran juga menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,06 persen dan 8,49 persen pada tahun 2023. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut. Namun, sektor jasa keuangan dan asuransi menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat, hanya mencapai 1,93 persen di tahun yang sama.

TABEL 2. 36 DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2024 (%)

No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,51	36,01	34,28	33,28
2	Pertambangan dan Penggalian	2,42	2,21	2,19	2,18
3	Industri Pengolahan	17,54	17,99	18,83	19,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06

No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06
6	Konstruksi	4,36	4,31	4,48	4,5
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,08	15,90	16,07	16,18
8	Transportasi dan Pergudangan	1,99	2,96	3,22	3,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,43	4,82	4,95	5,14
10	Informasi dan Komunikasi	3,92	3,68	3,86	3,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,81	1,80	1,75	1,66
12	Real Estate	1,08	1,03	1,05	1,03
13	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,30	0,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,84	1,76	1,73	1,73
15	Jasa Pendidikan	4,72	4,39	4,36	4,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,79	0,80	0,79
17	Jasa Lainnya	2,03	1,94	2,01	2,11
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100

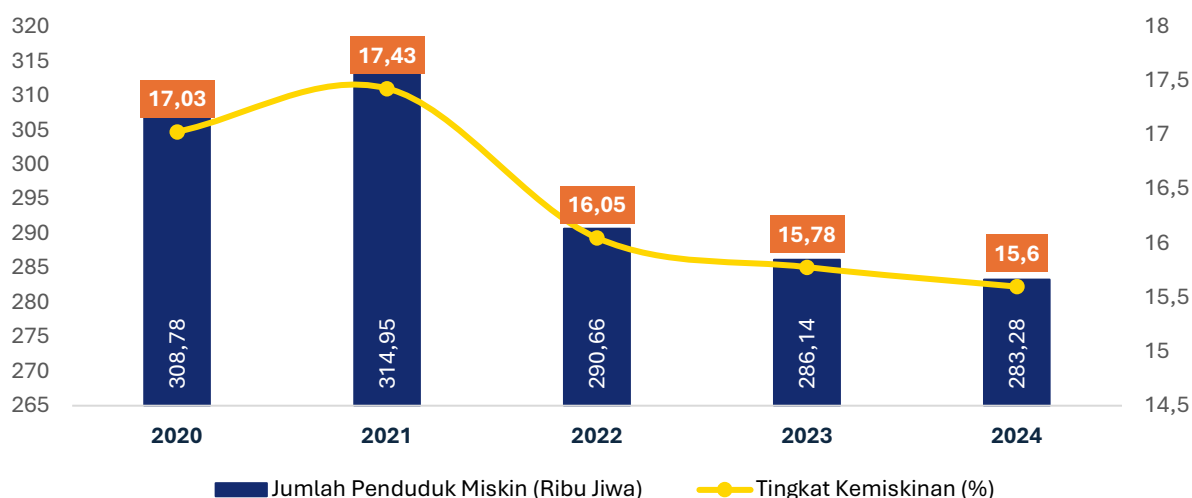
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2025

Distribusi PDRB Kabupaten Brebes menunjukkan tren penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari 36,51 persen pada 2021 menjadi 33,28 persen pada 2024, meskipun begitu sektor ini tetap menjadi sektor dominan. Penurunan terjadi diakibatkan abrasi dan fluktuasi suhu ekstrem yang terjadi di pesisir Kabupaten Brebes. Sebaliknya, sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan kontribusi, dari 17,54 persen pada 2021 menjadi 19,31 persen pada 2024, mencerminkan pertumbuhan industri sebagai pendorong utama ekonomi daerah. Perdagangan besar dan eceran tetap stabil dengan kontribusi sekitar 16 persen, menegaskan perannya dalam perekonomian lokal. Sektor transportasi dan pergudangan juga mengalami peningkatan, menunjukkan adanya penguatan konektivitas dan distribusi logistik. Namun, sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan kontribusi dari 1,81 persen pada 2021 menjadi 1,66 persen pada 2024, yang dapat mengindikasikan perubahan pola konsumsi atau akses ke layanan keuangan. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Brebes menuju sektor industri dan perdagangan, meskipun sektor pertanian masih menjadi pilar utama.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan isu yang harus diselesaikan secara terpadu dan lintas sektor. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2024 terdapat 283,28 ribu jiwa penduduk dalam kategori miskin atau sebesar 15,6 persen dari jumlah populasi Kabupaten Brebes. Secara umum, tingkat kemiskinan di Brebes mengalami fluktuasi dengan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Pada periode 2020-2024, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan, dengan penurunan tertinggi sebesar 1,38 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan kembali turun sebesar 0,27 persen dibanding tahun 2022, atau berkurang sebanyak 4,52 ribu jiwa. Sementara itu, pada tahun 2024 angka kemiskinan terus menurun meskipun dengan laju yang lebih lambat, hanya turun 0,18 persen dibandingkan tahun 2023. Salah satu faktor yang memengaruhi angka kemiskinan adalah

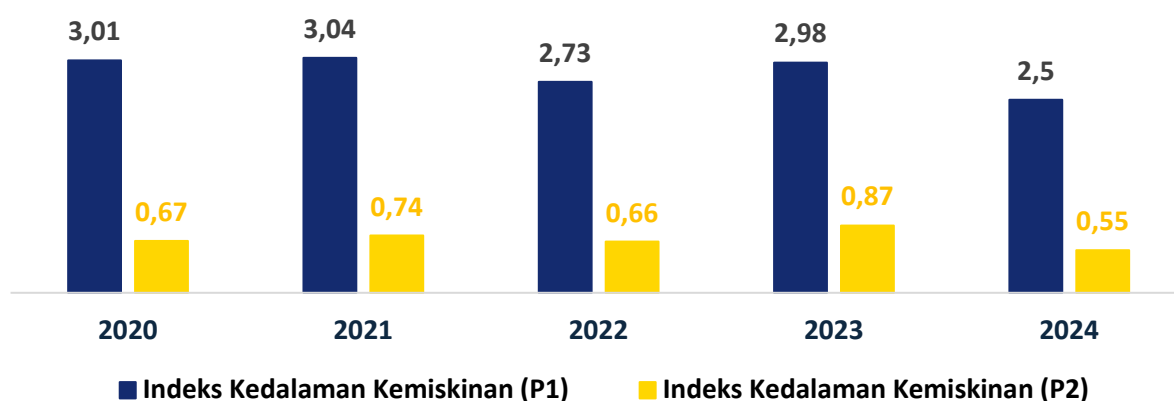
Garis Kemiskinan (GK), yang merepresentasikan jumlah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non-makanan secara layak. Selama periode 2020-2022, GK mengalami kenaikan sebesar 8,68 persen, dari Rp 472.326,- per kapita per bulan menjadi Rp 513.339,- per kapita per bulan.



Gambar 2. 15 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan menjadi 2,5 dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin turun. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 0,32 dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya perbaikan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan distribusi bantuan sosial yang lebih efektif.



Gambar 2. 16 Perkembangan Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Maret 2020 – Maret 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

Lebih lanjut, menurut Peraturan Presiden No. 163 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu dengan melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem sendiri merupakan kondisi

ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Di Kabupaten Brebes sendiri, persentase kemiskinan ekstrem terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentase kemiskinan di Kabupaten Brebes mencapai 10,32% dan terus mengalami penurunan menjadi 0,75% pada tahun 2024. Hal ini selaras dengan data tingkat kemiskinan dan perkembangan garis kemiskinan yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

TABEL 2. 37 KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024 (%)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kemiskinan Ekstrem	N/A	10,32	3,99	4,17	0,75

Sumber: Kemenko PMK

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah hasil bagi antara PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. PDRB perkapita menunjukkan gambaran kesejahteraan masyarakat dikarenakan fungsinya sebagai indikator perekonomian individu. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakatnya. Lebih lanjut, hal tersebut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebab disertai dengan peningkatan kemampuan daya beli. Berdasarkan BPS Kabupaten Brebes, diketahui bahwa terjadi peningkatan PDRB dari yang semula 16,55 juta rupiah menjadi 18,87 juta rupiah. Walaupun menunjukkan peningkatan, nilai PDRB Kabupaten Brebes berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai nilai Rp 41.934.000,00 atau nyaris tiga kali lipat. Selain itu, walaupun Kabupaten Brebes mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, kontribusi perekonomian individu terbilang relatif kecil terhadap rata-rata provinsi. Hal tersebut mengindikasikan urgensi diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi.

TABEL 2. 38 PDRB PER KAPITA KABUPATEN BREBES 2020-2024

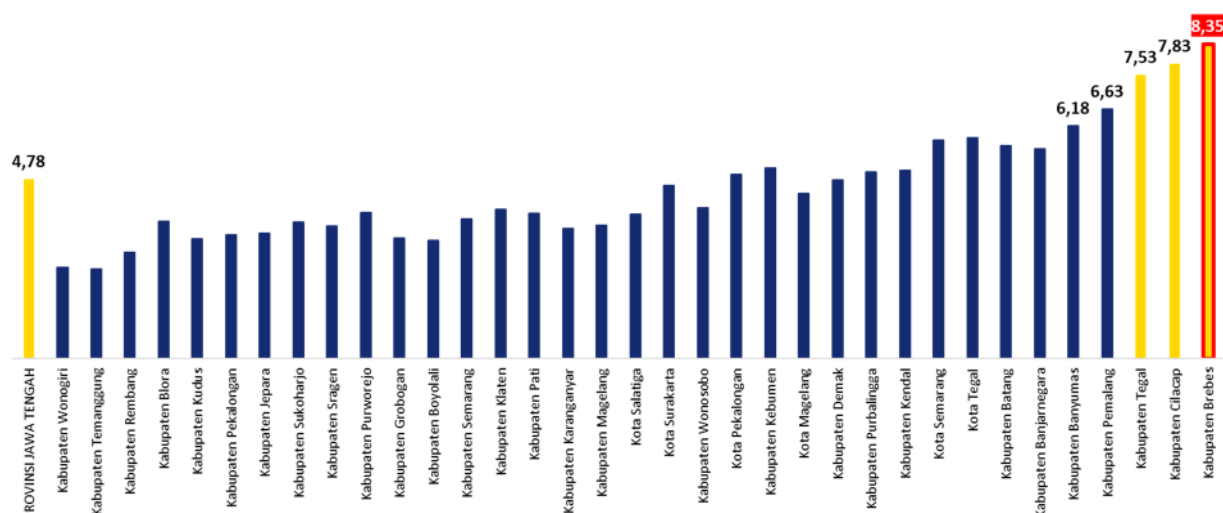
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Per Kapita Kabupaten Brebes (Juta Rupiah)	16,55	16,79	17,53	17,98	18,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia. Secara umum pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. **Gambar 2.17** menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 mengalami persentase yang fluktuatif. Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 8,35 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,95 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga meningkat dari 66,10 persen pada tahun 2023 menjadi 71,92 persen pada tahun 2024.



Gambar 2. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.39**, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020-2024, jumlah pengangguran dan angkatan kerja terus mengalami kenaikan. Namun demikian, hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang bekerja yang kemudian berdampak terhadap penurunan persentase pengangguran.

TABEL 2. 39 PENGANGGURAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Tahun	Bekerja (jiwa)	Pengangguran (jiwa)	Pengangguran (%)	Total Angkatan Kerja (jiwa)
2020	821.061	89.494	9,83	910.555
2021	793.289	85.969	9,78	879.258
2022	826.023	86.501	9,48	912.524
2023	946.472	93.374	8,98	1.039.846
2024	1.049.795	95.679	8,35	1.145.474

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

Selanjutnya, berdasarkan data Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Seminggu Terakhir di Kabupaten Brebes Tahun 2024, kontribusi terhadap pengangguran yang paling tinggi yaitu dengan pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 40.948 jiwa, kemudian SD dengan jumlah 28.932 jiwa. Dilihat dari partisipasi angkatan kerja, pendidikan SMP menempati tingkat partisipasi yang paling rendah yaitu sebesar 56,69 persen. Secara makro, jumlah pengangguran di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 sebanyak 95.679 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71,92 persen.

TABEL 2. 40 PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DAN JENIS KEGIATAN SEMINGGU TERAKHIR DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

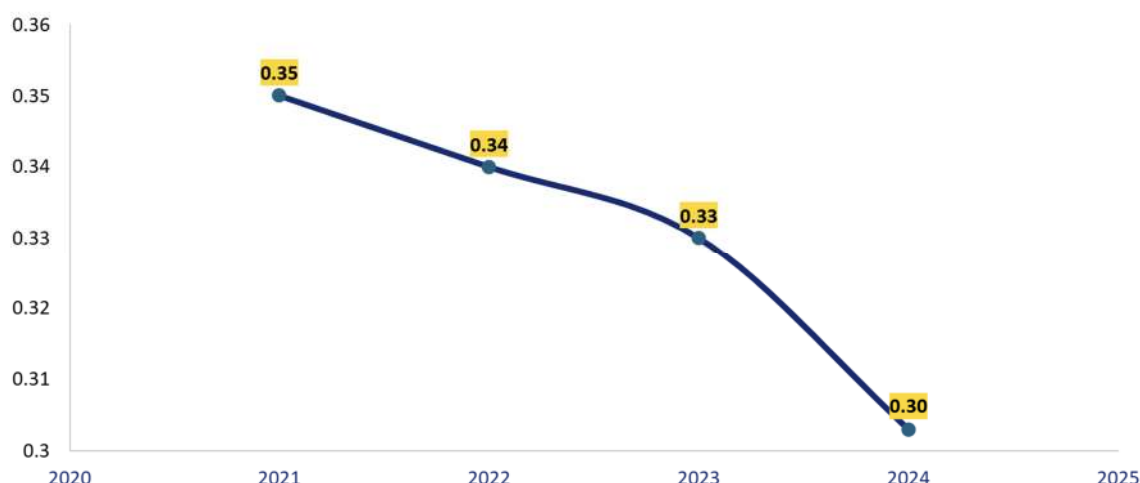
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja		
≤ Sekolah Dasar (SD)	584.197	28.932	613.129	231.962	72,55
SMP/Sederajat	177.452	23.087	200.539	153.238	56,69
SMA/Sederajat	234.464	40.948	275.412	57.499	82,73

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja		
Perguruan Tinggi	53.682	2.712	56.394	4.630	92,41
Jumlah	1.049.795	95.679	1.145.474	447.329	71,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

2.2.1.5 Gini Rasio Kabupaten Brebes

Gini Rasio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Kisaran angka tersebut menggambarkan pemerataan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional. Kondisi distribusi pendapatan yang merata ditunjukkan dengan besaran koefisien yang mendekati 0 (nol), sedangkan kecenderungan terjadinya ketimpangan ditunjukkan dengan besaran koefisien yang mendekati 1 (satu). Nilai 1 berarti distribusi yang sama sekali tidak sama yaitu satu orang memiliki segalanya dan yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Gini rasio Kabupaten Brebes dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan, hal ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan ketimpangan.



Gambar 2. 18 Gini Rasio Kabupaten Brebes Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

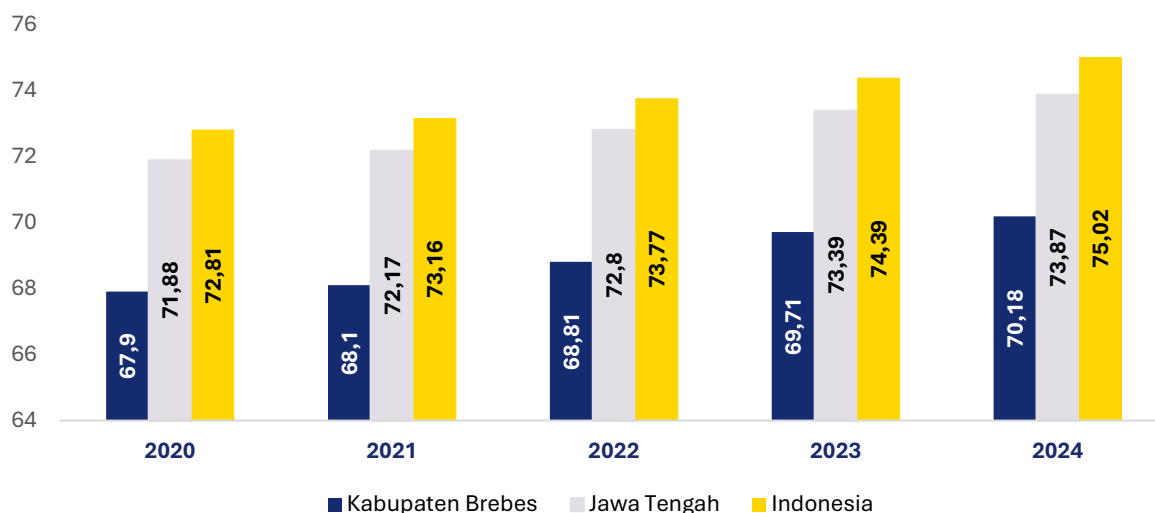
2.2.2 Kesejahteraan untuk Semua

Pemerataan kesejahteraan menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah yang berkeadilan. Kabupaten Brebes berupaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan tertinggal, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak. Melalui pendekatan pembangunan inklusif dalam RPJMD, peningkatan kualitas hidup penduduk terus didorong untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan memperhatikan beberapa komponen dasar kualitas hidup yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM Kabupaten Brebes pada kurun waktu 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 Indeks

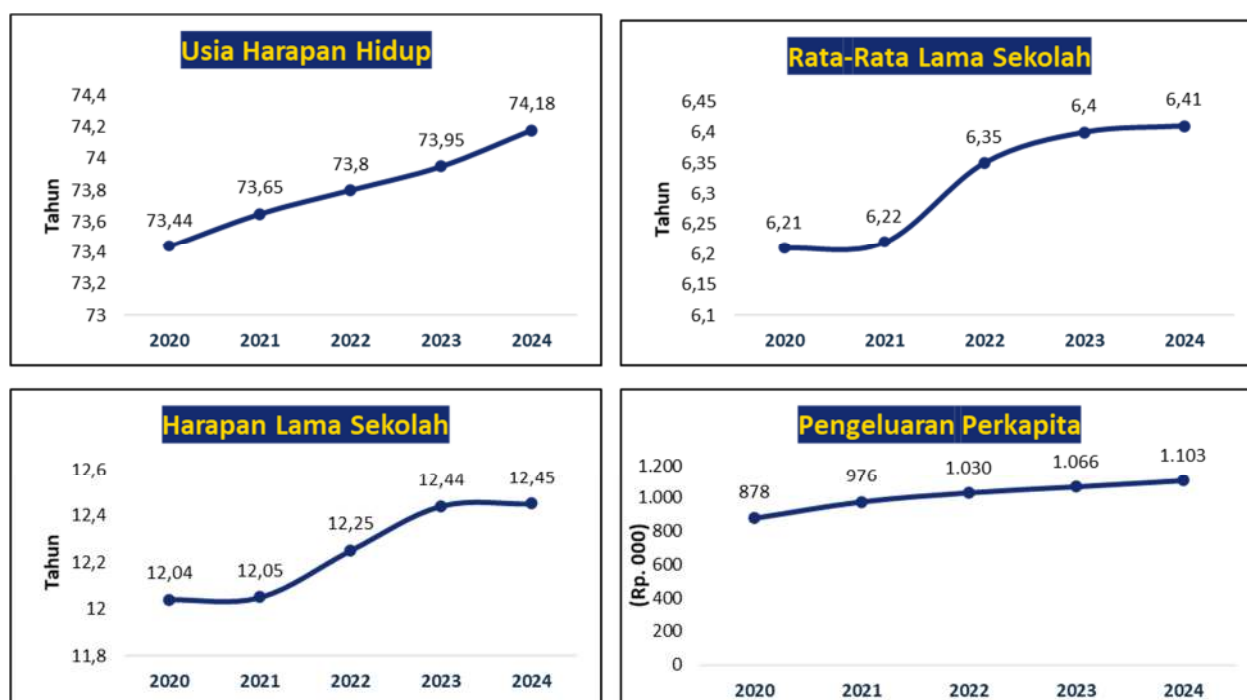
Pembangunan Manusia di Kabupaten Brebes mencapai 70,18. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69,71 (meningkat 0,47).



Gambar 2. 19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2024

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia disebabkan oleh beberapa faktor dari komponen pembentuk yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari faktor kesehatan, bayi yang dilahirkan pada tahun 2024 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 75,02 tahun dibandingkan bayi yang lahir pada tahun 2024 (74,39 tahun). Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes.

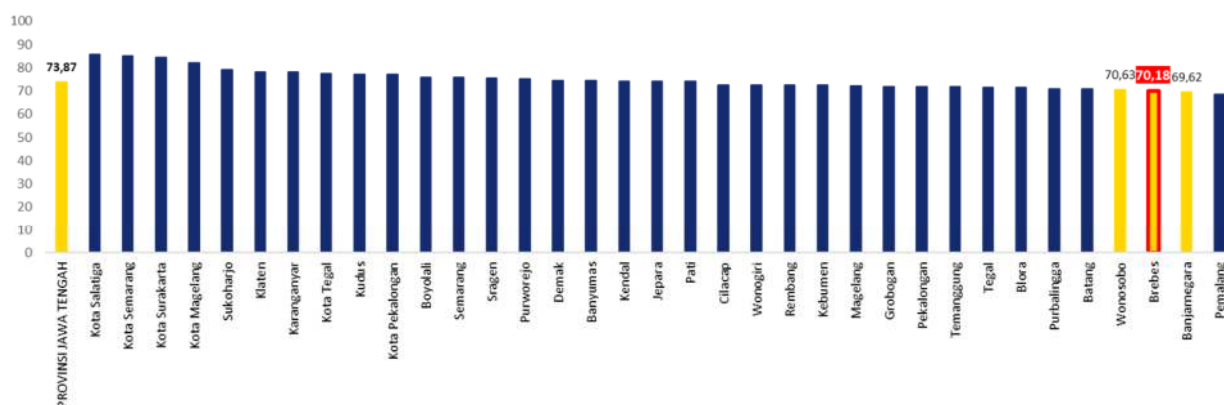


Gambar 2. 20 Perkembangan Komposisi Pembentuk IPM Kabupaten Brebes 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2024

Dari faktor pendidikan, anak-anak di Kabupaten Brebes yang berusia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,45 tahun atau setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan Pendidikan hingga setingkat SMA. Angka tersebut meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 12,44 tahun. Hal ini menandakan adanya upaya peningkatan sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas manusia di Kabupaten Brebes.

Selain itu rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,01 tahun, yaitu dari 6,4 tahun menjadi 6,41 tahun pada tahun 2024. Dari faktor dimensi standar layak hidup layak diukur dari representasi pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024 pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Brebes mencapai Rp.11.389.000,- per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,47 persen.



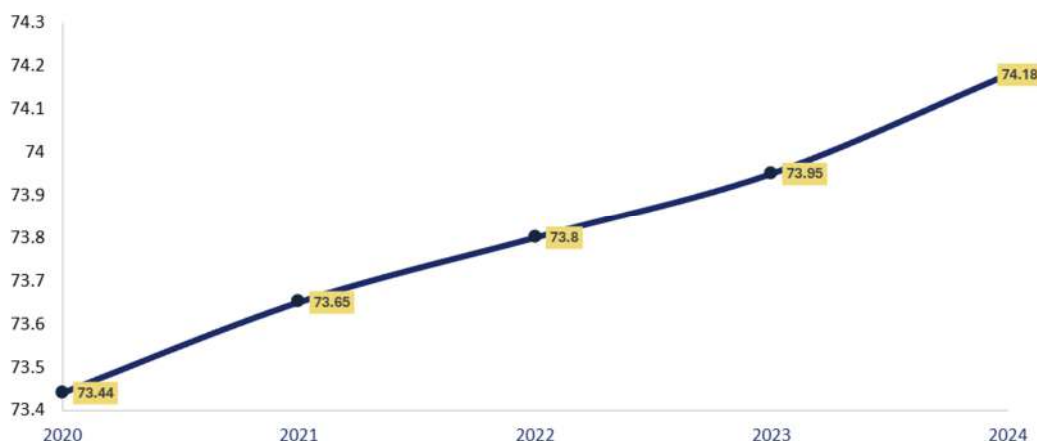
Gambar 2. 21 Perbandingan IPM Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes menempati posisi 33 dari 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Angka IPM Kabupaten Brebes masih berada di bawah angka IPM Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 74,48. Meskipun telah ada perbaikan di beberapa sektor yang berpengaruh terhadap peningkatan IPM Kabupaten Brebes tahun 2024, namun perlu adanya dorongan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Brebes dengan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

2.2.2.2 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Usia Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu wilayah. Usia harapan hidup di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun 2020 yakni 73,44 tahun menjadi 74,18 tahun di tahun 2024. Peningkatan angka harapan hidup ini memberikan gambaran bahwa rata-rata usia hidup penduduk di Kabupaten Brebes meningkat, hal ini dapat dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ataupun faktor-faktor lainnya. Berikut merupakan grafik angka harapan hidup di Kabupaten Brebes tahun 2020 – 2024.



Gambar 2. 22 Usia Harapan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2025

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga untuk menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2021 yang mencapai 54,65 menjadi 63,27 di tahun 2024. Berikut merupakan gambaran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Brebes Tahun 2020-2025.

TABEL 2. 41 INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga	N/A	54,65	57,78	62,18	63,27

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes, 2025

2.2.2.4 Prevalensi Stunting

Prevalensi balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG). Setiap tahun dilakukan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi balita di Kabupaten Brebes mulai dari gizi lebih sampai gizi buruk sebagai salah satu upaya untuk memantau tumbuh kembang balita.

Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacingan, demam berdarah, *thypus* dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita. Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan dengan gizi

seimbang dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat menyebabkan stunting.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Seorang anak dikatakan stunting apabila panjang badan saat lahir dibawah empat puluh delapan centimeter untuk bayi laki-laki dan kurang dari empat puluh tujuh centimeter untuk bayi perempuan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik diantaranya praktek pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif di enam bulan pertama usia bayi, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.

TABEL 2. 42 PREVALENSI GIZI BURUK DAN STUNTING KABUPATEN BREBES 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prev. Balita Gizi Buruk	0,29	0,4	0,38	1,2	N/A
Stunting	N/A	26,3	29,1	21,6	23,1

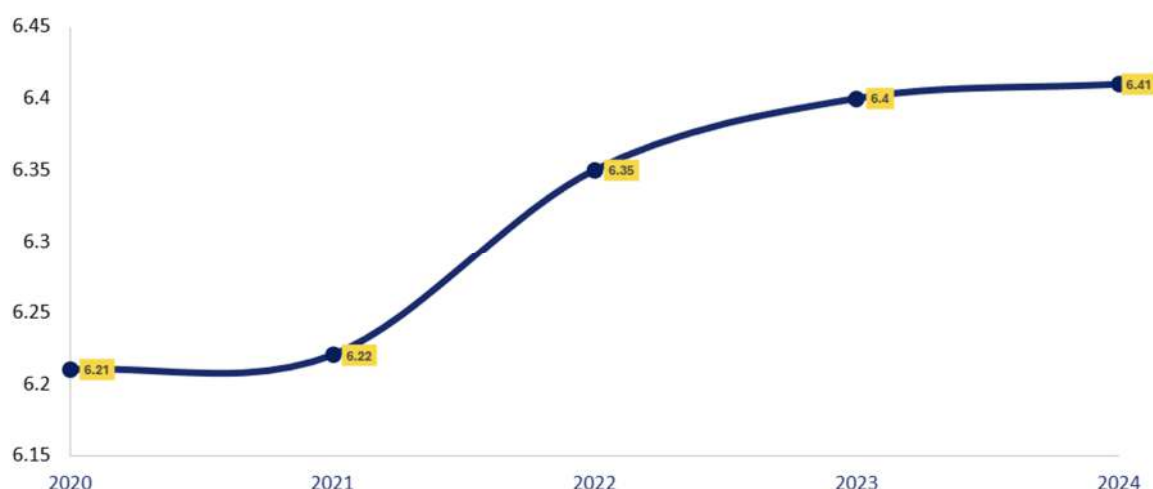
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2024

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam RPJMD Kabupaten Brebes, peningkatan akses dan mutu pendidikan menjadi prioritas untuk menciptakan kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh warga, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan indikator pendidikan seperti Rata-Rata Lama Sekolah, sebagai tolok ukur keberhasilan dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 6,21 menjadi 6,41 pada tahun 2024. [Gambar 2.23](#) merupakan harapan lama sekolah di Kabupaten Brebes tahun 2020 – 2024.

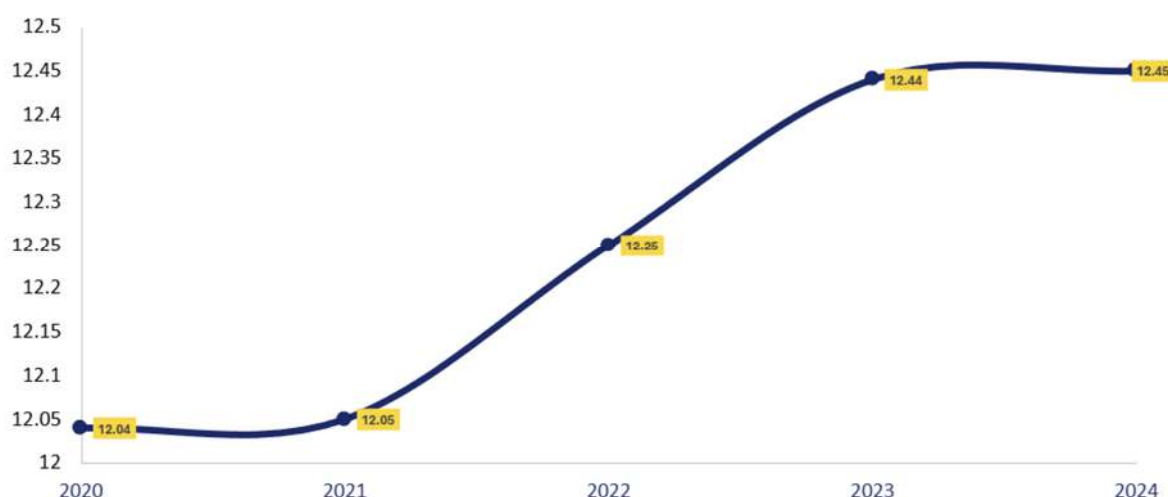


Gambar 2. 23 Rata-Rata Lama Sekolah (dalam tahun) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2025

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan lama sekolah di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 12,04 menjadi 12,44 pada tahun 2024. Berikut merupakan harapan lama sekolah di Kabupaten Brebes tahun 2020 – 2024.



Gambar 2. 24 Harapan Lama Sekolah (dalam tahun) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2025

2.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Salah satu indikator yang menunjukkan daya saing sumber daya manusia adalah kemampuan literasi dan numerasi. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kemampuan literasi merujuk pada kemampuan memahami dan menggunakan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sementara itu, kemampuan numerasi merupakan kemampuan dalam menggunakan prinsip matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.

Berdasarkan data Rapor Pendidikan Kabupaten Brebes 2024, kemampuan literasi pada SD umum berada pada kategori baik dengan nilai 70,89, sedangkan capaian kemampuan literasi SD Keagamaan berada kategori sedang dengan nilai 46,87. Di jenjang SMP, capaian kemampuan literasi pada SMP Umum berada pada kategori baik, dengan nilai sebesar 72,09, sedangkan pada SMP Keagamaan berada pada kategori sedang dengan nilai 58,74. Berkaitan dengan capaian kemampuan numerasi, pada jenjang SD umum berada pada kategori sedang dengan nilai 63,73. Sementara itu, pada jenjang SD Keagamaan berada pada kategori kurang dengan nilai 36,43. Di jenjang SMP umum, kemampuan numerasi berada pada kategori sedang dengan nilai 69,3, sedangkan pada jenjang SMP keagamaan memiliki nilai kemampuan literasi sebesar 57,43 dengan kategori baik.

TABEL 2. 43 HASIL ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022-2024

Indikator	SD			SMP		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk:						
a. Literasi Membaca	62,60	70,89	73,95	62,89	72,09	78,14
b. Numerasi	48,53	63,72	73,29	43,59	69,29	76,21

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, 2024

Berkaca dari kemampuan literasi dan numerasi siswa pada jenjang SD dan SMP di lingkungan sekolah umum dan keagamaan, perlu upaya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Hal ini penting, agar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat Kabupaten Brebes dapat mencerna informasi yang kompleks, sehingga materi yang di dapat pada jenjang yang lebih tinggi dapat diserap secara optimal. Kemampuan literasi dan numerasi yang baik juga akan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis. Harapannya, dengan kemampuan berpikir kritis dan logis akan mendorong munculnya inovasi-inovasi yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah.

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indikator yang lebih komprehensif untuk melihat capaian literasi masyarakat secara umum adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Dalam indikator ini, literasi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan untuk memahami teks/bacaan saja, melainkan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, serta menghitung menggunakan materi cetak, tertulis, dan visual yang berkaitan dengan berbagai konteks. Skor IPLM Kabupaten Brebes tahun 2023 adalah 62.51 dengan kategori sedang. Meskipun capaian IPLM berada dalam kategori sedang, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data IPLM yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional, per tahun 2023 masih terdapat kekurangan koleksi perpustakaan sebanyak 3.143.547 judul. Selain itu, secara rasio ketercukupan tenaga perpustakaan, 1 pustakawan harus melayani 1.892 penduduk. Dari aspek tingkat kunjungan masyarakat per hari, persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Kabupaten Brebes masih sangat rendah, baru 0,08%. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan kemampuan literasi dengan meningkatkan peran perpustakaan, baik perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, hingga perpustakaan desa dan taman baca masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengatasi kekurangan koleksi perpustakaan perlu dilakukan secara simultan dengan upaya meningkatkan minat baca masyarakat.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Upaya perlindungan sosial yang adaptif menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan dan tantangan sosial ekonomi yang terus berkembang. Dengan memperluas cakupan jaminan sosial, terutama kepada pekerja sektor informal dan rentan, Kabupaten Brebes berupaya menciptakan sistem perlindungan yang inklusif dan berkeadilan. Capaian kepesertaan jaminan sosial mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman dan kepastian hidup bagi warganya, khususnya dalam menghadapi risiko pasar tenaga kerja yang semakin kompleks.

2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*), misalnya: risiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Salah satu bentuk implementasi jaminan sosial tenaga kerja ini yaitu dengan kepemilikan bpjs ketenagakerjaan NON PBI.

TABEL 2. 44 PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JAMINAN KESEHATAN YANG DIMILIKI DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2017-2019

Jenis Jaminan Kesehatan	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	64,72	67,26	62,74	59,94	61,16
BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)	0,07	0,16	11,66	10,78	12,39
Jamkesda	0,43	0,08	0,06	0,03	-
Asuransi Swasta	1,00	0,69	0,09	0,02	-
Perusahaan/Kantor	34,08	31,95	1,30	1,17	0,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pemenuhan nilai-nilai keberagamaan dan kebudayaan yang maju menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Brebes terus berupaya menjaga toleransi antarumat beragama serta mendorong pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan sosial.

2.2.5.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Kabupaten Brebes memiliki keberagaman pada penduduknya, salah satunya yaitu pada aspek keagamaan. Mayoritas penduduk di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 sebesar 2.061.254 jiwa menganut agama islam, diikuti oleh protestan sebesar 3.417, dan katolik sebesar 1.392. Lebih lanjut, berikut merupakan jumlah penduduk di Kabupaten Brebes menurut agama yang dianut pada tahun 2021-2024.

TABEL 2. 45 JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2024

Tahun	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
2021	1.981.032	3.467	1.425	18	236	-	169
2022	2.014.001	3.439	1.416	18	225	-	156
2023	2.049.083	3.424	1.402	16	215	-	138
2024	2.061.254	3.417	1.392	15	212	49	87

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.5.2 Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah

Persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah menunjukkan besaran cagar budaya warisan tak benda yang dilestarikan di Kabupaten Brebes. Adapun dari tahun 2020 hingga 2024, angka ini terus mengalami penurunan. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah guna meningkatkan pelestarian cagar budaya dan sejarah. Lebih lanjut, berikut merupakan persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah di Kabupaten Brebes tahun 2020-2024.

TABEL 2. 46 PERSENTASE PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN SEJARAH DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah CB dan WBTB yang Dilestarikan	60	60	64	64	65
Jumlah CB dan WBTB yang Tercatat	65	70	73	187	187
Persentase	92,31	85,71	87,67	34,22	34,76

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Brebes, 2025

2.2.5.3 Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif

Persentase kelompok seni budaya aktif menunjukkan besaran kelompok seni budaya yang aktif terlibat dalam berbagai pertunjukan kesenian. Adapun angka ini cenderung fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Lebih lanjut, berikut merupakan persentase kelompok seni budaya yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir di Kabupaten Brebes tahun 2020-2024.

TABEL 2. 47 PERSENTASE KELOMPOK SENI BUDAYA YANG AKTIF TERLIBAT/MENGADAKAN PERTUNJUKAN KESENIAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Kesenian Yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam 1 Tahun Terakhir	30	75	0	52	62
Jumlah Total Keseluruhan Kelompok Kesenian yang Tercatat	624	699	855	970	1059
Persentase	4,81	10,73	0,00	5,36	5,85

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Brebes, 2025

2.2.5.4 Pengunjung Tempat Bersejarah

Pengunjung tempat bersejarah berarti individu atau seseorang yang melakukan kunjungan pada tempat bersejarah di Kabupaten Brebes. Adapun pada tahun 202, terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Brebes. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu dikarenakan adanya kelonggaran aturan PSBB pasca pandemic Covid-19. Berikut merupakan jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Brebes tahun 2020-2024.

TABEL 2. 48 JUMLAH PENGUNJUNG TEMPAT BERSEJARAH (ORANG) DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Pada Lokasi dan/Atau Bangunan Bersejarah yang Memiliki Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan	Jiwa	120	96	2.100	3.900	2.150

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Brebes, 2025

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menjelaskan kondisi mengenai peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender. Pada sub bab ini terdapat tujuh pembahasan yaitu indeks perlindungan anak, indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks ketimpangan gender, indeks pembangunan gender,

persentase perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial, serta indeks pembangunan pemuda. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pembahasan tersebut.

2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak (KHA). Indeks ini diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan dalam menangani berbagai permasalahan terkait perlindungan anak. Adapun selama lima tahun terakhir, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Brebes cenderung mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah adanya upaya peningkatan perlindungan khususnya terhadap hak-hak anak di Kabupaten Brebes, tetapi perlu peningkatan lebih lanjut. Berikut merupakan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

TABEL 2. 49 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak	N/A	58,48	60,21	60,84	59,76

Sumber : KemenPPPA, 2025

2.2.6.2 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks pembangunan keluarga merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas kehidupan keluarga di Indonesia. Tiga dimensi utama yang dijadikan tolak ukur yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Berdasarkan [Tabel 2.50](#), indeks pembangunan keluarga Kabupaten Brebes terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Hal ini menandakan adanya upaya yang terus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan khususnya pada tingkat keluarga.

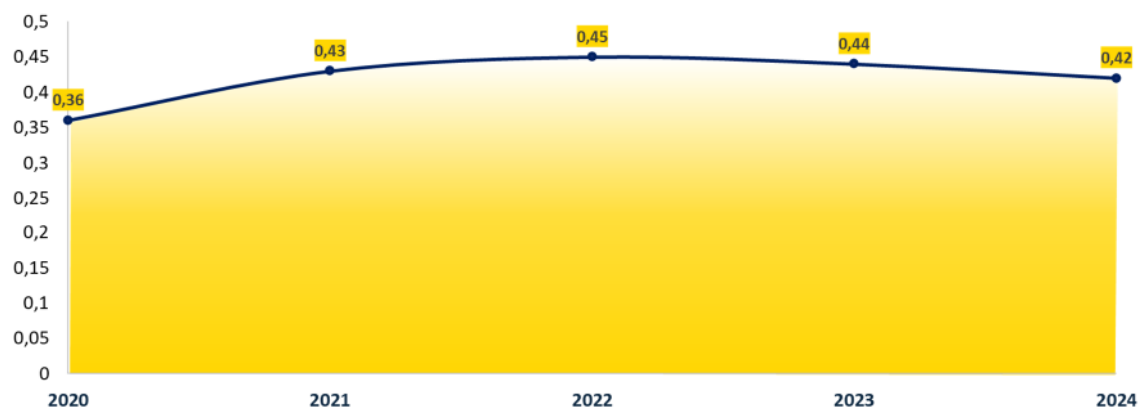
TABEL 2. 50 INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (Persen)	N/A	54,65	57,78	62,18	63,27

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes, 2025

2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, kesetaraan gender di Kabupaten Brebes juga dapat dilihat dari indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender merupakan indikator yang menunjukkan capaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan, reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi. Semakin kecil Indeks Ketimpangan Gender, menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender. Dalam kurun waktu 2020-2024, Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Brebes cenderung fluktuatif dengan tren menurun di tahun 2022-2024. Upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Brebes perlu dimulai dari lingkungan keluarga. Melalui distribusi peran yang setara antara peran ibu dan ayah dalam keluarga. Keluarga yang tentram dan mandiri menjadi modal dasar untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Brebes.



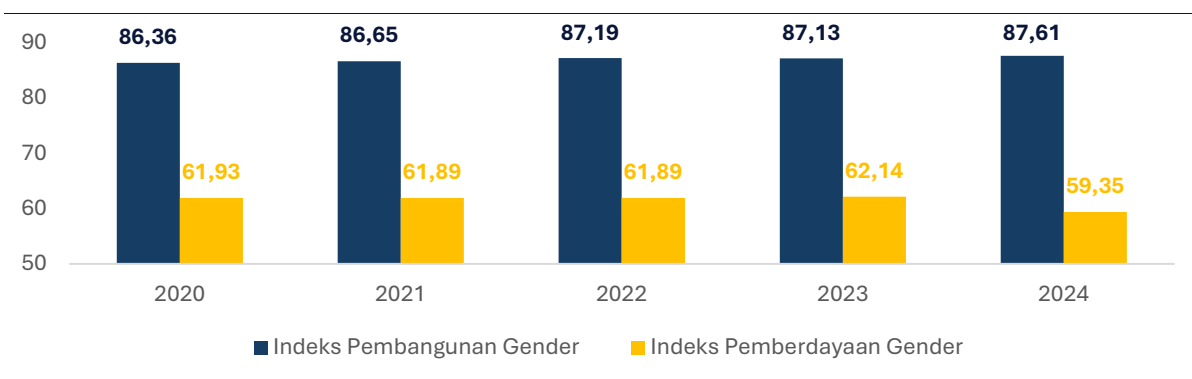
Gambar 2. 25 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Brebes 2020-2024

Sumber: DP3KB Kabupaten Brebes, 2024

2.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender

Kesejahteraan sosial budaya berkaitan erat dengan beberapa indikator yang merepresentasikan kualitas keluarga, gender, dan pembangunan kebudayaan masyarakat di Kabupaten Brebes. berkaitan erat dengan aspek kesetaraan gender. Untuk mengukur kesetaraan gender di Kabupaten Brebes secara makro dapat dilihat melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Capaian IPG Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat meskipun tidak signifikan. Di tahun 2020, IPG Kabupaten Brebes adalah senilai 86,36, sedangkan di tahun 2024, IPG Kabupaten Brebes senilai 87,61. Peningkatan nilai IPG dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa dari aspek kesetaraan gender, pembangunan semakin setara. Sejalan dengan capaian IPG, nilai IDG Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami peningkatan, walaupun begitu di tahun 2024 mengalami penurunan. Di tahun 2020, nilai IDG Kabupaten Brebes adalah 61,93, sedangkan di tahun 2023, nilai IDG Kabupaten Brebes adalah 62,14. Angka ini menurun di tahun 2024 menjadi 59,35. Jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir, nilai IDG mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin meningkat.



Gambar 2. 26 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2024

2.2.6.5 Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menurut dari bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

TABEL 2. 51 JUMLAH PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Kekerasan					
A.Jumlah KDRT	19	21	26	16	17
B.Kekerasan Terhadap Anak	47	61	42	57	63
C.Perkosaan	6	12	26	50	52
D.Pembuangan Bayi	0	0	N/A	0	0
E.Penelantaran	0	9	1	0	0
F.Kekerasan Fisik	13	14	15	11	6
G.Persetubuhan Anak	31	40	33	44	44
H.Penganiayaan	11	25	15	11	6

Sumber: DP3KB Kabupaten Brebes, 2025

2.2.6.6 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan PMKS mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dasar yang dilakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang dilakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus dilaksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa. Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PMKS di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial di luar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial di luar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial.

TABEL 2. 52 REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LUAR PANTI SOSIAL DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PMKS di luar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial (jiwa):					
A. Disabilitas Terlantar	150	150	390	203	706
B. Anak Terlantar	48	30	26	38	2058
C. Lanjut Usia Terlantar	60	60	74	451	196
D. Tuna Sosial Di luar Panti	60	60	61	102	89

Jumlah PMKS di luar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial (jiwa):

A. Disabilitas Terlantar	150	150	390	203	706
B. Anak Terlantar	48	30	26	38	2058
C. Lanjut Usia Terlantar	60	60	74	451	196
D. Tuna Sosial Diluar Panti	60	60	61	102	89

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Brebes, 2025

2.2.6.7 Indeks Pembangunan Pemuda

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Brebes menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, IPP berada di angka 86,36 dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 86,56 pada tahun 2022. Tren positif ini berlanjut dengan peningkatan menjadi 87,19 pada 2023, meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 87,13 pada 2024. Secara keseluruhan, selama empat tahun tersebut, peningkatan IPP sebesar 0,77 poin, mencerminkan stabilitas dalam pencapaian pembangunan pemuda di Brebes. Indeks ini mencerminkan berbagai aspek pembangunan pemuda seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi, serta gender dan kepemudaan. Meskipun kenaikannya tidak signifikan secara tahunan, angka IPP Kabupaten Brebes tergolong tinggi dan relatif mendekati angka maksimal 100. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi objektif pemuda di Brebes telah cukup baik, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial-ekonomi. Namun, penurunan tipis pada tahun 2024 mengindikasikan adanya potensi stagnasi atau tantangan baru yang perlu ditangani, seperti keterbatasan lapangan kerja atau partisipasi politik pemuda.

TABEL 2. 53 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN BREBES 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	86,36	86,56	87,19	87,13

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes, 2025

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

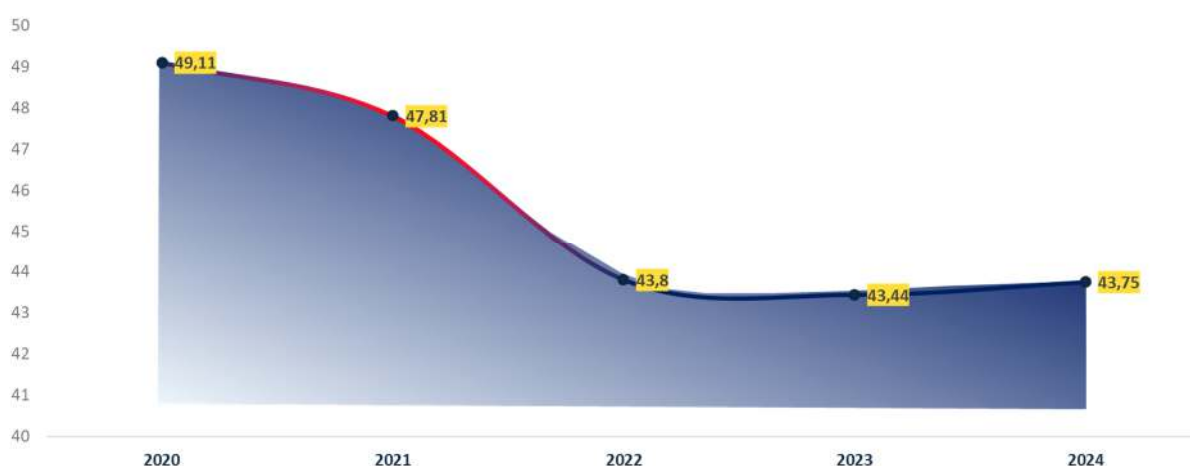
Daya saing daerah menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, baik melalui sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi, maupun tata kelola pemerintahan. Peningkatan daya saing ini menjadi salah satu fokus utama pembangunan di Kabupaten Brebes untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas lokal serta optimalisasi potensi daerah menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing tersebut.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat daya saing suatu daerah. Kualitas SDM yang unggul akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi pembangunan. Di Kabupaten Brebes, upaya peningkatan kualitas SDM terus didorong melalui berbagai program pendidikan, pelatihan vokasi, serta peningkatan derajat kesehatan penduduk. Selain itu, struktur demografi dengan proporsi usia produktif yang besar menjadi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal. Oleh karena itu, penguatan SDM menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kompetitif.

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Jumlah penduduk usia produktif yang dominan menyebabkan angka ketergantungan semakin menurun. Dalam kurun waktu 2019-2023, angka beban ketergantungan secara konsisten mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan terjadi di tahun 2022, dimana angka beban ketergantungan Kabupaten Brebes berada di angka 43,80. Di tahun 2023, angka beban ketergantungan Kabupaten Brebes menurun menjadi 43,44. Menurunnya rasio ketergantungan tersebut mengindikasikan bahwa beban yang ditanggung oleh usia produktif terhadap usia non produktif semakin menurun. Selain itu, meningkatnya jumlah usia produktif berpotensi menghasilkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.



Gambar 2. 27 Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) (dalam %) Kabupaten Brebes 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2024

Kabupaten Brebes berdasarkan tren rasio ketergantungan berada di fase *windows of opportunity* yang juga berpotensi terjadinya peluang bonus demografi yang ditandai dengan rasio ketergantungan yang terendah di tahun 2023 (43,44 persen). Potensi bonus demografi bisa mendorong percepatan dan peningkatan pembangunan daerah. Rasio ketergantungan terendah mengisyaratkan melimpahnya penduduk usia produktif yang perlu disediakan/terserap di lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia di kelompok usia produktif agar mempunyai keunggulan dan keahlian khusus agar mampu berkompetisi di pasar tenaga kerja. Diperkirakan rasio ketergantungan bergerak naik kembali dan peluang bonus demografi akan menutup. Sehingga kesempatan emas ini jangan disia-siakan oleh pemerintah kabupaten Brebes. Ancaman demografi 20 tahun ke depan Brebes akan menghadapi *Aging population*.

2.3.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan ditunjukkan melalui tingkatannya sebagai komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Apabila dilihat dari indikator umur harapan hidup pada tahun 2020-2024, jenis kelamin perempuan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Namun demikian, apabila dilihat dari indikator harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, jenis kelamin laki-laki menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini menandakan adanya perhatian lebih terhadap aspek kesehatan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Adapun aspek pendidikan dan keuangan, cenderung didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan.

TABEL 2. 54 UMUR HARAPAN HIDUP, HARAPAN LAMA SEKOLAH, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN PENGELUARAN PER KAPITA PEREMPUAN DI KABUPATEN BREBES 2020-2022

Indikator	2020		2021		2022	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Umur Harapan Hidup	67,40	71,23	67,64	71,44	67,83	71,65
Harapan Lama Sekolah	12,14	12,03	12,15	12,04	12,17	12,15
Rata-rata Lama Sekolah	6,77	5,45	6,78	5,55	6,88	5,83
Pengeluaran Perkapita (Rp. ribu)	14.725	6.943	14.812	7.038	15.330	7.238

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Kondisi kualitas sumber daya manusia perempuan ini juga dapat dilihat pada jumlah Angkatan kerja perempuan yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2020-2024. Adapun penurunan terjadi di tahun 2021 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehingga beberapa sektor perekonomian terdampak dengan kondisi tersebut. Meskipun begitu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan harus terus ditingkatkan guna menjamin adanya kesetaraan gender khususnya pada sektor perekonomian.

TABEL 2. 55 ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI KABUPATEN BREBES 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	910.555	879.258	912.524	912.524	1.145.474
Angkatan Kerja Perempuan	327.320	357.989	312.713	N/A	436.246

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Angkatan Kerja Perempuan	35,94	39,31	34,27	N/A	38,08

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah yang berdaya saing. Kabupaten Brebes menunjukkan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan dan akomodasi makan-minum, yang mencerminkan adanya perbaikan produktivitas ekonomi daerah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan inovasi mulai memberikan dampak nyata terhadap kinerja sektor ekonomi unggulan. Pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan RoA BUMD adalah turunan dari dokumen RPJPD.

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi Sektor Perindustrian adalah kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku yang memiliki peranan sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten. Penghitungan kontribusi sektor perindustrian dan nilai PDRB sektor industri pengolahan dilakukan oleh badan pusat statistik. **Tabel 2.56** merupakan gambaran rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Brebes tahun 2020-2024.

TABEL 2. 56 KONTRIBUSI SEKTOR PERINDUSTRIAN DI KABUPATEN BREBES 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan (%)	16,83	17,54	18,02	18,85	19,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2024

2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi Sektor Akomodasi, Makan, dan Minum terhadap PDRB ADHB adalah besarnya sumbangan dari kegiatan ekonomi seperti hotel, penginapan, restoran, dan warung makan terhadap total nilai tambah bruto suatu wilayah. Kontribusi ini menunjukkan peran sektor tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan biasanya dinyatakan dalam persentase dari total PDRB. **Tabel 2.57** merupakan tabel kontribusi sektor akomodasi makan dan minum di Kabupaten Brebes.

TABEL 2. 57 KONTRIBUSI SEKTOR AKOMODASI MAKAN DAN MINUM DI KABUPATEN BREBES 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,29	4,43	4,71	4,96	5,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2024

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah merilis angka pengangguran di Kabupaten Brebes menempati urutan tertinggi di Jateng yakni 8,35 persen dari jumlah penduduk. Jumlah pengangguran di Kabupaten Brebes didominasi laki-laki, hal ini disebabkan jumlah pengangguran dari kalangan perempuan relatif sedikit karena kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh pabrik. Terdapat 28 pabrik dengan serapan tenaga kerja sebanyak 30

ribu kalangan perempuan. Sedangkan pabrik yang mempekerjakan laki-laki hanya ada tiga dengan serapan 1.200 orang pekerja. Faktor lain yang memengaruhi tingginya tingkat pengangguran terbuka adalah *passion*, kompetisi, pendidikan, gender, mental penerima bantuan pemerintah, dan jurusan SMK yang tidak sesuai kebutuhan industri yang ada di Brebes.

TABEL 2. 58 TPT, TPAK, AK DI KABUPATEN BREBES 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,83	9,78	9,48	8,98	8,35
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,65	63,97	66,01	66,10	71,92
Angkatan Kerja	910.555	879.258	912.524	1.039.846	1.145.474

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2024

2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Indek Inovasi Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 adalah 73,72 dengan kategori “B”. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian IRB dari yang sebelumnya selalu berada dalam kategori CC berubah menjadi kategori B. Sama halnya Indeks Inovasi Daerah, juga mengalami peningkatan nilai dari yang sebelumnya kurang inovatif (tahun 2021) menjadi inovatif tahun 2022 dan 2023. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes tahun 2022 dan 2023 secara berturut yaitu 47,94 dan 51,60. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Brebes tahun 2023 adalah 2,83 dengan predikat baik. Capaian di tahun 2023 sedikit lebih baik dibanding tahun 2021 dan 2022. Tantangan di tahun-tahun mendatang adalah terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TABEL 2. 59 INDEKS INOVASI DAERAH DAN INDEKS SPBE

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	69 (satuan berbeda)	16,37	47,94	51,60	59,33
Indeks SPBE	2,81	2,34	2,4	2,83	2,84

Sumber: Dinkominfotik Kabupaten Brebes, 2025

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan berisi indikator-indikator yang menunjukkan diterapkannya ekonomi hijau (darat) dan ekonomi biru (laut). Ekonomi hijau merupakan konsep perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Sementara itu, ekonomi biru merupakan konsep yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk peningkatan perekonomian dengan tetap memperhatikan keselamatan ekosistem laut. Di Kabupaten Brebes telah berkembang industri yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, antara lain penggunaan pembangkit listrik tenaga surya, sistem penampungan dan pemanfaatan kembali air hujan, daur ulang air bekas, serta pemanfaatan sumber energi biomassa untuk mengurangi emisi karbon. Penerapan praktik industri hijau tersebut tidak hanya berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi hijau.

2.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau (Darat)

Indeks ekonomi hijau merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi suatu wilayah berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Indeks ini mencerminkan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks penyusunan RPJMD, penguatan ekonomi hijau menjadi pendekatan strategis untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

TABEL 2. 60 INDEKS EKONOMI HIJAU INDONESIA TAHUN 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Indeks Ekonomi Hijau (Darat) (%)	57,13	57,79	56,04	59,17

Sumber: Proxy Indeks Ekonomi Hijau Indonesia, 2021

Adapun gambaran indeks ekonomi hijau (darat) di Indonesia dapat dilihat dengan indeks ekonomi hijau Indonesia. Indeks ekonomi hijau (darat) Indonesia untuk periode tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan hasil proyeksi yang mencerminkan capaian Indonesia dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi di sektor darat menuju pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan. Nilai indeks mengalami fluktuasi, dari 57,13 pada tahun 2017, sedikit meningkat menjadi 57,79 pada tahun 2018, kemudian turun ke 56,04 pada tahun 2019, dan kembali naik secara signifikan menjadi 59,17 pada tahun 2020. Berdasarkan klasifikasi, nilai indeks tersebut berada dalam kategori "baik", yang menunjukkan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam transisi menuju ekonomi hijau, khususnya dalam pengelolaan sumber daya darat seperti hutan, lahan pertanian, dan energi. Namun demikian, tren fluktuatif ini tetap menjadi pengingat penting bagi perlunya konsistensi dan penguatan kebijakan lintas sektor dalam mendukung pembangunan hijau.

Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Indeks*) tidak diimperatiskan hingga ke level Kabupaten/Kota tetapi hanya sampai tingkat provinsi saja. Walaupun begitu perlu ada dukungan dari kabupaten/kota karena faktor komposit pembentuk indeks terdapat pada program dan kegiatan di kabupaten/kota. GEI didukung melalui 4 (empat) dimensi upaya yang selaras dengan provinsi, yaitu: 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau. Kabupaten Brebes mendukung ekonomi hijau dengan memasukkan keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam sebagai isu prioritas dalam RPJMD tahun 2025-2029. Program prioritas terkait dengan ekonomi hijau seperti: perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati).

2.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru (Laut)

Indeks ekonomi biru merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan memantau perkembangan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, dan transportasi laut. Tujuan dari pengukuran indeks ini yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Indonesia sendiri memiliki Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja ekonomi biru di berbagai daerah.

TABEL 2. 61 INDEKS EKONOMI BIRU INDONESIA TAHUN 2023

Uraian	2023
Indeks Ekonomi Biru (Laut) (%)	65,30

Sumber: Proxy Indeks Ekonomi Biru Provinsi Jawa Tengah, 2024

Komponen utama ekonomi biru terdapat pada tiga pilar yang saling berhubungan yaitu: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adapun gambaran indeks ekonomi biru (laut) di Kabupaten Brebes dapat dilihat dengan indeks ekonomi biru Provinsi Jawa Tengah. Nilai indeks ekonomi biru (laut) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 65,30 menggambarkan kinerja daerah dalam mengembangkan ekonomi kelautan berkelanjutan. Nilai ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam berbagai sektor kelautan seperti perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, serta transportasi dan logistik laut. Capaian ini juga sejalan dengan tingginya nilai pada pilar ekonomi dan lingkungan, meskipun masih perlu peningkatan di aspek sosial. Dengan memaksimalkan potensi tersebut, Jawa Tengah dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi biru di Indonesia yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut. Kabupaten Brebes mendukung penerapan ekonomi biru yang dapat dilihat dari adanya jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 4,918 dan 75,086 ton di tahun 2024. Selain itu, kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB di tahun 2024 yang mencapai angka 2,55%. Dukungan juga tercantum pada program Bupati Petani Lan Nelayan Sejahtera dengan program prioritas pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan.

2.3.3.3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer merupakan persentase energi baru terbarukan dari gabungan beberapa energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, serta energi baru dan energi terbarukan. Adapun dalam sub ini penggunaan data yang digunakan untuk mencerminkan energi baru terbarukan yaitu data mengenai jumlah infrastruktur energi baru terbarukan. Berikut merupakan data jumlah infrastruktur energi baru terbarukan Kabupaten Brebes Tahun 2019, 2022, dan 2023.

TABEL 2. 62 JUMLAH INFRASTRUKTUR ENERGI BARU TERBARUKAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2022 DAN 2023

Jenis Infrastruktur	2022		2023	
	Jumlah (unit)	Kapasitas	Jumlah (unit)	Kapasitas
Biogas (m ³)	32	399	20	233
PLTA (kW)	0	0	0	0
PLTM (kW)	0	0	0	0
PLTMH (kVa)	1	30	1	30
PLTS SHS (kWp)	0	0	0	0
PLTS <i>Ground Mounted</i> (kWp)	1	1,45	1	1,45
PLTS <i>Rooftop</i> (kWp)	4	3.187	9	4.381,78
PJUTS (watt)	625	193.500	625	193.500
Panas Bumi (MW)	0	0	0	0
PLTSa (MWp)	0	0	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah dan kapasitas biogas di Kabupaten Brebes mengalami penurunan di tahun 2023 sebanyak 12 unit dengan kapasitasnya yaitu 166 m³. Sementara itu, jumlah dan kapasitas PLTS *rooftop* justru mengalami kenaikan sebanyak 5 unit dengan kapasitasnya yaitu 1.194,78 kWp. Selanjutnya, jenis infrastruktur energi terbarukan lainnya cenderung mengalami stagnasi.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. Peningkatan indeks IP-TIK di Kabupaten Brebes mencerminkan kemajuan dalam adopsi teknologi informasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi mulai menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan daerah menuju tata kelola yang lebih modern dan responsif.

2.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Kabupaten Brebes direpresentasikan dengan pilar adopsi teknologi informasi dan komunikasi IDSD. Adapun pada tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Brebes menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2022, IP-TIK tercatat sebesar 3,08, kemudian mengalami kenaikan menjadi 4,30 pada 2023, dan sedikit meningkat lagi menjadi 4,40 pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 1,32 poin dalam dua tahun mencerminkan adanya kemajuan yang cukup cepat dalam pembangunan infrastruktur, akses, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Brebes. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mulai mengoptimalkan peran TIK dalam mendukung pembangunan daerah, baik dari sisi pelayanan publik, digitalisasi administrasi, maupun pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital. Namun demikian, nilai IP-TIK yang masih berada di bawah angka 5 mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kemajuan, kapasitas TIK di Kabupaten Brebes belum mencapai tingkat optimal. Apabila dibandingkan dengan rata-rata IP-TIK nasional yang pada 2022 menurut data BPS telah mencapai 5,03, maka Brebes masih memiliki gap dalam hal akses internet, kualitas jaringan, serta tingkat pemanfaatan teknologi di tingkat individu dan institusi.

TABEL 2. 63 INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	N/A	3,08	4,3	4,4

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Sub bab integrasi ekonomi domestik dan global membahas mengenai pembentukan modal tetap bruto serta ekspor impor barang dan jasa. Pembentukan modal tetap bruto merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, ekspor impor barang dan jasa merupakan aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah yang telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Berikut penjelasan lebih lanjut dari kedua pembahasan tersebut.

2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

TABEL 2. 64 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) KABUPATEN BREBES (MILIAR RUPIAH)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4.049,76	4.243,89	4.338,17	4.466,03	4.727,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) menurut pengeluaran untuk komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Brebes selama periode 2020 hingga 2024. PMTB mencerminkan investasi dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, infrastruktur, serta peralatan dan mesin. Nilai PMTB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar Rp 4.049,76 miliar pada tahun 2020, Rp 4.243,89 miliar pada tahun 2021, Rp 4.338,17 miliar pada tahun 2022, Rp 4.466,03 miliar pada tahun 2023, dan mencapai Rp 4.727,99 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan tren pertumbuhan investasi yang stabil di Kabupaten Brebes selama lima tahun terakhir. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan selisih sebesar Rp 261,96 miliar atau sekitar 5,86 persen. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas pembentukan modal tetap terus tumbuh, yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.

2.3.5.2 Ekspor Impor Barang dan Jasa

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari

kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang. Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

TABEL 2. 65 PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR ANTAR DAERAH KABUPATEN BREBES 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Ekspor dan Impor (ADHB)					
Ekspor (Miliar Rupiah)	28.121,21	32.450,46	36.061,34	35.594,62	39.175,34
Impor (Miliar Rupiah)	26.330,67	30.644,44	33.607,66	33.547,88	37.203,22
Net Ekspor (Miliar Rupiah)	1.790,53	1.806,03	2.453,68	2.046,74	1.972,12
Nilai Ekspor dan Impor (ADHK)					
Ekspor (Miliar Rupiah)	21.041,41	24.727,51	27.439,48	27.362,80	29.429,45
Impor (Miliar Rupiah)	18.965,80	22.190,80	24.443,08	24.537,54	26.533,73
Net Ekspor (Miliar Rupiah)	2.075,61	2.536,71	2.996,41	2.825,27	2.895,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

Berdasarkan ADHB, nilai ekspor meningkat dari Rp 28.121,21 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 39.175,34 miliar pada tahun 2024, sedangkan nilai impor juga meningkat dari Rp 26.330,67 miliar menjadi Rp 37.203,22 miliar pada periode yang sama. Meskipun nilai impor turut meningkat, nilai ekspor tetap lebih tinggi, sehingga menghasilkan net ekspor positif setiap tahun, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 2.453,68 miliar. Sementara itu, berdasarkan ADHK yang mencerminkan volume riil perdagangan antar daerah, nilai ekspor tumbuh dari Rp 21.041,41 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 29.429,45 miliar pada tahun 2024. Di sisi lain, impor meningkat dari Rp 18.965,80 miliar menjadi Rp 26.533,73 miliar. Net ekspor ADHK menunjukkan tren positif dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 2.996,41 miliar. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes secara konsisten mengalami surplus perdagangan antar daerah selama lima tahun terakhir, yang menandakan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah dari sektor perdagangan antarwilayah. Adapun angka tahun 2023 dan 2024 masih bersifat sementara dan sangat sementara.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Integrasi antara kedua wilayah ini dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. Selain itu, kolaborasi antara perkotaan dan perdesaan mampu menciptakan peluang usaha baru serta memperkuat jaringan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

2.3.6.1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan indikator yang menggabungkan beberapa perhitungan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Semakin tinggi indeks infrastruktur menandakan

semakin tinggi pula kualitas pelayanan infrastruktur di daerah tersebut. **Tabel 2.62** merupakan indeks infrastruktur Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

TABEL 2. 66 INDEKS INFRASTRUKTUR KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	N/A	N/A	78,00	79,94	80,98

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, 2025

2.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar minimum untuk kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan penghuninya. Rumah yang layak huni berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Rumah yang layak huni menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi keluarga, yang berdampak positif pada kesejahteraan fisik dan mental. Rumah yang layak huni merupakan dasar bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

TABEL 2. 67 RUMAH LAYAK HUNI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Layak Huni (unit)	418,021	441,198	44,545	449,753	450,374
Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	42,820	23,177	19,350	21,068	20,767

Sumber: Dinperwaskim Kabupaten Brebes, 2025

Rumah tidak layak huni (RTLH) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi standar minimum untuk kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan penghuninya. Pemerintah dan berbagai organisasi berupaya untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni melalui berbagai program. Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), Program peningkatan kualitas perumahan dan infrastruktur dan Pemberdayaan masyarakat.

2.3.6.3 Persentase Desa Mandiri

Menurut pasal 74 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri juga mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun berikut merupakan klasifikasi desa mandiri berdasarkan skor Indeks Desa.

TABEL 2. 68 KLASIFIKASI DESA BERDASARKAN IDM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Mandiri	N/A	N/A	N/A	N/A	12,33

Sumber: Dinpermades Kabupaten Brebes, 2025

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, pemerintah daerah dapat lebih mudah merencanakan dan mengelola program pembangunan secara efektif.

Selain itu, stabilitas ini juga memberikan kepercayaan kepada investor dan pelaku usaha untuk terus berkontribusi dalam perekonomian daerah. Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro harus didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang tepat serta penguatan sektor-sektor strategis di tingkat lokal. Pencapaian data Indikator Utama Pembangunan berkaitan dengan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB adalah tuntutan dari dokumen RPJPD. Permasalahan pada stabilitas ekonomi adalah adanya kesenjangan ekonomi dan akses keuangan. Hal ini dikarenakan rendahnya total kredit dan dana pihak ketiga terhadap PDRB.

2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan proporsi pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Adapun selama lima tahun terakhir, rasio pajak daerah terhadap PDRB cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rasio pajak daerah terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 3,67%. Namun demikian, mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024 dengan besaran 23,36%. Lebih lanjut, **Tabel 2.65** merupakan rasio pajak daerah terhadap Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

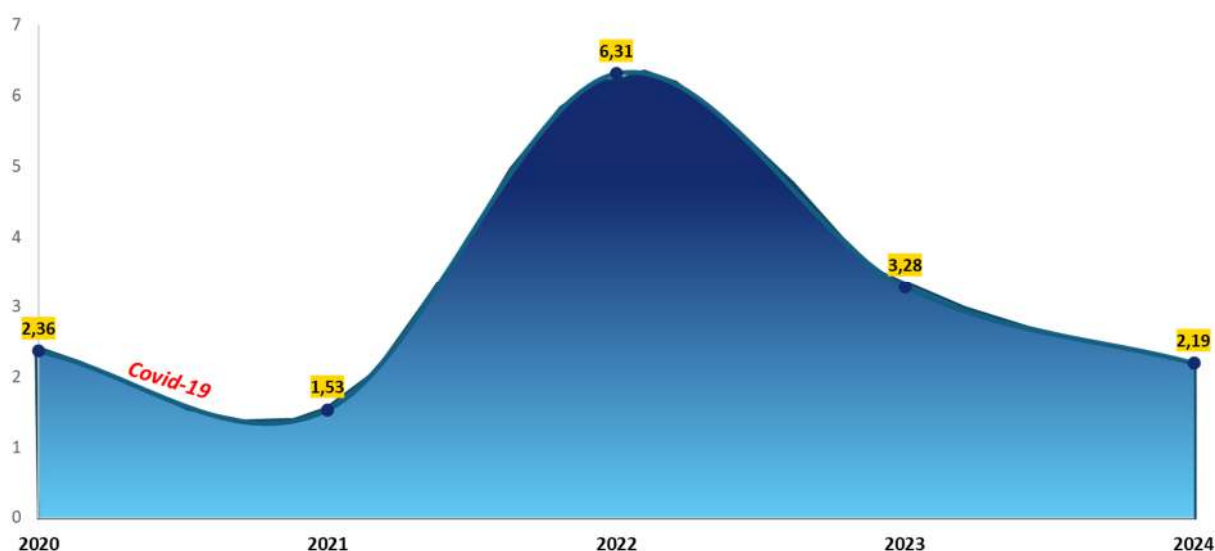
TABEL 2. 69 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,231	0,254	0,280	0,313	0,300

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Brebes, 2025

2.3.7.2 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Untuk menggambarkan inflasi di Kabupaten Brebes menggunakan data *sister city* Kota Tegal karena mulai tahun 2020 BPS tidak lagi mengeluarkan data inflasi per kabupaten. Berikut merupakan grafik inflasi Kota Tegal.



Gambar 2. 28 Inflasi Kota Tegal 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

Beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menekan kenaikan inflasi yaitu dengan melaksanakan Gelar Operasi Pasar. Dalam kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar operasi pasar (OP) berupa beras, minyak goreng dan gula pasir di beberapa pasar. Selain itu untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah, guna mengendalikan inflasi pemerintah Kabupaten Brebes bekerjasama dengan Forkompimda dan Bulog dalam penjualan paket sembako murah.

2.3.7.3 Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah merupakan indeks bagian dari pengukuran stabilitas makro yang dilakukan dengan mengukur pendalaman/intermediasi Sektor Keuangan serta Inklusi Keuangan. Pada bagian pendalaman/intermediasi sektor keuangan terdiri dari aset perbankan/PDB (%), aset dana pensiun (%), aset asuransi/PDB (%), kapitalisasi pasar modal/PDB (%), serta total kredit/PDB (%). Lebih lanjut, berikut merupakan Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

TABEL 2. 70 INDEKS AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Akses Keuangan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	4,14

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Untuk mengoptimalkan efektivitas pelayanan publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029, fokus utama pada aspek pelayanan umum menjadi krusial. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan bagi masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan yang mendesak seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Langkah-langkah strategis akan diimplementasikan untuk memperbaiki responsivitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan layanan publik. Ini juga mencakup pengembangan sistem integrasi data yang lebih canggih guna memastikan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan terinformasi secara akurat.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif merupakan komponen esensial dalam penguatan pelayanan umum pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029. Penguatan dimensi ini mencakup upaya peningkatan Indeks Reformasi Hukum melalui penataan regulasi yang responsif, simplifikasi peraturan, serta peningkatan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, akselerasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diarahkan untuk mewujudkan birokrasi digital yang efisien, transparan, dan akuntabel. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Integritas menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan tata kelola yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas dalam setiap proses pelayanan.

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan fokus pada identifikasi, pemetaan, deregulasi, deregulasi, serta penguatan sistem regulasi nasional. Hal ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

TABEL 2. 71 INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2024

Uraian	2020	2021	2022	Tahun 2023		Tahun 2024	
				Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
Kabupaten Brebes	N/A	N/A	N/A	55,23	CC (Cukup)	98,76	AA (Istimewa)

Sumber: Kementerian Hukum, 2025

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indeks yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif,

transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan [Tabel 2.72](#), diketahui besaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

TABEL 2. 72 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,81	2,34	2,4	2,83	2,84

Sumber: Dinkominfotik Kabupaten Brebes, 2025

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Pada tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 7,79% (0,3). Hal ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan pelayanan publik di lingkup pemerintahan Kabupaten Brebes. Meskipun demikian, upaya peningkatan aspek pelayanan publik perlu dilanjutkan guna mencapai pelayanan publik yang inklusif dan aman bagi semua kalangan khususnya perempuan.

TABEL 2. 73 INDEKS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	4,6	4,9

Sumber: Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025

2.4.1.4 Indeks Integritas

Indeks integritas didapatkan dari survei penilaian integritas (SPI) yang merupakan perangkat diagnostik untuk mengukur tingkat integritas dan memetakan risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Indeks integritas Kabupaten Brebes cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga 2024. Penurunan terjadi di tahun 2023 sebesar 0,27 dibandingkan tahun 2022. Lebih lanjut, [Tabel 2.74](#) menunjukkan besaran Indeks Integritas Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

TABEL 2. 74 INDEKS INTEGRITAS TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas (%)	N/A	71,72	72,27	72	72,45

Sumber: Komisi Pemberantas Korupsi, 2025

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial dalam kerangka pelayanan umum diarahkan untuk memperkuat tatanan sosial yang menjamin hak, keamanan, dan partisipasi warga secara inklusif. Peningkatan persentase penegakan Perda serta capaian aksi HAM menjadi instrumen strategis dalam menjamin supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, penguatan Indeks Demokrasi Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun demokrasi yang partisipatif dan berorientasi pada keadilan sosial. Adapun

peningkatan Indeks Rasa Aman serta Indeks Ketentraman dan Ketertiban menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim sosial yang stabil, kondusif, dan mendukung efektivitas pembangunan daerah secara menyeluruh.

2.4.2.1 Cakupan Penegakan Perda

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Lebih lanjut, **Tabel 2.75** menunjukkan cakupan Perda dan Perbup di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

TABEL 2. 75 CAKUPAN PENEGAKAN PERDA DAN PERBUP DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pelanggaran Perda/Perbup yang Ditangani	5.869	3.867	129	72	96
Pelanggaran Perda/Perbup yang Dilaporkan/Dipantau	5.869	3.867	129	72	96

Sumber: Satpol PP Kabupaten Brebes, 2025

2.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase capaian aksi HAM merupakan persentase pencapaian suatu daerah terhadap aksi yang dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM). Adapun pada tahun 2021, Kabupaten Brebes mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dengan nilai 79,5. Penilaian ini didasarkan pada beberapa parameter seperti hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak.

2.4.2.3 Persentase Pemilih Dalam Pemilu

Persentase pemilih dalam pemilu dapat menggambarkan tingkat pencapaian demokrasi di suatu daerah. Pemilu yang dimaksud disini yaitu pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan desa, serta pemilihan legislatif. Lebih lanjut, berikut merupakan persentase pemilih dalam pemilu di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

TABEL 2. 76 PERSENTASE PEMILIH DALAM PEMILU KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg) (%)	N/A	N/A	N/A	94	66,4

Sumber: Satpol PP Kabupaten Brebes, 2025

2.4.2.4 Cakupan Patroli

Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut

kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, seperti tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, serta tempat keramaian/hiburan. Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi. Penyesuaian-penyesuaian pagu anggaran sebagai dampak dari kebijakan perubahan kemampuan anggaran dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah juga berimbas pada kegiatan patroli dalam rangka pengamanan wilayah.

TABEL 2. 77 CAKUPAN PATROLI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Banyaknya Patroli (1 tahun)	3.600	3.775	10.800	10.800	130
Jumlah kecamatan	17	17	17	17	17
Cakupan Patroli (%)	9,86	9,25	63,5	63,5	7,6

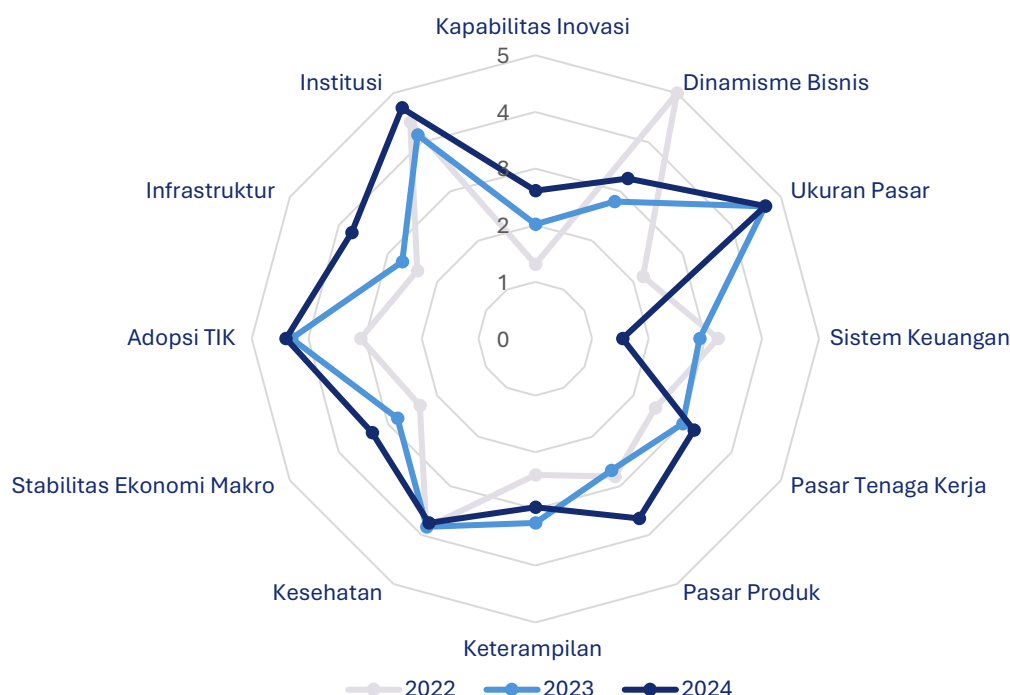
Sumber: Satpol PP Kabupaten Brebes, 2025

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Aspek Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dalam konteks pelayanan umum di Kabupaten Brebes ditunjukkan untuk memperkuat posisi strategis daerah dalam menghadapi dinamika regional, nasional, dan global. Fokus utama pada peningkatan Indeks Daya Saing Daerah merefleksikan upaya sistematis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, inovasi, dan produktivitas ekonomi lokal. Penguatan daya saing ini tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik dan kelembagaan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, efisiensi birokrasi, dan kestabilan keamanan daerah. Dengan demikian, Kabupaten Brebes diharapkan mampu bersaing secara kompetitif di tingkat provinsi maupun nasional, serta berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.

2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat daya saing suatu daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Indeks ini merefleksikan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, serta kemampuan bersaing baik di tingkat domestik maupun internasional, demi mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Indeks Daya Saing Daerah mengukur sejauh mana suatu daerah telah memanfaatkan seluruh potensi yang ada, termasuk ekosistem, inovasi, dan hasil IPTEK, untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan. Indeks Daya Saing Daerah menjadi pembanding tingkat pembangunan daerah dalam skala makro dan aspek-aspek lainnya. **Gambar 2.29** menunjukkan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022–2024 yang bersumber dari hasil telaah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2025.



Gambar 2.29 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes 2022–2024.

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa tiga pilar dalam IDSD Kabupaten Brebes yang paling dominan yaitu Ukuran Pasar, Institusi, dan Adopsi TIK yang meningkat seiring berjalannya waktu. Indeks Ukuran Pasar mengalami peningkatan sebesar 114% dari yang semula 2,19 pada 2022 menjadi 4,68 pada 2024. Indeks Institusi meningkat sebanyak 6% dari yang semula 4,41 pada 2022 menjadi 4,7 pada 2024. Terakhir, Indeks Infrastruktur meningkat sebanyak 55,8% dari yang semula 2,4 pada 2022 menjadi 3,74 pada 2024. Sementara itu, terdapat pula indeks yang mengalami penurunan, yakni Dinamisme Bisnis yang turun dari angka 5 pada 2022 menjadi 3,26 pada 2024 dan Sistem Keuangan yang pada awalnya 3,22 pada 2022 menjadi 1,54 pada 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan ukuran pasar, dukungan institusi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam perekonomian Kabupaten Brebes. Namun, dalam waktu yang bersamaan, bisnis menjadi semakin tidak dinamis dan sistem keuangan memburuk. **Tabel 2.78** menunjukkan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022–2024 secara lebih komprehensif.

TABEL 2. 78 INDEKS DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BREBES 2022-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Kapabilitas Inovasi	2,04	N/A	1,31	2,02	2,61
Dinamisme Bisnis	3,16	N/A	5	2,79	3,26
Ukuran Pasar	3,66	N/A	2,19	4,67	4,68
Sistem Keuangan	3,00	N/A	3,22	2,9	1,54
Pasar Tenaga Kerja	2,33	N/A	2,44	3	3,23
Pasar Produk	3,25	N/A	2,81	2,68	3,66
Keterampilan	1,83	N/A	2,4	3,25	2,97
Kesehatan	3,50	N/A	3,85	3,83	3,75
Stabilitas Ekonomi Makro	2,88	N/A	2,35	2,81	3,32
Adopsi TIK	3,00	N/A	3,08	4,3	4,4

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Infrastruktur	3,63	N/A	2,4	2,71	3,74
Institusi	3,63	N/A	4,41	4,15	4,7

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Aspek Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah merupakan elemen penting dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan umum di Kabupaten Brebes. Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Kunci menjadi instrumen evaluatif yang strategis untuk menilai sejauh mana capaian pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029. Penilaian ini mencakup seluruh urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan sosial. Dengan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan berbasis pada kinerja nyata.

2.4.4.1 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berperan sebagai tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara objektif dan terukur. IKK disusun untuk mencerminkan pencapaian keluaran dan dampak strategis dari kebijakan daerah, serta menjadi dasar evaluasi kinerja lintas sektor yang bersifat makro. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029, IKK difokuskan pada sektor-sektor prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal. Keberadaan IKK memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan kebijakan secara adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta meningkatkan akuntabilitas publik terhadap capaian pembangunan yang telah direncanakan.

(a) Pendidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi ini menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi merupakan proses yang disengaja dan dirancang untuk membangun suasana belajar yang memungkinkan peserta didik berkembang secara menyeluruh, baik dari aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, moral, maupun keterampilan. Berikut merupakan gambaran kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Brebes.

TABEL 2. 79 INDIKATOR URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Literasi (%)	N/A	N/A	62,745	71,49	76,045
Angka Numerasi (%)	N/A	N/A	46,06	66,505	74,75
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,04	12,05	12,25	12,36	12,48
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,11	6,16	6,35	6,41	6,42

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (%)	N/A	N/A	55,25	62,72	62,72
Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) (%)	N/A	N/A	15,01	51,2	51,2
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100	100	100	100	100
Rasio Siswa per Guru SD/MI (Angka)	18	21	17	17	19
Rasio Siswa per Guru SMP/MTs (Angka)	14	15	16	14	16
Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	N/A	N/A	N/A	N/A	8.807
Jumlah PKMB yang Aktif dan Terakreditasi	N/A	N/A	N/A	28	35
Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

(b) Kesehatan

Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sempurna yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan. Definisi ini menekankan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu yang memungkinkan mereka untuk hidup produktif dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Dengan demikian, kesehatan tidak hanya berarti tidak sakit, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk berfungsi secara baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemampuan mengelola emosi, berpikir secara rasional, serta menjalin hubungan sosial yang harmonis.

Kabupaten Brebes memiliki beberapa kasus penyakit seperti TBC, HIV/AIDS, Kusta, Malaria, DBD, dan IMS. Pada tahun 2024 angka penemuan kasus TBS per 100.00 penduduk di Kabupaten Brebes mencapai 88,55 kasus dengan angka keberhasilan pengobatan TBC 79%. Jumlah kasus baru AIDS pada tahun 2024 sebesar 177 kasus, terdapat penemuan kasus baru kusta per 100.00 penduduk dengan 12,83 kasus. Jumlah angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk adalah 13,5 kasus dan jumlah kasus baru IMS sebanyak 6 kasus. Angka tersebut jika dibandingkan dengan angka-angka pada tahun sebelumnya cenderung memiliki tren naik. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya edukasi terkait dengan penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS, serta pola hidup masyarakat yang tidak sehat.

Perlu adanya penanganan yang serius terkait dengan penyakit menular dan tidak menular ini. Salah satunya adalah penyediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Brebes. Kondisi pelayanan fasilitas di Kabupaten Brebes memiliki 13 rumah sakit, 48 sarana kesehatan poliklinik, 38 puskesmas, 61 puskesmas pembantu, dan 125 apotek. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Brebes didukung dengan 2.700 tenaga medis dan 2.050 tenaga non medis, selain itu ketersediaan tempat tidur pada Kabupaten Brebes berjumlah 1.941 tempat tidur.

TABEL 2. 80 INDIKATOR URUSAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (Tahun)	69,31	69,54	69,74	70,00	N/A
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	9,5	9,45	9,42	12,14	9,87
Angka Kematian Ibu (AKI) (Angka)	62	105	50	54	54
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	10,17
Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	100	100	100	100	99
Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	15,15	19,53	20,88	24,91	38
Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (%)	94,23	94,23	96,23	100	100
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (%)	N/A	88,85	90,12	N/A	N/A
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	63,68
Labkesda Melaksanakan Promosi Kesehatan (%)	N/A	N/A	N/A	1	1
Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Terduga Tuberculosis (TBC) (%)	N/A	N/A	N/A	90,93	61,15
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	82,9
Treatment Coverage (%)	57,91	65,76	125,14	160,65	84,69
Pelayanan Kesehatan Orang dengan <i>Suspect</i> Malaria (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Cakupan Kegiatan Surveilans Kesehatan (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Nakes yang Memiliki Izin Praktik yang Masih Berlaku (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Jumlah Desa yang Melaksanakan Minimal 3 UKBM Aktif (Desa)	N/A	N/A	N/A	73	112
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	N/A	N/A	N/A	N/A	1

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

(c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, pekerjaan umum mencakup fungsi pengairan, bina marga (jalan dan jembatan), dan cipta karya (penataan ruang kota, bangunan gedung, perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan pemukiman). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara

kelangsungan hidupnya. Tata ruang terdiri dari struktur ruang (susunan pusat permukiman dan jaringan prasarana) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya).

TABEL 2. 81 INDIKATOR URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (KLI)	N/A	N/A	78,00	79,94	80,98
Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)	N/A	N/A	N/A	4	2,96
Persentase Luas Layanan (%)	N/A	N/A	N/A	4	6,96
Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota (%)	95,44	95,74	100	100	100
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (%)	19,67	14,15	13,24	18,37	20,77
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	83,49
Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	95	94,29	90,68	92,66	100
Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik (%)	N/A	N/A	N/A	67	69
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	N/A	N/A	N/A	78,71	95,91
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	83	87	91	93	94
Tingkat Kemantapan Jalan (%)	77,96	63,83	59,07	61,15	62,71
Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%)	N/A	N/A	100	68,75	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

(d) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang mengatur penyediaan rumah yang layak huni beserta lingkungan hidupnya. Perumahan merupakan kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal yang sehat, aman, dan teratur. Sementara itu, kawasan permukiman adalah lingkungan tempat tinggal yang lebih luas, terdiri atas satu atau lebih perumahan beserta fasilitas pendukungnya, yang berfungsi sebagai tempat hunian dan aktivitas pendukung dalam lingkungan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Berikut merupakan gambaran kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Brebes.

TABEL 2. 82 INDIKATOR URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Sehat Layak Huni (%)	N/A	N/A	N/A	27,32	44,39

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	N/A	44	35	27	80
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	80
Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	N/A	N/A	N/A	21,28	28,72
Tersedianya PSU Perumahan (Angka)	N/A	N/A	N/A	110	100
Terbitnya Izin Pembangunan Pengembangan Perumahan (%)	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

(e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ketentraman dan ketertiban umum adalah kondisi aman, tertib, dan teratur yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah menjalankan aktivitas tanpa gangguan. Perlindungan masyarakat adalah upaya menjaga keamanan dan keselamatan warga dari ancaman atau gangguan. Keduanya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang damai dan nyaman bagi masyarakat.

TABEL 2. 83 INDIKATOR URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Angka)	9,86	9,25	63,5	63,5	7,6
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)	100	100	100	100	100
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	9,86	9,25	63,5	63,5	7,6
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100
Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100	100	100	100	100
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	13
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	70
Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	13
Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

(f) Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sosial atau kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan kata lain, sosial dalam konteks undang-undang ini mencakup aspek pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh agar tercipta kehidupan yang layak dan bermartabat. Berikut merupakan gambaran kinerja urusan sosial di Kabupaten Brebes.

TABEL 2. 84 INDIKATOR URUSAN SOSIAL TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran pada Dinas Sosial (%)	N/A	N/A	N/A	84,78	88,24
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	100	100	100	100	100
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100	100	100	100	100
Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100	100	100
Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100	100	100
Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI/Calon Tenaga Kerja yang Dilindungi Indonesia CTKI yang (%)	N/A	N/A	N/A	28	25
Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	100	100
Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	100	100
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	100	100
Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	100	100

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	100	100
Cakupan Penanganan Penyandang Disabilitas, Eks Penyandang Penyakit Sosial, PGOT, Anak Terlantar, (Termasuk Anak Cacat dan Anak Jalanan) Anak Nakal, Lanjut Usia Terlantar dan Anak Yatim Di Luar Panti (%)	N/A	N/A	N/A	99	100
Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Peranan Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	100	100
Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	N/A	N/A	100	100	100
Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	100	100	100	100
Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	98,36
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana dan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	100	100
Persentase Kampung Siaga Bencana yang Terbentuk (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

(g) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja sendiri didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Berikut merupakan gambaran kinerja ketenagakerjaan di Kabupaten Brebes.

TABEL 2. 85 INDIKATOR URUSAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	N/A	63.97	66.01	66.1	71.92
Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%)	N/A	N/A	N/A	25	30
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)	N/A	N/A	N/A	76,35	70
Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah (Orang)	5.711	3.395	15.959	14.667	24.451

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI / Calon Tenaga Kerja yang Dilindungi Indonesia CTKI yang Terdata (%)	N/A	N/A	N/A	99	100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

(h) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menurut undang-undang, pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri, serta berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan secara setara dan bermartabat. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu ditingkatkan guna menjamin inklusivitas bagi semua kalangan.

TABEL 2. 86 INDIKATOR URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,36	86,65	87,19	87,13	87,61
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,358	0,426	0,453	0,435	0,422
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	58,48	60,21	60,84	59,76
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	25	0,31	4	30,55	62,26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Angka)	327.320	357.989	312.713	N/A	436.246
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	N/A	N/A	100	N/A	100
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Angka)	1	1	1	1	1
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	N/A	58,30	55,96	56,67	N/A
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	47	61	42	57	62

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

(i) Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Hal ini

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berikut merupakan tabel Indikator Urusan Pangan Tahun 2020–2024.

TABEL 2. 87 INDIKATOR URUSAN PANGAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	75,73	76,91	76,74	77,21	78,79
Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	86,7	84,93	95,5	95,7	90,42
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	29
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	80

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

(j) Pertanahan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pertanahan adalah pengaturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan tanah sebagai sumber daya alam, meliputi hak atas tanah, penggunaan, penguasaan, pemanfaatan, serta pengelolaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pertanahan mencakup pengaturan kepemilikan, pendaftaran, pemanfaatan, dan perlindungan tanah agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Berikut merupakan gambaran kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Brebes.

TABEL 2. 88 INDIKATOR URUSAN PERTANAHAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Brebes (%)	N/A	N/A	N/A	91	90,06
Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	N/A	N/A	100	N/A	100
Persentase Tanah Yang Bersertifikat (%)	N/A	N/A	N/A	118	100
Persentase Jumlah Kasus Yang Tertangani (%)	N/A	N/A	N/A	100	50
Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Hak Guna Usaha (Bidang)	950	1.526	1.621	2.612	N/A
Jumlah Hak Pakai (Bidang)	543	1.200	1.121	1.611	N/A
Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Ha)	N/A	N/A	N/A	N/A	13,71
Jumlah Hak Milik Atas Tanah (Bidang)	40.595	56.577	26.874	64.530	N/A
Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	95
Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau yang Tertata (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	80

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Urusan pertanahan di Kabupaten Brebes mendukung Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria dengan adanya pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). GTRA Kabupaten Brebes melakukan penataan baik aset dan akses, seperti contoh pada Desa Kradenan, Kecamatan Kersana yang menjadi *pilot project* Kampung Reforma Agraria (KRA). KRA adalah kampung yang ditetapkan sesuai dengan kriteria penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan aksesnya.

(k) Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa lingkungan hidup mencakup seluruh unsur fisik, biologis, sosial, dan budaya yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain untuk menjaga keberlanjutan kehidupan. Berikut merupakan gambaran kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Brebes.

TABEL 2. 89 INDIKATOR URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	60,78	62	60,52	64,64	70,46
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	61,16
Indeks Kualitas Udara	82,62	81,07	82,24	86	90,71
Persentase RTH yang Terkelola (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Jumlah Penyimpanan Limbah B3 yang Sesuai Rincian Teknis (Angka)	N/A	N/A	N/A	10	11
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	25
Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	50
Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	N/A	N/A	N/A	22,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

(l) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan data penduduk serta mendukung pelayanan publik dan

pembangunan. Berikut merupakan tabel Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020–2024.

TABEL 2. 90 INDIKATOR URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	N/A	N/A	N/A	N/A	85,12
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	8,48
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	N/A	N/A	100	100	100
Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	36,37	37,89	100	100	100
Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	N/A	N/A	100	100	100
Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	N/A	N/A	100	100	100
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

(m) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola sumber daya dan pembangunan desa secara partisipatif. Hal ini bertujuan agar dapat terciptanya kesejahteraan dan kemajuan desa yang berkelanjutan. Berikut merupakan tabel Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020–2024.

TABEL 2. 91 INDIKATOR URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	12,33
Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN (%)	N/A	N/A	N/A	50	50
Persentase Desa yang Menyelenggarakan Program Penataan Desa (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang di Fasilitas (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

(n) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pengetahuan,

keterampilan, sikap, dan kesadaran serta pemanfaatan sumber daya lokal secara partisipatif. Sehingga masyarakat dapat mengelola dan mengatur urusan desa secara mandiri sesuai kebutuhan dan prioritasnya. Berikut merupakan tabel Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2024.

TABEL 2. 92 INDIKATOR URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,57	54,65	57,78	62,18	63,27
Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (Angka)	2,22	2,22	2,17	N/A	2,08
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>) (Angka)	34,96	N/A	36,9	N/A	17,6
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive/mCPR</i>) (Angka)	17,89	19,75	23,05	N/A	67,9
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)	16,13	15,8	14,87	N/A	6,7
Persentase keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok: BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS (%)	N/A	N/A	N/A	43,58	98,36

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

(o)Perhubungan

Perhubungan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan serta pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan yang dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien. Berikut merupakan tabel Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2020–2024.

TABEL 2. 93 INDIKATOR URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Angkutan Umum Melayani Wilayah Tersedia Jaringan Trayek (%)	N/A	N/A	N/A	0,96	N/A
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor yang baik (%)	N/A	N/A	N/A	97,52	88,71
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	24,52	25	35,58	14,2	15,36
Banyaknya Prasarana Perhubungan Laut (Angka)	7	8	N/A	N/A	N/A
Persentase Pengendalian KKOP (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

(p) Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang mencakup pengelolaan, penyampaian, dan pemrosesan informasi elektronik. Hal ini memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa, mengembangkan perekonomian nasional, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Berikut merupakan tabel Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2024.

TABEL 2. 94 INDIKATOR URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengelolaan <i>Service e-government</i> di Lingkup Pemerintah Kabupaten Brebes Terlaksana (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey) (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	93,33
Indeks SPBE	N/A	2,34	2,4	2,83	2,84

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2025

(q) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Usaha Kecil dan Menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan kriteria aset dan omzet tertentu.

TABEL 2. 95 INDIKATOR URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase UMKM aktif (%)	13,88	21,47	22,7	23,11	23,62
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	-3,4	51,1	-10,19	0,36	-12,82
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	57	36	59	65	100
Persentase Koperasi Aktif (%)	N/A	6,48	8,58	12,2	N/A
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	32,7	52,1	58,1	74,2	78,5
Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	3,5	3,4	3,3	3,2	6,25
Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	3,13
Pertumbuhan Wirausaha (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	3,98
Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	6,6
Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	19,6	31,7	36,6	37,7	38,2

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, 2025

(r) Penanaman Modal

Penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Berikut merupakan tabel Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2020–2024.

TABEL 2. 96 INDIKATOR URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Investasi (%)	65,43	4,25	37,67	3,72	25,63
Realisasi Total terhadap Target Investasi (Rp Milyar)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Perizinan Diterbitkan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2025

(s) Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pemuda sendiri didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun dan sedang dalam periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan olahraga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mencakup ruang lingkup, pembinaan, pengembangan, pengelolaan, serta penyelenggaraan kejuaraan dan peran serta masyarakat dalam bidang olahraga.

TABEL 2. 97 INDIKATOR URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	86,36	86,56	87,19	87,13	87,2
Persentase Atlet Muda Terbina pada 35 Cabang Olahraga (%)	N/A	N/A	N/A	50,54	84,99
Rasio Wirausaha Pemuda (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Atlet Berprestasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0,68
Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (%)	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

(t) Statistik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik adalah data yang diperoleh melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, sekaligus sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa statistik mencakup data atau informasi berupa angka, sistem penyelenggaraan statistik, serta ilmu yang mempelajari metode pengumpulan dan pengolahan data untuk mendukung pembangunan nasional. Berikut merupakan tabel Indikator Urusan Statistik Tahun 2020–2024.

TABEL 2. 98 INDIKATOR URUSAN STATISTIK TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	N/A	N/A	N/A	1,83	2,58

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2025

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dalam rangka perbaikan tata kelola data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan. Sesuai hasil Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS, Nilai Indeks SDI Kabupaten Brebes adalah sebesar **64,28**, dengan predikat Cukup. Sedangkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023 adalah **1,82**, dengan predikat Cukup, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi **2,58** dengan predikat Cukup.

(u) Persandian

Persandian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Persandian adalah suatu rangkaian karakter, huruf, angka, kata, gambar, suara, dan/atau tanda lainnya yang menggantikan informasi asal dengan cara mengubah, mengacak, atau menyembunyikan informasi tersebut guna menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta keaslian data dan informasi, terutama dalam rangka keamanan negara dan perlindungan data publik serta pribadi. Dalam konteks tata kelola sistem informasi pemerintahan, fungsi persandian menjadi instrumen strategis dalam menjaga keamanan komunikasi dan transaksi digital antarlembaga, mengingat semakin tingginya potensi ancaman siber yang dapat mengganggu integritas dan kerahasiaan data strategis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas persandian, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur teknologi, menjadi keharusan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan yang berdaulat, aman, dan andal.

TABEL 2. 99 INDIKATOR URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE (terkait keamanan)	N/A	2,34	2,4	2,83	2,84
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	50	32,43	35	37,21	38,64

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2025

(v) Kebudayaan

Kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Undang-undang ini mengatur bahwa kebudayaan nasional Indonesia merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Selain itu, hal tersebut menekankan upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan untuk memperkuat ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia.

TABEL 2. 100 INDIKATOR URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan Kembali (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025

(w) Perpustakaan

Perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah institusi yang secara profesional mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dengan sistem yang baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekosistem literasi nasional, perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat akses pengetahuan dan informasi yang inklusif serta berkelanjutan. Pengelolaan perpustakaan yang terstandar dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi elemen penting dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat, pengembangan budaya baca, serta penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, penguatan fungsi perpustakaan tidak hanya terbatas pada penyediaan koleksi, tetapi juga mencakup pengembangan layanan digital, peningkatan kompetensi pustakawan, serta sinergi antar instansi untuk memperluas jangkauan dan relevansi layanan.

TABEL 2. 101 INDIKATOR URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	1,74	2,8	13,72	13,13	14,46
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Angka)	47,19	48,19	52,64	57,68	66,8
Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	N/A	N/A	N/A	7	2
Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di bidang Perpustakaan (%)	N/A	N/A	N/A	1,98	11,26

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2025

(x) Kearsipan

Kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, dan sarana, serta sumber daya lainnya. Arsip sendiri didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam

konteks tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, kearsipan menjadi instrumen fundamental dalam menjamin tersedianya informasi autentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Oleh karena itu, penguatan sistem kearsipan nasional perlu diarahkan pada integrasi pengelolaan arsip dinamis dan statis berbasis digital, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kearsipan, serta penerapan standar nasional kearsipan yang adaptif terhadap dinamika zaman.

TABEL 2. 102 INDIKATOR URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	N/A	Memuaskan	Sangat Baik	Sangat Memuaskan	N/A
Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	53	58	62,33	76,77	77,05
Persentase Lembaga Kearsipan Daerah yang Memiliki Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	10	33,33	33,33	71,36	73,41
Jumlah Arsip yang Terlayani melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) (Berkas)	N/A	N/A	N/A	30	100
Persentase SDM Kearsipan yang Bersertifikat (%)	50,00	14,05	55,32	60,00	95,35

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2025

(y) Kelautan dan Perikanan

Kelautan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah segala hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam kerangka pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, serta pelestarian ekosistem laut. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah laut dan sumber daya ikan memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup perencanaan spasial kelautan, penguatan kelembagaan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memastikan keseimbangan pemanfaatan ekonomi.

TABEL 2. 103 INDIKATOR URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	115,35	118,03	118,65	114,58	112,51
Nilai Tukar Pembudi daya Perikanan (NTPi) (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	2,59	2,50	2,51	2,56	2,55
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4.141	3.879	4.289	4.837	4.918
Jumlah Produksi Perikanan Budi daya (ton)	71.664	75.278	79.940	74.934	75.086
Luasan Hutan Konservasi (Hektar)	53,56	53,56	53,56	53,56	N/A
Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	23,36	22,7	23,74	27,48	N/A

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Realisasi urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren kenaikan. Walaupun begitu, terdapat juga indikator yang mengalami tren penurunan yaitu indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN mengalami penurunan pada tahun 2022-2024, realisasi tahun 2022 berada pada angka 118,65% dan pada tahun 2024 berada pada angka 112,51%. Hal ini dikarenakan abrasi dan fluktuasi suhu pada pesisir Kabupaten Brebes.

(z) Pariwisata

Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor pariwisata memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi kreatif, penciptaan lapangan kerja, serta sarana promosi budaya dan kekayaan alam Indonesia di tingkat global. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menuntut sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai, pelayanan prima, serta pelestarian lingkungan dan kearifan lokal sebagai daya tarik utama destinasi wisata. Oleh karena itu, kebijakan kepariwisataan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, diversifikasi produk wisata, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kelembagaan dan regulasi yang mendorong terciptanya ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

TABEL 2. 104 INDIKATOR URUSAN PARIWISATA TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	4,29	4,43	4,71	4,96	5,14
Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) (DTW)	N/A	N/A	N/A	N/A	146,02
Jumlah dokumen pemasaran pariwisata dan kawasan strategis (Dokumen)	N/A	N/A	N/A	9	9
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan manfaat dan perlindungan HAKI (Unit)	N/A	N/A	N/A	5	10
Jumlah pelaku ekonomi kreatif di tiap sub sektor (Orang)	N/A	N/A	N/A	50	60

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

(aa) Pertanian

Pertanian menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Berikut merupakan indikator kinerja sektor pertanian.

TABEL 2. 105 INDIKATOR URUSAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani (NTP)	N/A	N/A	N/A	111,11	114,22
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	29,06	-1,52	6,82	16,00	10,82
Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	7,25	-23,49	7,35	124,56	10,71
Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	-0.135	N/A	N/A	N/A	65,64
Data persentase luas lahan sawah (%)	N/A	N/A	36,18	36,18	39,54
Penurunan Prevalensi Penyakit (Tahun)	N/A	N/A	N/A	1	1
Jumlah Perizinan untuk Kegiatan Peternakan langka	N/A	N/A	N/A	3	5
Prosentase lahan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana pertanian kabupaten/kota (%)	N/A	N/A	N/A	50	55
Luasan lahan yang tertangani akibat bencana pertanian (Ha)	N/A	N/A	N/A	220	222
Penambahan Jumlah Kelompok yang berizin (Kelompok)	N/A	N/A	N/A	20	20
Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	24	37	43	47	41
Poktan Yang Berdaya (%)	N/A	N/A	N/A	82	84

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat capaian kinerja urusan pertanian Kabupaten Brebes terlihat memiliki tren naik. Walaupun begitu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama pada produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang tampak menurun di tahun 2024. Hal ini dikarenakan perubahan iklim, serangan hama hingga manajemen pertanian. Terdapat juga alih fungsi lahan pertanian yang membuat produksi menurun. Dinas Pertanian Kabupaten Brebes telah memiliki *desk* kesepakatan dengan Provinsi Jawa Tengah mengenai rehabilitasi jaringan irigasi tersier, hal ini bertujuan untuk menjaga produksi dan produktivitas tanaman pertanian. Kabupaten Brebes sendiri telah melakukan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi rawa di wilayah D.I.R. Induk Pasar Minggu dan D.I.R Hiri.

(bb) Kehutanan

Kehutanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sektor kehutanan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekologis, mendukung ketahanan iklim, serta memberikan kontribusi ekonomi melalui hasil hutan kayu maupun

non-kayu. Pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan menuntut integrasi antara aspek konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan yang bertanggung jawab, disertai dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai subjek utama dalam perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Oleh karena itu, kebijakan kehutanan harus diarahkan pada penguatan tata kelola hutan berbasis partisipasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi, serta perlindungan terhadap kawasan hutan dari konversi lahan yang tidak terkendali, guna menjamin fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan secara berkelanjutan.

Urusan kehutanan pada Kabupaten Brebes sampai saat ini telah diterbitkan 3 SK Perhutanan Sosial dengan luas 529 ha yang melibatkan 611 anggota. Kabupaten Brebes berinisiasi untuk mengajukan pembentukan IAD (*Integrated Area Development*) ke Kementerian Perhutanan. Hal ini dimaksudkan agar Kabupaten Brebes dapat memberikan intervensi penguatan kelompok perhutanan sosial, sehingga dapat tercapai kelestarian sumberdaya hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TABEL 2. 106 INDIKATOR URUSAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tutupan Lahan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	24,76
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	N/A	36,51	36,01	34,28	33,28
Indeks Keanekaragaman Hayati	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

(cc) Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi adalah kemampuan atau daya yang dapat digunakan untuk melakukan kerja atau menghasilkan tenaga, sedangkan sumber daya mineral merujuk pada bahan galian yang terdapat di bumi yang dapat dimanfaatkan secara nyata, diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam kerangka pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada kemandirian energi, kedua sektor ini memegang peranan strategis sebagai penopang utama aktivitas ekonomi, penyediaan energi nasional, serta sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, pengelolaan energi dan sumber daya mineral harus dilaksanakan secara holistik melalui kebijakan yang mendorong efisiensi, diversifikasi energi baru dan terbarukan, peningkatan nilai tambah komoditas tambang, serta penegakan prinsip *good mining practices* dan pengawasan yang ketat terhadap dampak lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan energi dan mineral yang berkeadilan, ramah lingkungan, serta berkelanjutan.

TABEL 2. 107 INDIKATOR URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rasio Elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100
Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Sungai Lintas Negara (Ha)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Ha)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Rekomendasi IPR terhadap Usulan Wilayah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porsi EBT dalam Bauran Energi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, 2025

(dd) Perdagangan

Perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam konteks perekonomian nasional dan global, sektor perdagangan memegang peranan sentral sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta penciptaan nilai tambah yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, sistem perdagangan harus dikembangkan secara efisien, transparan, dan berdaya saing, melalui penguatan regulasi, fasilitasi perdagangan, penyediaan infrastruktur distribusi yang andal, serta perlindungan terhadap pelaku usaha domestik, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lebih lanjut, integrasi perdagangan digital dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi keniscayaan dalam memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk nasional, serta menjamin perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

TABEL 2. 108 INDIKATOR URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	15,87	16,08	16,08	16,07	16,18
Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Pasar Kondisi Baik (%)	34,62	34,62	34,62	46,15	46,50
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	N/A	N/A	N/A	48	48
Net Ekspor PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	1.790,53	1.806,03	2.453,68	2.046,74	1.972,12
Jumlah Laporan bulanan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Terealisasi	N/A	N/A	N/A	12	12

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Promosi Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, 2025

(ee) Perindustrian

Perindustrian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, sektor perindustrian berfungsi sebagai penggerak utama transformasi struktural, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing produk nasional, serta penguatan basis ekonomi domestik yang mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan industri perlu diarahkan pada pengembangan industri hulu ke hilir, penerapan teknologi inovatif, peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, serta fasilitasi terhadap industri kecil dan menengah agar mampu berperan aktif dalam rantai pasok nasional maupun global. Penguatan struktur industri nasional juga harus dibarengi dengan keberpihakan pada prinsip keberlanjutan lingkungan dan pemerataan ekonomi, guna mewujudkan sistem perindustrian yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap dinamika pasar serta tantangan global.

TABEL 2. 109 INDIKATOR URUSAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	16,83	17,54	17,54	18,83	19,31
Realisasi Investasi (Juta Rupiah)	1.255.697,17	1.309.006,83	1.802.095,7	1.869.217,17	2.348.212,75
Persentase jumlah Industri yang terverifikasi di SIINAS (%)	n/a	n/a	n/a	25,09	13,15
Persentase jumlah informasi industri yang terdata (%)	n/a	n/a	n/a	2,5	2,6

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

(ff) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam struktur birokrasi daerah, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi administratif yang memastikan sinergi antar perangkat daerah serta kelancaran pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah. Fungsi ini mencakup pengelolaan sumber daya aparatur, fasilitasi perumusan kebijakan teknis, serta pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah

secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme Sekretariat Daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

TABEL 2. 110 INDIKATOR URUSAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	58,54	73,72	60,69
Indeks Kematangan Organisasi (Angka)	N/A	N/A	N/A	57,914	64,278
Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Ketepatan Pelaksanaan Paket Pekerjaan (%)	N/A	N/A	N/A	95	95
Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (%)	N/A	N/A	N/A	80	100
Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

(gg) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi yang mendukung tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab secara teknis kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, fasilitasi rapat, serta penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRD berperan penting dalam memastikan kelancaran proses legislasi, pengawasan, dan aspirasi masyarakat melalui dukungan administratif yang profesional dan efisien. Fungsi ini menuntut pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, sistem administrasi yang terintegrasi, serta koordinasi yang sinergis dengan lembaga eksekutif dan perangkat daerah lainnya. Dengan demikian, Sekretariat DPRD menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan konstituen.

TABEL 2. 111 INDIKATOR URUSAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Angka)	N/A	N/A	80,99	87,8	81,72
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	100	100
Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100	100	100
Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD, 2025

(hh) Perencanaan

Perencanaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, yang bertujuan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya. Proses perencanaan ini menjadi pondasi strategis dalam mengarahkan pembangunan nasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, serta lingkungan. Pengintegrasian perencanaan antar tingkat pemerintahan dan sektor menjadi kunci dalam menciptakan sinergi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara holistik dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perencanaan, penggunaan data dan teknologi informasi, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi unsur penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

TABEL 2. 112 INDIKATOR URUSAN PERENCANAAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Survey kepuasan terhadap pelayanan Perkantoran Baperlitbangda (Indeks)	N/A	N/A	N/A	97,69	83,83
Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pembangunan Manusia (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, 2025

(ii) Keuangan

Kuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003). Dalam konteks pengelolaan negara, keuangan negara memegang peranan sentral sebagai instrumen utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan akuntansi publik yang akurat, dengan mekanisme pengawasan yang ketat dari berbagai lembaga terkait. Penerapan tata kelola keuangan negara yang baik tidak hanya menjamin optimalisasi penggunaan sumber daya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

TABEL 2. 113 INDIKATOR URUSAN KEUANGAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (%)	N/A	N/A	N/A	54,65	51,65
Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	4,14
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	53,5
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	4,75
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	N/A	N/A	N/A	76,11	N/A
Persentase Penurunan SILPA (%)	9,24	42,70	-1,62	1,11	1,74
Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Angka)	N/A	N/A	3,9	3,650	N/A
Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	-13,86	3,51	10,34	-1,53	-0,39
Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	13,05	16,4	14,03	15,61	12,71
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (%)	N/A	N/A	N/A	6	6
Persentase Satuan Kerja yang Menggunakan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

(jj) Kepegawaian

Kepegawaian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan pegawai negeri yang diangkat, digaji, dan dipekerjakan dalam jabatan negeri oleh pejabat yang berwenang, dengan tujuan membentuk aparatur negara yang setia, berdaya guna, dan berintegritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam kerangka reformasi birokrasi, pengelolaan kepegawaian harus mengedepankan prinsip profesionalisme, meritokrasi, serta transparansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, sistem kepegawaian harus dirancang secara komprehensif meliputi rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pemberian penghargaan dan sanksi yang adil. Penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan nasional yang dinamis.

TABEL 2. 114 INDIKATOR URUSAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	99	71	93	95	90
Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai Dengan Formasi (%)	99	71	93	95	90
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	81,82	83,6	87,92	91,35	91,45

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya (%)	83,10	86,36	88,00	91,70	92,92
Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	97,10	92,48	98,98	99,21	98,52

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

(kk) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 adalah proses belajar mengajar yang bertujuan meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan jabatannya, yang merupakan bagian integral dari pembinaan pegawai dan tidak dapat dipisahkan antara fungsi pendidikan dan pelatihan. Proses ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan sikap profesional aparatur agar mampu menjalankan tugas secara efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus berbasis pada kebutuhan organisasi dan individu, mengintegrasikan pendekatan pembelajaran yang inovatif serta evaluasi yang berkesinambungan guna menjamin peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja dan tuntutan perkembangan zaman.

TABEL 2. 115 INDIKATOR URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	N/A	N/A	21,30	30,94	30,72
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	82,67	83,75	87,39	90,51	91,73
Persentase Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	80,00	84,00	86,67	90,00	92,31
Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	80,00	84,00	86,67	90,58	91,43
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	78,57	83,33	86,96	90,32	91,76

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

(II) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan sistematis yang meliputi penelitian untuk memperoleh pengetahuan baru dan pengembangan hasil penelitian menjadi produk atau teknologi yang dapat dimanfaatkan secara luas. Kegiatan ini menjadi pilar utama dalam mendorong inovasi, peningkatan daya saing nasional, serta percepatan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sistem penelitian dan pengembangan harus didukung oleh kebijakan yang kuat, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta kerjasama lintas sektor dan institusi. Penguatan ekosistem inovasi ini memungkinkan terwujudnya sinergi antara penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan teknologi untuk menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan nasional.

TABEL 2. 116 INDIKATOR URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (%)	N/A	100	N/A	N/A	100
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (%)	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Persentase Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis, Supervisi Terkait Riset, dan Inovasi Daerah (%)	N/A	N/A	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, 2025

(mm) Pengawasan

Pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pengawasan bertujuan menjamin agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan lembaga negara, pengawasan menjadi instrumen vital untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan tugas, sekaligus mencegah penyimpangan dan korupsi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan harus dirancang secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak terkait, menggunakan metode yang objektif dan berkelanjutan, serta didukung oleh regulasi yang jelas. Penguatan fungsi pengawasan ini tidak hanya memperkuat integritas lembaga, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

TABEL 2. 117 INDIKATOR URUSAN PENGAWASAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	N/A	2,797	3,085	3,031	3,017
Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Angka)	N/A	N/A	N/A	54,65	51,65
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

(nn) Pemerintah Umum

Pemerintahan umum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota dengan bantuan instansi vertikal dan dibiayai dari APBN, meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan bangsa, kerukunan antar suku dan agama, penanganan konflik sosial, serta koordinasi antarinstansi pemerintahan di daerah. Pemerintahan umum mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan bangsa, kerukunan antar suku dan agama, penanganan konflik sosial, serta koordinasi antarinstansi pemerintahan di daerah. Fungsi ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, memperkuat integrasi

nasional, serta menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan umum memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai serta mekanisme koordinasi yang efektif, agar kebijakan dapat terlaksana secara harmonis dan berkelanjutan demi terwujudnya ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

TABEL 2. 118 INDIKATOR URUSAN PEMERINTAH UMUM TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	75,45	74,11	76,65	75,95	78,37
Indeks Harmoni Indonesia	100	100	100	100	100
Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Masyarakat Yang Paham Tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	100	100	100	100	100
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100
Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025, BPS Kabupaten Brebes 2024

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Perekonomian Kabupaten Brebes dalam lima tahun terakhir mengalami berbagai dinamika yang signifikan, dengan berbagai sektor ekonomi yang berkontribusi dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Analisis mendalam terhadap sektor-sektor utama memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kekuatan dan tantangan ekonomi di wilayah ini. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dari gambaran keuangan daerah di Kabupaten Brebes.

a) Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -6,23% akibat dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk Kabupaten Brebes. Pembatasan sosial dan penurunan permintaan menyebabkan banyak sektor, terutama perdagangan dan industri pengolahan, mengalami penurunan aktivitas yang signifikan. Sektor pariwisata dan jasa juga sangat terpengaruh oleh pembatasan perjalanan dan penutupan tempat wisata. Namun, perekonomian Kabupaten Brebes menunjukkan kemampuan untuk pulih dengan cepat. Pada tahun 2021, ekonomi mulai bangkit dengan pertumbuhan sebesar 2,33%. Ini sebagian besar didorong oleh pemulihan di sektor pertanian, yang merupakan sektor dominan di daerah ini, serta kebijakan stimulus ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung usaha kecil dan menengah.



Gambar 2. 30 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2019-2024

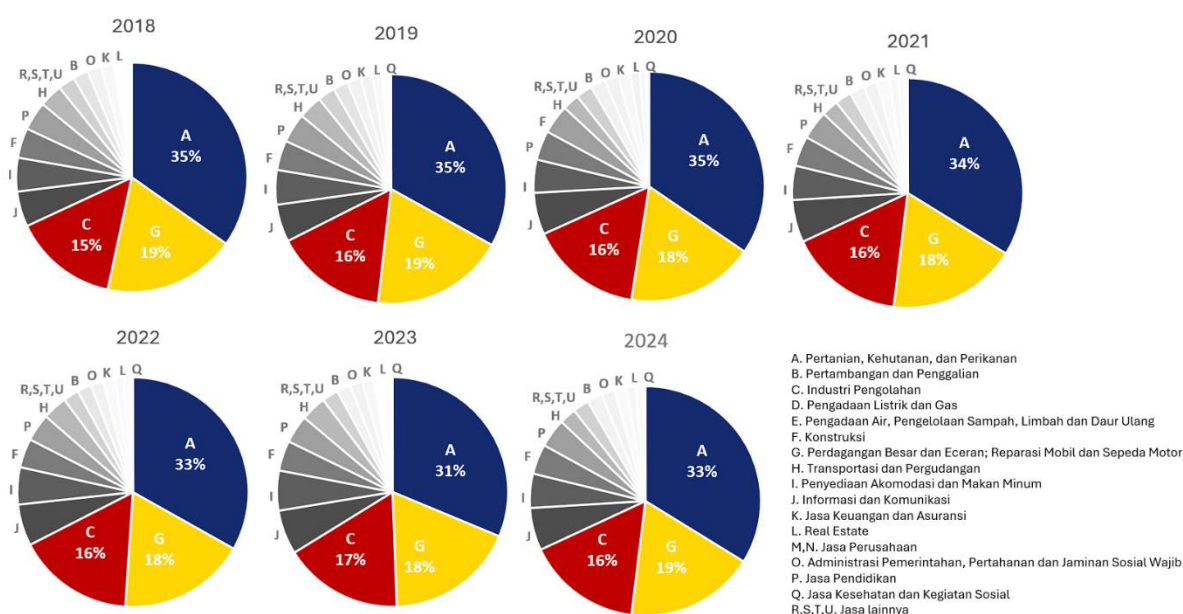
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2025

Berdasarkan **Gambar 2.30**, tahun 2022 memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, mencapai 5,61%. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan aktivitas di berbagai sektor, termasuk industri pengolahan dan perdagangan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan mendukung sektor swasta juga memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes kembali stabil di angka 3,74%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berhasil kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih normal. Peningkatan ini didukung oleh diversifikasi ekonomi

yang lebih baik, dengan kontribusi yang signifikan dari sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga mulai menunjukkan hasil dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang mendukung pertumbuhan sektor industri dan jasa.

b) Kontribusi Sektor Terhadap Perekonomian Kabupaten Brebes

Kontribusi sektor pada perkembangan perekonomian Kabupaten Brebes memiliki peran masing-masing. Terutama pada 3 sektor dengan kontribusi tertinggi yaitu Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, dan Sektor Industri Pengolahan. Selain itu, terdapat sektor yang memiliki potensi besar dalam menumbuhkan perekonomian Kabupaten Brebes walaupun kontribusinya tidak sebesar sektor pertanian dan industri yaitu Sektor Pariwisata dan Jasa.



Gambar 2. 31 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB ADHK

Sumber: Hasil Analisis, Badan Pusat Statistik, 2025

- Sektor pertanian** memainkan peran penting dalam perekonomian Kabupaten Brebes, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Selama lima tahun terakhir, sektor ini tidak hanya mendominasi perekonomian lokal tetapi juga menjadi tulang punggung yang memastikan stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan, termasuk pandemi COVID-19. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Brebes konsisten tinggi, mencerminkan ketergantungan ekonomi daerah ini pada aktivitas agraris. Komoditas utama seperti bawang merah, padi, dan jagung menjadi andalan utama. Bawang merah, khususnya, telah menjadi ikon ekonomi Brebes, dikenal secara luas baik di pasar domestik maupun internasional. Bawang merah adalah komoditas pertanian paling penting di Kabupaten Brebes. Daerah ini dikenal sebagai produsen bawang merah terbesar di Indonesia. Produksi bawang merah tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga diekspor ke berbagai wilayah di Indonesia dan bahkan ke pasar internasional. Modernisasi pertanian yang melibatkan penggunaan teknologi pertanian yang lebih efisien, seperti irigasi tetes dan pupuk organik, telah meningkatkan produktivitas dan kualitas bawang merah Brebes. Pada tahun 2023, produksi bawang merah mencapai sekitar 220.000 ton, dengan nilai ekonomi yang signifikan bagi petani lokal.

Selain bawang merah, padi dan jagung juga merupakan komoditas utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Produksi padi dan jagung didukung oleh program pemerintah seperti subsidi pupuk dan bantuan teknis kepada petani. Pada tahun 2023, produksi padi mencapai 500.000 ton dan jagung mencapai 150.000 ton. Program irigasi dan peningkatan varietas unggul telah membantu meningkatkan hasil panen yang berdampak positif pada pendapatan petani. Untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas utama, pemerintah daerah mendorong diversifikasi pertanian. Tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran lainnya mulai dikembangkan. Diversifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga komoditas. Selain itu, pengembangan tanaman perkebunan seperti kopi dan kakao juga mulai diperkenalkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi.

Upaya modernisasi dan penerapan teknologi pertanian menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Penggunaan teknologi seperti sistem irigasi modern, mekanisasi pertanian, dan aplikasi teknologi informasi untuk manajemen pertanian telah diperkenalkan. Inovasi ini tidak hanya membantu meningkatkan hasil panen tetapi juga mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk pertanian Brebes di pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertanian melalui berbagai program dan kebijakan. Program bantuan langsung, pelatihan, dan akses terhadap kredit usaha tani telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam promosi produk pertanian Brebes melalui pameran dan expo, baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara keseluruhan, sektor pertanian tetap menjadi pilar utama perekonomian Kabupaten Brebes. Kontribusinya yang signifikan terhadap PDRB dan peran strategisnya dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat menjadikannya sektor yang sangat vital. Upaya untuk terus meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan modernisasi pertanian akan menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah di masa depan.

- **Sektor industri pengolahan** merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Kabupaten Brebes. Kontribusi sektor ini tidak hanya dalam bentuk peningkatan nilai tambah produk pertanian tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong diversifikasi ekonomi. Selama lima tahun terakhir, sektor industri pengolahan di Brebes menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan berbagai industri kecil dan menengah yang terus tumbuh dan berkembang. Industri pengolahan di Kabupaten Brebes terutama berfokus pada pengolahan produk pertanian, makanan ringan, dan kerajinan tangan.
- **Industri pengolahan bawang merah** merupakan salah satu industri utama di Brebes. Pengolahan bawang merah mencakup berbagai produk seperti bawang goreng, pasta bawang, dan bubuk bawang. Industri ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk bawang merah tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2023, produksi bawang goreng di Brebes mencapai 15.000 ton, dengan nilai ekonomi yang signifikan.

Industri makanan ringan juga berkembang pesat di Brebes dengan berbagai produk seperti keripik, kue, dan camilan lainnya. Produk-produk ini menjadi andalan industri kecil dan menengah (IKM) yang tersebar di berbagai kecamatan. Pemerintah daerah mendukung pengembangan industri ini melalui program pelatihan, bantuan modal, dan

promosi produk-produk lokal di berbagai pameran dan expo. Pada tahun 2023, nilai produksi industri makanan ringan di Brebes mencapai Rp 3.500 miliar.

Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) menjadi fokus pemerintah daerah untuk mendukung industri pengolahan. Sentra IKM menyediakan fasilitas produksi, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil. Sentra-sentra ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, serta memperluas pasar produk-produk lokal. Pada tahun 2023, terdapat lebih dari 200 IKM yang aktif di Brebes, dengan total nilai produksi mencapai Rp. 1.800 miliar.

Penerapan teknologi modern dalam proses pengolahan menjadi salah satu kunci sukses industri pengolahan di Brebes. Penggunaan mesin-mesin pengolahan yang canggih, sistem manajemen produksi yang efisien, dan teknologi informasi untuk pemasaran dan distribusi telah meningkatkan produktivitas dan daya saing produk-produk industri pengolahan Brebes di pasar nasional dan internasional. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri pengolahan melalui berbagai kebijakan dan program. Program-program seperti pemberian insentif pajak, kemudahan perizinan, dan bantuan modal kerja telah membantu banyak usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, pemerintah juga aktif mempromosikan produk-produk industri pengolahan Brebes melalui berbagai platform, termasuk pameran internasional dan kampanye pemasaran digital.

- **Sektor perdagangan** juga mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama dengan adanya pasar besar seperti Pasar Bawang Brebes yang menjadi pusat perdagangan komoditas unggulan daerah ini. Pertumbuhan sektor perdagangan didukung oleh infrastruktur yang memadai serta kemudahan akses pasar bagi para petani dan pedagang lokal. Hal ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat dan perputaran ekonomi di daerah.
- **Sektor pariwisata dan jasa**, meskipun kontribusinya belum sebesar sektor pertanian dan industri, menunjukkan potensi yang besar. Obyek wisata alam, budaya, dan kuliner khas Brebes mulai dikembangkan dan dipromosikan untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Peningkatan sektor pariwisata juga berdampak pada peningkatan sektor jasa lainnya seperti perhotelan, transportasi, dan restoran.

c) Faktor-Faktor yang Memperlambat Perekonomian Brebes

Faktor-faktor yang memperlambat perekonomian Kabupaten Brebes merupakan faktor yang menyebabkan perekonomian di Kabupaten Brebes cenderung susah berkembang. Terdapat beberapa faktor yang memperlambat perekonomian Kabupaten Brebes yang dapat dideteksi yaitu infrastruktur yang kurang memadai, ketergantungan pada sektor pertanian, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta birokrasi dan regulasi. **Gambar 2.29** merupakan penjelasan lebih lanjut dari masing-masing faktor.



Gambar 2.32 Faktor-Faktor yang Menghambat Perekonomian Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes Tahun 2025

Salah satu faktor utama yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di Brebes adalah **infrastruktur yang kurang memadai**. Meskipun sudah ada beberapa perkembangan, jalan yang rusak dan kurangnya fasilitas umum yang baik masih menjadi tantangan. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung sektor perdagangan, pertanian, dan pariwisata.

Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian juga menjadi faktor yang memperlambat ekonomi. Fluktuasi harga komoditas pertanian, seperti bawang merah, dapat berdampak signifikan pada pendapatan petani dan perekonomian daerah secara keseluruhan. Diversifikasi ekonomi sektor lain seperti industri dan jasa perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko ini.

Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih relatif rendah juga menjadi penghambat. Banyak penduduk yang bekerja di sektor informal dengan keterampilan yang terbatas, sehingga sulit untuk mengembangkan industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Birokrasi yang rumit dan regulasi yang tidak efisien juga seringkali menjadi hambatan bagi perkembangan ekonomi. Proses perizinan yang panjang dan tumpang tindih regulasi dapat menghalangi investasi baru dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

2.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Brebes merupakan realisasi dari keuangan Kabupaten Brebes selama lima tahun. Kinerja pelaksanaan APBD ini meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Lebih lanjut, penjabaran mengenai kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat pada [Tabel 2.119](#).

TABEL 2. 119 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 - 2024 KABUPATEN BREBES

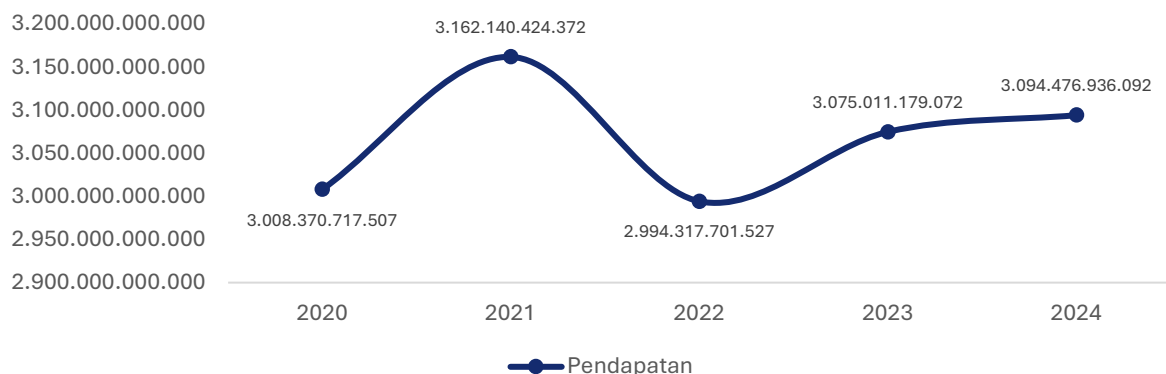
NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDAPATAN	3.008.370.717.507	3.162.140.424.372	2.994.317.701.527	3.075.011.179.072	3.094.476.936.092
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	392.541.730.819	518.511.128.705	419.385.638.383	479.936.145.391	393.455.665.918
1.1.1	Pajak Daerah	108.613.189.681	124.425.548.718	150.333.758.117	179.815.467.425	186.329.334.666
1.1.2	Retribusi Daerah	15.467.594.652	16.112.505.734	19.577.537.040	18.490.738.080	139.068.493.690
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.142.949.901	9.839.332.523	10.978.000.615	12.681.024.043	19.241.056.066
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	259.317.996.585	368.133.741.730	238.496.342.611	268.948.915.843	48.816.781.496
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.928.552.252.688	2.456.463.471.667	2.561.720.144.539	2.580.519.687.681	2.697.424.108.174
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.708.279.450.821	2.238.340.473.031	2.308.838.206.031	2.322.199.357.153	2.496.090.972.023
1.2.2	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	220.272.801.867	218.122.998.636	252.881.938.508	258.320.330.528	201.333.136.151
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	687.276.734.000	187.165.824.000	13.211.918.605	14.555.346.000	3.597.162.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	194.798.230.000	8.175.000.000	13.211.918.605	14.555.346.000	3.597.162.000
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan	492.478.504.000	178.990.824.000	-	-	-
2.	BELANJA	2.955.050.373.005	3.126.226.470.519	3.091.285.559.556	2.989.014.635.072	2.899.781.680.575
2.1	BELANJA OPERASI	1.824.812.030.370	1.992.262.378.184	1.952.476.281.894	2.118.778.276.541	1.996.314.189.867
2.1.1	Belanja Pegawai	1.020.237.638.369	1.061.706.394.882	1.018.714.340.491	1.114.115.933.151	1.227.909.482.469
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	716.009.739.829	818.819.614.482	803.745.035.118	847.763.670.560	617.817.358.148
2.1.3	Belanja Bunga	1.323.296.927,00	273.265.200	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	49.199.705.200	93.365.302.620	122.961.677.485	149.920.650.830	141.451.389.250
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	38.132.650.000	18.097.801.000	7.056.225.000	6.978.022.000	9.135.960.000
2.2	BELANJA MODAL	432.556.254.864	439.319.806.903	480.672.283.614	357.922.041.899	358.025.868.714
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.279.002.500	1.505.476.140	-	227.500.000	62.344.640
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.408.412.957	81.728.765.670	114.071.627.073	89.682.122.849	67.148.311.777
2.2.3	belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.092.056.315	159.174.560.006	166.066.285.008	52.721.300.467	63.631.365.265

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.652.855.296	180.910.365.758	183.852.539.769	191.528.125.702	211.513.272.338
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.044.260.391	16.000.639.329	12.576.379.281	20.410.604.553	15.350.831.584
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	68.078.667.405	-	4.105.452.483	3.352.388.328	319.743.110
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.673.910.400	2.735.627.990	3.717.196.960	1.187.275.000	315.620.000
2.3.1	Belanja tidak Terduga	2.673.910.400	2.735.627.990	3.717.196.960	1.187.275.000	315.620.000
2.4	BELANJA TRANFER	695.008.177.371	691.908.657.442	654.419.797.088	511.127.041.632	545.126.001.994
2.4.1	Belanja Bagi hasil	11.436.066.371	12.244.943.942	15.302.204.088	17.447.235.932	9.085.319.451
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	683.572.111.000	679.663.713.500	639.117.593.000	493.679.805.700	536.040.682.543
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	204.162.123.044	213.162.002.702	199.253.831.555	93.304.272.811	136.300.816.811
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	166.162.123.044	181.498.742.702	185.753.831.555	70.804.272.811	134.300.816.811
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	166.136.668.498	181.482.467.546	185.749.436.555,29	70.790.262.873,43	134.300.816.811
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	25.454.546	16.275.156	4.395.000	14.009.938	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.000.000.000	31.663.260.000	13.500.000.000	22.500.000.000	2.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000	18.000.000.000	-	-	2.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000	13.663.260.000	13.500.000.000	22.500.000.000	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

a) Pendapatan Daerah

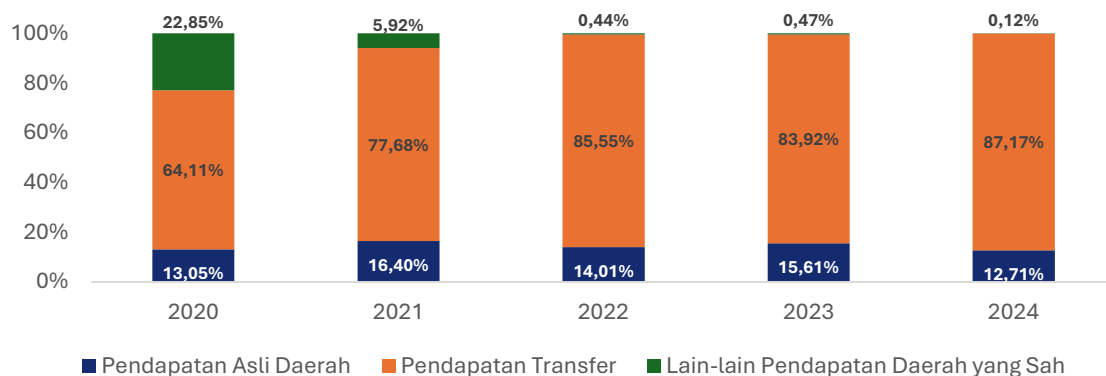
Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi daerah yang tercermin dalam APBD, meliputi gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.



Gambar 2. 33 Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Brebes, 2025

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2020–2024 tergolong masih rendah, yang tercermin dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, yaitu rata-rata hanya sebesar 14,26%. Proporsi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri masih terbatas. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mencerminkan belum optimalnya potensi pendapatan lokal yang dapat digali. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus mendorong perlunya inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah agar lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.



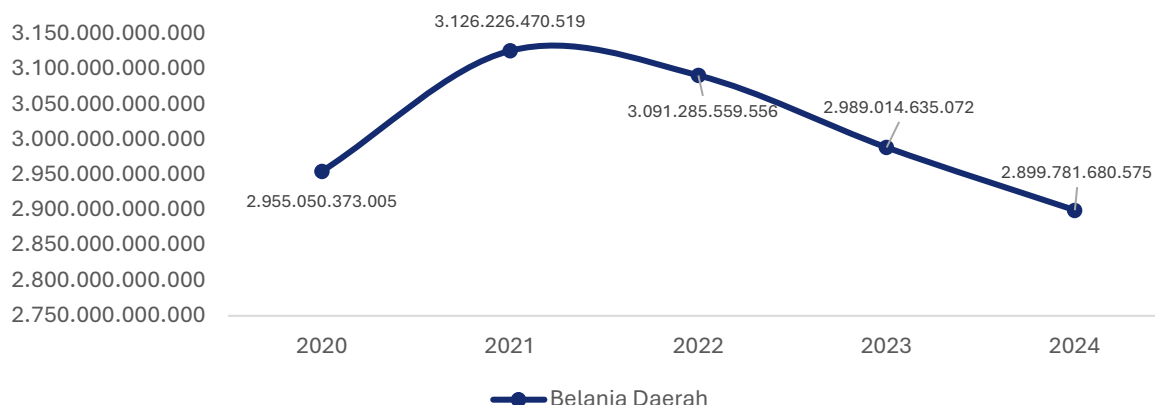
Gambar 2. 34 Proporsi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah

Sumber: BPKAD Kabupaten Brebes, 2025

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 2020-2024 rata-rata rasio Dana Transfer memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sebesar 75,85% disusul rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) sebesar 14,26 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 9,89%. Dilihat dari perkembangannya, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan tren kenaikan, begitu pula dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan proporsi Dana Perimbangan menunjukkan penurunan. Apabila tren kenaikan ini bisa dipertahankan bahkan dinaikan, maka tidak menutup kemungkinan proporsi PAD dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap TPD dapat berada di atas proporsi Dana Perimbangan, sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana transfer menjadi rendah atau dengan kata lain derajat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Brebes telah masuk dalam kategori tinggi.

b) Belanja Daerah

elanja Daerah Kabupaten Brebes terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Secara agregat, total Belanja Daerah selama periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020, realisasi belanja tercatat sebesar Rp 2,955 triliun, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp 3,126 triliun. Namun setelah itu mengalami tren penurunan bertahap, masing-masing menjadi Rp 3,091 triliun (2022), Rp 2,989 triliun (2023), dan Rp 2,899 triliun pada tahun 2024.

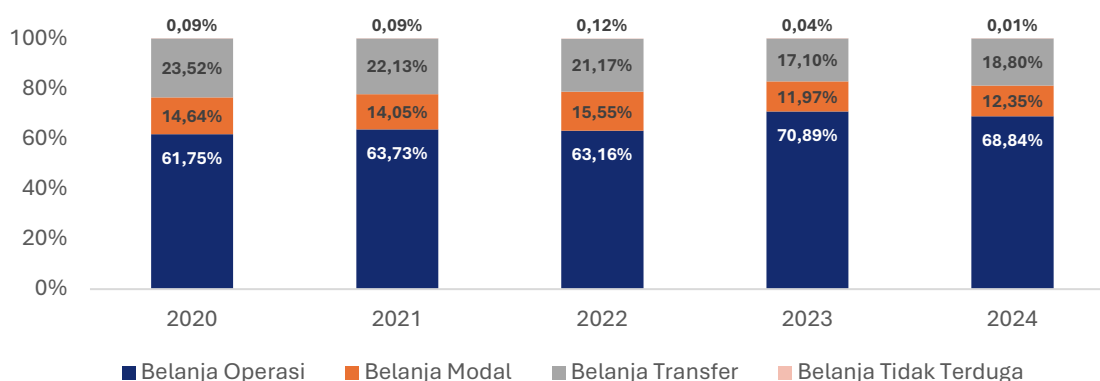


Gambar 2. 35 Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Brebes, 2025

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Brebes selama periode 2020–2024 menunjukkan dominasi Belanja Operasi. Pada tahun 2020, Belanja Operasi berkontribusi 61,75%, kemudian relatif stabil di kisaran 63% pada 2021–2022, sebelum meningkat signifikan menjadi 70,89% pada 2023 dan sedikit menurun menjadi 68,84% pada 2024. Peningkatan porsi Belanja Operasi pada 2023–2024 mengindikasikan meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan dasar dan belanja rutin pemerintah daerah.

Sementara itu, Belanja Modal, yang mencerminkan investasi pemerintah pada aset dan infrastruktur daerah, menunjukkan tren menurun. Proporsinya bergerak dari 14,64% pada 2020 menjadi 12,35% pada 2024, dengan titik tertinggi 15,55% pada 2022. Belanja Transfer kepada pemerintah desa mengalami penurunan bertahap, dari 23,52% pada 2020 menjadi 17,10% pada 2023, dan kemudian sedikit naik menjadi 18,80% pada 2024. Dinamika ini menggambarkan penyesuaian kebijakan alokasi transfer desa secara bertahap.

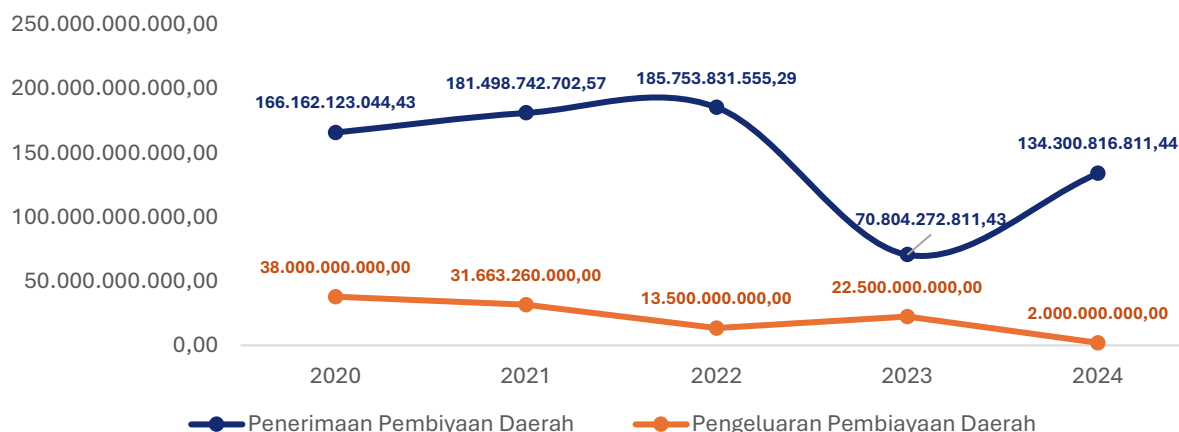


Gambar 2. 36 Proporsi Belanja Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Brebes, 2025

c) Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Di Kabupaten Brebes, tren penerimaan pembiayaan daerah selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan menurun, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -17,99%. Sebaliknya, pengeluaran pembiayaan daerah mengalami peningkatan signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63,13%, yang mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan strategis daerah untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas.



Gambar 2. 37 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Brebes, 2024

2.5.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar

untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Analisis Neraca Daerah Kabupaten Brebes secara umum menunjukkan pertumbuhan aset, kewajiban, dan ekuitas dari tahun 2020-2024. Total aset rata-rata tumbuh per tahun sebesar 4,6%. Pada kewajiban, utang jangka pendek pada tahun 2020 melonjak dari 66,1 miliar menjadi 98,8 miliar. Pada ekuitas, dana ekuitas tumbuh stabil dari 3,674 miliar menjadi 4,379 miliar, hal ini disebabkan oleh dorongan peningkatan aset tetap dan investasi. Hal yang perlu diwaspadai adalah lonjakan utang belanja dapat membebani APBD jika tidak dikelola. Selain itu, tetap memerlukan optimalisasi kas, percepatan penagihan piutang, dan penyusunan aset terutama pada perencanaan pergantian aset tetap yang sudah tua. Lebih lanjut, gambaran rata-rata neraca daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2020-2024 sesuai dengan **Tabel 2.120**.

TABEL 2. 120 NERACA DAERAH TAHUN 2020-2024 KABUPATEN BREBES

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	ASET	3.740.761.434.711	3.838.478.619.191	4.103.220.770.172	4.140.852.199.947	4.388.646.715.250
1.1	ASET LANCAR	299.509.182.456	288.235.125.275	160.968.370.769	223.492.806.549	306.977.186.336
1.1.1	Kas	181.483.222.747	185.800.877.936	71.495.443.819	134.390.676.067	177.404.730.317
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	140.099.014.035	84.299.735.940	41.962.032.335	117.654.188.656	136.501.881.155
1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.742.480	50.134.019	6.934.458	0	0
1.1.1.4	Kas di BLUD	40.616.205.864	100.749.728.268	28.749.807.022	16.379.265.768	40.894.592.783
1.1.1.5	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Kas di Bendahara BOS	760.260.368	701.279.709	776.670.003	357.221.643	8.256.379
1.1.1.7	Kas Lainnya	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0
1.1.2	Piutang	90.757.244.177	70.519.349.047	47.551.378.068	48.227.469.207	92.624.586.957
1.1.2.1	Piutang Pendapatan	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Piutang Pajak Daerah	26.172.664.986	28.472.033.648	28.677.796.140	27.173.073.439	32.648.951.833
1.1.2.3	Piutang Retribusi Daerah	304.340.104	550.307.311	208.848.751	487.142.401	4.997.109.150
1.1.2.4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.618.536.217	11.893.682.145	898.122.799	886.490.209	30.242.319.632
1.1.2.5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.607.284.399	27.211.603.336	14.830.189.396	12.368.424.989	8.610.561.685
1.1.2.6	Piutang Transfer Pemerintahan Pusat	13.784.829.366	0	0	0	0
1.1.2.7	Piutang Transfer Antar Daerah	20.268.279.105	2.391.722.607	2.936.420.982	7.312.338.169	16125644657
1.1.2.8	Piutang Lainnya	1.310.000	0	0	0	0
1.1.3	Penyisihan Piutang	-17.719.125.309	-19.270.568.755	-17.663.572.120	-14.339.295.665	-17.483.149.530
1.1.3.1	Penyisihan Piutang	-17.719.125.309	-19.270.568.755	-17.663.572.120	-14.339.295.665	-17.483.149.530
1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	93.339.861	461.169.090	77.856.972	75.030.682	18.008.855
1.1.4.1	Beban Dibayar Dimuka	93.339.861	461.169.090	77.856.972	75.030.682	18.008.855
1.1.5	Persediaan	44.894.500.981	50.724.297.957	59.507.264.031	55.138.926.258	54.413.009.736
1.1.5.1	Persediaan	44.894.500.981	50.724.297.957	59.507.264.031	55.138.926.258	54.413.009.736
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	155.701.555.302	175.115.022.611	193.661.007.479	225.389.068.988	241.650.469.947
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0
1.2.1.4	Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0	0	0	0	0
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	155.701.555.302	175.115.022.611	193.661.007.479	225.389.068.988	241.650.469.947
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	155.701.555.302	175.115.022.611	193.661.007.479	225.389.068.988	241.650.469.947
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0
1.3	ASET TETAP	3.159.693.561.388	3.274.474.813.029	3.651.946.333.067	3.596.738.084.070	3.743.080.952.885
1.3.1	Tanah	340.451.371.065	347.443.206.886	409.557.016.978	369.077.725.841	389.613.827.531
1.3.2	Peralatan dan Mesin	801.252.727.644	879.736.034.897	1.030.297.847.322	1.091.366.188.097	1.208.009.390.299
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.607.155.356.118	1.703.755.136.266	2.008.397.873.235	2.087.624.513.017	2.175.020.467.444
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.483.493.095.005	2.650.871.374.736	2.989.364.132.076	3.179.506.243.506	3.439.911.337.649
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	217.827.746.679	229.593.410.483	248.314.784.855	263.351.347.406	283.727.220.420
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	65.879.763.604	152.423.989.001	16.908.477.891	14.146.195.892	13.135.785.411
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-2.356.366.498.727	-2.689.348.339.240	-3.050.893.799.290	-3.408.334.129.689	-3.766.337.075.870

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.6	ASET LAINNYA	125.857.135.564	100.653.658.275	96.645.058.857	95.232.240.338	96.938.106.082
1.6.1	Tagihan Jangka Panjang	446.158.424	426.758.424	399.742.424	384.542.424	102.218.000
1.6.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	242.975.500	242.975.500	279.455.052	0	12276387800
1.6.3	Aset Tak Berwujud	5.749.710.959	6.793.566.959	6.990.896.764	7.446.425.064	7.739.821.324
1.6.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud	-4.220.814.475	-4.966.066.817	-5.463.551.320	-6.178.264.741	-6.713.059.614
1.6.5	Aset Lain-lain	123.639.105.156	98.156.424.209	94.438.515.937	93.579.537.591	240.830.114.271
1.6.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain					-157.297.375.699
2.	KEWAJIBAN	66.089.337.137	27.054.183.627	35.185.817.721	48.472.427.947	98.778.194.064
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	66.089.337.137	27.054.183.627	35.185.817.721	48.472.427.947	98.778.194.064
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	755.200	51.441.381	705.180.945	89.859.256	68.546.569
2.1.2	Utang Bunga					
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	13.663.260.000				
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.420.032.917	1.559.494.900	1.298.881.819	2.010.117.010	1.492.779.081
2.1.5	Utang Beban/ Belanja	44.048.267.662	25.169.440.075	33.181.754.958	46.204.243.527	92.463.782.389
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.957.021.358	273.807.271	-	168.208.154	4.753.086.025
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0
3.	EKUITAS DANA	3.674.672.097.574	3.811.424.435.564	4.068.034.952.451	4.181.697.134.442	4.379.688.049.228
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	0	0	0	0	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0	0	0	0
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan	0	0	0	0	0
3.1.3	Cadangan Piutang	0	0	0	0	0
3.1.4	Cadangan Persediaan	0	0	0	0	0
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Jangka Pendek	0	0	0	0	0
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	0	0	0	0	0
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0	0	0	0	0
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	0	0	0	0	0
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0	0	0	0	0
3.2.4	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0
4.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.740.761.434.712	3.838.478.619.191	4.103.220.770.172	4.230.169.562.390	4.478.466.243.292

Sumber: BPKAD Kabupaten Brebes, 2025

2.5.3 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Melihat capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020–2024, kedepan Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkat melalui berbagai upaya yang terencana dan berkelanjutan. Untuk mendorong peningkatan tersebut pada periode 2025–2029, pemerintah daerah telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang berfokus pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang potensial. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memperkuat struktur fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, serta mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- 2) Pendapatan daerah dikelola secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis aktual;
- 3) Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Kajian-kajian tentang potensi pendapatan daerah;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan pajak/retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras;
- 6) Perkuatan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah;
- 7) Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 8) Optimalisasi kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke PAD;
- 9) Peningkatan tata kelola BLUD sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam rangka mendukung akuntabilitas PPK-BLUD;
- 10) Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
- 11) Optimalisasi aset daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju capaian kinerja ekonomi makro daerah, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 disusun dengan berbasis pada beberapa asumsi. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2020–2024 dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta tren pendapatan PAD lainnya. Kedua, menyesuaikan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah daerah lainnya. Ketiga, lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah, dana penyesuaian/DID serta kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Brebes juga menyusun rencana pengembangan alternatif pembiayaan.

Dalam kurun waktu 2025–2029 Pendapatan Daerah diproyeksikan akan terus meningkat dengan asumsi kenaikan 6,21 % setiap tahun dimana proporsi Pendapatan transfer masih menjadi sumber pendapatan terbesar yaitu sebesar 78,24%, dimana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menjadi proporsi terbesar melalui Dana Perimbangan dan Dana Desa sebesar 90,67% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah melalui Pendapatan Bagi Hasil sebesar 9,33%. Lalu Pendapatan Asli Daerah diproyeksi dengan proporsi sebesar 21,76%, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terus di genjot agar kemandirian keuangan dapat tercapai, dimana Pajak Daerah yang merupakan sumber pendapatan Asli Daerah dengan proporsi terbesar yaitu sebesar 52,36%, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi objek pajak

terbesar yaitu sebesar 11,80% selanjutnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 10,93%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 9,14%, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 8,04% dan sisanya melalui Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Air Tanah, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 12,46%. Selanjutnya Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan terus meningkat dengan proporsi sebesar 9,69% dimana Pendapat BLUD menjadi objek Lain-lain PAD yang sah dengan proporsi terbesar yaitu sebesar 99,75%, dan sisanya melalui Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Bunga, Jasa Giro, Hasil Kerjasama Daerah, dan Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan. Selanjutnya, retribusi daerah di proyeksikan memberikan proporsi sebesar 0,37% terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan objek retribusi tertinggi adalah Retribusi perizinan tertentu sebesar 52,01%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 27,88% dan Retribusi Jasa Umum sebesar 20,12%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diproyeksi dengan rata-rata proporsi sebesar 0,27%, sedangkan untuk pendapatan melalui Sumber Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di proyeksi diproyeksikan tetap setiap tahunnya dimana pendapatan tersebut didapat melalui hibah dari Pemerintah Pusat. Adapun dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2020-2029 dilakukan proyeksi keuangan sampai tahun 2030 mengikuti RPJMN Tahun 2025-2029.

Belanja daerah sebagai *fiscal tool* dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pemerataan belanja daerah dan menggerakkan perekonomian daerah. Instrumen ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025–2029 yang diikuti tahun 2030 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan publik;
- 2) Belanja yang bersifat wajib dan mengikat diutamakan dengan berprinsip pada asas efisien, efektif, dan akuntabel;
- 3) Belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan tunjangan pegawai diarahkan pada kinerja Aparat Sipil Negara (ASN);
- 5) Belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dengan demikian semua belanja daerah harus mempunyai tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur;
- 6) Proporsi Belanja Pegawai dengan Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa untuk kepentingan umum secara bertahap diupayakan mencapai komposisi yang ideal dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku;
- 7) Belanja operasional SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah;
- 8) Pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan penyerahan urusan/kewenangan kepada kabupaten/kota;
- 9) Pendanaan program/kegiatan berdasarkan pada prioritas pembangunan sebagai penjabaran sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025;

- 10) Pemenuhan alokasi anggaran yang bersifat mengikat, diutamakan mendanai belanja aparatur, belanja operasional, dan belanja yang bersifat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Seiring dengan diproyeksikan akan meningkatnya Pendapatan Daerah, maka Belanja Daerah diasumsikan akan ikut naik guna memenuhi target-target dan sasaran jangka menengah daerah. Dimana belanja daerah diasumsikan naik sebesar 6% setiap tahunnya, Belanja Operasi diproyeksikan proporsinya sebesar 71,50% yang meliputi Belanja Pegawai dengan proporsi sebesar 39,43%, Belanja Barang Jasa dengan proporsi sebesar 26,69%, Belanja Hibah dengan proporsi sebesar 4,96%, dan Belanja Bantuan Sosial dengan proporsi sebesar 0,41% terhadap total Belanja Daerah. Sedangkan untuk Proporsi Belanja Modal diproyeksikan sebesar 12,78% yang meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga diproyeksikan dengan proporsi sebesar 0,14% dan Belanja Transfer sebesar 15,58%.

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Pada proyeksi 5 tahun ke depan, akan dilakukan memperkecil proporsi Belanja Pegawai apabila jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisis realisasi SILPA lima tahun sebelumnya. Perhitungan SILPA menggunakan perhitungan SILPA $n+1$ di mana sisa anggara pada tahun n akan digunakan pada tahun $n+1$. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Brebes merencanakan adanya penyertaan modal kepada beberapa BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD serta pengembalian pinjaman daerah. Lebih lanjut, proyeksi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah Kabupaten Brebes dapat dilihat pada [Tabel 2.121](#).

TABEL 2. 121 PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	PENDAPATAN	3.719.373.212.310	3.948.660.669.740	4.199.724.433.133	4.454.448.891.967	4.732.713.087.524	5.038.672.476.604
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	742.274.312.960	822.711.825.410	917.483.146.573	1.008.100.541.097	1.114.052.319.104	1.239.083.669.759
1.1.1	Pajak Daerah	356.500.000.000	412.256.000.000	481.145.319.500	549.433.448.391	631.738.557.521	728.904.656.583
1.1.2	Retribusi Daerah	14.772.750.000	15.109.280.000	15.377.415.000	15.795.809.500	16.102.078.450	16.452.799.695
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.176.082.128	11.176.082.128	11.176.082.128	11.176.082.128	11.176.082.128	11.176.082.128
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	359.825.480.832	384.170.463.282	409.784.329.945	431.695.201.078	455.035.601.005	482.550.131.353
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.976.998.899.350	3.125.848.844.330	3.282.141.286.560	3.446.248.350.870	3.618.560.768.420	3.799.488.806.845
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.699.276.963.250	2.834.240.811.420	2.975.952.852.000	3.124.750.494.590	3.280.988.019.320	3.445.037.420.288
1.2.2	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	277.721.936.100	291.608.032.910	306.188.434.560	321.497.856.280	337.572.749.100	354.451.386.557
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan						
2.	BELANJA	3.736.997.737.480	3.963.633.151.610	4.214.779.292.320	4.469.477.712.260	4.747.621.175.040	5.040.395.807.600
2.1	BELANJA OPERASI	2.671.785.190.880	2.833.819.311.770	3.013.377.499.020	3.195.475.406.050	3.394.335.463.500	3.603.656.148.841
2.1.1	Belanja Pegawai	1.473.538.739.160	1.562.903.541.020	1.661.933.188.220	1.762.363.537.650	1.872.038.521.750	1.987.482.734.784
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	997.458.982.000	1.057.951.266.270	1.124.985.819.520	1.192.968.527.710	1.267.209.058.400	1.345.354.860.848
2.1.3	Belanja Bunga						
2.1.4	Belanja Hibah	185.429.742.520	196.675.386.600	209.137.252.380	221.775.382.170	235.576.854.450	250.104.325.043
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.357.727.200	16.289.117.880	17.321.238.900	18.367.958.520	19.511.028.900	20.714.228.167
2.2	BELANJA MODAL	477.651.650.440	506.619.497.690	538.720.231.230	571.275.006.260	606.826.455.150	644.248.015.525
2.2.1	Belanja Modal Tanah	791.787.800	839.806.870	893.019.230	946.984.230	1.005.916.730	1.067.949.250
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.799.755.240	99.488.371.570	105.792.214.440	112.185.220.570	119.166.704.250	126.515.434.647
2.2.3	belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.785.101.800	94.169.597.520	100.136.428.980	106.187.656.920	112.795.901.670	119.751.759.656
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	264.365.649.250	280.398.470.940	298.165.249.840	316.183.326.890	335.859.971.690	356.571.666.278
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.266.549.260	23.616.935.050	25.113.365.680	26.630.962.250	28.288.253.890	30.032.723.982
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	7.642.807.090	8.106.315.740	8.619.953.060	9.140.855.400	9.709.706.920	10.308.481.712
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.260.000.000	5.579.000.000	5.932.500.000	6.291.000.000	6.682.500.000	7.094.594.059
2.3.1	Belanja tidak Terduga	5.260.000.000	5.579.000.000	5.932.500.000	6.291.000.000	6.682.500.000	7.094.594.059

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.4	BELANJA TRANSFER	582.300.896.160	617.615.342.150	656.749.062.070	696.436.299.950	739.776.756.390	785.397.049.174
2.4.1	Belanja Bagi hasil	27.797.734.510	29.483.566.700	31.351.722.430	33.246.301.860	35.315.277.730	37.493.087.854
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	554.503.161.650	588.131.775.450	625.397.339.640	663.189.998.090	704.461.478.660	747.903.961.320
3.	PEMBIAYAAN NETTO	17.624.525.170	14.972.481.870	15.054.859.187	15.028.820.293	14.908.087.516	14.308.746.387
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.624.525.170	19.972.481.870	20.054.859.187	20.028.820.293	19.908.087.516	19.308.746.387
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	22.624.525.170	19.972.481.870	20.054.859.187	20.028.820.293	19.908.087.516	19.308.746.387
3.1.1	Sebelumnya						
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah						
3.1.4	Penerimaan Kembali Pinjaman						
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes Tahun 202

2.6 Potensi, Permasalahan, dan Isu Strategis

Sub bab potensi, permasalahan, dan isu strategis menjelaskan mengenai potensi, permasalahan, dan isu strategis Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan merujuk pada data yang telah diuraikan pada bab II tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah. Sementara itu, perumusan isu strategis mempertimbangkan dinamika yang terjadi pada tataran global, nasional, dan regional dari berbagai aspek, seperti sosial, politik, dan ekonomi. Perumusan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 juga mengacu pada prinsip keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan provinsi. Identifikasi masalah dan isu strategis di Kabupaten Brebes diharapkan mampu menjadi dasar perumusan rekomendasi program prioritas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Tercapainya tujuan pembangunan di daerah diharapkan mendukung tercapainya tujuan pembangunan di tingkat provinsi dan juga nasional.

2.6.1 Potensi Pembangunan

Dalam kerangka perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029, identifikasi dan analisis potensi daerah menjadi langkah awal yang fundamental untuk menentukan arah pembangunan yang berbasis pada kekuatan lokal. Potensi yang dimiliki Kabupaten Brebes baik dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun posisi strategis wilayah, merupakan modal penting yang harus dioptimalkan secara sinergis dan berkelanjutan. Pemanfaatan potensi ini tidak hanya ditunjukkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sosial dan memperkecil kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, penggalan potensi daerah secara komprehensif menjadi pondasi penting dalam merumuskan strategi dan program pembangunan jangka menengah yang adaptif dan kontekstual.



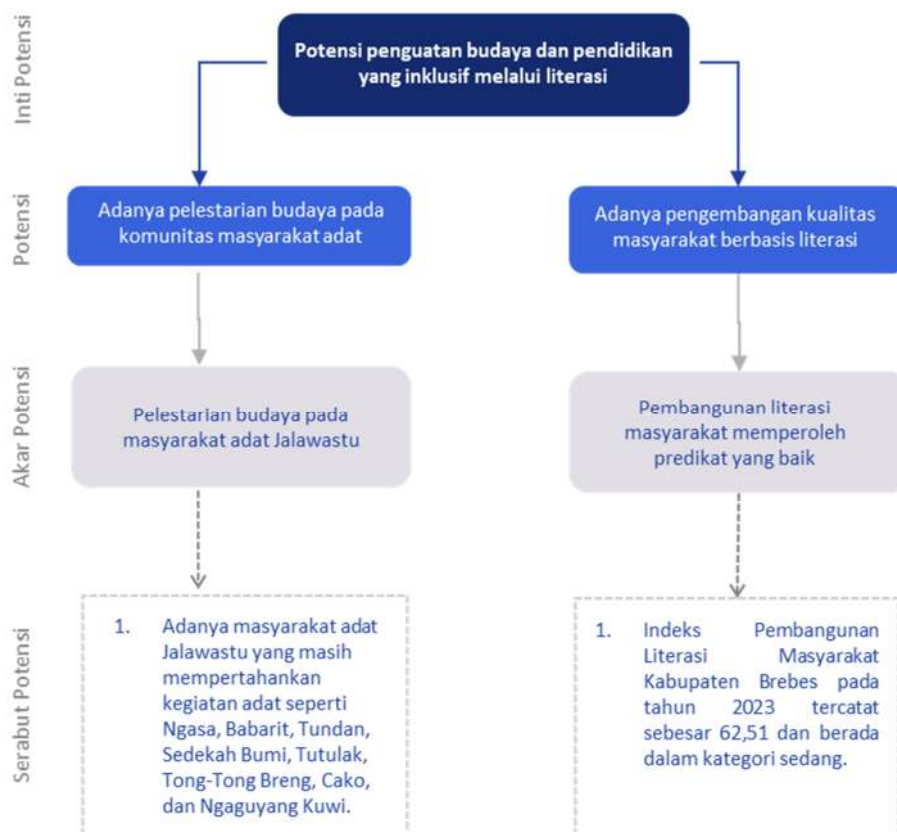
Gambar 2. 38 Gambar Potensi Pembangunan Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

2.6.1.1 Potensi Pondasi Budaya dan Pendidikan

Potensi pada aspek pondasi budaya dan pendidikan di Kabupaten Brebes merupakan elemen strategis yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, kapasitas, dan daya saing sumber daya manusia daerah. Keberagaman budaya lokal, nilai-nilai kearifan tradisional, serta peningkatan capaian pendidikan dasar dan menengah menjadi modal sosial yang penting untuk mendukung proses transformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Penguatan integrasi antara budaya lokal dan sistem pendidikan tidak hanya berkontribusi

terhadap peningkatan literasi dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas daerah dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, potensi budaya dan pendidikan perlu dioptimalkan secara sistematis dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 sebagai landasan pembangunan yang inklusif, berakar pada nilai lokal, dan berorientasi masa depan.



Gambar 2. 39 Bagan Potensi Pondasi Budaya dan Pendidikan Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

a) Pelestarian Budaya Pada Masyarakat Adat Jalawastu

Pelestarian budaya pada masyarakat adat menjadi salah satu kekuatan pembangunan daerah yang patut diunggulkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Pelestarian ini menjadi suatu keunikan dan identitas tersendiri bagi Kabupaten Brebes. Lebih lanjut, potensi ini menjadi salah satu warisan budaya yang dapat menguatkan pondasi pada sektor pendidikan khususnya dalam pengembangan budaya lokal.

- 1) Adanya masyarakat adat Jalawastu yang masih mempertahankan kegiatan adat seperti Ngasa, Babarit, Tundan, Sedekah Bumi, Tutulak, Tong-Tong Breng, Cako, dan Ngaguyang Kuwi.

b) Pengembangan Kualitas Masyarakat Berbasis Literasi

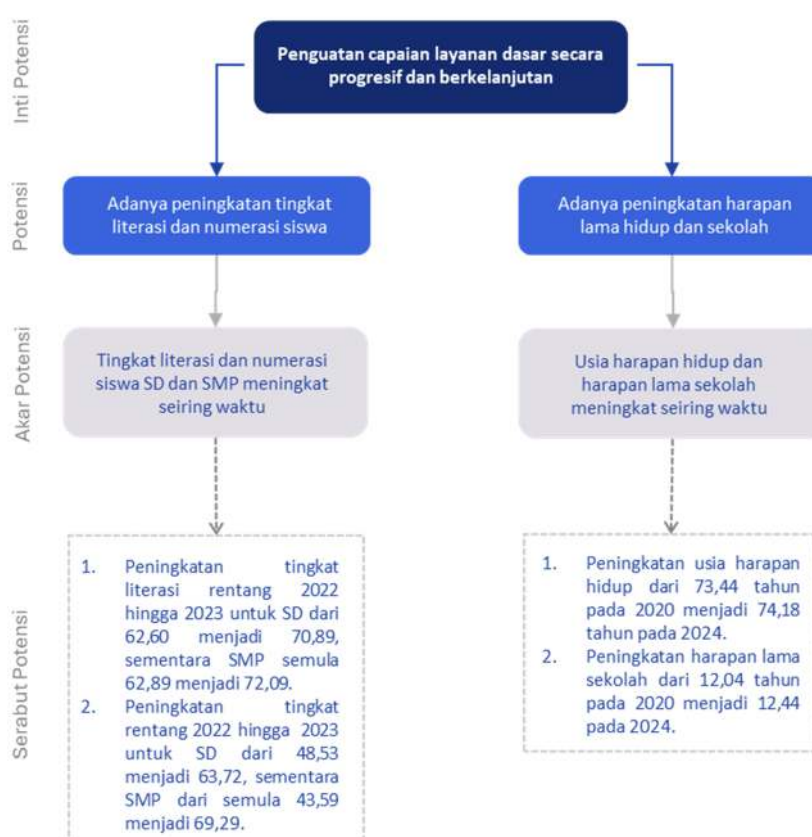
Pengembangan kualitas masyarakat berbasis literasi di Kabupaten Brebes menunjukkan kemajuan yang signifikan dan menjadi salah satu capaian unggulan dalam pembangunan sosial daerah. Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, program literasi fungsional, serta penguatan peran perpustakaan dan komunitas baca telah mendorong tumbuhnya budaya literasi di berbagai lapisan masyarakat. Kemajuan ini tidak hanya

tercermin dari membaiknya indikator pendidikan formal, tetapi juga dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembelajaran sepanjang hayat. Dengan pondasi literasi yang semakin kuat, masyarakat Brebes semakin siap menghadapi tantangan pembangunan ke depan secara lebih adaptif, produktif, dan berdaya saing.

- 1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Brebes pada tahun 2023 tercatat sebesar 62,51 dan berada dalam kategori sedang. Skor ini mencerminkan adanya kemajuan dalam penguatan ekosistem literasi, termasuk ketersediaan fasilitas, akses informasi, dan aktivitas literasi masyarakat. Meskipun masih berada pada tingkat menengah, capaian ini menunjukkan potensi yang besar untuk ditingkatkan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dan perluasan program literasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.6.1.2 Potensi Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar

Potensi akses dan kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Brebes menunjukkan capaian positif yang patut diunggulkan dalam kerangka pembangunan sosial daerah. Peningkatan cakupan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar secara bertahap telah memperluas jangkauan manfaat bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah terpencil. Capaian ini tercermin dari membaiknya indikator-indikator kunci seperti angka harapan hidup, harapan lama sekolah, angka partisipasi sekolah, dan akses terhadap air bersih serta sanitasi layak. Dengan landasan pelayanan dasar yang semakin merata dan berkualitas, Kabupaten Brebes memiliki peluang strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 2.40 Bagan Potensi Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

a) Peningkatan Tingkat Literasi dan Numerasi Siswa Sekolah Dasar dan Menengah

Peningkatan tingkat literasi dan kompetensi numerasi pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Brebes menunjukkan capaian signifikan yang patut diapresiasi dalam pembangunan sektor pendidikan. Pada tahun 2023, nilai literasi untuk siswa SD meningkat menjadi 70,89 dan SMP menjadi 72,09, naik tajam dari tahun sebelumnya. Sementara itu, capaian numerasi juga mengalami lonjakan, dari 48,53 menjadi 63,72 untuk SD, dan dari 43,59 menjadi 69,29 untuk SMP. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan pendidikan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas guru, serta pemanfaatan asesmen berbasis kompetensi sebagai alat ukur capaian belajar yang lebih holistik dan berorientasi pada peningkatan daya saing peserta didik.

- 1) Tingkat literasi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan signifikan antara tahun 2022 dan 2023. Nilai literasi SD naik dari 62,60 menjadi 70,89, sementara SMP meningkat dari 62,89 menjadi 72,09. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas intervensi pembelajaran dasar dan penguatan budaya literasi di lingkungan sekolah, yang berdampak pada peningkatan kualitas pemahaman bacaan siswa secara menyeluruh.
- 2) Peningkatan juga terjadi pada capaian kompetensi minimum numerasi siswa SD dan SMP dalam periode yang sama. Nilai numerasi SD meningkat dari 48,53 pada 2022 menjadi 63,72 pada 2023, sedangkan SMP melonjak dari 43,59 menjadi 69,29. Tren positif ini menunjukkan keberhasilan program peningkatan kualitas pengajaran matematika serta penguatan kapasitas guru dalam mendukung pencapaian kompetensi numerik siswa secara lebih merata.

b) Peningkatan Harapan Hidup dan Lama Sekolah

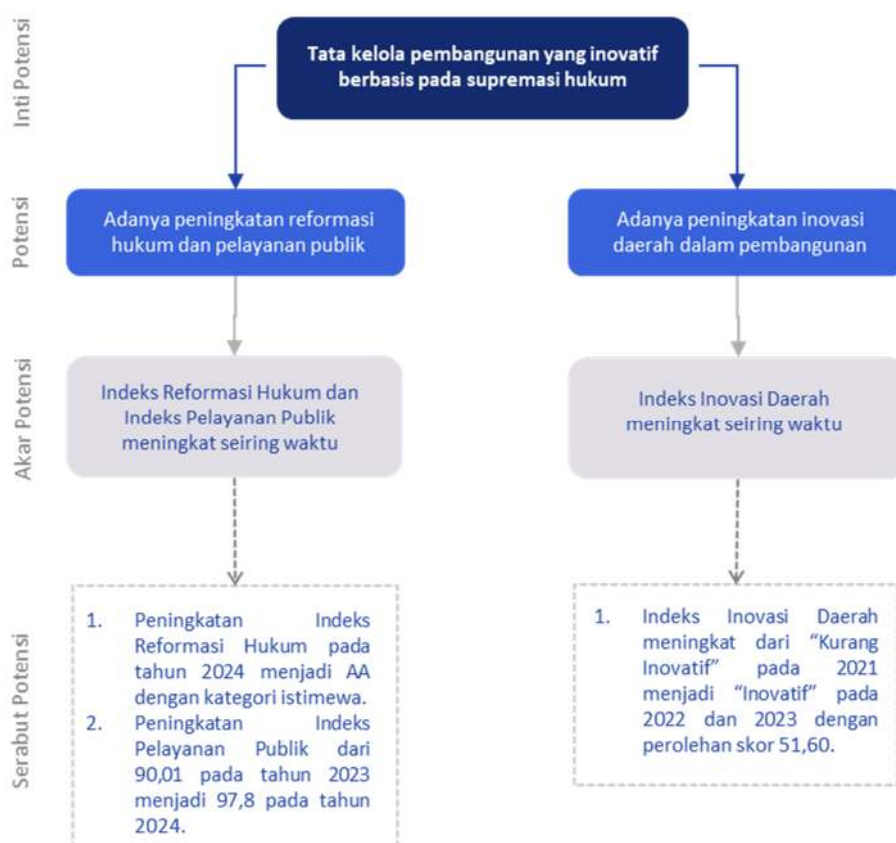
Peningkatan usia harapan hidup dan harapan lama sekolah di Kabupaten Brebes mencerminkan kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, usia harapan hidup mencapai 74,18 tahun, naik dari 73,44 tahun pada tahun 2020, menandakan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan, gizi masyarakat, dan sanitasi lingkungan. Di sisi lain, harapan lama sekolah meningkat dari 12,04 tahun menjadi 12,44 tahun dalam periode yang sama, menunjukkan membaiknya akses dan partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kedua capaian ini menegaskan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menciptakan ekosistem pembangunan sosial yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup dan investasi jangka panjang terhadap sumber daya manusia.

- 1) Usia harapan hidup di Kabupaten Brebes meningkat dari 73,44 tahun pada 2020 menjadi 74,18 tahun pada 2024, menunjukkan tren positif dalam derajat kesehatan masyarakat. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk upaya promotif dan preventif yang semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Capaian ini juga menunjukkan keberhasilan intervensi kebijakan di bidang gizi, sanitasi, dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.
- 2) Harapan lama sekolah di Kabupaten Brebes naik dari 12,04 tahun pada 2020 menjadi 12,44 tahun pada 2024, yang mencerminkan peningkatan partisipasi pendidikan jangka panjang. Indikator ini menunjukkan bahwa anak-anak di Brebes memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas atau bahkan perguruan tinggi. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan akses

pendidikan, penurunan angka putus sekolah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan.

2.6.1.3 Potensi Tata Kelola Pemerintahan

Potensi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Brebes menunjukkan capaian yang semakin kuat dan adaptif dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan akuntabel. Peningkatan kinerja reformasi birokrasi, perluasan digitalisasi layanan publik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi pondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan efisien. Capaian ini juga tercermin dari membaiknya indikator pelayanan publik dan integritas kelembagaan, yang menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah. Dengan tata kelola yang semakin transparan dan partisipatif, Kabupaten Brebes memiliki posisi strategis untuk mendorong transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.41 Bagan Potensi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

a) Peningkatan Reformasi Hukum dan Pelayanan Publik

Peningkatan capaian reformasi hukum dan pelayanan publik di Kabupaten Brebes ditandai dengan adanya peningkatan Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Pelayanan Publik. Peningkatan kedua indikator tersebut menandakan adanya perbaikan kualitas layanan publik dan penegakan hukum pada tataran pemerintahan. Adapun elemen penyusun dari indeks reformasi hukum diantaranya yaitu penguatan koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi, mendorong regulasi dan deregulasi

berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil review, mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level Peraturan Perundang-undangan, serta meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah. Sementara itu, elemen penyusun indeks pelayanan publik diantaranya yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan.

- 1) Indeks Reformasi Hukum mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan nilai 55,23 dengan kategori CC (cukup) menjadi 98,76 dengan kategori AA (istimewa) di tahun 2024. Lebih lanjut, peningkatan ini juga terlihat dari peningkatan nilai indeks pelayanan publik dengan nilai 90,01 pada tahun 2023 menjadi 97,8 pada tahun 2024.

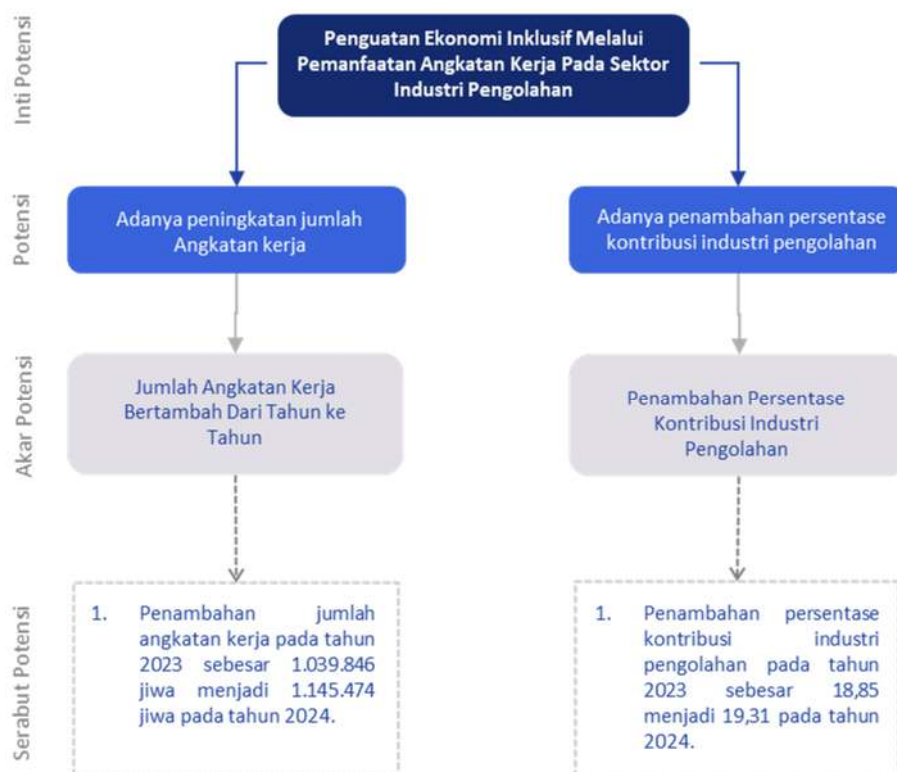
b) Peningkatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan

Peningkatan inovasi daerah dalam pembangunan menjadi salah satu capaian strategis yang menguatkan posisi Kabupaten Brebes sebagai daerah yang adaptif dan progresif dalam menghadapi tantangan pembangunan. Berbagai inisiatif inovatif, baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pengembangan ekonomi lokal, telah berhasil mendorong efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan program-program pembangunan. Capaian ini tercermin dari meningkatnya pengakuan terhadap praktik-praktik inovatif yang diadopsi oleh perangkat daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses inovasi berbasis kebutuhan lokal. Dengan ekosistem inovasi yang terus berkembang, Kabupaten Brebes memiliki daya dorong kuat untuk menciptakan solusi kreatif yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

- 1) Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari status "kurang inovatif" pada tahun 2021 menjadi kategori "inovatif" pada tahun 2022 dan 2023. Nilai indeks yang meningkat dari 47,94 menjadi 51,60 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi tata kelola dan pelayanan publik berbasis inovasi. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan penerapan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis solusi lokal.

2.6.1.4 Potensi Ekonomi dan Akses Keuangan

Potensi ekonomi dan akses keuangan di Kabupaten Brebes menunjukkan perkembangan yang semakin menjanjikan dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan inklusif daerah. Peningkatan aktivitas sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan lokal turut memperkuat struktur ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal. Di sisi lain, perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk melalui kehadiran lembaga keuangan mikro dan digitalisasi sistem pembayaran, telah membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk tumbuh. Capaian ini menandakan bahwa Kabupaten Brebes memiliki pondasi ekonomi yang semakin kokoh dan inklusif, serta mampu mendorong kemandirian finansial masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 2.42 Bagan Potensi Ekonomi dan Akses Keuangan Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

a) Peningkatan Jumlah Angkatan Kerja

Peningkatan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun menjadi suatu potensi tersendiri. Mengingat angkatan kerja merupakan penduduk dengan usia produktif yang menjadi sumber utama dalam peningkatan perekonomian pada skala wilayah. Lebih lanjut, penduduk pada usia ini cenderung lebih kreatif, sehingga dapat menjadi penggerak dalam mendorong peningkatan inovasi sebagai upaya peningkatan perekonomian di suatu daerah.

- 1) Penambahan jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebesar 1.039.846 jiwa menjadi 1.145.474 jiwa pada tahun 2024. Penambahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Brebes dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia khususnya yang memasuki usia kerja. Lebih lanjut, potensi ini dapat menjadi peluang bagi penurunan angka pengangguran di Kabupaten Brebes.

b) Penambahan Persentase Kontribusi Industri Pengolahan

Penambahan persentase kontribusi industri pengolahan selama lima tahun terakhir menjadi peluang dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan. Lebih lanjut, peningkatan ini menjadi salah satu indikator transisi atau perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Brebes dari pertanian menuju peningkatan pada sektor lainnya. Perubahan ini dapat dimaknai sebagai awal dari peningkatan produktivitas perekonomian khususnya di Kabupaten Brebes.

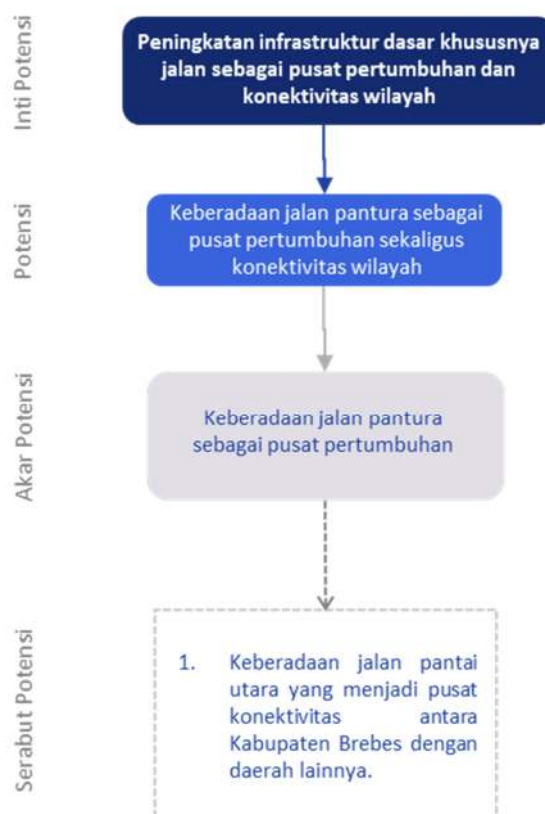
- 1) Penambahan persentase kontribusi industri pengolahan pada tahun 2023 sebesar 18,85 menjadi 19,31 pada tahun 2024. Penambahan ini menandakan adanya

peningkatan produktivitas sektor industri di Kabupaten Brebes. Peningkatan ini didukung dengan adanya pembangunan jalan arteri di sebelah utara Kabupaten Brebes.

2.6.1.5 Potensi Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Fasilitas

Peningkatan infrastruktur dasar khususnya jalan dapat menjadi potensi bagi pengembangan wilayah Kabupaten Brebes kedepan mengingat jalan tersebut merupakan salah satu pusat dari pengembangan di suatu wilayah. Lebih lanjut, Kabupaten Brebes dilalui oleh jalan pantai utara yang menjadi pusat pergerakan utama di Provinsi Jawa Tengah bagian utara. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian mengingat pentingnya fungsi jalan sebagai konektivitas sekaligus penghubung antara Kabupaten Brebes dengan kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah.

- 1) Keberadaan jalan nasional rute 1 atau yang biasa dikenal dengan nama jalan pantai utara yang menjadi pusat konektivitas antara Kabupaten Brebes dengan daerah lainnya. Jalan ini melewati 5 provinsi sepanjang 1.316 km yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal ini menjadi suatu potensi mengingat tingginya volume kendaraan pada ruas jalan ini.



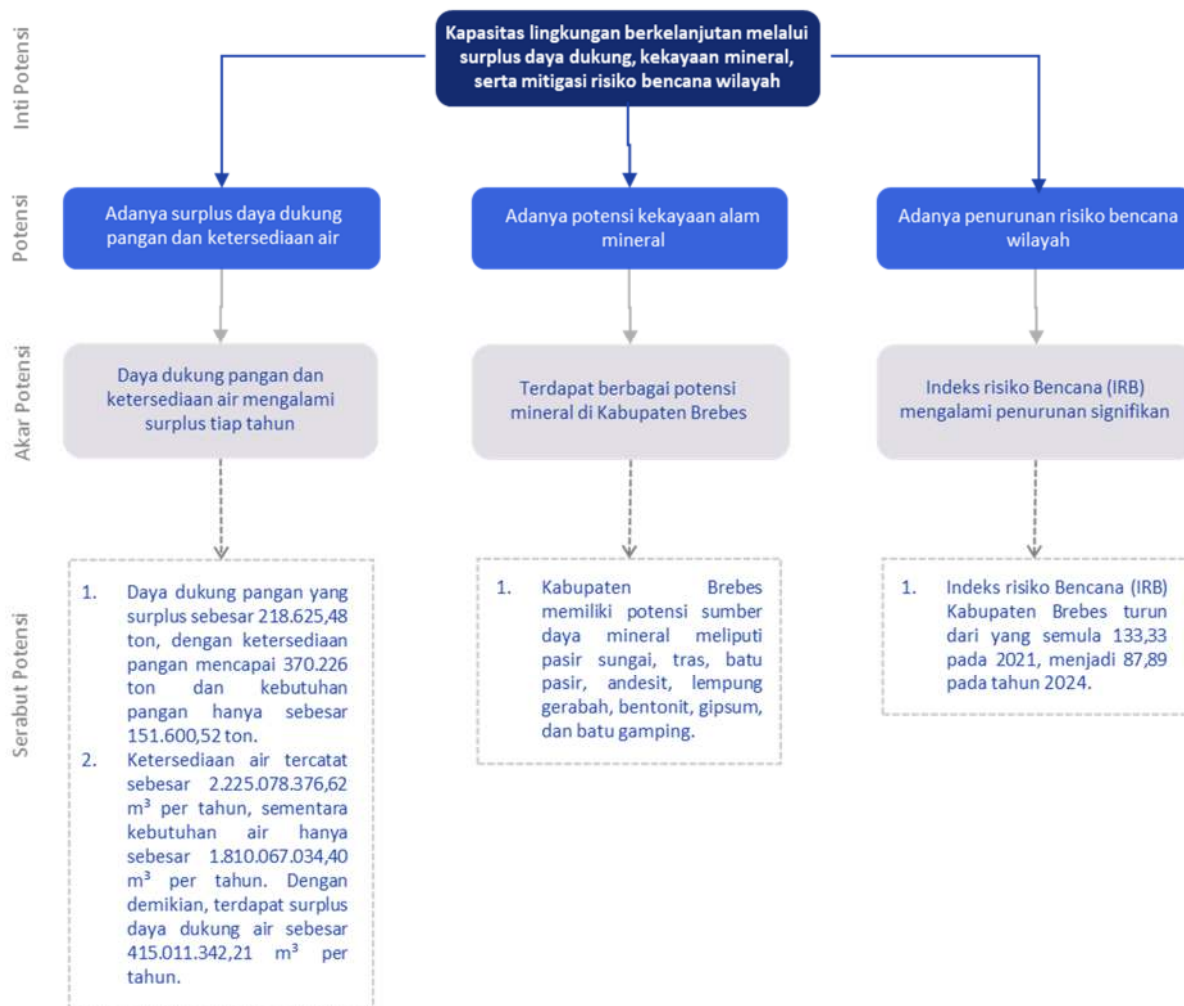
Gambar 2.43 Potensi Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Fasilitas

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

2.6.1.6 Potensi Penataan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Potensi penataan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Kabupaten Brebes menunjukkan arah yang semakin progresif dan berkelanjutan. Berbagai inisiatif konservasi lahan, rehabilitasi daerah aliran sungai, serta penguatan tata kelola sumber daya alam

berbasis komunitas mulai menghasilkan dampak positif terhadap kualitas lingkungan hidup. Capaian ini diperkuat oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan serta penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dalam berbagai sektor. Dengan pondasi kebijakan yang adaptif dan partisipatif, Kabupaten Brebes memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan ekologis sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.



Gambar 2.44 Bagan Potensi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

a) Surplus Daya Dukung Pangan dan Ketersediaan Air

Surplus daya dukung pangan dan ketersediaan air di Kabupaten Brebes merupakan capaian strategis yang memperkuat ketahanan wilayah dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global. Produksi pangan yang konsisten melebihi kebutuhan konsumsi, terutama pada komoditas utama seperti padi dan bawang merah, menunjukkan efisiensi sistem pertanian dan keberhasilan pengelolaan sumber daya lokal. Di sisi lain, ketersediaan air yang memadai untuk kebutuhan irigasi, domestik, dan pendukung sektor ekonomi mencerminkan penguatan infrastruktur serta tata kelola sumber daya air yang semakin adaptif. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Brebes sebagai daerah dengan ketahanan pangan dan air yang tangguh, sekaligus menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional.

- 1) Kabupaten Brebes memiliki kondisi daya dukung pangan yang surplus sebesar 218.625,48 ton, dengan ketersediaan pangan mencapai 370.226 ton dan kebutuhan pangan hanya sebesar 151.600,52 ton. Surplus ini mencerminkan tingkat produksi pangan yang tinggi dan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi secara mandiri. Namun demikian, terdapat 11,17% wilayah yang telah melampaui batas daya dukung pangannya, sehingga memerlukan pengaturan ruang dan intensifikasi pertanian yang lebih berkelanjutan di wilayah tersebut.
- 2) Berdasarkan data KLHS RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2045, ketersediaan air tercatat sebesar 2.225.078.376,62 m³ per tahun, sementara kebutuhan air hanya sebesar 1.810.067.034,40 m³ per tahun. Dengan demikian, terdapat surplus daya dukung air sebesar 415.011.342,21 m³ per tahun yang menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan air untuk kebutuhan masyarakat. Capaian ini mencerminkan pengelolaan sumber daya air yang efektif serta menjadi modal penting dalam menjaga ketahanan lingkungan.

b) Potensi Kekayaan Alam Mineral

Potensi kekayaan alam mineral di Kabupaten Brebes merupakan salah satu aset strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Brebes memiliki sumber daya mineral seperti batu andesit, pasir, dan tanah urug yang tersebar di berbagai kecamatan, dan telah dimanfaatkan untuk mendukung sektor konstruksi dan infrastruktur baik di dalam maupun luar wilayah. Pemanfaatan potensi ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta membuka peluang kerja lokal, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi turunan. Dengan pengelolaan yang terencana, berizin, dan berwawasan lingkungan, potensi mineral di Kabupaten Brebes dapat terus dimaksimalkan sebagai salah satu motor penggerak pembangunan daerah yang berdaya saing.

- 1) Kabupaten Brebes memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup beragam, mencakup delapan jenis komoditas, yaitu pasir sungai, tras, batu pasir, andesit, lempung gerabah, bentonit, gipsum, dan batu gamping. Keberagaman mineral ini memberikan nilai ekonomi yang signifikan, khususnya dalam mendukung industri konstruksi, kerajinan, serta bahan baku industri lainnya. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, potensi ini dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan sektor industri daerah.

c) Penurunan Risiko Bencana Wilayah

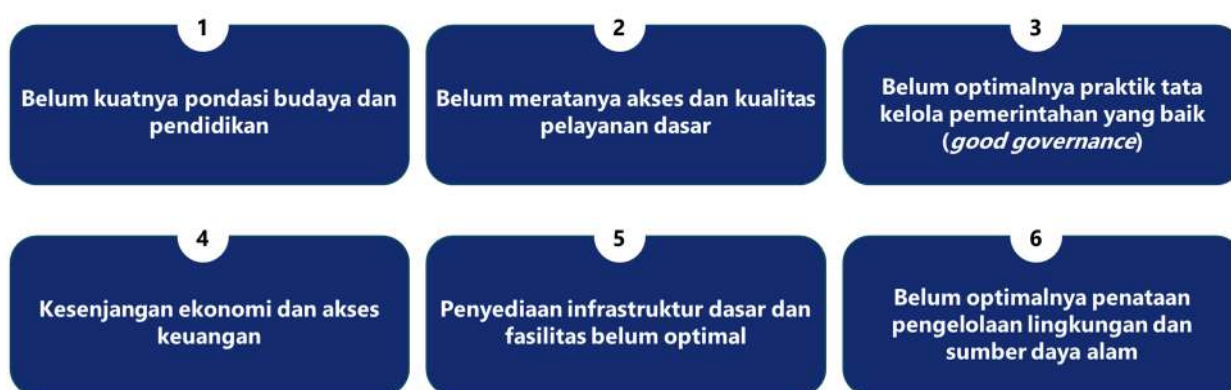
Penurunan risiko bencana di Kabupaten Brebes menunjukkan capaian positif yang memperkuat ketangguhan wilayah terhadap berbagai potensi ancaman alam. Melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, serta pelibatan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi, tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana secara bertahap berhasil ditekan. Capaian ini tidak hanya menurunkan potensi kerugian sosial dan ekonomi, tetapi juga membangun budaya tangguh bencana di tingkat lokal. Dengan strategi adaptif dan berbasis risiko, Kabupaten Brebes semakin siap dalam menghadapi dinamika perubahan iklim dan kejadian bencana di masa mendatang.

- 1) Pada tahun 2021, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Brebes tercatat sebesar 189,94 namun telah mengalami penurunan signifikan menjadi 143,69 pada tahun 2024. Penurunan ini menempatkan Kabupaten Brebes dalam kategori daerah dengan tingkat risiko bencana sedang, yang mencerminkan keberhasilan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi yang telah dilakukan. Capaian tersebut menunjukkan penguatan

kapasitas daerah dalam mengelola risiko bencana secara lebih sistematis dan berbasis data.

2.6.2 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Brebes yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2025-2029. Dalam lingkup makro, permasalahan pembangunan di Kabupaten Brebes dijabarkan dalam enam tema besar permasalahan pembangunan yaitu akses dan kualitas pelayanan dasar; pondasi budaya dan pendidikan; tata kelola pemerintahan; kesenjangan ekonomi dan akses keuangan; infrastruktur dasar dan penyediaan fasilitas; serta penataan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

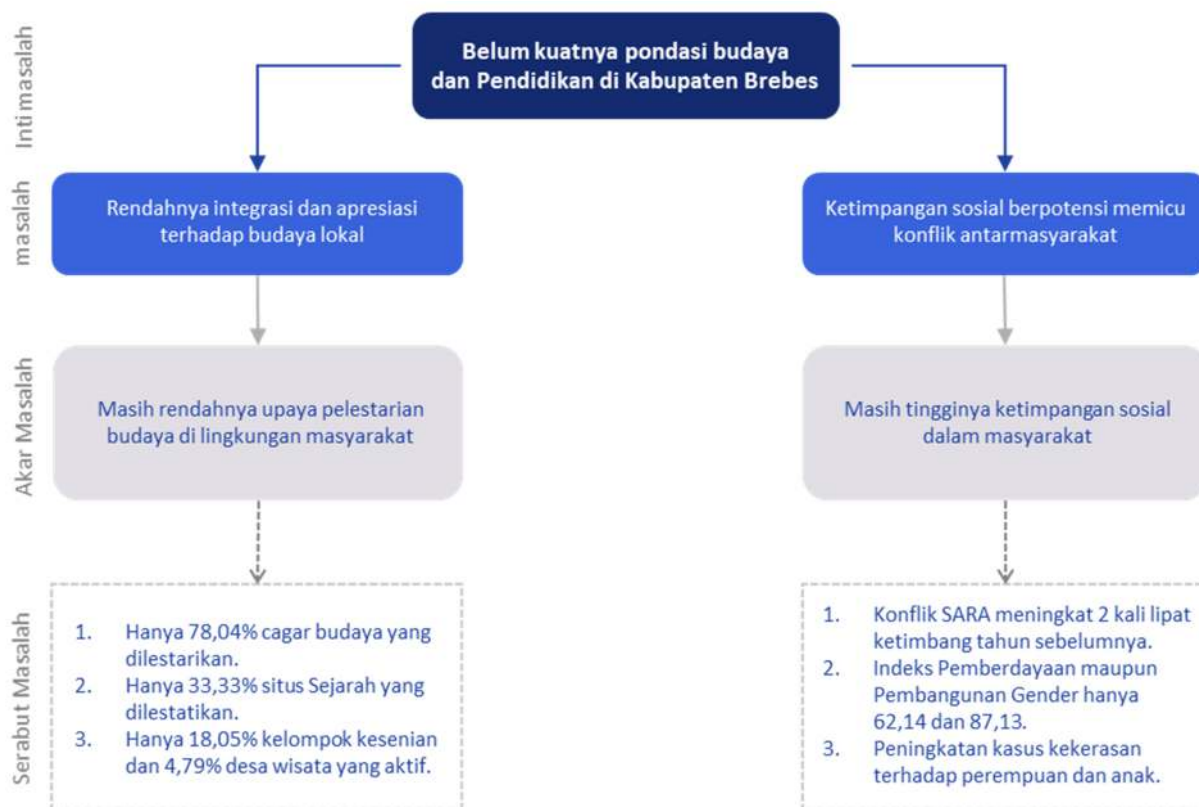


Gambar 2. 45 Gambar Permasalahan Pembangunan Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

2.6.2.1 Permasalahan Pondasi Budaya dan Pendidikan

Kabupaten Brebes memiliki budaya yang beragam. Salah satu indikasi yang menunjukkan keberagaman budaya di Kabupaten Brebes adalah penggunaan bahasa, dimana terdapat dua bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat yaitu Bahasa Jawa dan Bahasa Sunda. Selain itu, keberadaan kampung adat Jalawastu, kesenian daerah yang beragam, dan beberapa cagar budaya yang terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Brebes semakin menegaskan keragaman budaya khas daerah. Idealnya, keragaman budaya yang ada dapat menjadi modal untuk memperkuat kohesi sosial yang ada di masyarakat. Namun, yang menjadi persoalan adalah masyarakat kurang mengapresiasi budaya lokal. Akibatnya, muncul berbagai masalah sosial seperti konflik SARA, ketimpangan gender, dan hilangnya kebanggaan terhadap budaya khas di Kabupaten Brebes.



Gambar 2. 46 Bagan Permasalahan Pondasi Budaya dan Pendidikan Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

a) Rendahnya Integrasi dan Apresiasi Terhadap Budaya Lokal dan Sistem Pendidikan Masyarakat

Persoalan rendahnya integrasi dan apresiasi terhadap budaya lokal dan sistem pendidikan masyarakat disebabkan beberapa faktor. Beberapa faktor pemicu diantaranya adalah muatan lokal bahasa, seni dan budaya daerah belum secara merata diajarkan di semua sekolah. Selain itu, pelestarian cagar budaya dan juga kesenian di Kabupaten Brebes juga masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut:

- a) Per tahun 2023, persentase cagar budaya yang dilestarikan terbilang rendah, yakni hanya 78,04%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seperlima cagar budaya di Kabupaten Brebes belum terlestarikan dengan baik. Padahal, cagar budaya di Kabupaten Brebes berjumlah 82 buah. Dapat disimpulkan bahwa setidaknya 18 cagar budaya di Kabupaten Brebes belum terlestarikan dengan baik hingga kini.
- b) Per tahun 2023, persentase situs sejarah yang dilestarikan juga terbilang rendah, yakni hanya 33,33% dengan jumlah total 6 situs. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hanya 2 situs bersejarah yang terlestarikan hingga kini. Dapat disimpulkan bahwa situs sejarah di Kabupaten Brebes sebagian besar belum terlestarikan.
- c) Persentase kelompok kesenian aktif di tahun 2023 baru sebesar 18,05 persen dari total 1.021 kelompok. Rendahnya kelompok kesenian yang aktif juga berpengaruh terhadap upaya pengembangan potensi desa wisata. Ketiadaan atraksi dari kelompok kesenian menghambat pengembangan desa wisata, dimana pada tahun 2023 baru terdapat 14 desa wisata (4,79 persen) dari total hingga 292 desa.

b) Masih Tingginya Ketimpangan Sosial yang Memicu Konflik

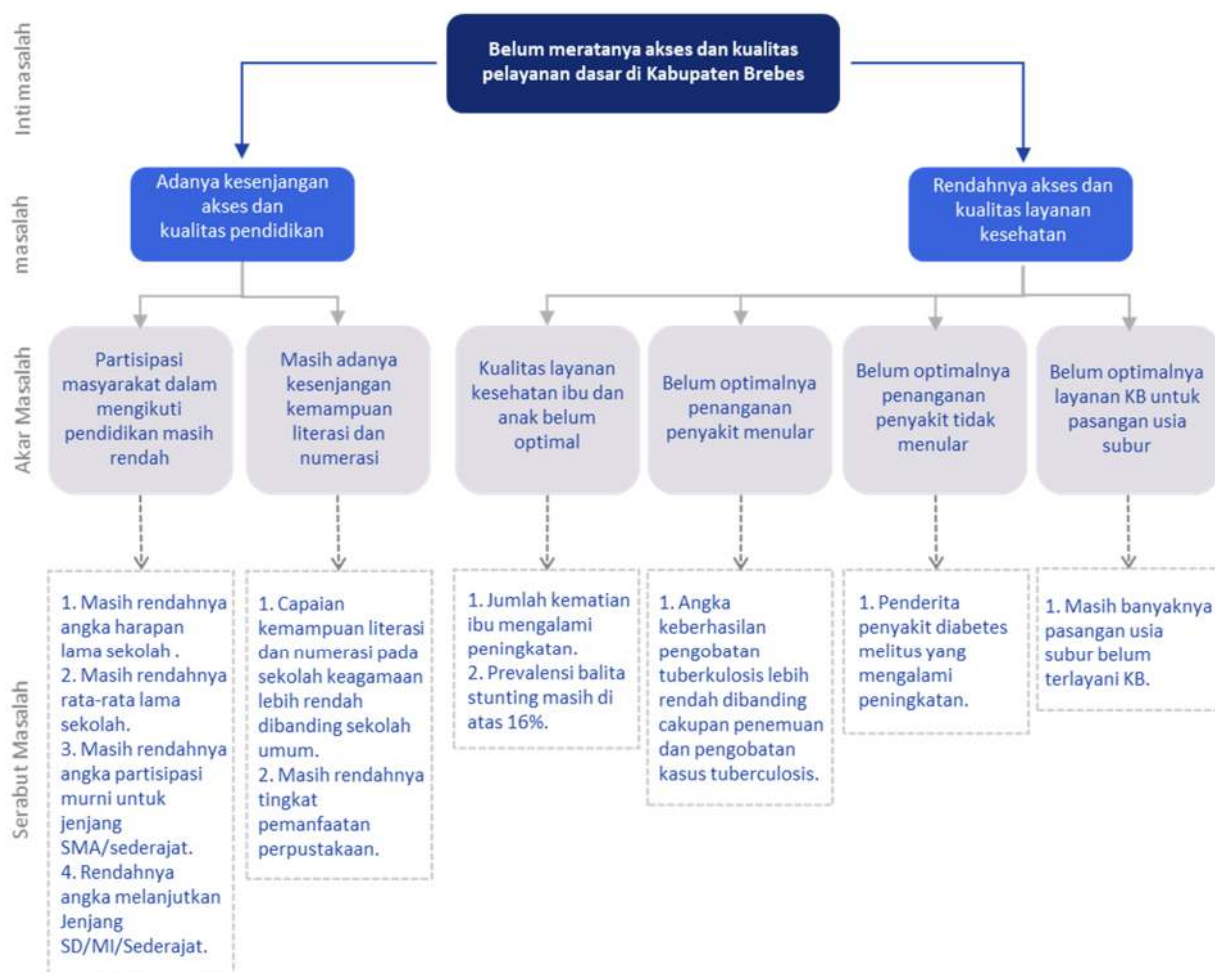
Rendahnya apresiasi terhadap seni budaya menyebabkan kesadaran terhadap keberagaman di lingkungan sosial menjadi rendah. Akibatnya, muncul eskalasi konflik horizontal berbasis SARA. Jumlah konflik SARA di Kabupaten Brebes pada tahun 2023 mencapai 8 kasus. Jumlah tersebut dua kali lebih banyak dibanding tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 terdapat 4 kejadian konflik SARA. Dalam skala yang lebih kecil, rendahnya apresiasi terhadap seni dan budaya luhur lokal juga berpotensi menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun ketimpangan yang terjadi bukanlah ketimpangan pendapatan, melainkan ketimpangan antara kelompok sosial dominan dan resesif dalam relasi kuasa masyarakat. Secara rinci, gambaran mengenai ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

- 1) Masih belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang. Terbukti dengan masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender yang pada tahun 2023 masih berada di angka 62,14 dan 87,13. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai angka 0,44 pada 2023 atau jauh lebih tinggi ketimbang rerata Jawa Tengah yang berada di angka 0,33.
- 2) Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada Tahun 2023 terdapat 57 kasus Kekerasan Terhadap Anak, 44 kasus Persetubuhan Anak, dan 50 kasus Pemerkosaan. Angka tersebut cenderung meningkat ketimbang tahun 2022, yakni 42 kasus Kekerasan Terhadap Anak, 33 kasus Persetubuhan Anak, dan 26 Kasus Pemerkosaan sehingga mengindikasikan bahwa Kabupaten Brebes belum ramah anak.
- 3) Gini Rasio Kabupaten Brebes pada 2024 berada pada angka 0,303 sehingga menjadi yang paling rendah di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat notabene lebih terdistribusi merata ketimbang kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Angka tersebut mengindikasikan ketimpangan yang terjadi bukanlah ketimpangan ekonomi, melainkan ketimpangan sosial dan gender.

2.6.2.2 Permasalahan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar

Akses dan kualitas pelayanan dasar merupakan hal paling esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan dasar yang dimaksud setidaknya meliputi pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Brebes. Yang menjadi persoalan, akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Brebes sampai saat ini masih belum optimal.

Akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan berkaitan erat dengan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan instrumen yang mengukur capaian tiga dimensi kunci dari pembangunan, yaitu: hidup sehat dan umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara ringkas, capaian IPM Kabupaten Brebes tahun 2024 adalah 69,6. Nilai tersebut berkurang 0,11 poin dibanding tahun 2023 sebesar 69,71. Angka tersebut juga berada di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 73,88. Penurunan capaian IPM mengindikasikan penurunan kualitas, baik dari komponen hidup sehat dan umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak.



Gambar 2. 47 Bagan Permasalahan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

Meskipun mengalami peningkatan, capaian nilai komponen penyusun IPM yang berkaitan dengan hidup sehat dan umur panjang dan komponen pengetahuan masih rendah. Dalam komponen hidup sehat dan umur panjang, Usia Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Brebes tahun 2024 sebesar 74,18 yang berada di bawah rata-rata Jawa Tengah. serta komponen pengetahuan masih rendah. Demikian juga dari komponen pengetahuan, dimana rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Brebes tahun 2024 baru mencapai 6,41 tahun. Capaian tersebut juga termasuk yang terendah di Jawa Tengah. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah penduduk Kabupaten Brebes meskipun bukan yang terendah tetapi baru mencapai 12,45 pada 2024.

a) Adanya Kesenjangan Akses dan Kualitas Pendidikan

Permasalahan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Brebes cenderung kompleks dan multidimensional. Isu ini mencakup rendahnya rata-rata lama sekolah, disparitas sarana dan prasarana pendidikan antarwilayah, keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pendidik, serta masih rendahnya capaian literasi dan numerasi di berbagai jenjang pendidikan. Secara rinci, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Brebes merupakan akumulasi dari permasalahan berikut:

- Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 baru mencapai 6,41 tahun. Meskipun mengalami peningkatan 0,1 tahun dibanding tahun 2023, rata-rata

lama sekolah di Kabupaten Brebes berada di bawah rerata Jawa Tengah. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Brebes, terutama yang masih dalam usia sekolah, mengenyam pendidikan formal hanya 6,41 tahun.

- b. Masih rendahnya angka harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data BPS, Harapan lama sekolah Kabupaten Brebes tahun 2024 baru mencapai 12,45 tahun. Hal ini berarti rata-rata peluang penduduk berusia di atas 7 tahun untuk mengenyam pendidikan baru sampai pada jenjang SMA/ sederajat. Angka tersebut berada di bawah rerata Provinsi Jawa Tengah yang menorehkan angka 12,85.
- c. Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD/MI/ Sederajat di tahun 2024 sebesar 99,34 persen. Angka tersebut lebih rendah dibanding tahun 2023 (99,41 persen). Sementara itu, Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/MTs/ Sederajat dan SMA/MA/ Sederajat masing- masing sebesar 84,6 persen dan 55,05 persen. Hal tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan wajib, baik tingkat dasar hingga menengah, masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten lain.
- d. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Brebes tahun 2024 untuk jenjang SD/MI/ Sederajat berada pada angka 105,09 atau mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen dari tahun sebelumnya. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut, Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Brebes pada 2022 sempat mencapai 108,84 persen. Walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2023, sejatinya Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Brebes terbilang fluktuatif dan kecenderungan menurun seiring tahun.
- e. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 pada jenjang SD/MI/ Sederajat mencapai 0,43 atau sebanyak 574 siswa putus sekolah. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2024 sebanyak 639 siswa putus sekolah. Angka Putus Sekolah Kabupaten Brebes mengalami kenaikan signifikan ketimbang tahun 2023 yang menorehkan angka 0,06 dengan total sejumlah 131 kasus siswa SD/MI/ Sederajat putus sekolah dan 345 kasus siswa SMP/MTs/ Sederajat putus sekolah.
- f. Angka Melanjutkan jenjang SD/MI pada tahun 2024 baru mencapai 56 persen. Hal ini berarti baru 56 dari setiap 100 siswa lulus SD yang melanjutkan ke jenjang SMP. Walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar pada angka 53,14%, Angka Melanjutkan jenjang SD/MI tidak dapat dibanggakan sebab menjadi indikasi hambatan dalam mengakses pendidikan dasar, terutama tingkat SD.
- g. Masih terdapat kesenjangan kemampuan literasi dan numerasi antara sekolah umum dengan sekolah keagamaan. Di tahun 2023, nilai kemampuan literasi pada SD Umum adalah 70,89, sedangkan nilai kemampuan literasi pada SD Keagamaan adalah 46,87. Di jenjang SMP, nilai kemampuan literasi pada jenjang SMP Umum adalah 72,09, sedangkan nilai kemampuan literasi pada SMP keagamaan adalah 58,74. Berkaitan dengan kemampuan numerasi, nilai kemampuan numerasi pada SD umum tahun 2023 adalah 63,73, sedangkan nilai kemampuan numerasi pada SD keagamaan baru mencapai 36,43. Di jenjang SMP, nilai kemampuan numerasi pada SMP umum adalah 69,3 pada tahun 2023, sedangkan pada jenjang SMP keagamaan baru mencapai 54,98.
- h. Masih rendahnya jumlah kunjungan perpustakaan per hari. Per tahun 2023, jumlah kunjungan perpustakaan per hari baru mencapai 1.637 penduduk perhari. Dalam kata lain, persentase kunjungan perpustakaan per hari hanya mencapai 0,08% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Brebes.

b) Rendahnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Persoalan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Brebes mencerminkan tantangan dalam penyediaan layanan yang merata, terutama terkait kesehatan ibu dan anak serta penanganan penyakit menular dan tidak menular. Kesenjangan distribusi tenaga medis, keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat turut memperburuk kondisi layanan kesehatan di daerah ini. Secara rinci, persoalan mengenai rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan adalah sebagai berikut:

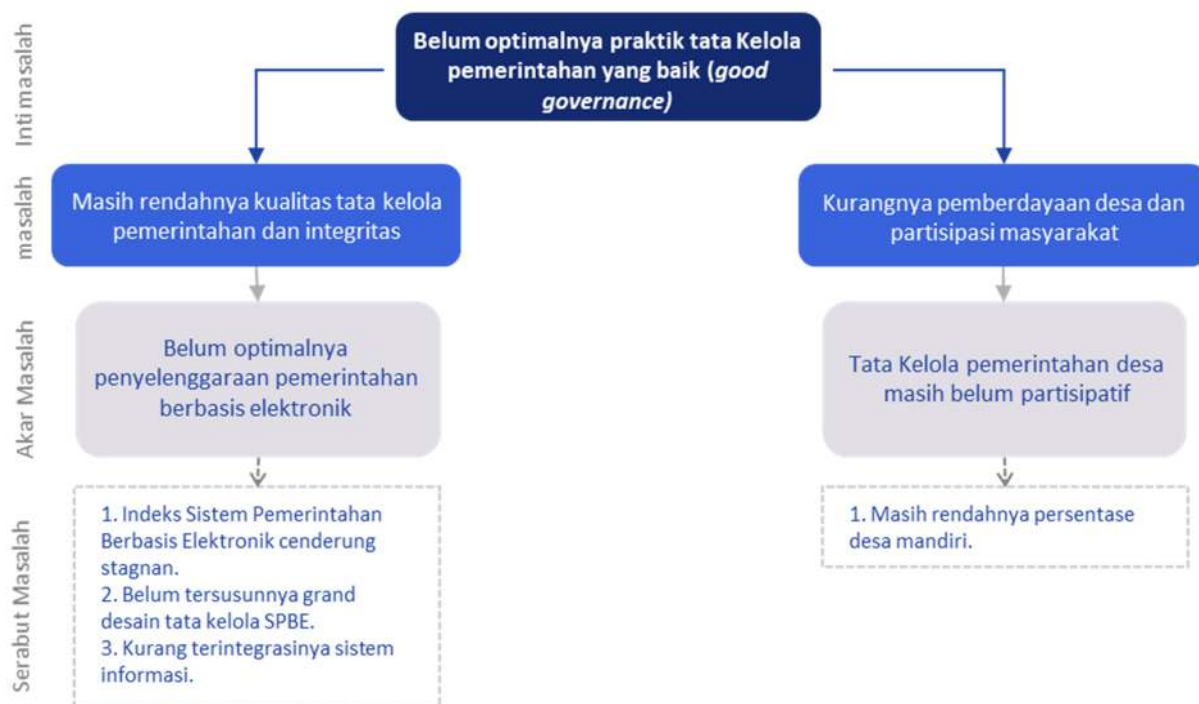
- 1) Pada tahun 2024 jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Brebes mencapai 54 kasus atau tidak mengalami perbaikan ketimbang tahun 2023. Beberapa faktor penyebab terjadinya kasus kematian ibu antara lain pre eklampsia, pendarahan saat dan pasca persalinan, hingga penyakit bawaan ibu hamil seperti hipertensi, gagal jantung, TBC, serta penyakit berisiko menular ke janin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi kematian ibu masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan di Kabupaten Brebes dan justru notabene mengalami peningkatan jumlah pascapandemi COVID-19.
- 2) Angka Kematian Bayi di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 sebesar 12,67 per 1000 kelahiran. Angka tersebut meningkat 0,53 poin ketimbang tahun 2023. Kasus kematian bayi antara lain disebabkan oleh asfiksia, berat badan bayi lahir rendah, kelainan bawaan, sepsis, diare, pneumonia, serta kelainan saluran cerna dan syaraf. Angka kematian bayi Kabupaten Brebes relatif sama dengan rerata Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 12,7 per 1000 kelahiran. Angka tersebut mengindikasikan rendahnya kualitas penanganan kelahiran, asupan nutrisi, maupun kualitas ibu hamil.
- 3) Prevalensi balita dengan gizi buruk di Kabupaten Brebes menorehkan angka sebesar 1,1 persen pada 2024 atau berkurang sebanyak 0,1 poin dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 1,2. Sementara itu, prevalensi stunting di tahun 2024 turut meningkat hingga berada pada angka 21,5 persen dari yang semula 16,23 persen. Diketahui bahwa prevalensi stunting meningkat tajam ketimbang tahun sebelumnya yang hanya berkisar pada 16,23. Prevalensi gizi buruk dan stunting yang meningkat tajam di Kabupaten Brebes mengindikasikan permasalahan terhadap asupan pangan dan nutrisi balita. Hal tersebut berkaitan erat dengan kualitas makanan hingga kemampuan keluarga dalam hal penyediaan pangan yang sehat dan bernutrisi di Kabupaten Brebes.
- 4) Di tahun 2024 jumlah penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Brebes mencapai 21.621 kasus. Angka tersebut meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 19.669 kasus. Kecenderungan peningkatan kasus diabetes melitus di Kabupaten Brebes mengindikasikan konsumsi makanan yang tidak sehat oleh masyarakat. Peningkatan kasus diabetes melitus menandakan kebutuhan mendesak, terutama berkaitan dengan penyediaan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan dengan kualitas yang baik serta dapat diakses oleh masyarakat dari semua golongan pendapatan.
- 5) Persentase keberhasilan pengobatan tuberkulosis masih lebih rendah dibanding persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan. Di tahun 2023, persentase keberhasilan pengobatan tuberkulosis baru mencapai 83,75 persen. Angka tersebut lebih kecil dibanding persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan

memperoleh pengobatan sebesar 90,93 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penanganan penyakit tuberkulosis di Kabupaten Brebes masih belum maksimal.

- 6) Hingga 2024, terdapat 25.879 pasangan, atau berkisar 7,8 persen dari total jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Brebes yang belum terlayani KB . Angka tersebut memang menurun dari tahun 2023 yang berjumlah 32,425 pasangan atau 9,91 persen dari total jumlah pasangan usia subur. Namun, persentase pasangan usia subur yang belum terlayani KB di Kabupaten Brebes berada di bawah rerata Jawa Tengah yang menorehkan angka 7,2 persen. Hal tersebut mengindikasikan kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes masih terbelang belum maksimal.

2.6.2.3 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Brebes berkaitan erat dengan berbagai aspek reformasi struktural dan kelembagaan yang masih menghadapi tantangan. Isu-isu tersebut meliputi reformasi birokrasi yang belum optimal, penyelenggaraan pelayanan publik yang belum sepenuhnya responsif, lemahnya implementasi reformasi hukum, serta masih terbatasnya integritas dan akuntabilitas aparatur. Selain itu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tata kelola pemerintahan desa juga menghadapi berbagai hambatan teknis maupun non-teknis, yang secara keseluruhan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Gambar 2. 48 Bagan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

Secara umum, permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Brebes mencerminkan masih rendahnya kualitas manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tingkat integritas aparatur yang belum optimal serta lemahnya koordinasi antarlembaga turut menghambat proses reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Selain itu, minimnya upaya pemberdayaan desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam

perencanaan serta pengawasan pembangunan menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif.

a) Masih Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Beberapa faktor yang menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kabupaten Brebes meliputi belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta belum tuntasnya proses reformasi birokrasi dan reformasi hukum. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah. Secara rinci, permasalahan terkait rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan integritas dapat diidentifikasi melalui aspek-aspek berikut:

- 1) Masih rendahnya angka persentase sistem informasi yang terintegrasi. Pada tahun 2024 tercatat dari 131 sistem informasi di kabupaten Brebes hanya 8 sistem informasi yang terintegrasi atau hanya 6,11 persen. Hal tersebut menyebabkan rendahnya interkoneksi antara basis data pada setiap sistem informasi. Lebih lanjut, hal tersebut berimplikasi pada lemahnya efektivitas dan efisiensi transfer informasi.
- 2) Sampai tahun 2024 masih terdapat sejumlah 15 daerah *blank spot* total dan *blank spot* sebagian. Masih adanya *blank spot* di Kabupaten Brebes perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh pemangku kepentingan agar seluruh masyarakat Kabupaten Brebes dapat menikmati akses informasi & komunikasi. Lebih lanjut, keberadaan *blank spot* di Kabupaten Brebes, baik total maupun sebagian, mengindikasikan kurang maksimalnya pelayanan dan kinerja sistem jaringan informasi komunikasi.
- 3) Masih rendahnya jumlah arsip vital konvensional yang dialihmediakan. Pada tahun 2024 tercatat jumlah arsip vital konvensional dialihmediakan berkisar pada 26.928 atau hanya 8,21 persen dari 328.050 arsip vital konvensional di Kabupaten Brebes. Diketahui bahwa persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 44,41 persen. Akan tetapi, jumlah arsip vital konvensional yang dialihmediakan meroket hingga mencapai 120 kali lipat.
- 4) Belum terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik, salah satunya adalah kepemilikan akta kelahiran. Sampai dengan tahun 2024 dari jumlah penduduk Kabupaten Brebes 2.066.426 jiwa, hanya 41,94 persen atau sebesar 859.560 jiwa yang mempunyai akta kelahiran. Hal tersebut menimbulkan tantangan dalam hal pencatatan dan dokumen sipil, terutama yang menyangkut kepemilikan akta kelahiran penduduk di Kabupaten Brebes. Sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah kabupaten guna meningkatkan capaian kinerja.
- 5) Masih rendahnya capaian persentase pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/lembaga lain. Pada tahun 2024 persentase pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/lembaga bernilai 0 persen atau memperoleh predikat Sangat Rendah. Dengan kata lain, data kependudukan sama sekali tidak dimanfaatkan oleh instansi atau lembaga di Kabupaten Brebes. Hal tersebut mengakibatkan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan yang belum maksimal dalam pelaksanaan tugas instansi maupun lembaga pemerintahan yang ada di Kabupaten Brebes.
- 6) Tingkat Kesiapan Penilaian/ Risiko Keamanan Informasi di Kabupaten Brebes masih relatif rendah. Tercatat dari 44 Jumlah Sistem Elektronik hanya 38,64% Jumlah Sistem Elektronik yang diuji Kerentanan dan Penilaian Risikonya. Dengan kata lain, hanya 17 Sistem Elektronik yang Diuji Kerentanan dan Penilaian Risiko. Angka tersebut menunjukkan tingginya potensi kerentanan dan risiko sistem elektronik yang belum

diidentifikasi di Kabupaten Brebes. Lebih lanjut, hal tersebut berimplikasi pada tingginya risiko keamanan sistem elektronik yang telah ada di Kabupaten Brebes.

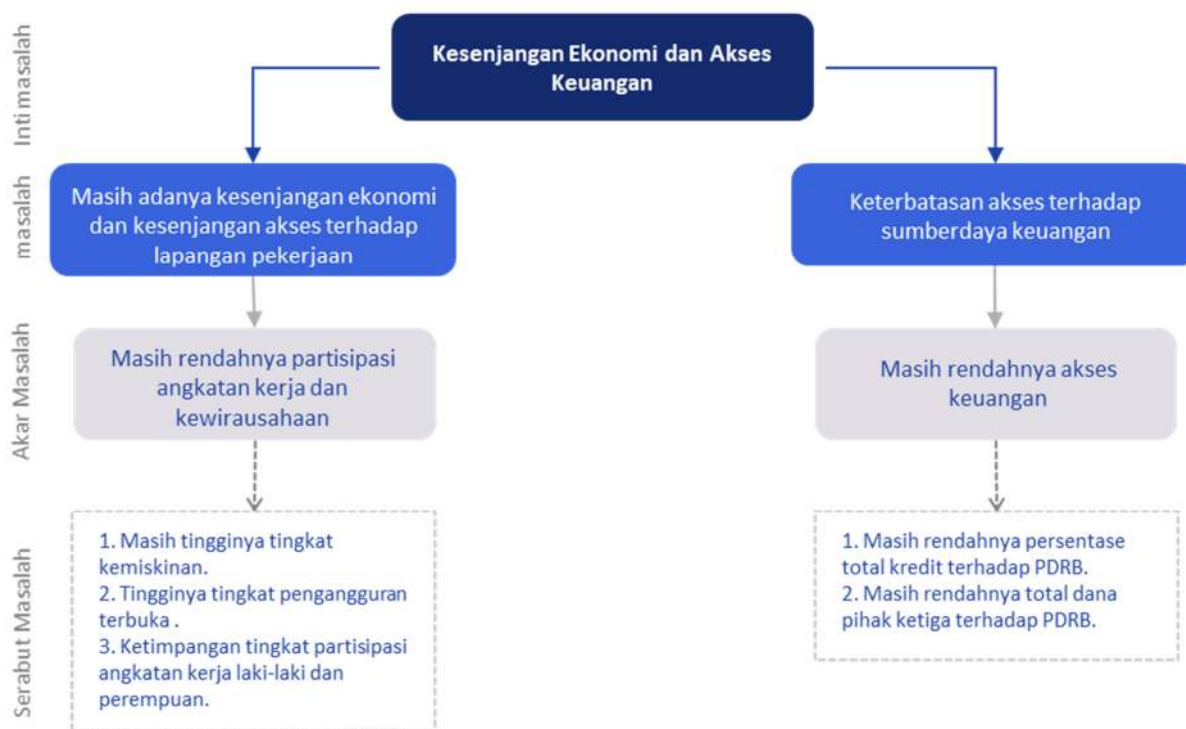
b) Kurangnya Pemberdayaan Desa dan Partisipasi Masyarakat

Kurangnya pemberdayaan desa dan partisipasi masyarakat tercermin dari capaian Indeks Desa Membangun di Kabupaten Brebes yang masih belum optimal, serta rendahnya persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif beroperasi. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan lokal. Permasalahan tersebut dapat diuraikan lebih rinci berdasarkan data berikut:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan BUMDes sebagai pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada tahun 2024 tercatat BUMDes aktif berjumlah 229 dari jumlah keseluruhan 308. Dengan kata lain, hanya berkisar 57,79 persen BUMDes di Kabupaten Brebes yang aktif. Hal tersebut menyebabkan komersialisasi potensi daerah menjadi kurang maksimal.
- 2) Berdasarkan data Indeks Desa Membangun, per 2024, hanya terdapat 25 dari 292 desa di Kabupaten Brebes yang masuk dalam kategori Mandiri. Sementara itu, 95 desa masuk kategori Maju, dan sebanyak 172 desa di Kabupaten Brebes masih dalam kategori Berkembang. Dengan kata lain, nyaris 60 persen desa-desa di Kabupaten Brebes masih terklasifikasi dalam kategori Berkembang. Hal itu mengindikasikan kapasitas ekonomi desa-desa yang ada di Kabupaten Brebes belum maksimal.

2.6.2.4 Permasalahan Kesenjangan Ekonomi dan Akses Keuangan

Secara makro, permasalahan kesenjangan ekonomi di Kabupaten Brebes dapat diidentifikasi melalui indikator jumlah penduduk miskin yang masih tinggi, yaitu mencapai lebih dari 286 ribu jiwa. Angka ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Apabila dianalisis lebih lanjut, permasalahan kesejahteraan ini berkaitan erat dengan kendala di sektor ketenagakerjaan, seperti rendahnya kesempatan kerja dan kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang memadai dan inklusif.



Gambar 2. 49 Bagan Permasalahan Kesenjangan Ekonomi dan Akses Keuangan Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

a) Masih Adanya Kesenjangan Ekonomi dan Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan

Pembangunan kesejahteraan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang layak, bermartabat, serta kebutuhan dasarnya terpenuhi secara menyeluruh. Di Kabupaten Brebes, permasalahan kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Permasalahan tersebut meliputi beberapa aspek berikut:

- 1) Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang pada 2024 berjumlah 283.280 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 140 jiwa ketimbang tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan stagnasi penanganan kemiskinan di Kabupaten Brebes. Lebih lanjut, hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes tidak bersifat inklusif bagi kelompok-kelompok paling rentan, terutama masyarakat miskin. Akhirnya, disparitas sosial ekonomi masyarakat cenderung melebar.
- 2) Pada 2023, masih terdapat 19.471 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang harus segera ditangani. Meskipun demikian, hingga kini hanya 3.049 PMKS yang ditangani oleh Dinas Sosial, meliputi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial di luar panti. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial, terutama terhadap masyarakat rentan masih lemah. Apabila tidak ditangani, PMKS akan menjadi beban sosial ekonomi yang menghambat pembangunan wilayah maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia wilayah Kabupaten Brebes.
- 3) Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada tahun 2024 merilis angka pengangguran di Kabupaten Brebes menempati urutan tertinggi di Jateng yakni 8,98 % dari jumlah

penduduk yang berusia produktif. Situasi ini menjadi indikasi lemahnya daya serap pasar tenaga kerja lokal serta keterbatasan sektor produktif dalam menciptakan pekerjaan baru. Jika tren ini berlanjut, maka dampak yang ditimbulkan adalah peningkatan angka kemiskinan, pelebaran jurang ketimpangan sosial, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Brebes secara keseluruhan.

- 4) Pada tahun 2024 upah minimum Kabupaten Brebes jika dibandingkan dengan empat Kabupaten lainnya di Eks-Karesidenan Pekalongan, upah minimum Kabupaten Brebes menempati urutan paling rendah yaitu sebesar Rp. 2.239.801. Upah minimum yang rendah berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan membuat Kabupaten Brebes kurang kompetitif dalam menarik tenaga kerja berkualitas maupun investasi. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada lemahnya dinamika perekonomian lokal dan kesejahteraan rakyat.
- 5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. TPAK perempuan di Kabupaten Brebes pada 2023 adalah 50,08, sedangkan TPAK laki-laki sebesar 81,78. Ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Brebes. Rendahnya TPAK perempuan mengindikasikan belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan ekonomi daerah, serta adanya persoalan aksesibilitas, norma sosial, maupun juga peluang kerja yang belum ramah terhadap golongan perempuan.

b) Keterbatasan Akses Terhadap Sumber daya Keuangan

Keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan merupakan salah satu permasalahan struktural yang memperlebar kesenjangan ekonomi di Kabupaten Brebes. Kondisi ini tercermin dari rendahnya inklusi keuangan, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta masyarakat berpendapatan rendah yang masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan literasi keuangan, minimnya agunan, serta distribusi lembaga keuangan yang belum merata, khususnya di wilayah perdesaan. Akibatnya, potensi ekonomi lokal tidak dapat dimobilisasi secara optimal, sehingga memperlambat proses pemerataan pembangunan dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

- 1) Total kredit per PDRB di Kabupaten Brebes tahun 2023 baru mencapai 34 persen. Kondisi ini mengindikasikan terbatasnya akses pelaku usaha dan masyarakat terhadap pembiayaan formal, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan sektor produktif serta memperlambat perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara luas. Dengan kata lain, intermediasi keuangan daerah sepanjang tahun 2023 masih belum berjalan optimal.
- 2) Total dana pihak ketiga terhadap PDRB di Kabupaten Brebes baru mencapai 20 persen. Hal tersebut mencerminkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan atau rendahnya tingkat literasi keuangan di lingkungan masyarakat. Implikasi dari kondisi ini adalah terbatasnya sumber dana lokal yang dapat dihimpun untuk mendukung investasi maupun perluasan atau ekspansi ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat memperlambat pembangunan ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.
- 3) Masih rendahnya status koperasi sehat. Tercatat dari 412 koperasi di Kabupaten Brebes hanya 32 koperasi yang berstatus sehat atau 8,25 persen pada 2024. Angka tersebut menurun dari yang semula 50 koperasi berklasifikasi sehat atau berkisar 12,2

persen dari total koperasi di Kabupaten Brebes. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya kapasitas kelembagaan koperasi dalam menjalankan fungsi ekonomi secara efektif. Kondisi ini tidak hanya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi, tetapi juga membatasi peran koperasi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan anggotanya.

- 4) Masih rendahnya UMKM aktif. Dari 107.082 UMKM, hanya 25.298 UMKM yang berstatus aktif atau sekitar 23,62 persen pada 2024. Hal tersebut menunjukkan lemahnya dinamika usaha kecil dan menengah di Kabupaten Brebes. Rendahnya tingkat aktivitas UMKM ini menjadi penghambat utama bagi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan pengurangan kesenjangan pendapatan.
- 5) Masih rendahnya persentase usaha mikro yang berkembang. Tercatat hanya 25.298 UMKM, atau total hanya 23,62 persen dari total 107.082 UMKM di Kabupaten Brebes yang tergolong dalam kategori berkembang pada 2024. Angka tersebut mengindikasikan keterbatasan kemampuan pelaku usaha mikro untuk melakukan ekspansi skala usaha dan meningkatkan produktivitas. Fenomena ini berimplikasi pada terjebaknya sebagian besar usaha mikro dalam sektor informal yang berproduktivitas rendah, sehingga membatasi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan yang menunjang pergerakan perekonomian. Pada tahun 2024, pasar dalam kondisi baik hanya berjumlah 12 dari total 26 pasar, atau hanya sekitar 46,15 persen. Hal tersebut menunjukkan lemahnya dukungan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Brebes. Keterbatasan ini berpotensi menghambat aktivitas perdagangan lokal, menurunkan efisiensi distribusi barang, serta melemahkan daya saing produk lokal, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- 7) Menurunnya persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar daerah. Tercatat bahwa dalam tempo 4 tahun terakhir (tahun 2021-2024), terjadi penurunan persentase realisasi target penerimaan pendapatan pasar daerah dari 93,20 persen pada tahun 2021 turun menjadi 67 persen pada tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan target capaian setiap tahun yang tidak diikuti oleh penambahan realisasi penerimaan pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara target pendapatan dan kemampuan riil pasar di Kabupaten Brebes untuk menghasilkan pendapatan. Situasi ini mengindikasikan adanya stagnasi aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional yang dapat memperburuk kondisi fiskal.
- 8) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menurun dari yang semula 15,61% pada 2023 menjadi 12,71% pada 2024. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Brebes didominasi oleh dana transfer sebesar 87,17%, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, proporsi pendapatan daerah lain berada pada titik terendah, yakni hanya 0,12%.

2.6.2.5 Permasalahan Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Fasilitas

Infrastruktur dasar merupakan prasyarat penting yang mendukung kelancaran berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang memadai tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga. Selain itu, fasilitas pendukung seperti sarana air minum dan sanitasi memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 2. 50 Bagan Permasalahan Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Fasilitas Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

a) Kurangnya Akses Terhadap Hunian Layak, Sanitasi Aman, dan Air Bersih

Untuk mewujudkan hunian layak memerlukan sarana pendukung yang memadai. Yang menjadi persoalan, saat ini masih terdapat kawasan kumuh dan masih adanya beberapa sarana yang belum mendukung. Gambaran rinci mengenai permasalahan kurangnya akses terhadap hunian layak, sanitasi aman dan air bersih adalah sebagai berikut:

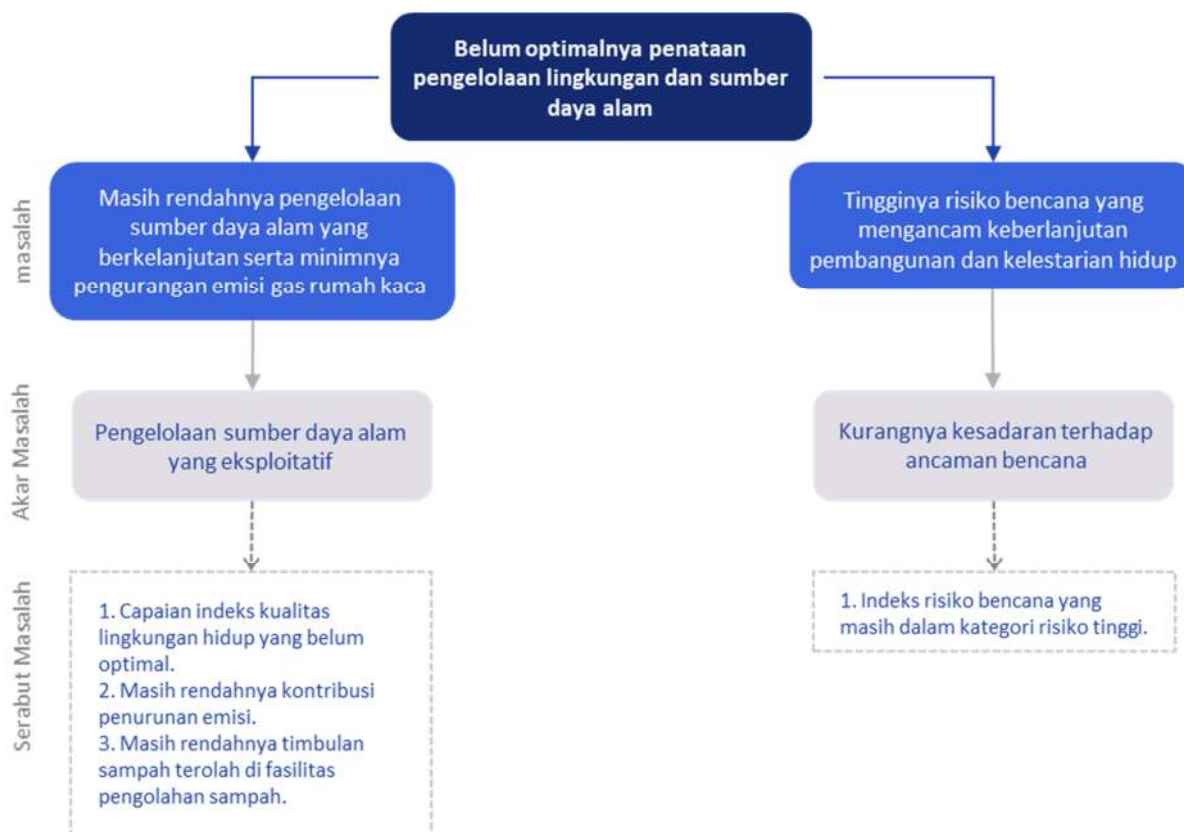
- 1) Masih rendahnya jumlah rumah sehat layak huni yang terbangun di kawasan kumuh. Pada tahun 2024 persentase jumlah rumah sehat layak huni yang terbangun di kawasan kumuh ditargetkan sebesar 87 persen dengan realisasi hanya 80 persen. Kondisi ini berimplikasi pada terhambatnya peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh, memperpanjang eksistensi lingkungan tidak sehat, serta menurunkan efektivitas program pengentasan kemiskinan melalui perbaikan fasilitas.
- 2) Masih adanya kawasan kumuh, pada tahun 2024 tercatat luas kawasan kumuh 409,51 ha. Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Brebes berkurang 13,08 persen ketimbang 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan permukiman masih belum mampu mengimbangi laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk miskin yang terkonsentrasi di perkotaan, sehingga dapat terus memperparah ketimpangan sosial serta membebani upaya pemerataan pembangunan.
- 3) Masih rendahnya persentase penurunan kawasan kumuh di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2024 persentase penurunan kawasan kumuh ditargetkan sebesar 23,51 persen dengan realisasi hanya 15,5 persen. Dengan kata lain, hanya 64,02 persen target penurunan kawasan kumuh yang tercapai. Hal tersebut mengindikasikan adanya hambatan signifikan dalam pelaksanaan program peremajaan kawasan kumuh di Kabupaten Brebes. Keterlambatan ini berdampak pada semakin lambatnya

penciptaan lingkungan permukiman yang sehat dan layak, yang pada akhirnya dapat memperbesar risiko sosial ekonomi, seperti kesehatan masyarakat yang buruk dan rendahnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Brebes.

- 4) Cakupan rumah tangga perkotaan yang menggunakan air minum jaringan perpipaan baru mencapai 93,64 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian kecil penduduk perkotaan di Kabupaten Brebes masih belum menikmati akses terhadap air minum layak. Ketidakmerataan ini berpotensi memperburuk ketimpangan layanan dasar, meningkatkan risiko penyakit berbasis air, serta menurunkan kualitas hidup, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan di wilayah perkotaan.
- 5) Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di tahun 2024 mencapai 100%. Hal ini merupakan perkembangan positif yang menunjukkan keberhasilan program infrastruktur sanitasi dasar. Pencapaian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengurangan risiko penyakit menular, serta penciptaan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan layak huni, yang menjadi pondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan.
- 6) Persentase rumah tangga hunian layak di Kabupaten Brebes tahun 2024 baru mencapai 90.38 persen, atau dengan kata lain mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 10 persen rumah tangga yang hidup dalam kondisi hunian tidak layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penyediaan perumahan layak masih cukup besar, dan jika tidak segera diatasi, dapat memperlambat pencapaian target pembangunan sosial serta memperbesar kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat.

2.6.2.6 Permasalahan Penataan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam merupakan tantangan utama yang harus dihadapi dalam lima tahun ke depan, terutama mengingat masih seringnya praktik pengelolaan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Ketidakseimbangan ini berpotensi merusak ekosistem dan mengurangi kapasitas sumber daya alam untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Selain itu, ancaman risiko bencana alam juga menjadi faktor kritis yang dapat mengganggu kelangsungan pembangunan serta kelestarian kehidupan masyarakat dan lingkungan di wilayah tersebut.



Gambar 2. 51 Bagan Permasalahan Penataan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2024

a) Masih Rendahnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan serta Minimnya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Brebes belum memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian alam. Pengelolaan sumber daya alam juga berkaitan dengan masih minimnya pengelolaan potensi sumber daya di kawasan pesisir. Persoalan ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

- 1) Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA). Pada tahun 2024 IKLH masih berada di angka 73,53. Berdasarkan standar Kementerian Lingkungan Hidup, angka tersebut termasuk dalam kategori kurang. Sedangkan IKA sebesar 54,78.
- 2) Persentase kontribusi penurunan emisi baru sebesar 0,26 persen pada capaian provinsi.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui 3R (reduce, reuse, recycle). Per tahun 2024, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Brebes mencapai 372.861,5 ton. Dari jumlah timbulan sampah tersebut, hanya 20,77 persen yang terolah di fasilitas pengolahan sampah.
- 4) Masih rendahnya persentase produksi perikanan tangkap dan perairan umum. Pada tahun 2024 tercatat terjadi peningkatan produksi hanya 1,7 persen.
- 5) Terjadi peningkatan produksi perikanan budi daya, tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2024 produksi perikanan budi daya meningkat menjadi 75.086,12 ton dari tahun 2023 sebesar 74.934,94 ton.

- 6) Belum optimalnya perkembangan produksi garam. Tercatat pada tahun 2023 produksi garam menurun menjadi 49.057 ton dari tahun 2022 sebesar 57.195 ton.
- 7) Sebagian besar komoditas yang diproduksi di Kabupaten Brebes mengalami defisit. Komoditas-komoditas di Kabupaten Brebes yang mengalami defisit antara lain seperti kedelai (15.889,99 ton), kacang tanah (385,14 ton), ubi kayu (2.735,42 ton), ubi jalar (5.767,17 ton), dan gula (16.209,32 ton).
- 8) Penurunan luasan kawasan hutan di Kabupaten Brebes sejak tahun 2018 – 2021 dimana pada tahun 2018 luasan kawasan hutan di Kabupaten Brebes seluas 50.030,19 ha dan pada tahun 2021 menurun menjadi 50.009,40 ha. Pada tahun 2018 luasan hutan produksi seluas 23.133,03 ha dan pada tahun 2021 menurun menjadi 23.128,28 ha.
- 9) Nilai PPH Susenas mengalami penurunan yang pada tahun 2023 berkisar pada angka 95,7 menjadi 90,42 pada tahun 2024. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebanyak 5,28 poin

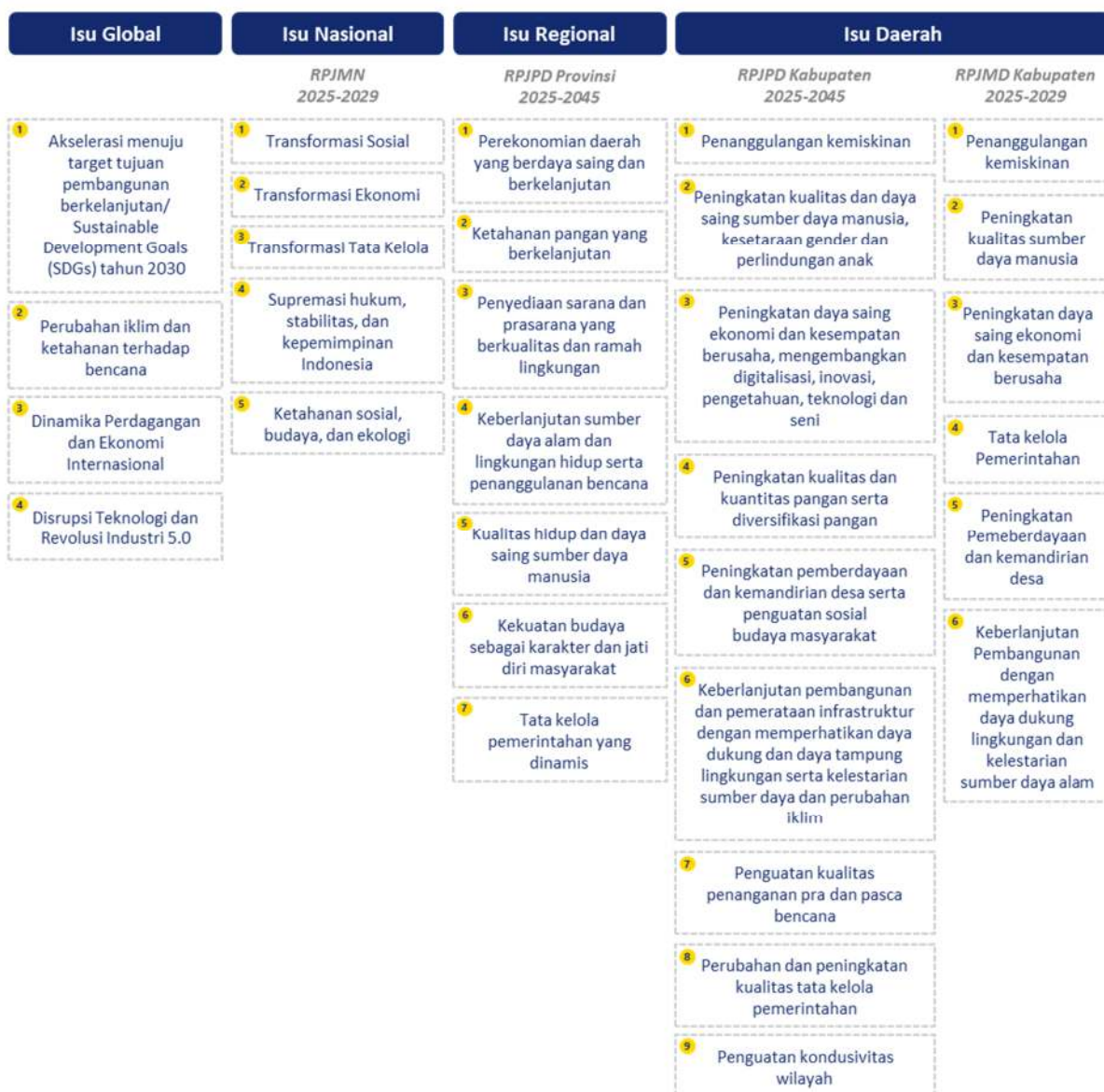
b) Masih Tinggi Risiko Bencana yang Mengancam Keberlanjutan Pembangunan dan Kelestarian Hidup

Risiko bencana yang ada di Kabupaten Brebes tergolong tinggi. Risiko bencana di wilayah Kabupaten Brebes merentang dari risiko bencana banjir, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem, abrasi, dan kekeringan. Risiko bencana tercermin dalam nilai indeks risiko bencana yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan data BNPB tahun 2024, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Brebes tahun 2024 adalah 143,69. Nilai tersebut menjadikan Kabupaten Brebes sebagai daerah dengan kelas risiko sedang terhadap bencana. Sebagai contoh, terdapat 46.356,10 Ha (26 persen) luasan kelas sangat tinggi terhadap bencana tanah longsor. Sebaliknya, hanya 1.028,20 Ha atau 1 persen luasan dengan kategori atau kelas sangat rendah. Hal tersebut mengindikasikan kerawanan terhadap bencana alam, terutama tanah longsor yang masih tinggi di Kabupaten Brebes. Lebih lanjut, tingginya kerawanan dan risiko terhadap bencana menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Brebes yang lebih berkelanjutan.

2.6.3 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rumusan isu strategis menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala global, nasional, dan regional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam jangka menengah. Rumusan isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Perumusan isu strategis dilakukan melalui telaah dokumen yang bersumber dari berbagai laporan, dokumen perencanaan pembangunan nasional (Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2029-2045 dan RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045).

Isu-Isu Strategis



Gambar 2. 52 Bagan Isu-Isu Strategis Kabupaten Brebes

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2025

2.6.3.1 Isu Global

Isu global merupakan isu-isu yang menjadi pembahasan pada skala global atau dunia. Dalam pembahasan ini, terdapat tiga isu global yang menjadi perhatian. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dari ketiga isu global tersebut.

1) Akselerasi Menuju Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030

Laporan capaian SDGs yang dirilis oleh PBB mengungkapkan bahwa sampai tahun 2024, secara global baru 17 persen target SDGs yang berjalan sesuai rencana. Sementara itu, 66 persen target capaian SDGs berada pada kategori moderat stagnan, dan 17 persen target mengalami kemunduran. Progress yang lambat disebabkan oleh beratnya upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19, eskalasi konflik, tensi geopolitik yang meningkat di beberapa kawasan, dan perubahan iklim. Periode 2025-2029 merupakan fase krusial bagi

negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk merealisasikan target SDGs di tahun 2030. Pemerintah Kabupaten Brebes perlu memperhatikan dinamika yang terjadi berkaitan dengan pencapaian target SDGs. Upaya kolaborasi antar aktor di berbagai tingkatan, termasuk pemerintah desa sebagai entitas pemerintahan terkecil perlu dilakukan agar target SDGs di tahun 2030 dapat terealisasi tanpa ada satupun yang tertinggal (no one left behind).

2) Perubahan Iklim dan Ketahanan Terhadap Bencana

Berdasarkan kajian yang dilakukan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), suhu bumi pada tahun 2030 diperkirakan meningkat 1,5 derajat Celcius dibanding masa pra industri. Peningkatan suhu bumi akan diikuti perubahan iklim, yang berpotensi menyebabkan bencana. Ancaman bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim antara lain meliputi kekeringan dan kelangkaan air bersih serta gelombang panas yang mematikan. Perubahan iklim juga akan berpengaruh pada pola tanam dan hasil panen komoditas pertanian. Ancaman perubahan iklim yang ditandai dengan naiknya permukaan air laut juga berdampak pada masyarakat nelayan dan penduduk yang tinggal di kawasan pesisir seiring. Pemerintah Kabupaten Brebes perlu mengakomodir upaya mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Upaya mitigasi bencana akibat perubahan iklim perlu dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Selain itu, pemerintah Kabupaten Brebes juga perlu meningkatkan kesiagaan ketahanan pangan untuk mengantisipasi risiko bencana kekurangan pangan akibat perubahan iklim.

3) Dinamika Perdagangan dan Ekonomi Internasional

Disrupsi teknologi merupakan sebuah transformasi mendasar secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi digital. Disrupsi teknologi telah mendorong munculnya inovasi baru yang merubah pola-pola konvensional, menciptakan pola-pola baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Salah satu contoh hasil disrupsi teknologi adalah penyelenggaraan kelas secara daring, yang memungkinkan peserta didik mengikuti pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi. Disrupsi teknologi yang terjadi secara terus menerus mendorong munculnya revolusi industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan teknologi robot dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam jangka menengah, adanya disrupsi teknologi yang mendorong revolusi industri 5.0 menimbulkan peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah. Kemajuan teknologi yang pesat membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan inovasi berbasis teknologi. Selain itu, teknologi yang berkembang pesat juga dapat mendorong peningkatan daya saing daerah, dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti tindak kejahatan siber (cyber crime), kekerasan gender berbasis online, dan tindak kejahatan lainnya.

2.6.3.2 Isu Nasional

Penyusunan Isu Nasional mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, khususnya pada Tahap 1 Periode 2025–2029. Dalam konteks perencanaan teknokratis, identifikasi isu nasional

menjadi pondasi utama untuk merumuskan strategi pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Proses ini mempertimbangkan dinamika global, nasional, serta tantangan struktural yang dihadapi Indonesia dalam lima tahun pertama periode RPJPN. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan mencerminkan kesinambungan antara visi jangka panjang dan kebutuhan pembangunan jangka menengah secara strategis.

1) Transformasi Sosial

Isu Transformasi Sosial dijabarkan melalui dua poin utama, yakni: (1) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial; dan (2) peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Akses yang merata terhadap layanan dasar tersebut menjadi prasyarat untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat pondasi pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk membentuk individu yang sehat, terdidik, dan memiliki keterampilan yang relevan terhadap zaman.

2) Transformasi Ekonomi

Isu Transformasi Ekonomi dijabarkan melalui lima poin utama, yakni: (1) Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan; (2) Peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja; (3) Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama; (4) Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia; dan (5) Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, utamanya di luar Pulau Jawa. Transformasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan nilai tambah sumber daya domestik. Peningkatan kapasitas riset dan pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa ditujukan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan wilayah.

3) Transformasi Tata Kelola

Isu Transformasi Tata Kelola dijabarkan melalui delapan poin utama, yakni: (1) Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi; (2) Penyempurnaan pondasi penataan regulasi; (3) Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi; (4) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit; (5) Kebijakan pembangunan berbasis bukti; (6) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan; (7) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan (8) Penguatan kapasitas masyarakat sipil. Transformasi ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan. Reformasi birokrasi, penguatan kapasitas regulasi, dan masyarakat sipil menjadi elemen penting untuk memastikan kebijakan pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Tata kelola yang baik menjadi pondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan.

4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Isu Transformasi Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dijabarkan melalui sembilan poin utama, yakni: (1) Pembaharuan substansi hukum; (2) Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian; (3) Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan masyarakat, keamanan insani, dan keamanan siber; (4) Penguatan lembaga demokrasi yang akuntabel, digital, dan berbasis nilai; (5) Menjaga stabilitas harga dan daya beli serta keberlanjutan fiskal yang adaptif; (6) Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan; (7) Konsolidasi kebijakan diplomasi untuk

memperkuat sinergi luar negeri; (8) Pembangunan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim; serta (9) Dukungan industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri. Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum, stabilitas nasional, dan ketahanan negara dalam menghadapi dinamika geopolitik serta tantangan multidimensi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai, sistem hukum dan pertahanan Indonesia diarahkan menjadi lebih responsif, modern, dan berdaulat dalam menjaga integritas.

5) Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Isu Transformasi Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup dijabarkan melalui enam poin utama, yakni: (1) Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan penguatan modal sosial; (2) Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi perubahan dan bencana; (3) Penguatan riset, inovasi, dan teknologi untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (4) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, termasuk energi baru terbarukan; (5) Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan SDA dan lingkungan; serta (6) Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. Transformasi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan manusia yang berakar pada nilai dan budaya bangsa dengan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan memperkuat daya sosial dan lingkungan, Indonesia diharapkan mampu menjaga kualitas hidup masyarakat sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim global.

6) Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Isu Transformasi Wilayah dijabarkan melalui lima poin utama, yakni: (1) Peningkatan pembangunan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi infrastruktur dan energi; (2) Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera–Jawa); (3) Percepatan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang terintegrasi dengan konektivitas udara, darat, dan digital; (4) Pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar, termasuk penyiapan enam klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN); serta (5) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti listrik dengan *micro grid*. Transformasi wilayah ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan antar daerah melalui peningkatan keterhubungan dan aksesibilitas antarwilayah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi tersebar merata dan inklusif, sejalan dengan agenda pemerataan pembangunan.

7) Kestinambungan Pembangunan

Isu Transformasi Pembiayaan Pembangunan dijabarkan melalui dua poin utama, yakni: (1) Reformasi tata kelola fiskal; dan (2) Mobilisasi serta optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah. Reformasi tata kelola fiskal diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara secara berkelanjutan, termasuk penguatan kualitas belanja dan pengendalian risiko fiskal. Di sisi lain, peningkatan peran pembiayaan non pemerintah melalui skema kemitraan dan instrumen pembiayaan inovatif menjadi strategi penting dalam memperluas ruang fiskal pemerintah. Kombinasi kedua pendekatan ini menjadi landasan penting untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Adapun Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 sebagaimana dikutip dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025- 2029 adalah “Megapolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan”. Wilayah Jawa memiliki kontribusi tertinggi dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi ekonomi yang bersumber dari kekuatan aglomerasi perkotaan yang efisien, berkualitas dan berkelanjutan serta pengembangan industri padat karya terampil, industri berteknologi tinggi, pertanian pangan, ekonomi kreatif dan perguruan tinggi riset berkelas dunia. sementara itu, tema pembangunan untuk Jawa Tengah adalah “penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional”. Adapun highlight arah kebijakan untuk Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

1) Transformasi Sosial

Transformasi sosial di Jawa Tengah difokuskan pada penguatan pendidikan tinggi berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) guna menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan mendukung ekonomi berbasis pengetahuan. Pengembangan kapasitas riset dan inovasi di perguruan tinggi diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti teknologi, pertanian, dan manufaktur. Di samping itu, percepatan penuntasan dan pencegahan stunting menjadi prioritas melalui penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, penguatan layanan kesehatan primer, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola asuh dan pola makan yang sehat.

2) Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi diarahkan pada penguatan sektor industri melalui pengembangan kawasan strategis industri di Pantura Jawa Tengah, yang mencakup industri kimia, logam dan bahan galian, mesin, migas, serta industri aneka yang berbasis pada keunggulan lokal dan daya saing global. Investasi infrastruktur akan dilanjutkan melalui pembangunan lanjutan jalan tol Trans Jawa untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan efisiensi logistik. Selain itu, penerapan meteran listrik pintar (smart meter) akan didorong untuk meningkatkan akurasi pencatatan konsumsi listrik, efisiensi energi, dan transparansi layanan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi berbasis teknologi digital.

3) Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola difokuskan pada penguatan sistem kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Langkah-langkah reformasi birokrasi akan diimplementasikan secara sistematis, termasuk digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, penguatan regulasi dan kelembagaan dalam pengelolaan layanan dasar, seperti air minum dan sanitasi, akan dilakukan melalui integrasi sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik, guna meningkatkan efisiensi pelayanan dan keberlanjutan lingkungan.

4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Supremasi hukum dan stabilitas sosial menjadi prasyarat penting bagi percepatan pembangunan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan dan ketertiban akan dilakukan melalui optimalisasi peran aparat penegak hukum, penguatan sistem deteksi dini, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang kondusif. Berdasarkan data tahun 2022, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kejadian

kejahatan tertinggi ketujuh secara nasional, yaitu sebanyak 8.909 kasus, sehingga peningkatan efektivitas penanganan kejahatan menjadi prioritas untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas sosial yang mendukung iklim investasi dan pembangunan.

5) Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi akan dilaksanakan melalui pembangunan kawasan strategis agrikultur yang terintegrasi dengan sistem distribusi pangan nasional untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang. Upaya konservasi wilayah pesisir utara dan lahan kritis akan diperkuat melalui rehabilitasi ekosistem, perlindungan zona rawan bencana, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah juga akan mendorong perluasan akses terhadap layanan sanitasi aman berbasis sistem terpusat, yang ditopang oleh penguatan kapasitas tata kelola daerah, peningkatan pendanaan infrastruktur sanitasi, serta harmonisasi kebijakan air minum dan limbah domestik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

2.6.3.3 Isu Regional (Provinsi Jawa Tengah)

Terdapat tujuh isu strategis pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Tujuh isu strategis tersebut berkaitan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, kualitas sarana dan prasarana, lingkungan hidup dan sumber daya alam, sumber daya manusia, kebudayaan, dan tata kelola pemerintahan. Secara rinci, isu strategis pembangunan Jawa Tengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1) Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Tantangan di sektor perekonomian di Jawa Tengah ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global.

2) Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Isu besar mengenai ketahanan pangan di Jawa Tengah adalah bagaimana menjamin ketersediaan pangan dalam jangka panjang dengan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu dan antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga.

3) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Isu strategis lainnya adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan dan kelompok berkebutuhan

husus perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Selain itu penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap infrastruktur dasar yang memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi layak, energi listrik, dan transportasi.

4) Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah. Isu ini berkaitan dengan kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestariannya. Pengendalian kerusakan lingkungan serta kapasitas mitigasi struktural dan nonstruktural masih menjadi isu yang perlu diprioritaskan. Pengetahuan lokal dan kebiasaan perilaku masyarakat dalam pengelolaan kebencanaan juga menjadi modal sosial yang dapat dioptimalkan untuk mitigasi dan adaptasi.

5) Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Isu strategis berikutnya adalah upaya mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin unggul melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh. Tujuannya adalah menciptakan manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing, dan sejahtera secara berkelanjutan. Perwujudan tersebut dilakukan dengan memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan layanan kesehatan yang merata, serta memperkuat sistem perlindungan sosial sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

6) Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jati Diri Masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang massif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

7) Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Isu strategis yang tidak dapat diabaikan adalah transformasi tata kelola pemerintahan sebagai upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Transformasi ini bertujuan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, tata kelola pemerintahan diarahkan menjadi lebih dinamis dengan memperkuat adaptabilitas, tetap berpegang pada asas hukum yang berlaku, serta mengoptimalkan

mekanisme ko-kreasi dan kolaborasi antaraktor untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.6.3.4 Isu Daerah Kabupaten Brebes

Isu daerah Kabupaten Brebes merupakan isu yang menjadi perhatian pada skala daerah atau kabupaten. Terdapat dua kategori isu daerah Kabupaten Brebes yaitu isu jangka panjang dan jangka menengah. Berikut penjelasan lebih lanjut dari kedua kategori tersebut.

a. Isu Jangka Panjang

Isu strategis jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2045 disusun sebagai respons terhadap dinamika pembangunan daerah dan tantangan global yang terus berkembang. Perumusan isu ini mempertimbangkan kondisi eksisting daerah, proyeksi tren masa depan, serta arah kebijakan nasional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada penguatan pondasi transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi yang bertumpu pada daya saing lokal, kualitas sumber daya manusia, serta ketahanan wilayah terhadap risiko multidimensional. Dengan demikian, identifikasi isu strategis jangka panjang menjadi landasan penting dalam merancang visi, misi, dan arah pembangunan daerah secara terintegrasi dan adaptif menuju Brebes yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut merupakan kesembilan isu strategis jangka panjang Kabupaten Brebes.

1) Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang tidak dapat ditanggulangi oleh satu sektor saja. Data statistik tentang garis kemiskinan menunjukkan kenaikan setiap tahun. Faktor-faktor seperti pendidikan yang rendah, keterbatasan kemampuan bertahan hidup, pekerjaan tidak menentu, lingkungan yang tidak mendukung untuk hidup layak menjadi faktor yang mendominasi kemiskinan. Bantuan sosial terus disalurkan, tetapi masih banyak yang tidak tepat sasaran. sehingga data kemiskinan perlu diperbarui dan divalidasi secara berkala agar efektif dan tepat sasaran. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem sampai dengan 0 persen pada tahun 2024. Prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahap pertama berada di tujuh provinsi, termasuk Jawa Tengah. Adapun persentase penduduk miskin Tahun 2023 di Kabupaten Brebes sebanyak 15,78 persen. Angka tersebut masih diatas angka kemiskinan provinsi Jawa Tengah.

2) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Kesetaraan Gender, dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Brebes juga menghadapi tantangan serius dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing. Proyeksi demografi Kabupaten Brebes pada tahun 2045 mencapai 2,3 juta jiwa yang menjadikan Kabupaten Brebes mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Hal ini dapat menjadi potensi sekaligus tantangan untuk mensejahterakan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Tingginya angka anak putus sekolah, akses infrastruktur yang tidak menunjang, sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi rusak menjadi penyebab capaian IPM yang tidak signifikan, dengan angka IPM saat ini 69,71. Sedangkan dari bidang kesehatan, rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk masih belum mencapai angka ideal dan jumlah fasilitas kesehatan juga masih belum mencukupi. Kondisi geografis di Kabupaten Brebes menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan pemerintah. Cakupan pelayanan jaminan kesehatan di Kabupaten Brebes terus

ditingkatkan terutama pada kelompok masyarakat miskin. Pembangunan berbasis gender juga relevan. Dengan mengoptimalkan pemberdayaan perempuan terutama pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menjadi potensi besar, tidak hanya dari sisi pemberdayaan, peningkatan kualitas dari bidang pendidikan dan kesehatan, perluasan akses terhadap semua sumber daya.

3) Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha, Mengembangkan Digitalisasi, Inovasi, Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

Perekonomian Kabupaten Brebes masih bergantung pada 3 sektor yaitu pertanian, perindustrian dan perdagangan. Meski dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir distribusi sektor pertanian terus menurun, namun potensi untuk meningkatkan pertanian nasional menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah penumpu ketahanan pangan. Selain itu, upaya pengembangan digitalisasi, inovasi, pengetahuan, teknologi dan seni merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Salah satunya, dukungan terhadap penelitian dan pengembangan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Budaya dan seni juga dapat meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong ekonomi kreatif.

4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pangan serta Diversifikasi Pangan

Kualitas tanah pada lahan pertanian semakin menurun akibat penggunaan pestisida berlebihan yang mengakibatkan banyaknya lahan kurang produktif. Penggunaan pestisida yang berlebihan menyebabkan turunnya kualitas bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Pangan tersebut dapat memengaruhi kesehatan masyarakat khususnya pada anak balita (menyebabkan stunting). Selain itu, produktivitas lahan pertanian juga dipengaruhi oleh supply air yang digunakan untuk mengairi kawasan pertanian. Namun, kebutuhan air untuk kawasan pertanian dihadapkan pada permasalahan kerusakan jaringan irigasi dan ketidakseimbangan siklus hidrologis akibat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kondisi ini mengakibatkan pengairan kawasan pertanian menjadi tidak optimal. Keberadaan kawasan pertanian di Daerah Irigasi (DI) juga banyak mengalami alih fungsi lahan sehingga luas lahan pertanian semakin berkurang. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas pangan yang dihasilkan. Dari beberapa masalah tersebut, diperlukan adanya inovasi untuk intensifikasi dan diversifikasi pertanian agar dapat mengatasi persoalan penurunan kualitas dan kuantitas pangan mengingat Kabupaten Brebes masih menjadi daerah penyokong ketahanan pangan nasional. Tantangan diversifikasi pangan kedepan adalah perubahan pola konsumsi, keterbatasan akses, harga pangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat.

5) Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa Serta Penguatan Sosial Budaya Masyarakat

Desa mempunyai peran strategis dalam mendukung tercapainya target kinerja pemerintah. Pelibatan unsur-unsur masyarakat serta sumber daya lainnya dalam partisipasi pembangunan desa diharapkan dapat memudahkan tujuan kemandirian desa. Perencanaan desa dengan kabupaten dan provinsi perlu lebih diharmonisasikan, sehingga permasalahan-permasalahan pembangunan yang timbul dapat segera teratasi. Lebih lanjut, peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat desa juga perlu ditingkatkan guna memastikan adanya manajemen perencanaan serta pengelolaan desa yang lebih efektif. Perkembangan teknologi turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap informasi yang berkembang, yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas sosial

masyarakat dan aktivitas budaya masyarakat. Dalam hal penguatan sosial dan budaya, semangat gotong royong dan tolong menolong antar masyarakat sangat perlu dipertahankan, hal ini teruji saat Indonesia dilanda pandemi, kebijakan pemerintah melalui program “Jogo Tonggo” terbukti dapat diterapkan sebagai upaya bertahan dalam melalui pandemi.

6) Keberlanjutan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Serta Kelestarian Sumber Daya dan Perubahan Iklim

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Infrastruktur jalan dan jembatan akan memperlancar pergerakan barang dan jasa serta menghubungkan antarwilayah sehingga semua aspek bidang kesejahteraan dapat tumbuh positif terutama untuk mengatasi isu pembangunan seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah dan ketimpangan antarwilayah. Namun demikian, pembangunan infrastruktur mempunyai harga yang mahal disaat ruang fiskal daerah untuk pembangunan yang sangat terbatas. Penyediaan infrastruktur juga diperuntukan bagi semua masyarakat dengan meningkatkan inklusivitas layanan transportasi yang memperhatikan kelompok rentan dan disabilitas untuk mendukung mobilisasi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur wilayah juga perlu mempertimbangkan kesesuaian lahan dan daya dukungnya. Perlunya mempertimbangkan isu perubahan iklim yang sudah menjadi isu global, sehingga konstruksi infrastruktur harus mempertimbangkan kemampuan dari kerusakan akibat perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) daerah yang mengukur kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan ketahanan wilayah.

7) Penguatan Kualitas Penanganan Pra dan Pasca bencana

Bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan, baik terhadap jiwa manusia, harta benda maupun infrastruktur. Untuk meminimalisir dampak bencana, diperlukan upaya penguatan penanganan pra dan pasca bencana. Upaya pra bencana tersebut antara lain edukasi kesadaran masyarakat tentang jenis-jenis bencana yang terjadi di wilayah mereka, cara mengenali tanda-tanda peringatan dini dan langkah yang harus diambil saat terjadi bencana. Selain itu pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan terintegrasi untuk memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Pemetaan risiko bencana untuk mengidentifikasi wilayah yang rawan terhadap bencana serta mitigasi bencana sebagai langkah untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Selain itu, penguatan peran pengawasan tata ruang agar tidak ada pembangunan di kawasan rawan bencana untuk mengantisipasi adanya korban dan kerugian materiil. Upaya penguatan penanganan pasca bencana diantaranya adalah penanggulangan darurat yang dilakukan segera setelah bencana untuk menyelamatkan jiwa manusia dan meminimalisir kerusakan, pemulihan pasca bencana merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terkena dampak bencana serta pembelajaran bencana untuk mengevaluasi efektivitas penanganan pra dan pasca bencana

8) Perubahan dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan untuk mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel, dinamis,

adaptif dan optimal. Paradigma tata kelola pemerintahan yang dikenal kaku, lama dan rumit harus segera diubah. Perubahan diawali dari sektor perencanaan dengan meningkatkan kualitas perencanaan yang mengakomodir hasil kajian dan inovasi. Selain perencanaan, peningkatan pendapatan melalui efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan asli daerah, serta peluang pendanaan untuk pembangunan dari pembiayaan non APBD juga perlu dipertimbangkan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah merupakan isu yang akan terus berlangsung, hal ini disebabkan kejahatan korupsi merupakan ancaman serius terhadap penyelenggaraan pemerintah sehingga peningkatan integritas dan profesionalisme ASN merupakan cara untuk mereduksi ancaman tersebut.

9) Penguatan Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah merupakan hal penting agar kegiatan masyarakat dapat terus positif, terutama untuk aktivitas perekonomian daerah yang mempunyai dampak terhadap kegiatan/ aktivitas lainnya. Konflik horizontal yang melibatkan kelompok masyarakat. Konflik berlandaskan SARA di Kabupaten Brebes dalam kurun satu dekade terakhir sudah tidak terdapat kasus konflik di tengah masyarakat. Namun demikian permasalahan yang rentan menimbulkan konflik antar warga masih muncul seperti perbedaan pandangan politik terutama pada perhelatan pemilihan kepala desa maupun agenda-agenda politik lainnya. Selain muncul pada saat-saat tertentu seperti pada saat pemilu, kondusivitas wilayah juga terjadi pada saat adanya pembangunan yang memiliki kepentingan strategis namun ditolak oleh warga. Konflik ini terjadi di daerah lain tetapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi di Kabupaten Brebes.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025- 2045, menetapkan bahwa visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025- 2045 adalah **“Menuju Brebes 2045: Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) misi RPJPD Kabupaten Brebes tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pengamalan nilai-nilai Pancasila, budaya dan kearifan lokal.
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, demokratis, partisipatif dan adaptif.
- 4) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya pertanian guna peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
- 5) Mewujudkan peningkatan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah.
- 6) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

b. Isu Jangka Menengah

Memperhatikan permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi Kabupaten Brebes, seperti kesenjangan ekonomi, rendahnya kualitas SDM, serta keterbatasan infrastruktur dasar, perlu dirumuskan arah kebijakan yang responsif dan berkelanjutan. Selain itu, dinamika

lingkungan strategis global, nasional, dan regional, termasuk transformasi digital, perubahan iklim, dan integrasi ekonomi kawasan di Provinsi Jawa Tengah turut menjadi faktor penentu dalam menetapkan fokus pembangunan. Dengan memperhitungkan pula isu jangka panjang Kabupaten Brebes 2025–2045, maka rumusan **isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes dengan periode 2025 – 2029** yaitu:

1) Pengurangan Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Selaras dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*). Berdasarkan data BPS pada tahun 2024 terdapat 283,28 ribu jiwa penduduk dalam kategori miskin atau sebesar 15,6 dari jumlah populasi Kabupaten Brebes. Secara umum tingkat kemiskinan di Brebes mengalami fluktuasi dengan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, pemerintah dan seluruh stakeholder perlu memperhatikan aspek keparahan dan kedalaman tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. P1 tahun 2024 sebesar 2,5, lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 2,98. Begitu juga dengan P2 yang di tahun 2024 sebesar 0,55, lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 0,87. Garis kemiskinan di Kabupaten Brebes pada Maret 2023 adalah sebesar Rp.513.339,- per kapita per bulan. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara holistik. Intervensi kebijakan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin harus sejalan dengan upaya penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Yang menjadi tantangan Kabupaten Brebes saat ini adalah jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, tetapi indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami peningkatan. Target pemerintah pusat terhadap kemiskinan ekstrem adalah 0 persen. Pemerintah juga perlu mengantisipasi munculnya kasus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Brebes pasca 2024.

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan urusan pendidikan dan kesehatan. Dari sektor pendidikan, anak-anak di Kabupaten Brebes yang berusia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,45 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,01 tahun, yaitu dari 6,40 tahun menjadi 6,41 tahun pada tahun 2024. Capaian rata-rata lama sekolah di tahun 2024 adalah 6,41 tahun. Harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 HLS di Kabupaten Brebes mencapai 12,45 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi komponen pembentuk IPM dari aspek pendidikan namun belum menggambarkan kualitas pendidikan di Kabupaten Brebes. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga menjadi hal yang penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan berbagai Lembaga belum dapat menuntaskan isu Kesehatan di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data pada tahun 2024, bayi yang dilahirkan mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 74,18 tahun dibandingkan bayi yang

lahir pada tahun 2023 (73,95 tahun). Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan, namun masih berada di bawah rata-rata AHH Provinsi Jawa Tengah.

3) Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes masih belum optimal, kuat dan stabil, karena sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global dan nasional. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing daerah. Perekonomian Kabupaten Brebes masih bergantung pada 3 sektor yaitu pertanian, perindustrian, serta transportasi dan perdagangan. Meski dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir distribusi sektor pertanian terus menurun, namun potensi untuk meningkatkan pertanian Nasional menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah penumpu ketahanan pangan. Kabupaten Brebes sebagai salah satu penumpu pangan nasional tetapi masih lemah dalam sistem keuangan untuk permodalan, kapasitas infrastruktur dan kapasitas inovasi. Pertumbuhan ekonomi yang menurun salah satunya disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2024, Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menurun sebesar 33,28 persen dan laju pertumbuhan PDRB di sektor transportasi dan perdagangan meningkat hingga 8,11 persen. Selain berdampak pada ekonomi, sektor tenaga kerja juga terkena imbas. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 8,35 persen, tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat menjadi 71,92 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 66,01 persen. Tekanan ekonomi terhadap UMKM, IKK dan koperasi karena menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya omzet dan jumlah tenaga kerja, penurunan penjualan produk pertanian dan olahan pertanian, penyesuaian harga baru pasca pemulihan ekonomi perlu mendapat perhatian khusus.

4) Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan menjadi isu strategis lima tahun kedepan, karena pemerintahan yang baik dari tingkat pemerintahan kabupaten, kecamatan, dan desa akan mendorong roda pembangunan ke arah yang lebih baik, menghindarkan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga perlu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien yang didukung melalui Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP). Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Brebes tahun 2023 adalah 73,72 dengan kategori "B". Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian IRB dari yang sebelumnya selalu berada dalam kategori CC berubah menjadi kategori B. Sama halnya Indeks Inovasi Daerah, juga mengalami peningkatan nilai dari yang sebelumnya kurang inovatif (tahun 2021) menjadi inovatif tahun 2022 dan 2023. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes tahun 2022 dan 2023 secara berturut yaitu 47,94 dan 51,60. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Brebes tahun 2024 adalah 2,84 dengan predikat baik. Capaian di tahun 2024 sedikit lebih baik dibanding tahun 2021 dan 2022. Tantangan di tahun-tahun mendatang adalah terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator lain yang menggambarkan kualitas pelayanan umum adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP). SAKIP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tahun 2024 nilai SAKIP Kabupaten Brebes adalah 64,29 dengan kategori baik. Nilai SAKIP meningkat dari tahun 2023 yaitu 63,26. Untuk meningkatkan capaian nilai SAKIP, seluruh

unsur pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

5) Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa

Desa memiliki peranan penting dalam menentukan arah pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa untuk memperkuat pemberdayaan dan kemandirian desa dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten melalui anggaran desa atau dana desa, salah satunya mengoptimalkan peran strategis BUMDes. Berdasarkan data pada tahun 2024 tercatat BUMDes di Kabupaten Brebes sejumlah 292, namun yang berstatus aktif hanya 178 BUMDes atau baru sekitar 57,79 persen. Saat ini persentase desa mandiri di Kabupaten Brebes sebesar 8,56 persen. Hal ini diperlukan peran pemerintah daerah dalam optimalisasi pengelolaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Dalam hal penggunaan lahan, Data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Brebes tahun 2023 menunjukkan terdapat 63.642,27 Ha atau 36,18 persen lahan di Kabupaten Brebes merupakan lahan sawah. Selain lahan sawah, lima peruntukan pemanfaatan lahan tertinggi lainnya adalah untuk hutan lahan tinggi seluas 32.366,44 Ha (18,40 persen), ladang/tegalan seluas 22.973,14 Ha (13,06 persen), permukiman seluas 19.120,83 Ha (10,87 persen), lahan tambak seluas 12.084,64 Ha (6,87 persen), serta pemanfaatan lahan untuk kebun campuran seluas 10.413,55 (5,92 persen). Nilai IKLH Kabupaten Brebes di tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2023. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025, nilai IKLH Kabupaten Brebes tahun 2024 adalah 70,46. Nilai tersebut menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 75,04. Penurunan nilai IKLH di tahun 2024 terjadi seiring dengan penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Terdapat perhitungan baru untuk target IKLH tahun 2025-2045 dikarenakan Terdapat perubahan cara perhitungan, cara pengambilan sampel, penambahan koefisien dari KLHK sehingga target secara nasional akan mengalami perubahan. Dalam hal ancaman, kerentanan, dan kapasitas terhadap bencana, Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024 mencatat bahwa Kabupaten Brebes termasuk dalam daerah dengan kelas risiko tinggi terhadap bencana. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Brebes tahun 2024 adalah 143,69 Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan ancaman risiko sedang terhadap bencana banjir, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kekeringan. Integrasi Potensi, Masalah, dan Isu Daerah

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029, diperlukan analisis integratif yang mampu memetakan keterkaitan antara potensi, permasalahan aktual, isu-isu strategis, serta dinamika lingkungan pembangunan baik di tingkat global, nasional, maupun regional.

TABEL 2. 122 INTEGRASI POTENSI, MASALAH, DAN ISU DAERAH KABUPATEN BREBES

NO	ASPEK	NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS			ISU STRATEGIS
						GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Pondasi Budaya dan Pendidikan	1.1	Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Brebes tahun 2023 adalah 62,51 dengan kategori sedang.	Rendahnya Integrasi dan Apresiasi Terhadap Budaya Lokal dan Sistem Pendidikan Masyarakat	Kualitas hidup sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan	Akselerasi Menuju Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030	Transformasi Sosial	Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jati Diri Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		1.2	Adanya masyarakat adat Jalawastu yang masih mempertahankan kegiatan adat seperti Ngasa, Babarit, Tundan, Sedekah Bumi, Tutulak, Tong-Tong Breng, Cako, dan Ngaguyang Kuwi.	Masih Tingginya Ketimpangan Sosial yang Memicu Konflik			Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pengurangan Angka Kemiskinan
2	Permasalahan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar	2.1	Harapan lama sekolah di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 12,04 menjadi 12,44 pada tahun 2024.	Adanya Kesenjangan Akses dan Kualitas Pendidikan	Belum optimalnya pengelolaan perencanaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Akselerasi Menuju Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030	Transformasi Sosial	Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		2.2	Harapan lama sekolah di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 12,04 menjadi 12,44 pada tahun 2024.						
		2.3	Terjadi peningkatan Tingkat Literasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dari yang awalnya 62,60 pada 2022 menjadi 70,89 pada 2023 untuk SD, dan 62,89 pada 2022 menjadi 72,09 pada 2023.						
		2.4	Terjadi peningkatan kompetensi minimum Numerasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dari yang awalnya 48,53 pada 2022 menjadi 63,72 pada 2023 untuk SD, dan 43,59 pada 2022 menjadi 69,29 pada 2023.						
		2.5	Usia harapan hidup di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun 2020 yakni 73,44 tahun menjadi 74,18 tahun di tahun 2024.	Rendahnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan				Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	
3	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan	3.1	Indeks Inovasi Daerah, juga mengalami peningkatan nilai dari yang sebelumnya kurang inovatif (tahun 2021) menjadi inovatif tahun 2022 dan 2023. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes tahun 2022 dan 2023 secara berturut yaitu 47,94 dan 51,60.	Masih Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, dan berbasis teknologi informasi, serta penegakan hukum untuk stabilitas dan keamanan wilayah	Akselerasi Menuju Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030	Transformasi Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Tata Kelola Pemerintahan
		3.2	Peningkatan Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2024 menjadi AA dengan kategori istimewa.						
		3.3	Peningkatan Indeks Pelayanan Publik dari 90,01 pada tahun 2023 menjadi 97,8 pada tahun 2024.	Kurangnya Pemberdayaan Desa dan Partisipasi Masyarakat			Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa
4	Permasalahan Kesenjangan Ekonomi dan Akses Keuangan	4.1	Penambahan jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebesar 1.039.846 jiwa menjadi 1.145.474 jiwa pada tahun 2024.	Masih Adanya Kesenjangan Ekonomi dan Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan	Belum optimalnya ekonomi daerah berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan	Dinamika Perdagangan dan Ekonomi Internasional	Transformasi Ekonomi	Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha
		4.2	Penambahan persentase kontribusi industri pengolahan pada tahun 2023 sebesar 18,85 menjadi 19,31 pada tahun 2024.	Keterbatasan Akses Terhadap Sumber daya Keuangan					
5	Permasalahan Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Fasilitas	5.1	Keberadaan jalan pantai utara yang menjadi pusat konektivitas antara Kabupaten Brebes dengan daerah lainnya.	Kurangnya Akses Terhadap Hunian Layak, Sanitasi Aman, dan Air Bersih	Belum optimalnya pengelolaan perencanaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Akselerasi Menuju Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030	Transformasi Sosial	Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan Kualitas Sumber Infrastruktur Daerah
6	Permasalahan Penataan Pengelolaan Lingkungan dan	6.1	Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Brebes secara keseluruhan masih surplus sebesar 218.625,48 ton dengan ketersediaan pangan mencapai 370.226 ton dan kebutuhan pangan hanya 151.600,52 ton. Dalam kondisi surplus tersebut juga terdapat 11,17%	Masih Rendahnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan serta Minimnya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	Belum optimalnya pengelolaan perencanaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Akselerasi Menuju Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana	Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan

NO	ASPEK	NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS			ISU STRATEGIS
						GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Sumber Daya Alam		wilayah yang sudah terlampaui untuk kondisi daya dukung pangannya.						dan Kelestarian Sumber Daya Alam
		6.2	Berdasarkan data KLHS RPJPD Kabupaten Brebes tahun 2025-2045, ketersediaan air di Kabupaten Brebes mencapai 2.225.078.376,62 m3/tahun dan mampu memenuhi kebutuhan air sebesar 1.810.067.034,40 m3/tahun sehingga daya dukung air di Kabupaten Brebes masih dalam kondisi surplus sebesar 415.011.342,21 m3/tahun.						
		6.3	Potensi sumber daya mineral yang meliputi 8 jenis, yakni pasir sungai, tras, batu pasir, andesit, lempung gerabah, bentonit, gipsum dan batu gamping.			Perubahan Iklim dan Ketahanan Terhadap Bencana			
		6.4	Tercatat di 2021 nilai IRB Kabupaten Brebes sebesar 133,33 sedangkan pada tahun 2024 sudah mengalami penurunan menjadi 87,89 Nilai IRB pada tahun 2024. Ini menggolongkan Kabupaten Brebes ke dalam daerah dengan risiko bencana rendah.	Masih Tinggi Risiko Bencana yang Mengancam Keberlanjutan Pembangunan dan Kelestarian Hidup	Peningkatan Intensitas Bencana serta Perubahan Iklim	Perubahan Iklim dan Ketahanan Terhadap Bencana			

Sumber: Hasil Analisis Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2025

Visi Misi Program Prioritas

- Visi dan Misi
- Tujuan dan Sasaran
- Strategi
- Arah Kebijakan
- Program Prioritas



BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Terdapat dua pembahasan utama dalam bab ini yaitu mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi, arah kebijakan, dan program prioritas. Dalam sub bab visi, misi, tujuan, dan sasaran terdapat pembahasan yang mengaitkan antara tujuan RPJMD dengan sasaran pokok RPJPD. Lebih lanjut, berikut merupakan penjelasan dari masing-masing pembahasan.

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Sub bab ini akan menjelaskan mengenai visi dari RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan tujuan. Selanjutnya, tujuan tersebut dibedakan menjadi beberapa sasaran.

3.1.1 Visi dan Misi

Sub bab ini akan menjelaskan mengenai visi dan misi penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Terdapat dua pembahasan yaitu visi yang merupakan gambaran yang ingin dicapai di masa depan serta misi yang merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai gambaran masa depan tersebut. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dari visi dan misi tersebut.

3.1.1.1 Visi

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 berisi penjabaran visi, misi, serta program Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah menjadi visi pembangunan yang akan dicapai Kabupaten Brebes untuk 5 tahun mendatang (2025-2029). RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 adalah tahap pembangunan periode I atau pertama dalam RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045. Berdasarkan Visi-Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah pada periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, dan tantangan global, dokumen RPJPD Provinsi, dan dokumen terkait lainnya, maka ditetapkan Visi Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 yaitu:

“BREBES BERES”

Mewujudkan Brebes sebagai kabupaten yang:

Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat dan Sejahtera

Berkeadaban merupakan upaya dalam mengembangkan nilai-nilai budaya, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, serta pembangunan daerah agar tercipta harmoni, keteraturan sosial, dan sikap saling menghormati. Harapannya Kabupaten Brebes akan menjadi daerah yang menjunjung tinggi keadilan, keberagaman, serta nilai-nilai luhur yang menjadi identitas masyarakatnya.

Ekonomi Tangguh diartikan sebagai perekonomian daerah yang kuat dengan meningkatkan daya saing industri lokal, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta membuka peluang investasi yang berkelanjutan. Kabupaten Brebes akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata,

serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan kuat.

Responsif adalah upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang tanggap, transparan, dan cepat dalam menangani permasalahan serta kebutuhan masyarakat. Melalui digitalisasi layanan publik, optimalisasi peran aparatur negara, serta partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Brebes akan membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Edukatif merupakan perubahan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat menjadi lebih baik dengan menyediakan akses pendidikan yang merata, berkualitas, serta berbasis teknologi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha, Kabupaten Brebes akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, kreatif, serta siap menghadapi tantangan global.

Sehat dan Sejahtera adalah meningkatnya taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, serta jaminan sosial. Hal ini juga merupakan realisasi dari 9 indikator tatanan sehat yang terdiri dari tatanan permukiman, sarana dan prasarana sehat; sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi sehat; industri dan perkantoran sehat; pariwisata sehat; pertambangan sehat; hutan sehat; kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; ketahanan pangan dan gizi; serta mitigasi dan penanggulangan bencana. Kabupaten Brebes berkomitmen menciptakan lapangan kerja yang layak, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, sehingga seluruh warga dapat hidup dengan aman, nyaman, dan bermartabat.

3.1.1.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi pembangunan yang berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi berfungsi sebagai pedoman sekaligus batasan dalam proses pembangunan agar setiap kebijakan dan program yang disusun tetap selaras dengan arah pembangunan daerah. Berbagai strategi dan kebijakan yang dirancang akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada pencapaian visi Kabupaten Brebes. Adapun rumusan misi yang mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah

Kabupaten Brebes berkomitmen untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, memiliki moralitas yang baik, serta menaati hukum yang berlaku. Dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama, keberagaman sosial, dan sikap saling menghormati, masyarakat Kabupaten Brebes dapat hidup dalam harmoni serta menjalankan kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan.

2. Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan untuk seluruh masyarakat

Kabupaten Brebes berkomitmen untuk menjalankan pembangunan yang transparan dan bebas dari korupsi, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pembangunan yang berorientasi pada kemajuan teknologi, efisiensi, dan keberlanjutan akan menjadi

prioritas utama agar Brebes berkembang dengan tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3. Mengurangi pengangguran-dan kemiskinan serta memperkuat ekonomi kreatif

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan ini yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna mendorong produktivitas dan mengurangi angka pengangguran. Sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Brebes menuju pembangunan perekonomian yang berkelanjutan.

4. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus

Pembangunan di Kabupaten Brebes akan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Program perlindungan sosial, kebijakan yang berperspektif gender, serta fasilitas publik yang ramah bagi semua kelompok akan terus ditingkatkan agar setiap warga dapat hidup dengan aman, nyaman, dan mendapatkan hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

5. Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam kemajuan perekonomian di suatu daerah. Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan vokasi akan diperkuat guna menciptakan tenaga kerja yang terampil, kreatif, serta siap menghadapi tantangan global. Selain itu, pembangunan karakter juga menjadi fokus agar masyarakat Kabupaten Brebes memiliki daya juang tinggi, mandiri, dan produktif.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam membangun Kabupaten Brebes yang lebih maju. Salah satu pilar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan peningkatan kesadaran dan fasilitas serta infrastruktur dasar pada bidang kesehatan. Peningkatan kesehatan ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat di Kabupaten Brebes menjadi masyarakat yang sehat, tangguh, dan berdaya guna.

7. Memajukan potensi yang dimiliki oleh Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Kabupaten Brebes memiliki berbagai potensi unggulan, baik dalam sektor pertanian, perikanan, industri, maupun pariwisata. Dengan pengelolaan yang optimal dan inovatif, potensi ini dapat dikembangkan untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah juga akan mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan akademisi guna memperkuat daya saing daerah dalam skala nasional maupun global. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam menguatkan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes, dirumuskan tujuan dan sasaran yang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasional dari visi dan misi yang telah ditetapkan, yang akan memastikan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran ini berfungsi sebagai penghubung dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan daerah. Tujuan mencerminkan pernyataan mengenai langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai visi serta menjalankan misi, dengan menjawab berbagai isu strategis serta tantangan dalam pembangunan daerah.

3.1.2.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Secara sistematis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam periode lima tahun menjadi dasar utama yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan yang diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian tujuan juga mencerminkan keberhasilan hasil akhir dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan tujuan yang mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Terciptanya Masyarakat yang Menghargai dan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dengan Penguatan Identitas Budaya Lokal serta Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Setara.**

Tujuan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila melalui pelestarian budaya lokal dan seni tradisional. Dengan mengadakan berbagai pagelaran seni dan olahraga, diharapkan tercipta kehidupan sosial yang harmonis, inklusif, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

- 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata berbasis pada pemanfaatan sumbu berdaya lokal dan pertanian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan kesempatan kerja yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.**

Pertumbuhan ekonomi yang merata diarahkan melalui optimalisasi potensi lokal dan sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian daerah. Pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dilakukan melalui peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes, serta modernisasi alat produksi. Langkah ini secara langsung mendorong peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja, khususnya di wilayah perdesaan.

Pembangunan infrastruktur menjadi pengungkit utama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi hasil produksi. Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan transportasi logistik mempercepat arus barang dan jasa, sehingga memperkuat akses pasar bagi komoditas unggulan lokal. Infrastruktur irigasi yang andal juga memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas sektor pertanian, sementara pengembangan infrastruktur digital membuka peluang inovasi ekonomi berbasis teknologi. Seluruh upaya ini tidak terlepas dari pentingnya

pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. SDA yang dikelola secara bijak menjamin ketersediaan bahan baku, kestabilan ekosistem produksi, serta ketahanan wilayah terhadap risiko bencana. Melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti bendungan dan sistem deteksi dini bencana, serta peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat melalui konservasi dan edukasi, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

3. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif.

Tujuan ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan memberdayakan masyarakat dan desa dalam proses pembangunan, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih serta mampu menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

4. Terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerataan layanan pendidikan, baik dari aspek kualitas tenaga pendidik maupun sarana prasarana, menjadi landasan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan yang inklusif dan bermutu akan menghasilkan generasi yang cerdas, produktif, serta mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan berkualitas merupakan hak dasar seluruh warga dan menjadi prasyarat terciptanya masyarakat yang sehat. Peningkatan layanan kesehatan dilakukan melalui penguatan fasilitas medis, ketersediaan tenaga kesehatan, serta penyediaan program promotif dan preventif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Dengan SDM yang sehat, produktivitas masyarakat akan meningkat, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi strategi kunci dalam membuka peluang kerja dan mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah daerah mendorong peningkatan investasi serta pengembangan kawasan industri dan UMKM untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk bagi perempuan, anak muda, lansia, dan penyandang disabilitas. Pendekatan pembangunan yang inklusif ini bertujuan memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses manfaat pembangunan. Melalui integrasi antara pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan.

3.1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Total sasaran dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 yaitu delapan sasaran. Berikut merupakan klasifikasi dari masing-masing sasaran tersebut.

Tujuan 1: Terciptanya Masyarakat yang Menghargai dan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dengan Penguatan Identitas Budaya Lokal serta Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Setara.

Sasaran 1.1: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berkebudayaan berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Tujuan 2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal dan pertanian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan kesempatan kerja yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sasaran 2.1: Terjaganya stabilitas ekonomi daerah guna meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dan sektor unggulan.

Sasaran 2.2: Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sasaran 2.3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat (perempuan dan laki-laki) yang setara dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, serta ketahanan daerah melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan 3: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif.

Sasaran 3.1: Meningkatnya efektivitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan partisipatif.

Tujuan 4: Terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sasaran 4.1: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan yang berorientasi pada daya saing dan keadilan sosial.

Sasaran 4.2: Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Sasaran 4.3: Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

TABEL 3. 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Brebes sebagai kabupaten yang: BREBES BERES Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat dan Sejahtera	- Mewujudkan Masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah	Terciptanya Masyarakat yang Menghargai dan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dengan Penguatan Identitas Budaya Lokal serta Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Setara		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	100	100	100	100	100	100
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berkebudayaan berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	70	71	72	73	74	75
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	61,89	62,39	62,89	63,39	63,89	74,39
	- Mengurangi pengangguran dan kemiskinan, memperkuat ekonomi kreatif. - Memajukan potensi yang dimiliki oleh Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal dan peartanian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan kesempatan kerja yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5,32	5,47	5,62	5,77	5,92
				PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta Per Tahun)	32,04	33,04	34,04	35,04	36,04	37,04
			Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Indeks Infrastruktur (Angka)	85,42	86,42	87,42	88,42	89,42	90,42
				Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	0,97	0,98	0,99	1	1	1
				Indek Kinerja Sistem Irigasi (%)	68,41	68,61	68,82	69,03	69,23	69,44
			Terjaganya stabilitas ekonomi daerah guna meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dan sektor unggulan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,99	7,84	7,69	7,54	7,39	7,3
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	9,07	8,97	8,87	8,77	8,67	8,57
				Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	79,79	80,79	81,79	82,79	83,79	84,79
				PDRB Kabupaten Brebes Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah (%)	3,5	3,568	3,636	3,704	3,772	3,84
				Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	20.99-21.93	21.34-22.30	21.70-22.67	22.06-23.05	22.43-23.43	22.81-23.83
				Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	5.61-5.72	5.74-5.86	5.87-5.99	6-6.12	6.11-6.23	6.22-6.35
				Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	2.87-2.94	2.82-2.89	2.77-2.84	2.72-2.79	2.68-2.74	2.63-2.70
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, serta ketahanan daerah melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64
				Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq)	1.599.586	2.366.531,45	3.133.476,90	3.900.422,35	4.667.367,80	5.434.313,25
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	75,39	75,43	75,47	75,52	75,56	75,60
	- Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan untuk seluruh masyarakat	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif	Meningkatnya efektivitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	80,50	80,80	81,20	81,50	81,80	82
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,36	4,39	4,42	4,45	4,48	4,50
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,07	85,57	86,07	86,57	87,07	87,57
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,067	3,117	3,167	3,217	3,267	3,317
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Indeks)	64,79	65,29	65,79	66,29	66,79	67,29
				Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,51	3,53	3,55	3,57	3,59	3,61
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4,20	4,23	4,26	4,29	4,33	4,34
				Indeks Integritas (Angka)	72,55	72,65	72,75	72,85	72,95	73,05
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
				Indeks Pemerintah Digital (Indeks)	0	1,8	1,8	1,9	1,9	2

VISI / MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Kapabilitas Inovasi (Angka)	2.04-2.06	2.05-2.08	2.06-2.10	2.08-2.12	2.09-2.14	2.10-2.17
	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus - Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna 	Terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	70,53	71,02	71,52	72,14	72,59	72,95
				Tingkat Kemiskinan ((%))	14,13	13,78	13,13	12,48	11,83	11,18
				Rasio Gini (Indeks)	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37
			Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan yang berorientasi pada daya saing dan keadilan sosial.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,45	6,49	6,55	6,59	6,64	6,67
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,60	12,72	12,86	12,99	13,10	13,21
				Literasi Membaca SD/Sederajat (%)	45.00-49.00	49.01-50.19	50.30-51.48	51.64-52.89	53.01-54.34	54.41-55.83
				Numerasi SD/Sederajat (%)	30.06-31.88	70.0246-70.84	70.0796-70.90	70.1346-70.96	70.1896-71.01	70.2446-71.07
				Literasi Membaca SMP/Sederajat (%)	72.55-73.35	72.78-73.58	73.01-73.82	73.25-74.05	73.48-74.28	73.71-74.52
				Numerasi SMP/Sederajat (%)	30.06-31.88	70.0246-70.84	70.0796-70.90	70.1346-70.96	70.1896-71.01	70.2446-71.07
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,37	74,55	74,74	74,92	75,11	75,30
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	22,5	22	21,5	21	20,5	20
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	45,39	46,39	47,39	48,39	49,39	50,39
				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	31	32	33	34	35	36
		Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87,61	87,9	88,44	88,92	89,21	89,75
				Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	61,75	62,75	63,75	64,75	65,75	66,75

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

3.1.2.3 Hubungan Tujuan RPJMD Kabupaten Brebes 2025-2030 dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030 terhubung dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, salah satunya adalah RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045. Keterkaitan antara keduanya terlihat pada keselarasan misi, tujuan, dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030 dengan sasaran pokok yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045. Berikut disajikan tabel yang menggambarkan hubungan dan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030 dengan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045

TABEL 3. 2 HUBUNGAN TUJUAN RPJMD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030 DENGAN SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045

VISI	MISI	SASARAN POKOK	TUJUAN	SASARAN
<i>Kepala Daerah</i>		<i>RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045</i>	<i>RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029</i>	
Berkeadaban	Misi 1: Masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah.	Sasaran Pokok 1: Terciptanya Masyarakat yang Menghargai dan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dengan Penguatan Identitas Budaya Lokal serta Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Setara	Tujuan 1: Terciptanya Masyarakat yang Menghargai dan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dengan Penguatan Identitas Budaya Lokal serta Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Setara	Sasaran 1.1: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berkebudayaan berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM
Ekonomi Tangguh	Misi 3: Mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan memperkuat ekonomi kreatif. berkelanjutan.	Sasaran Pokok 4: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Merata, Berbasis pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Pertanian, dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Ketahanan Pangan, dan Kesempatan Kerja.	Tujuan 2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal dan pertanian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan kesempatan kerja yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Sasaran 2.1: Terjaganya stabilitas ekonomi daerah guna meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dan sektor unggulan
	Misi 7: Memajukan potensi yang dimiliki oleh Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh	Sasaran Pokok 5: Terciptanya Infrastruktur yang Berkualitas, Terpadu, dan Merata di Seluruh Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.		Sasaran 2.2: Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		Sasaran Pokok 6: Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan		Sasaran 2.3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan

VISI	MISI	SASARAN POKOK	TUJUAN	SASARAN
	pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	Lingkungan yang Berkelanjutan dengan Mengurangi Risiko Bencana untuk Mendukung Pembangunan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan		kesadaran masyarakat (perempuan dan laki-laki) yang setara dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, serta ketahanan daerah melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
Responsif	Misi 2: Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan untuk seluruh masyarakat.	Sasaran Pokok 3: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, dan Partisipatif, dengan Pemberdayaan Desa dan Masyarakat untuk Mewujudkan Kemandirian dan Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan 3: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif	Sasaran 3.1: Meningkatnya efektivitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan partisipatif
Edukatif	Misi 5: Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat.	Sasaran Pokok 2: Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kompetitif, dan Berkeadilan dengan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas	Tujuan 4: Terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Sasaran 4.1: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan yang berorientasi pada daya saing dan keadilan sosial.
Sehat dan Sejahtera	Misi 6: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna.			Sasaran 4.2: Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
	Misi 4: Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus.			Sasaran 4.3: Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Perumusan strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman menyeluruh bagi pemerintah daerah dalam menjalankan rencana pembangunan selama lima tahun ke depan guna mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang holistik, kebijakan ini berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan, reformasi, serta peningkatan kinerja. Perencanaan strategis tidak hanya mencakup kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup program-program pendukung yang memastikan layanan publik dapat berjalan optimal.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Sub bab ini akan menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Penyusunan strategi diklasifikasikan berdasarkan tujuan. Sementara itu, penyusunan arah kebijakan disusun berdasarkan misi.

3.2.1.1 Strategi

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya, strategi disusun untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Brebes dalam lima tahun ke depan. Setiap sasaran dalam RPJMD memiliki strategi tersendiri yang dirancang guna memastikan pencapaian yang optimal. Berikut adalah rincian strategi yang akan diterapkan.

TABEL 3. 3 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI RPJMD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029

TUJUAN/SASARAN		STRATEGI
1	Terciptanya Masyarakat yang Menghargai dan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dengan Penguatan Identitas Budaya Lokal serta Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Setara	
1.1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berkebudayaan berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Meningkatkan jumlah sekolah yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan Peningkatan kualitas guru pengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan Mendorong kualitas dan kapasitas pendidikan non formal; Meningkatkan pengarsipan Warisan Budaya Tak Benda Meningkatkan promosi Warisan Budaya Tak Benda Meningkatkan jumlah atraksi pada tempat bersejarah Meningkatkan akses menuju tempat bersejarah Meningkatkan promosi tempat bersejarah Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok kesenian Meningkatkan jumlah pertunjukan kesenian Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga Pemenuhan lima pilar ketahanan keluarga Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal dan pertanian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan kesempatan kerja yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	
2.1	Terjaganya stabilitas ekonomi daerah guna meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dan sektor unggulan	Penguatan Logistik Daerah Stabilisasi Pasar Peran BUMD dan BUMDes Pengurangan Ketimpangan Ekonomi Diversifikasi Pendapatan Inklusi Keuangan Efisiensi Anggaran Penguatan Iklim Investasi Pengelolaan Fiskal yang Sehat Stabilitas Harga dan Pasokan

TUJUAN/SASARAN		STRATEGI
		Penguatan Kelembagaan dan Basis Data Terpadu
		Digitalisasi dan Transparansi Tata Kelola Program
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kolaborasi Multipihak
		Pemberdayaan Sektor Usaha Lokal
		Mendirikan pusat inovasi dan inkubator bisnis untuk mendukung riset, teknologi, dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta industri
		Memperkuat kerja sama riset untuk mendorong inovasi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata
		Mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan dan akses ke e-commerce
		Memperluas akses internet di seluruh daerah untuk integrasi ekonomi digital
		Mengoptimalkan SPBE dan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi birokrasi
		Menciptakan layanan inovatif berbasis teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi
		Pelatihan teknologi dan inovasi untuk masyarakat dan ASN
		Kemitraan dengan universitas dan industri untuk membangun talenta lokal
		Mendorong regulasi yang mendukung inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual
		Penerapan teknologi pertanian modern
		Penggunaan benih dan varietas unggul
		Diversifikasi usaha tani dan Penguatan kelembagaan petani
		penerapan praktik pertanian berkelanjutan
2.2	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Pembangunan dan pemeliharaan jalan
		Penyediaan hunian layak melalui program renovasi hunian
		Penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
		Peningkatan sanitasi aman
		Peningkatan kualitas air bersih
		Pemerataan jaringan air minum perpipaan
		Perluasan jaringan internet untuk mencapai zero blank spot area
		Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
		Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi
		Peningkatan koordinasi pengelolaan infrastruktur irigasi
		Promosi penggunaan alat keselamatan
		Manajemen kecepatan
		Pelatihan dan pendidikan keselamatan berkendara
		Intervensi berbasis teknologi
		Adaptasi Kontekstual
2.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat (perempuan dan laki-laki) yang setara dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, serta ketahanan daerah melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.	Pendekatan Multi-Komponen
		Perhatian kepada Populasi Rentan
		Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem
		Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
		Pengelolaan Sampah-Sampah Regional
		Pengelolaan Limbah dan Peningkatan Kesadaran Lingkungan
		Pengurangan Emisi dan Transisi Energi Hijau
		Pengelolaan Risiko dan Penanggulangan Bencana
		Mendorong implementasi PLTS atap
		Mengembangkan sumber energi baru terbarukan (EBT)
3	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif	Membangun skema kolaboratif
		Pengelolaan sumber daya air dan lingkungan melalui pembangunan sumur resapan di hulu DAS
		Pengelolaan sampah terpadu di hulu dan hilir
		Pengelolaan penurunan emisi GRK
3.1	Meningkatnya efektivitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan partisipatif.	Transparansi dan Akuntabilitas
		Manajemen Risiko
		Budaya Anti-Korupsi
		E-government
		Infrastruktur TIK
		Literasi Digital

TUJUAN/SASARAN		STRATEGI
		Digitalisasi Layanan Publik
		PTSP
		Feedback Publik
		Penyederhanaan Regulasi
		Akses Hukum yang Setara
		Penguatan Kelembagaan Penegak Hukum
		Kerja Sama Multisektoral
		Pembangunan Sistem Keamanan Berbasis Teknologi ancaman
		Pendidikan Bela Negara dan Kesadaran Hukum
		Partisipasi Publik
		Keterbukaan Informasi
		Peningkatan Pemilu yang Berintegritas
		Pembangunan Budaya Integritas
		Penegakan Etika Birokrasi
		Penguatan Lembaga Pengawasan
		Pembangunan Infrastruktur Dasar
		Digitalisasi Infrastruktur Desa
		Pengembangan Potensi Lokal
		Pembentukan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
		Program Kewirausahaan Desa
		Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa
		Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa
		Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
		Mitigasi Bencana dan Adaptasi Iklim
		Pemberdayaan Komunitas Lokal
		Sinergi Pemerintah Daerah dan Desa
		Penciptaan Desa Kreatif
		Pengembangan Kawasan Pedesaan
		Pengembangan Pasar Desa dan Pusat Ekonomi Lokal
		Kolaborasi Antar Desa dan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Akses Pendanaan Desa
4	Terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	
4.1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan yang berorientasi pada daya saing dan keadilan sosial.	Meningkatkan kualitas pendidikan
		Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat
		Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Sekolah Inklusi (SD dan SMP)
		Peningkatan Fasilitas dan Koordinasi Lintas Sektor dan Multipihak
		Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
		Memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal
		Menguatkan pendidikan karakter dan mengembangkan kurikulum adaptif
		Mendukung pendidikan vokasional melalui identifikasi dan pemetaan potensi lokal
4.2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
		Meningkatkan standar kesehatan
		Mendorong gaya hidup sehat
		Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
		Perhatian khusus terhadap lansia
4.3	Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Penguatan dan peningkatan kualitas perlindungan sosial
		Pelatihan Berbasis Teknologi
		Program Vokasi
		Pengembangan UMKM
		Inkubator Bisnis
		Layanan Penitipan Anak dan Lansia
		Fleksibilitas Kerja
		Kampanye Kesadaran Gender
		Pemberdayaan di Desa
		Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
		Mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI
	Perlindungan Hak Pekerja
	Penghapusan Diskriminasi Gender

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

Tujuan 1: Terciptanya Masyarakat yang Menghargai dan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dengan Penguatan Identitas Budaya Lokal serta Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Setara

Sasaran 1.1: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berkebudayaan berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM

- Meningkatkan jumlah sekolah yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan
- Meningkatkan jumlah sekolah yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan
- Mendorong kualitas dan kapasitas pendidikan non formal;
- Meningkatkan pengarsipan Warisan Budaya Tak Benda
- Meningkatkan promosi Warisan Budaya Tak Benda
- Meningkatkan jumlah atraksi pada tempat bersejarah
- Meningkatkan akses menuju tempat bersejarah
- Meningkatkan promosi tempat bersejarah
- Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok kesenian
- Meningkatkan jumlah pertunjukan kesenian
- Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga
- Pemenuhan lima pilar ketahanan keluarga
- Peningkatan pemberdayaan perempuan
- Mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tujuan 2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal dan pertanian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan kesempatan kerja yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Sasaran 2.1: Terjaganya stabilitas ekonomi daerah guna meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dan sektor unggulan

- Penguatan Logistik Daerah: Membangun infrastruktur logistik dan memperbaiki transportasi untuk menurunkan biaya distribusi.
- Stabilisasi Pasar: Mengembangkan sentra produksi lokal dan menjalankan operasi pasar murah di wilayah rentan.
- Peran BUMD dan BUMDes: Memperkuat BUMD dan BUMDes sebagai stabilisator harga di tingkat lokal.
- Pengurangan Ketimpangan Ekonomi: Fokus pada program bantuan sosial, pelatihan, dan subsidi untuk masyarakat rentan.
- Diversifikasi Pendapatan: Kembangkan pariwisata dan industri kreatif serta perluas akses kredit mikro bagi UMKM.

- Inklusi Keuangan: Meningkatkan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha serta meningkatkan akses layanan keuangan dan literasi keuangan di masyarakat pedesaan.
- Efisiensi Anggaran: Prioritaskan anggaran pada sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mendorong peningkatan kerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang layak secara ekonomi dan finansial.
- Penguatan Iklim Investasi
- Pengelolaan Fiskal yang Sehat
- Stabilitas Harga dan Pasokan
- Pemberdayaan Sektor Usaha Lokal
- Penguatan Kelembagaan dan Basis Data Terpadu: Memperkuat kelembagaan dan tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta basis data terpadu, melalui penyusunan SOP lintas sektor, pembagian peran yang jelas, dan pemutakhiran sistem informasi kemiskinan berbasis SPBE.
- Digitalisasi dan Transparansi Tata Kelola Program: Mendorong digitalisasi dan transparansi penuh dalam siklus penanggulangan kemiskinan, mulai dari pendataan hingga monitoring dan evaluasi, untuk mempercepat birokrasi, menekan kebocoran anggaran, dan membuka akses publik terhadap capaian program.
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kolaborasi Multipihak: Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berbasis potensi lokal, dengan menyediakan pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan mikro melalui kemitraan BUMDes/Koperasi, serta kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi) guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
- Mendirikan pusat inovasi dan inkubator bisnis untuk mendukung riset, teknologi, dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta industri
- Memperkuat kerja sama riset untuk mendorong inovasi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata
- Mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan dan akses ke *e-commerce*
- Memperluas akses internet di seluruh daerah untuk integrasi ekonomi digital
- Mengoptimalkan SPBE dan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi birokrasi
- Menciptakan layanan inovatif berbasis teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi
- Pelatihan teknologi dan inovasi untuk masyarakat dan ASN
- Kemitraan dengan universitas dan industri untuk membangun talenta lokal
- Mendorong regulasi yang mendukung inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual

Sasaran 2.2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan
- Penyediaan hunian layak melalui program renovasi hunian
- Penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Peningkatan sanitasi aman

- Peningkatan kualitas air bersih
- Pemerataan jaringan air minum perpipaan
- Perluasan jaringan internet untuk mencapai zero blank spot area
- Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan
- Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi
- Peningkatan koordinasi pengelolaan infrastruktur irigasi
- Promosikan alat keselamatan berkendara melalui kampanye dan sosialisasi rutin.
- Kendalikan kecepatan kendaraan dengan pembatas kecepatan dan desain jalan yang aman.
- Tingkatkan pelatihan keselamatan berkendara untuk membangun keterampilan dan kesadaran risiko.
- Manfaatkan teknologi keselamatan lalu lintas seperti CCTV dan sistem peringatan dini.
- Sesuaikan intervensi keselamatan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
- Gabungkan berbagai pendekatan intervensi untuk efektivitas yang lebih tinggi.
- Perkuat perlindungan bagi pengguna jalan rentan dengan program keselamatan yang inklusif.

Sasaran 2.3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat (perempuan dan laki-laki) yang setara dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, serta ketahanan daerah melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

- Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem
- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- Pengelolaan Sampah-Sampah Regional
- Pengelolaan Limbah dan Peningkatan Kesadaran Lingkungan
- Pengurangan Emisi dan Transisi Energi Hijau
- Pengelolaan Risiko dan Penanggulangan Bencana
- Mendorong implementasi PLTS atap pada bangunan publik, rumah tangga, dan industri sebagai langkah konkret transisi menuju energi terbarukan.
- Mengembangkan sumber energi baru terbarukan (EBT) dan alternatif lainnya, dengan fokus pada pemanfaatan di sektor rumah tangga dan UMKM.
- Membangun skema kolaboratif dengan pemerintah provinsi, BUMN/BUMD/BLUD sektor ESDM, serta pihak swasta untuk mempercepat penyediaan, distribusi, dan pemanfaatan energi ramah lingkungan.
- Pengelolaan penurunan emisi GRK: Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah- System Of Rice Intensification (SRI), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi, Mitigasi Emisi CH₄ Melalui Aplikasi Biogas Kotoran Ternak (Biogas Ternak Asal Masyarakat (BATAMAS), Pengelolaan Ternak Penggunaan Feed Suplemen Untuk Bahan Pakan Sapi.

Tujuan 3: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif

Sasaran 3.1: Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan partisipatif.

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan sistem merit bagi ASN.
- **Manajemen Risiko:** Implementasi manajemen risiko untuk mencegah penyimpangan.
- **Budaya Anti-Korupsi:**
 - Menggalakkan program anti-korupsi dan integritas.
- **E-government:** Integrasi sistem digital di seluruh sektor pemerintahan untuk efisiensi.
- **Infrastruktur TIK:** Peningkatan infrastruktur dan keamanan data.
- **Literasi Digital:** Pelatihan ASN untuk mendukung transformasi digital
- **Digitalisasi Layanan Publik:** Meningkatkan akses layanan melalui platform digital.
- **PTSP:** Penguatan layanan satu pintu untuk mempercepat proses administrasi.
- **Feedback Publik:** Pengembangan mekanisme umpan balik dan standar pelayanan.
- **Penyederhanaan Regulasi:** Melakukan harmonisasi dan deregulasi hukum untuk mengurangi tumpang tindih peraturan dan mempercepat proses penegakan hukum.
- **Akses Hukum yang Setara:** Memperluas akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui bantuan hukum gratis dan peningkatan layanan hukum berbasis teknologi.
- **Penguatan Kelembagaan Penegak Hukum:** Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dengan pelatihan terkait profesionalisme, integritas, dan teknologi informasi untuk mendukung sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.
- **Kerja Sama Multisektoral:** Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah dengan pendekatan pencegahan konflik.
- **Pembangunan Sistem Keamanan Berbasis Teknologi:** Mengembangkan sistem keamanan berbasis teknologi seperti CCTV dan aplikasi pengaduan cepat untuk meningkatkan respons dalam menghadapi potensi ancaman.
- **Pendidikan Bela Negara dan Kesadaran Hukum:** Melibatkan masyarakat dalam program pendidikan bela negara dan peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan.
- **Partisipasi Publik:** Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum diskusi publik, musyawarah, dan platform digital untuk partisipasi yang lebih inklusif.
- **Keterbukaan Informasi:** Mendorong transparansi pemerintahan melalui kebijakan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat dan akurat.
- **Peningkatan Pemilu yang Berintegritas:** Mendorong pengawasan pemilu yang lebih kuat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil.

- **Pembangunan Budaya Integritas:** Mengintegrasikan nilai-nilai integritas dalam setiap kebijakan pemerintah daerah melalui pelatihan dan kampanye anti-korupsi di berbagai tingkatan.
- **Penegakan Etika Birokrasi:** Menerapkan standar etika dan kode perilaku yang ketat bagi pejabat dan ASN untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang.
- **Penguatan Lembaga Pengawasan:** Memperkuat peran lembaga pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas.
- **Pembangunan Infrastruktur Dasar:** Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik di desa-desa agar meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian lokal
- **Digitalisasi Infrastruktur Desa:** Meningkatkan akses internet dan infrastruktur teknologi informasi di desa-desa untuk mendukung kemajuan teknologi dan inovasi lokal, serta memfasilitasi pelayanan publik berbasis digital.
- **Pengembangan Potensi Lokal:** Mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kecil dengan memberikan akses permodalan dan pelatihan keterampilan.
- **Pembentukan dan Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa):** Memperkuat peran BUMDes untuk mendukung perekonomian desa melalui pengelolaan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing. Meningkatkan kapasitas BUMDes melalui pelatihan manajerial, akses pendanaan, dan pengembangan produk lokal, serta menciptakan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas pasar dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian desa.
- **Program Kewirausahaan Desa:** Mendorong kewirausahaan di desa dengan memberikan pendampingan, akses modal, dan pengembangan pasar untuk menciptakan lapangan kerja lokal.
- **Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa:** Memberikan pelatihan kepada perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program-program pembangunan desa.
- **Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa:** Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel di desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencegah penyelewengan dana desa.
- **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:** Mendorong pengelolaan sumber daya alam desa secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam praktik konservasi lingkungan dan pertanian ramah lingkungan.
- **Mitigasi Bencana dan Adaptasi Iklim:** Mengembangkan program mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti pengelolaan risiko banjir dan kekeringan di desa yang rentan terhadap bencana.
- **Pemberdayaan Komunitas Lokal:** Melibatkan komunitas desa dalam menjaga ketahanan wilayah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.

- Sinergi Pemerintah Daerah dan Desa: Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan desa dalam pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- Penyediaan Akses Pendanaan Desa: Mendorong peningkatan alokasi dana desa serta memfasilitasi akses desa terhadap sumber pendanaan eksternal untuk mendukung program pembangunan yang inovatif.
- Penciptaan Desa Kreatif: Mendorong inovasi desa kreatif yang berbasis pada potensi lokal, seperti seni, kerajinan tangan, kuliner, dan wisata berbasis budaya, yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan serta membuka peluang pasar bagi produk-produk lokal.
- Pengembangan Kawasan Perdesaan: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas kawasan perdesaan melalui perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan komunikasi, dan fasilitas umum, serta memperkuat kerjasama antar desa untuk mendukung ekonomi kawasan yang lebih luas.
- Pengembangan Pasar Desa dan Pusat Ekonomi Lokal: Membangun dan merevitalisasi pasar desa sebagai pusat perekonomian desa, dengan fasilitas pendukung yang memadai, serta mengintegrasikan pasar desa dengan sistem distribusi dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar produk desa.
- Kolaborasi Antar Desa dan Pemerintah Daerah: Mendorong kerjasama antar desa untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan sinergi dalam pembangunan ekonomi desa, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan desa.

Tujuan 4: Terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Sasaran 4.1: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan yang berorientasi pada daya saing dan keadilan sosial.

- Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, menerapkan metode pembelajaran inovatif, meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat sistem pendidikan.
- Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan, meningkatkan peran orangtua dalam pendidikan anak, meningkatkan kualitas kemitraan antara sekolah dan masyarakat
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui peningkatan akses internet dan komputer sekolah, menerapkan model pembelajaran daring, pemanfaatan platform pembelajaran online
- Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Sekolah Inklusi (SD dan SMP): Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah inklusif di setiap kecamatan melalui penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pelatihan bagi guru untuk menangani kebutuhan khusus, serta pengembangan kurikulum yang mendukung keberagaman siswa dengan kebutuhan berbeda.

- Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Lintas Sektor dan Multipihak: Memperkuat koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah inklusi dengan menciptakan mekanisme kerjasama yang efektif, termasuk penyediaan sumber daya, pelatihan lintas sektor, serta pemantauan yang melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program pendidikan inklusi.
- Memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal sebagai bagian dari implementasi Wajib Belajar 13 Tahun.
- Memperkuat pendidikan karakter dan mengembangkan kurikulum adaptif yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah.
- Mendukung pendidikan vokasional melalui identifikasi dan pemetaan potensi lokal untuk mendorong link and match dengan dunia kerja.

Sasaran 4.2: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan akses terhadap obat dan teknologi medis, mendorong upaya pencegahan penyakit
- Meningkatkan standar kesehatan melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, peningkatan akses terhadap perumahan yang layak.
- Mendorong gaya hidup sehat melalui promosi pola makan sehat, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat dan edukasi penyakit tidak menular.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui peningkatan akses terhadap informasi kesehatan, penerapan teknologi telemedicine, memanfaatkan aplikasi kesehatan
- Perhatian khusus terhadap lansia melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan lansia, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan lansia, membangun lingkungan yang mendukung lansia.

Sasaran 4.3: Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- Pelatihan Berbasis Teknologi: Meningkatkan keterampilan perempuan melalui pelatihan teknologi dan kewirausahaan.
- Program Vokasi: Memperluas akses perempuan ke pendidikan vokasi yang relevan dengan pasar kerja.
- Pengembangan UMKM: Memberikan akses permodalan dan pelatihan bagi perempuan di UMKM.
- Inkubator Bisnis: Fasilitasi perempuan dalam memulai dan mengembangkan bisnis inovatif.
- Layanan Penitipan Anak dan Lansia: Membangun layanan penitipan untuk mendukung perempuan bekerja.
- Fleksibilitas Kerja: Mendorong kebijakan kerja fleksibel bagi perempuan.
- Kampanye Kesadaran Gender: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan di ekonomi.

- Pemberdayaan di Desa: Mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor-sektor produktif di pedesaan.
- Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
- Mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Perlindungan Hak Pekerja: Memastikan upah setara, perlindungan, dan lingkungan kerja yang aman.
- Penghapusan Diskriminasi Gender: Mendukung kesetaraan peluang di tempat kerja.

Selanjutnya, strategi-strategi tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penahapan pembangunan ini memiliki tema dan topik bahasan yang berbeda dari tahun ke tahun. Berikut merupakan tabel penahapan pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.

TABEL 3. 4 TABEL PENAHPAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

TABEL 3.5 TABEL PENAHPAN PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Mewujudkan Penguatan Fondasi Budaya dan Pendidikan dan infrastruktur dasar untuk mendukung kemandirian pangan	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing, dan Berkeadilan diarahkan pada Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Demokratis, Partisipatif, dan Adaptif untuk mendukung Pemerataan Ekonomi Hijau	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya pertanian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat diarahkan pada Pengurangan Kesenjangan Ekonomi dan Akses Keuangan	Mewujudkan Brebes yang Berkeadaban, Edukatif, Responsif, Sejahtera, dan Berkelanjutan
1. Meningkatkan jumlah sekolah yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan guna meningkatkan standar kesehatan dan gaya hidup sehat yang diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas pada proses tata kelola pemerintahan daerah	1. Pengurangan ketimpangan ekonomi melalui stabilitas pasar, diversifikasi pendapatan, inklusi keuangan, dan efisiensi anggaran	1. Meningkatkan kesejahteraan dengan perbaikan sarana prasarana dasar permukiman seperti air bersih, jalan, sanitasi, perpipaan, irigasi, dan jaringan internet.

TAHAP 1 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
2. Mendorong kualitas dan kapasitas pendidikan non formal guna meningkatkan aktivitas yang berkaitan dengan kebudayaan tak benda sebagai pendorong dalam peningkatan jumlah atraksi pada tempat bersejarah	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam acara yang bersifat edukatif	2. Penguatan kelembagaan penegakan hukum serta pembangunan sistem keamanan berbasis teknologi ancaman guna menjamin keterbukaan informasi dan akses hukum yang setara	2. Mendirikan pusat inovasi dan inkubator bisnis untuk mendukung riset, teknologi, dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta industri guna meningkatkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata	2. Peningkatan pelestarian budaya lokal dan budaya membaca agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas
3. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dengan memenuhi lima pilar ketahanan keluarga dan pangan serta pemberdayaan terhadap perempuan	3. Penguatan dan peningkatan kualitas perlindungan sosial	3. Pengembangan potensi desa dengan menerapkan digitalisasi infrastruktur dan penguatan kelembagaan	3. Penguatan iklim investasi dengan pengelolaan fiskal yang sehat, stabilitas harga dan pasokan, serta pemberdayaan sektor usaha lokal	3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi ekosistem sehingga meminimalisir resiko terjadinya bencana
4. Pelestarian pariwisata bersejarah dengan melakukan pengecakan secara berkala serta pembangunan fasilitas pelayanan dasar di sekitar area wisata	4. Perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat mendukung peningkatan kinerja sektor kesehatan dan pendidikan seperti ruang kelas, puskesmas, jalan, dan lainnya.	4. Pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai bentuk pemberdayaan komunitas lokal dalam mendukung perputaran pendanaan desa	4. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam penerapan teknologi guna meningkatkan produktivitas pekerjaan	4. Tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan sehingga dapat mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

3.2.1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, arah kebijakan Kabupaten Brebes disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara permasalahan dan potensi lokal, capaian pembangunan sebelumnya, serta dinamika regional dan nasional. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029, Kabupaten Brebes ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas nasional, khususnya dalam dua program strategis, yaitu:

1. **Program Prioritas C1:** Kawasan Swasembada Pangan dan Air (Pemali–Comal), dan
2. **Program Prioritas D1:** Kawasan Afirmasi (Percepatan Pengentasan Kemiskinan).

Penetapan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah, agar selaras dengan agenda pembangunan nasional. Selain itu, penetapan ini diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Brebes tidak hanya merespons isu-isu lokal, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional secara lebih luas.

1. Program Prioritas C1 – Kawasan Swasembada Pangan dan Air (Pemali–Comal)

Kabupaten Brebes ditetapkan sebagai bagian dari kawasan strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Penempatan ini menggarisbawahi kontribusi Brebes sebagai daerah lumbung pangan nasional, khususnya dalam subsektor hortikultura dan irigasi teknis.

Indikasi intervensi nasional yang dirancang untuk wilayah Brebes dalam program ini mencakup:

- a) Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur irigasi guna meningkatkan efisiensi distribusi air pertanian.
- b) Penguatan sektor pertanian dan hortikultura, terutama peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan.
- c) Pembangunan dan optimalisasi tampungan air untuk mendukung ketersediaan air irigasi serta pengendalian banjir.
- d) Dukungan terhadap riset pertanian, pengembangan varietas unggul lokal, serta penguatan sistem distribusi dan pasar hasil pertanian.
- e) Percepatan pembangunan Bendungan Kedunglanggar sebagai bagian dari strategi ketahanan air dan irigasi berkelanjutan.

2. Program Prioritas D1 – Kawasan Afirmasi: Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Sebagai wilayah dengan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, Kabupaten Brebes juga termasuk dalam daftar Kawasan Afirmasi yang menjadi fokus intervensi nasional untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Penetapan ini menempatkan Brebes dalam skema intervensi komprehensif lintas sektor, dengan pendekatan afirmatif terhadap kelompok masyarakat rentan dan wilayah tertinggal. Rangkaian intervensi yang dirancang dalam kerangka ini meliputi:

- a) Penyediaan infrastruktur layanan dasar, termasuk air baku dan air minum, sanitasi, listrik perdesaan, dan rumah layak huni.

- b) Peningkatan ketahanan terhadap bencana alam melalui penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat.
- c) Preservasi jalan daerah guna mendukung konektivitas antarwilayah dan akses terhadap layanan publik.
- d) Pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan, khususnya pertanian dan peternakan yang bernilai tinggi (*high value*).
- e) Percepatan transformasi digital di wilayah afirmasi, melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan literasi digital, serta perluasan layanan siaran digital.
- f) Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial terpadu untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.

Selain itu, terdapat kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diamanatkan dari RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan prioritas yang diamanatkan seperti, industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Kabupaten Brebes mendukung kebijakan ini dengan mengeluarkan 597 sertifikat halal di tahun 2024 untuk UMKM Kabupaten Brebes.

Selanjutnya, penyusunan arah kebijakan Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 diklasifikasikan berdasarkan misi RPMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Beberapa substansi juga diadopsi dari Laporan KLHS RPJMD Tahun 2024. Lebih lanjut, berikut merupakan arah kebijakan Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.

TABEL 3.6 ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan
1.	Masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pendidik dalam pembelajaran muatan lokal seni dan budaya melalui pelatihan guru secara berkelanjutan serta Penguatan pendidikan nonformal berbasis pelestarian dan pengembangan kebudayaan tak benda untuk mendorong peningkatan kualitas atraksi di situs dan kawasan bersejarah. 2. Memperluas akses masyarakat terhadap seni dan budaya melalui pembangunan dan revitalisasi infrastruktur kebudayaan. 3. Memperkuat perlindungan dan pelestarian warisan budaya lokal melalui penyusunan dan penerapan regulasi khusus. 4. Menjamin keberlanjutan fondasi budaya dan pendidikan melalui penguatan regulasi perlindungan budaya lokal, efektivitas pelaksanaan program pendidikan, serta evaluasi berkala terhadap capaian program. 5. Mendorong penguatan nilai toleransi dan keragaman dalam masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi kebudayaan.
2.	Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan untuk seluruh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi digitalisasi layanan publik, penguatan mekanisme akuntabilitas, dan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

No	Misi	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan melalui pembangunan mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 4. Mengembangkan kebijakan pengawasan dan evaluasi untuk menilai kinerja serta efektivitas kebijakan dan program pemerintahan secara berkelanjutan. 5. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan etika pemerintahan dan integritas bagi pejabat publik dan staf pemerintahan. 6. Mengoptimalkan pengembangan Titik Aglomerasi sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah melalui peningkatan infrastruktur konektivitas, penguatan jaringan rantai pasok, pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal, serta penciptaan ekosistem investasi dan inovasi yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
3.	Mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan memperkuat ekonomi kreatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal melalui penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha dan perencanaan bisnis. 2. Memperkuat program pembiayaan untuk mendukung pengembangan UMKM, khususnya yang berbasis sektor pertanian dan potensi sumber daya lokal. 3. Pengembangan Kluster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang. 4. Pengembangan Integrated Eco-Tourism Sabuk Gunung Slamet (Guci - Kaligua).
4	Memajukan potensi yang dimiliki oleh Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan produktivitas sektor unggulan agribisnis dan pariwisata melalui dukungan riset serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk membuka lapangan kerja baru. 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi dasar, termasuk transportasi, pasar, dan fasilitas pendukung lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 3. Mengembangkan kebijakan, tata kelola, sarana, infrastruktur dan partisipasi masyarakat yang responsif gender dan inklusif dalam pengelolaan sampah. 4. Mendorong upaya promotif dan preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat melalui penyediaan sanitasi layak, pengelolaan sampah, akses air bersih aman, dan lingkungan yang berkelanjutan. 5. Melaksanakan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem wilayah. 6. Meningkatkan kapasitas pengurangan risiko bencana, perlindungan kelompok rentan, pengembangan sistem peringatan dini, dan adaptasi perubahan iklim untuk meminimalkan dampak dan kerugian bencana. 7. Meningkatkan kualitas dan proporsi ruang terbuka hijau yang berfungsi secara ekologis, sosial, rekreasi, dan estetika 8. Mendorong pengelolaan sampah terpadu di hulu dan hilir

No	Misi	Arah Kebijakan
5.	Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pengembangan SMA/SMK unggulan di setiap kecamatan melalui pemetaan potensi lokal sebagai dasar penguatan pendidikan berbasis keunggulan wilayah. 2. Memprioritaskan program pencegahan, pengobatan, dan pengurangan kesenjangan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, serta penguatan kapasitas institusi pendidikan tinggi. 4. Meningkatkan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keluarga.
6.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional untuk memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga. 2. Menggalakkan kampanye kesadaran kesehatan dan edukasi masyarakat guna mendorong pola hidup sehat dan upaya pencegahan penyakit. 3. Meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keluarga.
7.	Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus	Meningkatkan distribusi kesejahteraan serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak melalui penyediaan layanan publik yang responsif, inklusif, dan berkeadilan.

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

3.2.2 Program Prioritas

Program prioritas merupakan program utama yang menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Program prioritas ini menjadi arah strategis dalam merancang kebijakan dan alokasi sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Lebih lanjut, program prioritas merupakan yang mendukung program kepala daerah. Melalui program kepala daerah, berbagai inisiatif pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan, dapat dijalankan secara terarah dan berkesinambungan. Berikut merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.

TABEL 3.7 PROGRAM PRIORITAS RPJMD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2029

TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	PROGAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
1	Terciptanya Masyarakat yang Menghargai dan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dengan Penguatan Identitas Budaya Lokal serta Kehidupan Sosial yang Harmonis dan Setara	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berkebudayaan berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Ngibadah Ayem lan Bungah, Program Insentif	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Terwujudnya kehidupan sosial berlandaskan nilai-nilai pancasila, demokrasi, dan HAM		Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Lestari Budaya Brebesku	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				Brebes Festival	Pengembangan Kebudayaan
					Pengembangan Kesenian Tradisional
			Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Piala Bupati Brebes	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal dan pertanian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan kesempatan kerja yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Terjaganya stabilitas ekonomi daerah guna meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dan sektor unggulan	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Genjot Investasi	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Beresi pasar	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
				Gebyar Produk Lokal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Jaga Harga Bawang	Pelayanan Penanaman Modal
					Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Meningkatnya kesempatan dan	Buruh Mapan	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
					Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
					Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
					Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
					Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
					Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
					Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
					Penempatan Tenaga Kerja

TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	PROGAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
			produktivitas tenaga kerja		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
					Perekonomian dan Pembangunan
			Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Beresi Pupuk	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Petani Lan Nelayan Sejahtera	Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata Brebes Laris Manis	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya kesejahteraan petani	Agrowisata Brebes Tata	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
					Penyuluhan Pertanian
			Meningkatnya daya saing industri		Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Beresi Dalam Beresi Lapangan Olahraga	Pengembangan Permukiman
			Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Beresi Saluran Banyu	Penataan Bangunan dan Lingkungan
					Pengembangan Perumahan
					Pengembangan Kawasan Permukiman
			Terciptanya keadilan dalam penugasan, kepemilikan,	Beresi Dalam	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
					Penatagunaan Tanah

TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	PROGAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
			penggunaan dan pemanfaatan tanah		
			Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Terwujudnya pengembangan wilayah baru		Penyelenggaraan Jalan
			Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan		Kebijakan Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat (perempuan dan laki-laki) yang setara dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, serta ketahanan daerah melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Brebes Merdeka Internet	Pengelolaan Aspek Kegeologian
					Pengelolaan Ketenagalistrikan
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sampah	Alam Bersih dan Lestari	Perencanaan Lingkungan Hidup
					Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Beresi Sampah		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
					<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan dari sumbernya. • Pemanfaatan kembali (<i>reuse</i>) dan daur ulang (<i>recycle</i>) . • Peningkatan infrastruktur persampahan. • Kebijakan regulatif dan insentif. • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). • Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sampah dan Kerja Sama Antar Daerah.

TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	PROGAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
3	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, dan Partisipatif, dengan Pemberdayaan Desa dan Masyarakat untuk Mewujudkan Kemandirian dan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya efektivitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan partisipatif.	Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Gerakan Tangani dan Cegah Bencana	Pengelolaan Hutan
					Penanggulangan Bencana
					Penanganan Bencana
			Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Layanan Publik Tanggap dan Cepat	Pencatatan Sipil
			Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatnya tata kelola arsip		Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Pengelolaan Arsip
			Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Pemerintahan dan Otonomi Daerah
					Kesejahteraan Masyarakat
					Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya keamanan informasi	Digitalisasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
					Pengelolaan Aplikasi Informatika
					Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			Meningkatnya kualitas pengawasan dalam		Penyelenggaraan Pengawasan

TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	PROGAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
			penyelenggaraan pemerintahan		
			Meningkatnya kemandirian desa yang partisipatif	Desa Maju Lan Mapan	Penataan Desa
				Beresi Desa	Peningkatan Kerja Sama Desa
					Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Mikro
					Sistem Informasi Desa
			Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Terwujudnya profesionalitas ASN	Pegawe Brebes Unggul Lan Mapan	Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Pemuda Brebes Maju Lan Mapan	Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Penelitian dan Pengembangan Daerah
			4	Terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan yang berorientasi pada daya saing dan keadilan sosial.
Meningkatnya literasi masyarakat	1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana	Pengembangan Kurikulum			
		Gerakan Sekolah 12 Tahun			Pendidik dan Tenaga Pendidikan
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan				Beresi Fasilitas Kesehatan

TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	PROGAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		kesehatan bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Beresi Angka Kematian Ibu dan Anak	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Antisipasi Pandemi dan Penyakit Menular	
				Sehat Bareng, Seneng Bareng	
		Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Terwujudnya pemerataan kesempatan bagi berbagai kalangan khususnya perempuan dan lansia		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Meningkatnya perlindungan bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas	Minterna Bocah Tekan Tuntas	Pemenuhan Hak Anak
			Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Pemberdayaan Faskes dan tenaga Kesehatan	Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Sembako untuk Warga Miskin dan Lansia	

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

Terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Bregasmalang.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi;
- b. Mendorong sekolah inklusif;
- c. Pengembangan SMK Unggulan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasar/industri, melalui penyesuaian kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap kerja;
- d. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mendorong pengembangan UMKM/ Industri Kecil Menengah dan sektor pariwisata;
- b. Mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Pengembangan SPAM Regional Bregas;
- b. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
- c. Mendorong rehabilitasi kawasan pesisir;
- d. Mendorong sinergisitas pengelolaan kawasan konservasi Gunung Slamet;
- e. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat
- f. Mendorong pengelolaan sampah berbasis wilayah yang berkelanjutan;
- g. Mendorong Pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang.

Berikut disajikan pemetaan rinci program dukungan Kabupaten Brebes terhadap Program Unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemetaan ini disusun untuk memastikan terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

TABEL 3. 8 SANDANGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN BREBES

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
Indeks Reformasi Birokrasi			
PP.	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Pegawe Brebes Unggul Lan Mapan	5.03.02 – Program Kepegawaian Daerah
			5.04.02 – Program Pengembangan SDM
PI.	Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni	Digitalisasi Pelayanan Publik	2.16.03 – Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
PI.	Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam "Jateng Nglakoni"	Layanan Publik Tanggap dan Cepat	2.16.03 – Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			4.01.02 – Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
	Menyiapkan Infrastruktur di Pusat dan PPID		
	Menyiapkan kebutuhan SDM di Pusat dan PPID		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Merubah Peraturan Gubernur terkait dengan PPID Pelatihan SDM PPID Smart Response		
PI. Kantor Gubernur Rumah Rakyat	Pertemuan reguler pemerintah provinsi atau Gubernur dengan masyarakat secara langsung di Kantor Gubernur atau Kantor Eks Bakorwil	PROVINSI	4.01.02 – Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
PI. Digitalisasi Manajemen Arsip	Penyusunan regulasi manajemen arsip Pembuatan Digital Arsip terintegrasi	Digitalisasi Pelayanan Publik	2.16.03 – Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
PA. Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	Penyusunan regulasi kelembagaan Penyiapan infrastruktur dan SDM	Layanan Publik Tanggap dan Cepat	4.01.02 – Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
PA. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	PROVINSI	1.06.05 – Program Perlindungan & Jaminan Sosial
PA. Pengembangan sister province	Penyusunan regulasi tentang sister province atau Kerjasama Daerah (KSD) Promosi kerjasama sister province Pengembangan sister province pada sektor strategis (pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pariwisata, teknologi informasi)	PROVINSI	4.01.03 – Program Perekonomian & Pembangunan
PA. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK	Penyusunan Pergub satuan tugas pengamanan data digital	PROVINSI	2.16.03 – Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Identifikasi ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK		
	Pembentukan satuan tugas pengamanan data digital		
PA.	Program Kerjasama Forkopimda	Layanan Publik Tanggap dan Cepat	4.01.02 – Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
	Koordinasi Hubungan Kerjasama Pembangunan Daerah melalui Forkopimda		
PT.	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima	Layanan Publik Tanggap dan Cepat	Program pelayanan pendapatan daerah
	Peningkatan sarpras dan SDM pelayanan dan fasilitas SAMSAT		
PT.	Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah	Layanan Publik Tanggap dan Cepat	4.01.02 – Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
	Penambahan anggaran penegakan Peraturan Daerah		
	Penambahan SDM penegakan Peraturan Daerah		
	Revitalisasi sarana dan prasarana PPNS		
PT.	Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalannya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan)	Genjot Investasi	2.18.02 – Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2.18.03 – Program Promosi Penanaman Modal
	Kerjasama dengan akademisi		
	Kerjasama dengan Bisnis		
	Kerjasama dengan Komunitas		
	Memperkuat Kerjasama Pemerintah		
	Kerjasama dengan Media		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
PT.	Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Pegawe Brebes Unggul Lan Mapan	5.04.02 – Program Pengembangan SDM 4.01.03 – Program Perekonomian & Pembangunan
Memperkuat ekosistem riset dan inovasi dalam pembangunan daerah			
Indeks Integritas Nasional			
PI.	Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Pegawe Brebes Unggul Lan Mapan	5.03.02 – Program Kepegawaian Daerah
	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas		
	Evaluasi Zona Integritas		
PI.	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa	Digitalisasi Pelayanan Publik	4.01.02 – Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat 5.03.02 – Program Kepegawaian Daerah
	Penyusunan Pergub tentang kewenangan Inspektorat		
	Penambahan anggaran pengawasan		
	Penambahan SDM pengawasan		
	Sistem informasi pengawasan terintegrasi		
PA.	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Pegawe Brebes Unggul Lan Mapan	5.04.02 – Program Pengembangan SDM
	Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN		
	Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
Otonomi Fiskal Daerah	PA. Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C	PROVINSI	4.01.02 – Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
	Penyusunan Pergub tentang tata kelola mineral bukan logam dan batuan (MBLB)		
	PI. Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah	Beresi Desa	2.13.02 – Program Penataan Desa 3.27.02 – Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Riset potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala Menyusun riset potensi pembangunan desa Menyusun rencana pembangunan kawasan pedesaan Sistem informasi peta potensi desa dan kelurahan		
	PA. Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal	Genjot Investasi	2.18.02 – Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2.18.03 – Program Promosi Penanaman Modal
	Menyusun Regulasi Daerah tentang Pendayagunaan Aset Idle Daerah Menempatkan SDM di UPTD Pemanfaatan Aset Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait pemanfaatan Aset Promosi pemanfaatan aset potensial Melakukan kerjasama pengelolaan aset		
	PA. Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD	Genjot Investasi	4.01.03 – Program Perekonomian dan Pembangunan
	Merubah Pergub terkait tata kelola BUMD Reformasi Struktur Organisasi		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
		Peningkatan kompetensi SDM	
		Menyusun Rencana Aksi tata kelola BUMD	
	PT. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima	Layanan Publik Tanggap dan Cepat	4.01.02 – Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Perbaikan Tata Kelola SAMSAT untuk memaksimalkan pendapatan daerah	
		Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah	
Pertumbuhan Ekonomi			
	PP. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Pariwisata Brebes Laris Manis	3.26.02 – Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3.26.05 – Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Penyusunan Regulasi Daerah terkait ekosistem ekonomi syariah	
		Mengembangkan wisata ramah muslim	
		Penyusunan lembaga masyarakat ekonomi syariah	
	PP. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri	Beresi Pupuk	3.27.02 – Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian
	Pupuk mudah bagi petani	Penyusunan pergub Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	3.27.02 – Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian
	Subsidi solar bagi nelayan	Penyusunan pergub	Petani Lan Nelayan Sejahtera 3.25.04 – Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3.25.03 – Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Pendirian SPBU milik BUMD JPEN di kawasan Nelayan Day care untuk buruh di Kawasan Industri Penyusunan pergub	Buruh Mapan	
	Koordinasi dengan pengusaha dan pengelola kawasan industri		
PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Koordinasi dengan pengusaha dan pengelola kawasan industri Penyusunan Pergub Pemberdayaan Pemuda Jawa Tengah Pendataan Pemuda (16 - 30 tahun) Koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten/Kota (terkait dengan data pemuda) Identifikasi Partner Kerjasama Pengembangan Cafe Berdaya di setiap Kecamatan	Pemuda Brebes Maju Lan Mapan	2.19.02 – Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
PI. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan Pemberdayaan ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif Pengembangan sport center di setiap kecamatan	Pemuda Brebes Maju Lan Mapan	2.17.07 – Program Pemberdayaan UMKM 3.26.04 – Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
PI. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Pemetaan sasaran desa wisata Penambahan anggaran	Gebyar Produk Lokal	3.26.02 – Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2.13.02 – Program Penataan Desa

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Menyiapkan infrastruktur dan SDM pengelola		
PI. Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah		Agrowisata Brebes	3.26.02 – Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
PI. Pengembangan wisata alam	Dieng - Wonosobo Geopark Karangsambung - Kebumen	PROVINSI	
PI. Pengembangan wisata budaya	Rambut Gimbal - Dieng Desa Adat Banokeling - Banyumas	PROVINSI	
PI. Pengembangan wisata religi	Kyai Soleh Darat - Kota Semarang Sunan Kalijaga - Demak Sunan Muria - Kudus Klenteng Liong Hok Bio - Magelang Gereja Salib Putih - Salatiga Prambanan dan Borobudur - Magelang	PROVINSI	
PI. Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening	Pengembangan Kawasan Borobudur Pengembangan Kawasan Kopeng Pengembangan Kawasan Rawa Pening	PROVINSI	
PI. Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa		PROVINSI	
PI. Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal		Lestari Budaya Brebesku	
PI. Pembinaan kebudayaan lokal bekerjasama dengan ISI Surakarta	Sekolah Wayang, Tari, Gamelan, dan Dalang Penyusunan Peraturan gubernur tentang pemberian insentif budayawan Pemberian insentif kepada budayawan	Lestari Budaya Brebesku	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Identifikasi potensi pembiayaan kelembagaan BLUD sektor budaya dan cagar budaya		
PI. Revitalisasi taman cagar budaya	Taman Budaya Jawa Tengah	Lestari Budaya Brebesku	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan
	Museum Ronggowarsito		
PA. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis		Pedagang dan UMKM Berdaya Sejahtera	2.17.07 – Program Pemberdayaan UMKM 3.26.04 – Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM		
	Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM		
	Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM		
	Pendampingan sertifikasi P-IRT bagi UMKM		
PA. Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa blankspot)		Brebes Merdeka Internet	2.16.03 – Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Pemasangan jaringan FO, Wi-fi gratis berkapasitas 20 Mbps, bersifat stimulan selama 1 tahun anggaran dan, pelatihan penggunaan secara positif (usaha/bisnis)		
PA. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM		Gebyar Produk Lokal	2.17.07 – Program Pemberdayaan UMKM
	Subsidi Modal kepada UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)		
	Pendampingan Usaha dan Promosi UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM yang bekerjasama dengan Diaspora		
PA. Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter		Beresi Dalam	1.03.10 – Program Penyelenggaraan Jalan 1.03.06 – Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Jalan sabuk Gunung Sumbing Wonosobo - Banjarnegara Pemalang - Banyumas Brebes - Tegal Pemalang - Batang Semarang - Purwodadi Rembang - Blora		
PA. Peningkatan Kualitas Jalan Provinsi baik di Wilayah Perbatasan maupun di Kabupaten / Desa	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Provinsi	Beresi Dalan	1.03.10 – Program Penyelenggaraan Jalan
PA. Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	BLUD Pengelola Trans Jateng Kerjasama CSR dan BUMN/BUMD Moderanisasi armada Trans Jateng Moderanisasi sistem Trans Jateng Modernisasi halte Trans Jateng	PROVINSI	
PA. Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi		PROVINSI	
PA. Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global		PROVINSI	
PA. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api		PROVINSI	
PA. Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan		Genjot Investasi	2.18.02 – Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Penyesuaian dan Implementasi Regulasi Daerah terkait Industri Ramah Lingkungan		
	Pemberian Insentif bagi Investor yang telah menerapkan Industri Ramah Lingkungan		
PA.	Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	Genjot Investasi	2.18.02 – Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Identifikasi kawasan industri berwawasan lingkungan		
	Fasilitasi pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan		
PA.	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya	PROVINSI	
	DAS Serayu		
	DAS Bengawan Solo		
PA.	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	Petani dan Nelayan Sejahtera	3.27.02 – Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian 3.27.07 – Program Penyuluhan Pertanian
	Sewa Lahan Pertanian dari Masyarakat, Pekerja oleh Masyarakat, tapi dikelola oleh Investor Swasta dengan Mengedepankan Kesejahteraan Petani		
PA.	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian	Petani dan Nelayan Sejahtera	3.27.02 – Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian
	Adanya sistem kolaborasi pertanian, swasta melakukan sewa lahan kepada pemilik lahan kemudian dilakukan penyesuaian lahannya dan yang mengelola dikembalikan ke pemilik lahan agar yang awalnya panenya 3 kali setahun bisa 4 kali setahun		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
PA.	Pendirian Koperasi Buruh	Buruh Mapan	2.13.03 – Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	Pendirian Koperasi Buruh		
PA.	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora	Lestari Budaya Brebesku	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan
	Identifikasi budaya lokal di Jawa Tengah		
	Pameran Budaya Jawa Tengah di forum Internasional		
	Pengembangan jejaring Diaspora untuk promosi budaya		
PA.	Event olahraga memancing terbesar di Asia	Brebes Festival	3.26.03 – Program Pemasaran Pariwisata
PA.	Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi	Piala Bupati Brebes	2.19.03 – Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
PA.	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya	Genjot Investasi	2.18.02 – Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Menyusun riset investasi berbasis padat karya		
	Menyusun peta investasi berbasis padat karya		
	Identifikasi potensi investasi proyek pemerintah yang padat karya		
	Promosi investasi dalam dan luar negeri		
PA.	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	Petani dan Nelayan Sejahtera	3.27.04 – Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesmas Veteriner
	Identifikasi dan Pemetaan Potensi Bibit Ternak Khas Jawa		
	Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Lokal		
	Pelatihan dan Pendampingan Peternak lokal		
	Penjaminan Kualitas Pakan Ternak		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	PA. Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional	PROVINSI	
	PA. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Desa Maju Lan Mapan	2.13.03 – Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	Penguatan koperasi desa		
	PA. Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa	Pariwisata Brebes Laris Manis	3.26.02 – Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata
	PA. Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah	Genjot Investasi	4.01.03 – Program Perekonomian dan Pembangunan
	Penyusunan Pergub Badan Aglomerasi		
	PA. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau		2.11.09 – Program Penghargaan Lingkungan Hidup 2.11.11 – Program Pengelolaan Persampahan
	Menyusun Regulasi Daerah tentang Ekonomi Hijau		
	Menyusun RAD tentang Ekonomi Hijau		
	PA. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pariwisata Brebes Laris Manis	3.26.03 – Program Pemasaran Pariwisata
	Pelatihan dan pendampingan untuk menciptakan 1.000 konten kreator di desa wisata		
	PT. Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi	Beresi Sampah	2.11.11 – Program Pengelolaan Persampahan
	Pesantren olah sampah		
	Pesantren mandiri energi		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
PT.	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Petani dan Nelayan Sejahtera	2.17.07 – Program Pemberdayaan UMKM
	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir		
	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi petani perempuan		
PT.	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap BUMDes di Jateng)	Desa Maju dan Mapan	2.13.03 – Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	Pendampingan pembentukan badan hukum untuk Bumdes		
	Penyusunan Regulasi Daerah tentang Bumdes		
PT.	Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jawa Tengah		
	Revitalisasi embung	Beresi Saluran Banyu	1.03.02 – Program Pengelolaan Sumber Daya Air
			1.04.03 – Program Kawasan Permukiman
PT.	Pembangunan Embung Baru		
	Rehabilitasi Embung eksisting		
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan		
PT.	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Jaga Harga Bawang	3.26.04 – Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
	Pemetaan Potensi Produk Unggulan di Jawa Tengah		
	Promosi produk unggulan di Jawa Tengah		
PT.	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan	Beresi Pasar	3.27.07 – Program Penyuluhan Pertanian
	Penguatan Urban Farming di Perkotaan		
	Pelatihan dan pembinaan kepada petani urban farming		
	Promosi hasil urban farming		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
PT.	Revitalisasi Pasar Tradisional yang terintegrasi berbasis Digital	Beresi Pasar	3.30.03 – Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
PT.	Penguatan dan Pembinaan E-Sport Jawa Tengah	Brebes Festival	2.19.03 – Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Penguatan dan Pembinaan E-Sport Jawa Tengah		
PT.	Penyediaan benih yang berkualitas	Petani dan Nelayan Sejahtera	3.27.02 – Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian
PT.	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	Petani dan Nelayan Sejahtera	3.27.02 – Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian
PT.	Regulasi Pengembangan kawasan industri	Genjot Investasi	2.18.02 – Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
PT.	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha	Genjot Investasi	2.18.04 – Program Pelayanan Penanaman Modal
	Percepatan perizinan		
	Pemberian insentif bagi investor		
PT.	Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (E-Commerce)	Pedagang dan UMKM Berdaya Sejahtera	2.17.07 – Program Pemberdayaan UMKM 2.18.03 – Program Promosi Penanaman Modal
	Membuat anak perusahaan pengelola e commerce milik pemerintah		
	Membuat platform E-Commerce		
	Membuat Pergub tentang penguatan e commerce		
PT.	Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dunia Usaha dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH”	Beresi Lapangan Olahraga	2.19.03 – Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
Tingkat Pengangguran Terbuka			
PP.	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Buruh Mapan	5.04.02 – Program Pengembangan SDM
	Kurikulum Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja		
	Bursa Kerja / Job Fair		
PA.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Minterna Bocah Sampe Tuntas	1.01.02 – Program Pengelolaan Pendidikan
	Penyetaraan ijazah lulusan pesantren		
PA.	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Buruh Mapan	3.27.04 – Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal		
	Standarisasi rumah pemotongan hewan		
PA.	Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja	PROVINSI	
	Membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri		
	- Perbaikan kurikulum sesuai kebutuhan industri		
PA.	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial	PROVINSI	
	Pemberdayaan Alpukat		
	- Kabupaten Semarang, Wonosobo, dan Kendal		
	Pemberdayaan Sengon		
	- Wonosobo, Banjarnegara dan Temanggung		
	Pemberdayaan kelapa Kopyor		
	- Pati dan Blora		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Pemberdayaan Aren		
PT.	Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	Pemuda Brebes Maju lan Mapan	2.17.07 – Program Pemberdayaan UMKM
	Pengembangan koperasi pesantren Fasilitasi jaringan pemasaran one pesantren one product		
PT.	Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenagakerjaan	Buruh Mapan	4.01.02 – Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jaminan cuti hamil, melahirkan bagi pekerja perempuan dan laki-laki Perlindungan atas hubungan industrial Jaminan keterlibatan kaum buruh dalam penetapan upah		
PT.	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas	Pegawe Brebes Unggul lan Mapan	5.03.02 – Program Kepegawaian Daerah
PT.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Petani lan Nelayan Sejahtera	3.25.03 – Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3.25.04 – Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Tambak Ikan Nila - Pantura Tambak Udang - Pansela		
Indeks Demokrasi Indonesia			
PP.	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Ngibadah Ayam lan Bungah	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan
	Menyusun Regulasi Daerah terkait kerukunan umat beragama		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
PP.	Penerapan pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di SMA/SMK	Beresi Sekolah	1.01.02 – Program Pengelolaan Pendidikan
	Peningkatan toleransi beragama kepada Masyarakat		
	Sosialisasi Wawasan kebangsaan kepada Masyarakat		
	Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Jateng		
	Pelatihan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan dalam organisasi kepemudaan		
	Pelatihan Pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di kalangan pesantren		
	Penyelenggaraan Jateng Bersholawat		
PA.	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	PROVINSI	
	Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan		
	Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas		
PA.	Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO	Lestari Budaya Brebesku	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan
PA.	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Lestari Budaya Brebesku	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan
PA.	Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	Ngibadah Ayem Lan Bungah	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan
PA.	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Ngibadah Ayem Lan Bungah	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Peningkatan kegiatan forum Kerukunan antar Umat Beragama	Ngibadah Ayem Lan Bungah	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan		
	Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan		
	Hibah FKUB		
PA.	Peningkatan kegiatan kepada forum pembauran kebangsaan	Lestari Budaya Brebesku	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan
	Penguatan Jawa Tengah Kampung Bhineka		
	Penguatan Kontra Radikalisme Ekstrimisme Bagi Masyarakat		
	Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Lintas Etnis		
	Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		
	Dialog Pembauran Kebangsaan		
	Nguri-nguri Budaya pada Generasi Muda Guna Ketahanan Bangsa		
	Kemah Kebangsaan		
	Hibah FPK		
PT.	Mendorong terciptanya Pengarustamaan Gender yang berkeadilan	PROVINSI	
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengarustamaan Gender		
	Penguatan perempuan dalam pembangunan daerah berbasis organisasi		
PT.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya	Lestari Budaya Brebesku	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan
	Event Budaya di spot kunjungan wisata		
	- Kraton Mangkunegaran - Solo		
	- Kota Lama - Semarang		
	- Kota Lama - Banyumas		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Penggunaan baju adat daerah setiap 1 minggu sekali dan hari-hari besar nasional		
Indeks Modal Manusia			
PP.	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren	Ngibadah Ayem Lan Bungah	2.22.02 – Program Pengembangan Kebudayaan
	Hibah pesantren		
PP.	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Pemberdayaan Faskes dan tenaga Kesehatan	1.02.02 – Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Masyarakat
	Asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin		
PP.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Ngibadah Ayem Lan Bungah	1.01.02 – Program Pengelolaan Pendidikan
	Insentif Guru		
	Insentif pengajar agama		
	Insentif penghafal kitab		
	Beasiswa luar dan dalam negeri untuk siswa miskin		
	Beasiswa luar dan dalam negeri untuk guru		
	Beasiswa luar dan dalam negeri untuk santri berprestasi		
PI.	Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	Sehat Bareng, Seneng Bareng	1.02.02 – Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Masyarakat
	Balita		
	Pemberian PMT		
	Pemberian Suplemen		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	PI. Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet)	Gerakan Sekolah 12 Tahun	1.01.02 – Program Pengelolaan Pendidikan
	Menyediakan Paket Pendidikan Seragam		
	Menyediakan Paket Pendidikan Buku Pembelajaran		
	Menyediakan Paket Pendidikan Akses Internet		
	PA. Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Beresi Fasilitas Kesehatan	1.02.02 – Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Masyarakat
	Spesialis keliling setiap desa		
	Pelayanan kesehatan keliling		
	PA. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Pemberdayaan Faskes dan tenaga Kesehatan	1.02.02 – Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Masyarakat
	Penyediaan 1 Dokter di setiap puskesmas pembantu		
	Penyediaan 1 Bidan di setiap Puskesmas Pembantu		
	PA. Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit	Beresi Fasilitas Kesehatan	1.02.02 – Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Masyarakat
	Lansia		
	Ibu Hamil		
	Disabilitas		
	Pensiunan		
	PA. BOSDa Madrasah Aliyah	PROVINSI	
	Identifikasi Madrasah Aliyah di Jawa Tengah		
	Penambahan Anggaran BOS		
	PA. Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	PROVINSI	

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Identifikasi SMA/SMK di setiap Kecamatan		
	Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah swasta		
PA. Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga		Piala Bupati Brebes	2.19.03 – Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih		
	Peningkatan kualitas dan tata kelola manajemen olahraga		
	Meningkatkan alokasi anggaran KONI dan KORMI		
PA. Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan		Beresi Sekolah	1.01.02 – Program Pengelolaan Pendidikan
	Pemetaan dan Penetapan Sekolah Percontohan Inklusif		
	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas		
PT. Pap smear gratis (skrining Ca serviks)		Sehat Bareng, Seneng Bareng	1.02.02 – Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Masyarakat
	Skrining IVA		
PT. Peningkatan operasional kader Posyandu		Pemberdayaan Faskes dan tenaga Kesehatan	1.02.02 – Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Masyarakat
PT. Peningkatan kualitas hidup lansia		Beresi Fasilitas Kesehatan	1.02.02 – Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Masyarakat
	Peningkatan fasilitasi Posyandu lansia		
	Pemeriksaan kesehatan		
	Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi		
PT. Mendukung Jawa Tengah bebas Peredaran Narkoba		PROVINSI	
PT. Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah		PROVINSI	
	RSJD dr.Soejarwadi Klaten		
	RSJD Amino Gondohutomo		
	RSJD dr Arif Zainudin		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	PT. Penanganan Bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Beresi Sekolah	1.01.02 – Program Pengelolaan Pendidikan
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
	PT. Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa	Beresi Sekolah	1.01.02 – Program Pengelolaan Pendidikan
	Penguatan regulasi daerah tentang sekolah luar biasa		
	Peningkatkan kualitas guru SLB		
	Perbaikan manajemen dan tata kelola SLB		
	Perbaikan sarana dan prasarana SLB		
	PT. Cek kesehatan gratis	beresi Angka Kematian Ibu dan Anak	1.02.02 – Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Masyarakat
	Balita		
	anak usia dua tahun		
	Anak usia sekolah Kelas 7		
	skrining TB anak dan dewasa		
Angka Kemiskinan			
	PP. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Beresi Desa	2.13.02 – Program Penataan Desa 3.27.02 – Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian 2.16.03 – Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1.05.03 – Program Penanggulangan Bencana
	Pembangunan lumbung kesejahteraan		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Produk unggulan go internasional bekerjasama dengan diaspora		
	Sistem Informasi Desa (SID)		
	Penguatan Tim tanggap bencana		
PP.	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Beresi Desa	1.04.03 – Program Kawasan Permukiman 3.26.02 – Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2.19.03 – Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 4.01.03 – Program Perekonomian dan Pembangunan
	Verifikasi dan Validasi RTLH	Beresi Pasar	
	Penyediaan Anggaran	Beresi Lapangan Olahraga	
	Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan sebagai Etalase Jawa Tengah	Genjot Investasi	
	Mendorong terciptanya Kolaborasi dengan BUMD, Swasta, dan Dunia Usaha dalam Kawasan Pengembangan Potensi Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan	Agrowisata Brebes Tata & Pariwisata Brebes Laris Manis	
PI.	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa	Desa Maju Lan Mapan	2.13.02 – Program Penataan Desa
	Gubernur		
	Wakil Gubernur		
	DPRD		
PI.	Jambanisasi 100%	Beresi Desa	.03.06 – Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
PI.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Petani Lan Nelayan Sejahtera	3.27.02 – Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR		PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
PI.	Pembelian hasil panen petani	Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Mengoptimalkan Hasil Pertanian (Intensifikasi)	Petani Lan Nelayan Sejahtera	3.27.02 – Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian
		Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen		
	Pembelian hasil panen nelayan	Pelatihan Penggunaan Teknologi GPS pada Nelayan	Petani Lan Nelayan Sejahtera	3.25.04 – Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Pelatihan Petambak Garam untuk Peningkatan Kualitas Produksi Garam Industri		3.25.03 – Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
PI.	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen	Petani Lan Nelayan Sejahtera	3.27.05 – Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian
				3.25.03 – Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Asuransi gagal panen bagi petani	PROVINSI	
		Asuransi alat tangkap dan kapal bagi nelayan		
PA.	Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir	Pembangunan rumah apung di Kota Pekalongan	PROVINSI	
		Pembangunan rumah apung di Kab. Demak		
PA.	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional		PROVINSI	
	Kewenangan Provinsi	Kabupaten Kendal		
		Kabupaten Pemalang		
	Bekerjasama dengan BBWS	Kota Pekalongan		
		Juana - Pati		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Semarang		
	Jepara		
PA. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)		PROVINSI	
	Sistem Irigasi terintegrasi	Grobogan	
		Demak	
		Pati	
	Pompanisasi khusus daerah priotitas rawan kekeringan	Grobogan	
		Demak	
		Pati	
PA. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM		Pedagang dan UMKM Berdaya Sejahtera	2.17.07 – Program Pemberdayaan UMKM
	Melakukan Identifikasi hutang petani, nelayan, UMKM		
	Menyusun Peraturan Gubernur penghapusan piutang		
	Pendampingan Penghapusan Hutang		
PA. Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk Buruh, Lansia, Veteran, dan Pelajar		PROVINSI	
PA. Petani milenial gaji		Petani lan Nelayan Sejahtera	3.27.07 – Program Penyuluhan Pertanian
	Identifikasi dan pemetaan petani milenial		
	Pendampingan petani milenial		
	Koordinasi dan Integrasi dengan Pemerintah Pusat terkait Program Petani Milenial Gajian		
PA. Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah		Genjot Investasi	2.18.06 – Program Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal
			2.18.02 – Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola CSR Penyusunan lembaga pengelola CSR Identifikasi program yang dibiayai CSR		
PA. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Identifikasi wilayah rawan bencana di Jawa Tengah Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi Monitoring sistem peringatan bencana	Gerakan Tangan dan Cegah Bencana	1.05.03 – Program Penanggulangan Bencana
PT. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Penguatan anggaran dan perubahan manajemen Balai Rehabilitasi Sosial Kolaborasi Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin Penambahan Identitas bagi kaum marginal	Sembako untuk Warga Miskin dan Lansia	1.06.05 – Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
PT. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya	Menyusun Regulasi Daerah terkait Energi Baru Terbarukan Identifikasi desa mandiri energi Melakukan riset potensi mandiri energi berbasis desa Kolaborasi pengembangan EBT dengan BUMN dan Swasta	Beresi Desa	4.01.03 – Program Perekonomian dan Pembangunan
PT. Mendorong Pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk Penyediaan Air Bersih		PROVINSI	
Pembangunan infrastruktur SPAM Regional	Solo Raya Banyumas Raya		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Pati Raya		
	Kedu Raya		
	Pekalongan Raya		
	Semarang Raya		
	Pembangunan infrastruktur SPAM Industri	Kawasan Industri Terpadu Batang	
		Kawasan Industri Kendal	
PT.	Pendidikan Perubahan Iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren	PROVINSI	
	Penerapan Pendidikan dan pelatihan Perubahan Iklim	SMA/SMK	
		Pesantren	
	Penerapan Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	SMA, SMK, SLB	
		Pesantren	
PT.	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Gerakan Tangan dan Cegah Bencana	1.05.03 – Program Penanggulangan Bencana
		Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana	
		- BPBD Provinsi	
		- Tagana	
		- Masyarakat	
		Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota	
PT.	Penataan Drainase dan Pengendalian Banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan dan Kabupaten Demak	PROVINSI	
	Penataan Drainase	Kota Semarang	
		Kota Pekalongan	
		Kabupaten Demak	
	Pengendalian Banjir	Kota Semarang	
		Kota Pekalongan	

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Kabupaten Demak		
	Kabupaten Kendal		
PT.	Fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	Beresi Desa	1.04.03 – Program Kawasan Permukiman
IKLH			
PP.	Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai	Sigap Bencana	1.05.03 – Program Penanggulangan Bencana 2.11.04 – Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Penanaman mangrove		
PI.	Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)	PROVINSI	
	Identifikasi Lokasi Desalinasi		
	Pembangunan desanilasi di Pekalongan		
	Pembangunan desanilasi di Demak		
	Pembangunan desanilasi di Kota Semarang		
	Rumusan Kelembagaan Pengelola		
	Pengujian Hasil		
	Kerjasama dengan CSR		
PA.	Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	Beresi Saluran Banyu	1.03.02 – Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
PA.	Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)	PROVINSI	

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	PA. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Alam Bersih dan Lestari	1.03.08 – Program Penataan Bangunan Gedung 1.04.03 – Program Kawasan Permukiman
	RTH Perkotaan		
	RTH Perdesaan		
	PT. Menghadirkan Infrastruktur yang carbon neutral	Alam Bersih dan Lestari	4.01.03 – Program Perekonomian dan Pembangunan
	Penegakan Peraturan Daerah terkait dengan Carbon neutral		
	Pemberian insentif kepada daerah yang menggunakan Carbon neutral dalam Pembangunan Infrastruktur		
	PT. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional	Beresi Sampah	2.11.11 – Program Pengelolaan Persampahan
	Penguatan tata kelola KSM		
Inflasi	PT. Pengembangan tempat pengolahan sampah regional	Beresi Sampah	2.11.11 – Program Pengelolaan Persampahan
	Modernisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg)		
	Penguatan Tata kelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg)		
	PT. Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Jaga Harga Bawang	3.30.04 – Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	PT. Subsidi Pangan Murah	Sembako untuk Warga Miskin dan Lansia	3.30.04 – Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1.06.05 – Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Identifikasi kebutuhan pokok yang sudah disubsidi		
	Identifikasi penerima bantuan		

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS GUBERNUR	PROGRAM PRIORITAS	RINCIAN PROGRAM
	Identifikasi koperasi/BUMD penyalur		
	Menyusun SOP penyaluran bantuan		
	Penyiapan anggaran		
PDRB per Kapita			
	PI. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Genjot Investasi	4.01.03 – Program Perekonomian dan Pembangunan 2.18.02 – Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Pembentukan Kelembagaan		
	Identifikasi Potensi Kawasan Aglomerasi		

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

Program & Kinerja Pemerintah

- Program Perangkat Daerah
- Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



04

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan Kabupaten Brebes pada tahun 2025 hingga tahun 2030, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab program perangkat daerah menjelaskan mengenai program penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan dibagi berdasarkan urusan dan unsur sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Selanjutnya, sub bab mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan membahas mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Seluruh target dalam bab ini ditetapkan untuk periode 2025–2030, di mana target tahun 2030 merupakan bagian dari penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030–2034, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

4.1 Program Perangkat Daerah

Guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah, diperlukan kebijakan yang terarah melalui program-program pembangunan yang mendukung tujuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Brebes telah merancang dan menetapkan program yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sub bab ini akan menjelaskan mengenai susunan program perangkat daerah berdasarkan pembagian urusan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta target penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 dan kerangka pendanaan.

4.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan program yang menjadi bentuk penjabaran dari visi, misi, tujuan, serta sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Program-program ini dikelompokkan berdasarkan masing-masing urusan dan unsur. **Tabel 4.1** merupakan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan.

TABEL 4. 123 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.125.233.890.000		1.105.845.890.000		1.101.547.890.000		1.096.802.890.000		1.094.564.090.000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					771.913.000.000		771.913.000.000		771.913.000.000		771.913.000.000		771.913.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	96,66	97	97,5	771.913.000.000	97,75	771.913.000.000	98	771.913.000.000	98,5	771.913.000.000	99	771.913.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					343.885.890.000		324.492.890.000		320.189.890.000		315.439.890.000		313.196.090.000	
Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru berkualifikasi akademik minimal S1 Jenjang SD (%)	97,88	98	98,5	948.000.000	99	985.000.000	99,5	1.005.000.000	100	1.045.000.000	100	1.060.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Guru berkualifikasi akademik minimal S1 Jenjang SMP (%)	95	96	97		98		99		100		100		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Guru berkualifikasi akademik minimal S1 Jenjang TK (%)	70,02	71	72		73		74		74,5		75		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Presentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Jenjang SD (%)	69,60	69,60	72		75		80		82		85		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Presentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Jenjang SMP (%)	56,80	56,80	60		65		70		72		75		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Presentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Jenjang TK (%)	41,4	45	50		53		56		58		60		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD (%)	51,45	52	53	342.937.890.000	54	323.507.890.000	56	319.184.890.000	58	314.394.890.000	60	312.136.090.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Sederajat (%)	101,79	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP Sederajat (%)	100,87	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD Sederajat (%)	94,51	95	96		97		98		99		100		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP Sederajat (%)	78,48	80	81		82		83		84		85		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	85,07	85.07-86.23	86.23-86.94		86.94-87.53		87.53-88.11		88.11-88.70		88.70-89.88		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	4,56	4.56-4.65	4.65-4.70		4.70-4.74		4.74-4.78		4.78-4.82		4.82-4.90		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang Paket A (Angka)	10,69	11	12		13		14		15		16		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang Paket B (Angka)	19,57	20,5	21		22,5		23		24,5		25		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang Paket C (Angka)	20,65	21	22		23		24		25		26		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang PAUD (Siswa/Rombel) (*)	15,99	15,8	15,7		15,5		15,25		15		15		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang SD (Siswa/Rombel) (*)	24,4	25	25,75		26,5		27		28		28		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang SMP (Siswa/Rombel) (*)	29,78	29,9	30,5		31		31,5		32		32		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	7,35	7.35-7.49	7.49-7.64		7.64-7.79		7.79-7.94		7.94-8.10		8.10-8.25		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					9.435.000.000		9.440.000.000		9.445.000.000		9.450.000.000		9.455.000.000	
Meratanya distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	4,24	4.24-4.48	4.48-4.70	9.435.000.000	4.70-4.78	9.440.000.000	4.78-5.15	9.445.000.000	5.15-5.22	9.450.000.000	5.22-5.58	9.455.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Rasio Guru per Siswa jenjang PAUD (Guru/Siswa) (*)	18,22	18,15	18		17,75		17,5		17,25		17		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Rasio Guru per Siswa Jenjang SD (Guru/Siswa) (%)	20,56	20	20		20		20		20		20		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Rasio Guru per Siswa Jenjang SMP (Guru/Siswa) (*)	18,47	18,65	18,75		19		19,5		19,75		20		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					744.623.052.220		800.787.937.315		828.714.438.597		868.973.739.951		903.296.391.730	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					655.710.490.704		691.378.498.715		720.631.861.357		760.740.346.951		793.760.126.730	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bandungsari (Indeks)	82,26	82,87	82,98	655.710.490.704	83,10	691.378.498.715	83,21	720.631.861.357	83,32	760.740.346.951	83,43	793.760.126.730	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Banjarharjo (Indeks)	78,88	81,59	82		83		84		85		86		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bantarkawung (Indeks)	88,65	88,7	88,75		88,8		88,85		88,9		88,95		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bentar (Indeks)	88,99	88,9	90		90,1		90,2		90,3		90,4		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bojongsari (Indeks)	85,79	85,8	85,8		85,8		85,81		85,81		85,81		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Brebes (Indeks)	79,16	80	81		82		83		84		85		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Buaran (Indeks)	88,9	88,9	89,1		89,3		89,6		89,8		85		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bulakamba (Indeks)	87,98	88	88,02		88,04		88,06		88,08		88,1		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bumiayu (Indeks)	77,89	80,83	83		84		85		86		87		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Cikakak (Indeks)	86,65	87	88		88,2		88,3		88,4		88,5		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Cikeusal Kidul (Indeks)	85,88	85,89	85,91		85,93		85,94		85,95		85,96		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jagalempeni (Indeks)	84,94	85	85		85		85		85		85		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jatibarang (Indeks)	89,38	89,45	89,52		89,59		89,66		89,73		89,85		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jatirokeh (Indeks)	83,52	84	84,25		84,50		84,75		85		85,25		DINAS KESEHATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kaligangsa (Indeks)	83,88	84,30	84,75		85,10		85,50		85,80		86		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kalimati (Indeks)	88,34	88,50	88,66		88,75		89		89,25		89,24		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kaliwadas (Indeks)	85	85,2	85,4		85,6		85,8		86		86,2		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kecipir (Indeks)	82,52	83,19	83,39		83,59		83,79		84		84,2		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kemurang Wetan (Indeks)	82,66	83	83,2		83,4		83,6		83,8		84		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kersana (Indeks)	88,71	89,21	89,71		90,21		90,71		91,21		91,71		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Ketanggungan (Indeks)	78,09	80,31	80,41		80,51		80,61		80,71		80,81		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Klikiran (Indeks)	85,21	85,30	85,50		85,70		85,90		86,10		86,30		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kluwut (Indeks)	80,8	82	84		86		88		90		92		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kutamendala (Indeks)	83,47	83,7	83,93		84,16		84,39		84,62		84,85		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Larangan (Indeks)	84,44	84,94	85,44		85,94		86,44		86,94		87,44		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Losari (Indeks)	80,38	82,8	84,42		86,04		87,66		89,28		90,9		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Luwunggede (Indeks)	83,9	83,93	83,93		84,13		84,33		84,53		84,7		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Paguyangan (Indeks)	86,27	86,40	86,60		86,80		87		87,20		87,40		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Pemaron (Indeks)	80,54	80,80	81,20		81,50		82		82,80		83		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Salem (Indeks)	89,21	89,3	89,4		89,5		89,6		89,7		89,8		DINAS KESEHATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sidamulya (Indeks)	83,59	83,8	84		84,2		84,4		84,6		84,8		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sirampog (Indeks)	82,64	82,89	83		83,5		84		84,5		85		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sitanggal (Indeks)	83,79	83,85	84,1		84,5		84,75		85,25		85,5		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Siwuluh (Indeks)	80,99	81,9	82,9		83,9		84,9		85,9		86,9		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tanjung (Indeks)	87,91	89	90		90,5		91		91		91,5		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tonjong (Indeks)	82,85	81,21	82,85		82,9		83,5		84		85		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Wanasari (Indeks)	87,35	83,02	84		84,5		85		85,5		86		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Winduaji (Indeks)	88,34	86,83	87,03		87,23		87,43		87,63		87,83		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Brebes (Indeks)	83	84	85		85		85		85		85		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Bumiayu (Indeks)	81,25	81,50	82		82,50		83		83,50		84		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan (Indeks)	84	84,5	85		85,5		86		86,5		87		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Balai Pengobatan Paru dan Kusta (Indeks)	87	88	88,5		89		89,5		90		90,5		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Indeks)	85	86	87		88		89		90		91		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN					87.695.478.216		108.005.438.600		106.515.577.240		106.511.393.000		107.586.265.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	79	82	83	87.695.478.216	84	108.005.438.600	85	106.515.577.240	87	106.511.393.000	88	107.586.265.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Angka penemuan kasus baru Kusta per 100.000 penduduk (per 100.000 penduduk)	1,28	1,27	1,26		1,25		1,24		1,2		1,19		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Cakupan imunisasi lengkap pada bayi usia 0-11 Bulan (IDL) (%)	95,9	97	97		98		98,5		99		99		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98,31	97,6	97,7		97,8		97,9		98		98,1		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (%)	57,14	58	59		60		61		62		63		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	75,16	71,61	71,71		71,81		71,91		72,01		72,11		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	88,81	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Cakupan penemuan kasus pneumonia pada Balita (%)	67,29	70	72		74		76		78		80		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Cakupan penemuan kasus TB (Treatment Coverage) (%)	86	90	91		92		93		94		95		DINAS KESEHATAN DAERAH
	cakupan puskesmas yang melayani kesehatan pasca bencana, Wabah dan KLB (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Fasyankes (RS dan puskesmas) memenuhi layanan kesling kunci (%)	54	54	54		54		54		54		54		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Jumlah Kematian Anak Balita (Kasus)	372	364	357		349		342		334		327		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Jumlah Kematian Bayi (Kasus)	303	298	293		288		283		278		273		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (%)	5,57	6	7		8		9		10		11		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	93,4	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	87,63	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheri tetanus (3 dosis DPT) (%)	87,8	88	88,5		89		89,5		90		90,5		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	30	40		50		60		70		80		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	13,47	20,20	33		45,79		58,59		71,38		84,18		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	35,35	38,38	40,40		40,40		47,47		47,47		54,55		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	74,19	74,19	74,24		75		75,76		75,76		75,76		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	0	83	85		88		92		95		96		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	87,24	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K4) (%)	91,1	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K6) (%)	85,8	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan (%)	95,2	95,2	96		96,5		97		97,5		98		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	0	25,5	24,5		23,5		22,5		21,5		20,5		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	77,75	25,5	24,5		23,5		22,5		21,5		20,5		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	93,06	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)													
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	61,15	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	75,23	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) sesuai standar (%)	59,25	60	62		65		70		72		75		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,93	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	57,62	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase posyandu aktif siklus hidup (%)	15,99	30,05	44,10		58,16		72,21		86,27		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase puskesmas dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	0	2,63	5,26		7,89		10,52		13,15		18,42		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) Memenuhi Syarat (%)	30	39,47	44,73		50		52,63		57,89		63,16		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan (%)	0	5,26	7,89		10,52		13,16		18,42		23,68		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan (%)	0	5,26	7,89		10,52		13,15		15,78		21,05		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase puskesmas yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara (%)	0	2,63	5,26		7,89		10,52		13,15		18,42		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat (%)	0	30	35		40		45		50		60		DINAS KESEHATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	83,43	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	75	77		79		81		83		85		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Presentase orang dengan Pelayanan Kesehatan Orang dengan suspect Malaria sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Presentase Orang Penderita Penyakit menular dan tidak menular Mendapatkan Pelayanan Sesuai standar (%)	97,26	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	1	1,5		2		2		2		2,5		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,8	20	19		18		17		16		15		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	8	7,8	7,6		7,4		7,2		7		6,8		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	60	70		80		90		95		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	5	7		10		15		17		20		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (%)	94,63	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL	100	83	85		88		92		95		96		DINAS KESEHATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Imunisasi Rutin Lengkap) (Persentase)													
	Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (Unit)	38	38	38		38		38		38		38		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Laboratorium untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah di Kabupaten Brebes (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					523.190.800		600.000.000		650.000.000		695.000.000		765.000.000	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	60,52	73,68	75	523.190.800	77	600.000.000	80	650.000.000	90	695.000.000	100	765.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	66,66	66,66	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di Laboratorium Kesehatan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2,08	2,14	2,14		2,15		2,16		2,16		2,17		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di Klinik Pengobatan Paru dan Kusta (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					351.652.500		359.000.000		367.000.000		372.000.000		375.000.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	100	100	351.652.500	100	359.000.000	100	367.000.000	100	372.000.000	100	375.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	0	75	76		77		78		79		80		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	0	11,27	20,95		30,63		40,32		50		60		DINAS KESEHATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	0	83,5	84		84,5		85		85,5		90		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	54	58		62		66		70		74		DINAS KESEHATAN DAERAH
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					342.240.000		445.000.000		550.000.000		655.000.000		810.000.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	2	16	32	342.240.000	48	445.000.000	64	550.000.000	80	655.000.000	96	810.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Terlaksananya PHBS dalam rangka Promotif Preventif di UPTD Labkes Kab.Brebes (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN DAERAH
	Terselenggaranya Program Promosi Kesehatan tentang Pengobatan Paru dan Kusta (%)	0	88	89		89,5		90		90,5		91		DINAS KESEHATAN DAERAH
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					878.331.672.952		632.255.054.202		514.249.472.952		463.230.672.952		436.803.847.952	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					42.283.766.702		40.433.766.702		40.433.766.702		40.583.766.702		40.883.766.702	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	78,33	79	80	22.288.766.702	81	22.288.766.702	82	22.288.766.702	83	22.288.766.702	84	22.288.766.702	DINAS PEKERJAAN UMUM
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	19.995.000.000	100	18.145.000.000	100	18.145.000.000	100	18.295.000.000	100	18.595.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					25.400.000.000		26.150.000.000		26.900.000.000		27.650.000.000		28.400.000.000	
Terbangunnya infrastruktur Sungai / saluran pembuang	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (Indeks)	68,33	68,53	68,74	25.400.000.000	68,94	26.150.000.000	69,15	26.900.000.000	69,36	27.650.000.000	69,57	28.400.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terbangunnya Tanggul dan Dinormalisasikannya Sungai /Saluran Pembuang (Km)	444,98	444,98	444,98		444,98		444,98		444,98		444,98		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					41.795.000.000		41.795.000.000		41.795.000.000		41.795.000.000		41.795.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	0	0	1,5	41.795.000.000	3	41.795.000.000	5	41.795.000.000	8	41.795.000.000	11	41.795.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
	Jumlah Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Jaringan Perpipaan (Liter/Detik)	21,69	22	23		24		25		26,5		28		DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.100.000.000		4.125.000.000		4.150.000.000		4.175.000.000		4.200.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	85,06	85,29	85,52	4.100.000.000	85,75	4.125.000.000	86,29	4.150.000.000	86,52	4.175.000.000	86,75	4.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	81,85	82,42	82,98		83,55		84,11		84,68		85,24		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					22.050.000.000		22.050.000.000		22.050.000.000		22.050.000.000		22.050.000.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Saluran Drainase tersumbat tertangani (%)	100	100	100	22.050.000.000	100	22.050.000.000	100	22.050.000.000	100	22.050.000.000	100	22.050.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					20.800.000.000		20.800.000.000		20.800.000.000		20.800.000.000		20.800.000.000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah Dokumen Rekomtek Persetujuan Bangunan Gedung terbit dan Sertifikat Laik Fungsi (Dokumen)	445	450	450	20.800.000.000	450	20.800.000.000	450	20.800.000.000	450	20.800.000.000	450	20.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					717.284.906.250		472.221.287.500		353.376.706.250		301.357.906.250		273.788.081.250	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase panjang Jalan Kabupaten Kondisi Rusak tertangani (%)	12,16	10,45	29,83	717.284.906.250	22,56	472.221.287.500	18,78	353.376.706.250	16,94	301.357.906.250	15,53	273.788.081.250	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.068.000.000		1.130.000.000		1.194.000.000		1.269.000.000		1.337.000.000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	73	75	77	1.068.000.000	79	1.130.000.000	81	1.194.000.000	83	1.269.000.000	85	1.337.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000	
Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase implementasi implementasi penyelenggaraan penataan ruang (%)	50	55	60	2.550.000.000	65	2.550.000.000	70	2.550.000.000	75	2.550.000.000	80	2.550.000.000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					44.529.926.316		48.381.748.912		52.271.385.351		56.394.703.509		60.610.417.105	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.559.150.000		8.573.650.000		8.593.150.000		8.607.650.000		8.627.150.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	95	95	95	8.559.150.000	95	8.573.650.000	95	8.593.150.000	95	8.607.650.000	95	8.627.150.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.448.000.000		1.689.800.000		1.975.000.000		2.332.000.000		2.769.000.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat relokasi program pemerintah provinsi/kabupaten/kota	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persentase)	82,70	83,50	84,31	1.448.000.000	85,11	1.689.800.000	85,91	1.975.000.000	86,71	2.332.000.000	87,51	2.769.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas	80	82	84		86		88		90		92		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)													
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					17.681.726.316		19.429.748.912		21.169.685.351		23.066.503.509		24.985.717.105	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	12,57	24,78	36,99	17.681.726.316	49,20	19.429.748.912	61,40	21.169.685.351	73,61	23.066.503.509	85,82	24.985.717.105	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					7.000.000.000		8.000.000.000		9.000.000.000		10.000.000.000		11.000.000.000	
Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Persentase pengurangan potensi kawasan permukiman kumuh (%)	12,57	24,78	36,99	7.000.000.000	49,20	8.000.000.000	61,40	9.000.000.000	73,61	10.000.000.000	85,82	11.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	81,85	82,42	82,98		83,55		84,11		84,68		85,24		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					9.794.800.000		10.618.550.000		11.441.050.000		12.268.550.000		13.088.550.000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	0	82	84	9.794.800.000	86	10.618.550.000	88	11.441.050.000	90	12.268.550.000	92	13.088.550.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					46.250.000		70.000.000		92.500.000		120.000.000		140.000.000	
Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	4,06	4,06	13,30	46.250.000	20,82	70.000.000	26,92	92.500.000	31,89	120.000.000	35,93	140.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					27.582.433.313		32.176.828.413		34.479.433.313		38.340.933.313		40.390.433.313	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.163.367.813		19.239.867.813		18.650.367.813		19.661.867.813		19.076.367.813	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	13.410.367.813	100	13.625.867.813	100	13.836.367.813	100	14.046.867.813	100	14.262.367.813	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	4.753.000.000	100	5.614.000.000	100	4.814.000.000	100	5.615.000.000	100	4.814.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.522.853.200		5.670.748.300		7.762.853.200		9.727.853.200		11.667.853.200	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat (tibusmantras) (%)	100	100	100	3.522.853.200	100	5.670.748.300	100	7.762.853.200	100	9.727.853.200	100	11.667.853.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.465.000.000		5.035.000.000		5.035.000.000		5.135.000.000		5.035.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	17,77	18,18	20,66	2.180.000.000	23,14	2.650.000.000	25,62	2.650.000.000	28,1	2.750.000.000	30,58	2.650.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	835.000.000	100	835.000.000	100	835.000.000	100	835.000.000	100	835.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	1.450.000.000	100	1.550.000.000	100	1.550.000.000	100	1.550.000.000	100	1.550.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.431.212.300		2.231.212.300		3.031.212.300		3.816.212.300		4.611.212.300	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Rensponse Time) (%)	47	100	100	1.431.212.300	100	2.231.212.300	100	3.031.212.300	100	3.816.212.300	100	4.611.212.300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					32.335.409.619		22.358.467.888		23.069.809.565		23.846.946.944		24.670.645.173	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.726.715.619		9.918.467.888		10.594.809.565		11.331.946.944		12.135.645.173	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	9.726.715.619	100	9.918.467.888	100	10.594.809.565	100	11.331.946.944	100	12.135.645.173	DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.041.432.700		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100	1.041.432.700	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	"Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial " (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN					33.544.500		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KORBAN TINDAK KEKERASAN														
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan (Orang)	0	0	5	33.544.500	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	DINAS SOSIAL
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					4.311.366.700		4.390.000.000		4.390.000.000		4.390.000.000		4.390.000.000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks)	0	60	61,50	4.311.366.700	63	4.390.000.000	64,50	4.390.000.000	66	4.390.000.000	67,50	4.390.000.000	DINAS SOSIAL
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks)	0	58	59,5		61		62,5		64		65,5		DINAS SOSIAL
	Indeks Peranan Sosial (Indeks)	0	61	62,5		64		65,50		67		68,50		DINAS SOSIAL
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					15.491.987.100		5.760.000.000		5.760.000.000		5.760.000.000		5.760.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (Indeks)	0	60	61,5	15.491.987.100	63	5.760.000.000	64,5	5.760.000.000	66	5.760.000.000	67,5	5.760.000.000	DINAS SOSIAL
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (Indeks)	0	61	62,5		64		65,5		67		68,5		DINAS SOSIAL
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.365.868.900		390.000.000		425.000.000		465.000.000		485.000.000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	1.365.868.900	100	390.000.000	100	425.000.000	100	465.000.000	100	485.000.000	DINAS SOSIAL
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					364.494.100		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik (%)	100	100	100	364.494.100	100	360.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000	DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.202.760.081		13.965.000.000		13.715.000.000		12.525.000.000		12.565.000.000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.095.174.522		10.760.000.000		10.530.000.000		9.340.000.000		9.350.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	8.095.174.522	100	10.760.000.000	100	10.530.000.000	100	9.340.000.000	100	9.350.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					20.000.000		40.000.000		10.000.000		10.000.000		40.000.000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	69,35	69,5	69,75	20.000.000	70	40.000.000	70,25	10.000.000	70,5	10.000.000	70,75	40.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.530.000.000		2.530.000.000		2.530.000.000		2.530.000.000		2.530.000.000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	10	11,37	12,36	2.530.000.000	13,36	2.530.000.000	14,36	2.530.000.000	15,75	2.530.000.000	16,75	2.530.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Persentase tenaga kerja di sektor industri yang meningkat produktivitasnya (%)	87,29	87,3	87,4		87,5		87,6		87,7		87,8		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					267.587.800		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	69,35	69,5	69,75	267.587.800	70	330.000.000	70,25	330.000.000	70,5	330.000.000	70,75	330.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					289.997.759		305.000.000		315.000.000		315.000.000		315.000.000	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	69.607	69.700	69.700	289.997.759	69.700	305.000.000	69.700	315.000.000	69.700	315.000.000	69.700	315.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN					7.100.102.848		7.906.680.000		8.478.180.000		9.073.680.000		9.669.180.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.122.102.848		6.870.680.000		7.384.180.000		7.921.680.000		8.459.180.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	6.122.102.848	100	6.870.680.000	100	7.384.180.000	100	7.921.680.000	100	8.459.180.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					665.000.000		697.000.000		729.000.000		761.000.000		793.000.000	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	62,26	53,85	54,48	665.000.000	55,08	697.000.000	55,31	729.000.000	55,31	761.000.000	55,83	793.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55,38	55,48	55,58		55,68		55,78		55,88		55,98		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000	
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	1	1	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					8.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	100	100	8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	56,67	57,67	58,67	80.000.000	59,67	85.000.000	60,67	90.000.000	61,67	95.000.000	62,67	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	77,7	61,75	62,75	110.000.000	63,75	120.000.000	64,75	130.000.000	65,75	140.000.000	66,75	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Layanan Komprehensif (Persentase)													ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.491.300.000		1.789.100.000		2.076.900.000		2.374.700.000		2.662.500.000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000	
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	0,0039	0,006	0,011	200.000.000	0,016	225.000.000	0,021	250.000.000	0,026	275.000.000	0,030	300.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					961.300.000		1.229.100.000		1.491.900.000		1.759.700.000		2.022.500.000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90,42	90,5	90,65	961.300.000	90,75	1.229.100.000	90,85	1.491.900.000	91	1.759.700.000	91,15	2.022.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000	
Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0,67	0,67	0	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					50.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	0	85	86	50.000.000	87	55.000.000	88	55.000.000	89	60.000.000	100	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.310.000.000		2.310.000.000		2.320.000.000		2.320.000.000		2.320.000.000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.120.000.000		1.120.000.000		1.130.000.000		1.130.000.000		1.130.000.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan	16,66	16,66	33,33	1.120.000.000	50	1.120.000.000	66,66	1.130.000.000	83,33	1.130.000.000	100	1.130.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)													KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					590.000.000		590.000.000		590.000.000		590.000.000		590.000.000	
Meningkatnya redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee kepada subjek penerima yang sah, melalui mekanisme ganti kerugian dan penataan aset guna mendukung keadilan agraria dan kepastian hukum pertanahan	Prosentase tanah yang terfasilitasi redistribusi (%)	0	0	20,01	590.000.000	40,01	590.000.000	60,01	590.000.000	80,01	590.000.000	100	590.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Meningkatnya kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat melalui penetapan yang sah, guna mendukung perlindungan hak masyarakat hukum adat dan penataan ruang wilayah berbasis kearifan lokal	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	51,21	54,45	60,21	600.000.000	63,35	600.000.000	67,45	600.000.000	70,25	600.000.000	75	600.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					41.785.000.000		46.620.000.000		43.062.000.000		46.202.000.000		44.807.000.000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.485.000.000		18.705.000.000		15.872.000.000		18.787.000.000		16.417.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	14.485.000.000	100	18.705.000.000	100	15.872.000.000	100	18.787.000.000	100	16.417.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					1.275.000.000		1.680.000.000		1.490.000.000		1.600.000.000		1.710.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	0	100	100	1.275.000.000	100	1.680.000.000	100	1.490.000.000	100	1.600.000.000	100	1.710.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					3.920.000.000		4.335.000.000		4.850.000.000		5.365.000.000		5.880.000.000	
Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	0	71,9	72,1	3.920.000.000	72,3	4.335.000.000	72,5	4.850.000.000	72,7	5.365.000.000	72,9	5.880.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	0	85,27	85,47		85,67		85,87		86,07		86,27		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					5.500.000.000		5.300.000.000		3.800.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	0	10	15	5.500.000.000	20	5.300.000.000	25	3.800.000.000	27	3.100.000.000	30	3.100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					500.000.000		550.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	25	25	500.000.000	25	550.000.000	25	550.000.000	25	600.000.000	25	600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					325.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	50	55	325.000.000	60	350.000.000	65	400.000.000	70	450.000.000	75	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	100	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					15.000.000.000		14.920.000.000		15.320.000.000		15.520.000.000		15.820.000.000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Volume sampah yang terkelola di pengelola sampah (%)	0	200	250	15.000.000.000	300	14.920.000.000	350	15.320.000.000	400	15.520.000.000	450	15.820.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI					16.537.600.000		16.537.600.000		16.537.600.000		16.537.600.000		16.537.600.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.051.000.000		13.051.000.000		13.051.000.000		13.051.000.000		13.051.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	95	95	95	13.051.000.000	95	13.051.000.000	95	13.051.000.000	95	13.051.000.000	95	13.051.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	8,48	8,49	8,5	2.250.000.000	8,51	2.250.000.000	8,52	2.250.000.000	8,53	2.250.000.000	8,54	2.250.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	35,87	36,87	37,87		38,87		39,87		40,87		41,87		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Buah)	127.597	128.000	128.000		128.000		128.000		128.000		128.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Jumlah Updating Kartu Keluarga (Dokumen)	169.287	169.500	169.500		169.500		169.500		169.500		169.500		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Akta Cerai (%)	70,86	71,86	72,86		73,86		74,86		75,86		76,86		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Akta Nikah / Buku Nikah (%)	63,71	64,21	65,21		66,21		67,21		68,21		69,21		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					193.000.000		193.000.000		193.000.000		193.000.000		193.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	95,83	96,08	96,33	193.000.000	96,58	193.000.000	96,83	193.000.000	97,08	193.000.000	97,33	193.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil,	95	95,25	95,5		95,75		96		96,25		96,50		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	menurut umur (Persentase)													
	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.036.100.000		1.036.100.000		1.036.100.000		1.036.100.000		1.036.100.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	25	1.036.100.000	50	1.036.100.000	50	1.036.100.000	75	1.036.100.000	100	1.036.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Inovasi pelayanan (Inovasi) (*)	2	1	1		1		1		1		1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Dokumen)	0	3	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					10.981.472.070		11.445.016.000		12.105.042.650		12.290.538.650		12.513.672.650	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.260.075.250		8.353.216.000		8.864.342.650		8.900.213.650		8.956.857.650	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	8.260.075.250	100	8.353.216.000	100	8.864.342.650	100	8.900.213.650	100	8.956.857.650	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					154.000.000		162.000.000		171.000.000		180.000.000		188.250.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	154.000.000	100	162.000.000	100	171.000.000	100	180.000.000	100	188.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					54.500.000		184.800.000		195.100.000		205.500.000		235.800.000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	54.500.000	100	184.800.000	100	195.100.000	100	205.500.000	100	235.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.254.508.045		1.358.600.000		1.431.900.000		1.478.125.000		1.530.430.000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	1.254.508.045	100	1.358.600.000	100	1.431.900.000	100	1.478.125.000	100	1.530.430.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.258.388.775		1.386.400.000		1.442.700.000		1.526.700.000		1.602.335.000	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100	1.258.388.775	100	1.386.400.000	100	1.442.700.000	100	1.526.700.000	100	1.602.335.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	50	50	66		100		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					998.500.000		1.056.300.000		1.143.430.000		1.187.000.000		1.258.850.000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					197.000.000		213.300.000		232.730.000		251.300.000		273.050.000	
Terkendaliannya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	17,6	17.6-17.3	17.3-17	197.000.000	17-16.7	213.300.000	16.7-16.4	232.730.000	16.4-16.1	251.300.000	16.1-15.8	273.050.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,08	2,1	2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rasio Kepadatan Penduduk (Orang/Km2)	1.167	1.180	1.191		1.203		1.214		1.225		1.235		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					541.500.000		563.000.000		610.700.000		635.700.000		685.800.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	67,66	68,09	68,34	541.500.000	68,59	563.000.000	68,84	610.700.000	69,09	635.700.000	69,34	685.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (%)	63,19	63,25	63,30		63,35		63,40		63,50		63,50		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	6,7	6,5	6,4		6,3		6,2		6,1		6		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					260.000.000		280.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran Serta Masyarakat	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	6,48	7	7,4	260.000.000	7,8	280.000.000	8,1	300.000.000	8,5	300.000.000	8,8	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Ketahanan Keluarga (Persentase)													PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					88.669.000.000		133.186.500.000		123.778.885.000		123.727.441.550		125.210.494.797	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.769.000.000		34.497.000.000		28.747.000.000		30.284.000.000		29.705.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	25.769.000.000	100	34.497.000.000	100	28.747.000.000	100	30.284.000.000	100	29.705.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					62.900.000.000		98.689.500.000		95.031.885.000		93.443.441.550		95.505.494.797	
meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,5	0,53	0,56	15.250.000.000	0,59	49.610.000.000	0,62	44.480.000.000	0,65	41.375.000.000	0,68	41.875.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	16,33	16.33-18.46	18.46-20.60		20.60-22.73		22.73-24.86		24.86-26.99		26.99-29.12		DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	0	100	100	47.650.000.000	100	49.079.500.000	100	50.551.885.000	100	52.068.441.550	100	53.630.494.797	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11.529.360.000		10.964.860.000		10.319.360.000		10.360.860.000		10.224.960.000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.786.360.000		8.510.360.000		8.098.360.000		8.728.360.000		8.334.360.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	98,74	98,8	98,9	7.786.360.000	99	8.510.360.000	99,1	8.098.360.000	99,2	8.728.360.000	99,3	8.334.360.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					863.000.000		924.500.000		986.000.000		1.047.500.000		1.090.600.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	persentase permohonan data informasi yang diproses (%)	100	100	100	863.000.000	100	924.500.000	100	986.000.000	100	1.047.500.000	100	1.090.600.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.880.000.000		1.530.000.000		1.235.000.000		585.000.000		800.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Sub Domain yang aktif (%)	100	100	100	2.880.000.000	100	1.530.000.000	100	1.235.000.000	100	585.000.000	100	800.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (%)	73,72	73.72-78.80	78.80-83.89		83.89-88.97		88.97-94.05		94.05-99.14		99.14-100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					18.658.139.994		21.300.737.300		21.699.692.500		22.243.050.000		23.299.780.000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.058.140.094		19.520.737.300		19.731.692.500		20.078.250.000		20.928.500.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	17.058.140.094	100	19.520.737.300	100	19.731.692.500	100	20.078.250.000	100	20.928.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi meningkatkan tata kelola, memperkuat kepatuhan regulasi, serta memberikan perlindungan kepada anggota, sehingga tercipta ekosistem perkoperasian yang sehat dan berkelanjutan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (%)	0	112	114	300.000.000	116	330.000.000	118	363.000.000	120	399.300.000	122	439.230.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,83	0.83-0.93	0.93-1.05		1.05-1.17		1.17-1.31		1.31-1.47		1.47-1.65		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	145	150	155	500.000.000	160	550.000.000	165	605.000.000	170	665.500.000	170	732.050.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
koperasi, memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi, sehingga tercipta koperasi yang profesional dan berdaya saing tinggi														
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					799.999.900		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000	
Peningkatan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Ijin Usaha (Unit Usaha)	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Ijin Usaha (Unit Usaha)	0	886	886	799.999.900	985	900.000.000	1.130	1.000.000.000	1.235	1.100.000.000	1.235	1.200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,5	2.5-2.66	2.66-2.82		2.82-2.97		2.97-3.12		3.12-3.27		3.27-3.41		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					11.538.180.366		17.960.000.000		21.552.000.000		25.862.400.000		31.034.880.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.438.180.366		14.260.000.000		17.112.000.000		20.534.400.000		24.641.280.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	9.438.180.366	100	14.260.000.000	100	17.112.000.000	100	20.534.400.000	100	24.641.280.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					600.000.000		1.200.000.000		1.440.000.000		1.728.000.000		2.073.600.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase realisasi investasi (%)	100	100	100	600.000.000	100	1.200.000.000	100	1.440.000.000	100	1.728.000.000	100	2.073.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					200.000.000		400.000.000		480.000.000		576.000.000		691.200.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	0	10	200.000.000	10	400.000.000	10	480.000.000	10	576.000.000	10	691.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					600.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.440.000.000		1.728.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	0	0	100	600.000.000	100	1.000.000.000	100	1.200.000.000	100	1.440.000.000	100	1.728.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					500.000.000		800.000.000		960.000.000		1.152.000.000		1.382.400.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	800.000.000	100	960.000.000	100	1.152.000.000	100	1.382.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					200.000.000		300.000.000		360.000.000		432.000.000		518.400.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0	0	100	200.000.000	100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					11.695.000.000		13.730.000.000		15.775.000.000		17.795.000.000		17.915.000.000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					4.875.000.000		6.815.000.000		8.755.000.000		10.685.000.000		10.705.000.000	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Organisasi)	34	34	34	4.875.000.000	34	6.815.000.000	34	8.755.000.000	34	10.685.000.000	34	10.705.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor (%)	49	49	50		51		52		53		54		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					6.820.000.000		6.915.000.000		7.020.000.000		7.110.000.000		7.210.000.000	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Provinsi (Orang)	25	25	37	6.820.000.000	40	6.915.000.000	47	7.020.000.000	50	7.110.000.000	55	7.210.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Jumlah Atlet yang dibina tingkat Pendidikan Dasar (Orang)	347	347	36		380		400		415		420		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					135.000.000		180.000.000		190.000.000		200.000.000		220.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					135.000.000		180.000.000		190.000.000		200.000.000		220.000.000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah Publikasi Buku Statistik Sektoral (Dokumen)	4	4	4	135.000.000	4	180.000.000	4	190.000.000	4	200.000.000	4	220.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					904.000.000		904.000.000		904.000.000		904.000.000		904.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					904.000.000		904.000.000		904.000.000		904.000.000		904.000.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi Pemkab Brebes di Data Center Dinkominfotik yang diamankan menggunakan SSL (Aplikasi)	200	200	200	904.000.000	200	904.000.000	200	904.000.000	200	904.000.000	200	904.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					9.694.331.932		12.110.121.600		13.386.220.000		13.985.520.000		13.739.020.000	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.364.990.532		10.073.121.600		10.753.220.000		10.936.520.000		10.014.020.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	8.364.990.532	100	10.073.121.600	100	10.753.220.000	100	10.936.520.000	100	10.014.020.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.169.021.400		1.222.000.000		1.313.000.000		1.429.000.000		1.590.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	1.169.021.400	100	1.222.000.000	100	1.313.000.000	100	1.429.000.000	100	1.590.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					35.000.000		190.000.000		200.000.000		205.000.000		220.000.000	
Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)	20,38	20.38-21.71	21.71-23.05	35.000.000	23.05-24.38	190.000.000	24.38-25.71	200.000.000	25.71-27.05	205.000.000	27.05-28.38	220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Prosentase Kesenian Tradisional yang	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)													
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					0		50.000.000		80.000.000		90.000.000		95.000.000	
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Orang)	34,82	34.82-35.51	35.51-36.20	0	36.20-36.91	50.000.000	36.91-37.62	80.000.000	37.62-38.35	90.000.000	38.35-39.10	95.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					48.000.000		215.000.000		295.000.000		305.000.000		325.000.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	34,82	34.82-35.51	35.51-36.20	48.000.000	36.20-36.91	215.000.000	36.91-37.62	295.000.000	37.62-38.35	305.000.000	38.35-39.10	325.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					77.320.000		360.000.000		745.000.000		1.020.000.000		1.495.000.000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	100	100	100	77.320.000	100	360.000.000	100	745.000.000	100	1.020.000.000	100	1.495.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					7.617.500.000		9.970.000.000		15.420.500.000		9.731.500.000		9.226.500.000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.440.500.000		8.643.000.000		13.965.500.000		8.147.500.000		7.618.500.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	6.440.500.000	100	8.643.000.000	100	13.965.500.000	100	8.147.500.000	100	7.618.500.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.135.000.000		1.280.000.000		1.404.000.000		1.529.000.000		1.548.000.000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	66,80	66,80	66,90	1.135.000.000	67	1.280.000.000	67,10	1.404.000.000	67,20	1.529.000.000	67,30	1.548.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI					42.000.000		47.000.000		51.000.000		55.000.000		60.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NASIONAL DAN NASKAH KUNO														
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0,042	0,045	42.000.000	0,047	47.000.000	0,049	51.000.000	0,051	55.000.000	0,053	60.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					375.000.000		562.000.000		574.000.000		700.000.000		825.000.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					345.000.000		522.000.000		524.000.000		640.000.000		755.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	77,05	77,50	78	345.000.000	78,50	522.000.000	79	524.000.000	79,50	640.000.000	80	755.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	73,41	74	75	30.000.000	76	40.000.000	77	50.000.000	78	60.000.000	79	70.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					12.888.000.000		13.689.500.000		14.439.000.000		15.138.500.000		15.818.000.000	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.905.000.000		8.812.000.000		9.369.000.000		9.936.000.000		10.483.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	100	100	8.905.000.000	100	8.812.000.000	100	9.369.000.000	100	9.936.000.000	100	10.483.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.291.000.000		1.962.500.000		1.975.000.000		1.987.500.000		2.000.000.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.918,96	4.970	5.020	1.291.000.000	5.070	1.962.500.000	5.120	1.975.000.000	5.170	1.987.500.000	5.220	2.000.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.477.000.000		1.690.000.000		1.800.000.000		1.910.000.000		2.020.000.000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	75.086	74.000	74.050	1.477.000.000	74.100	1.690.000.000	74.150	1.800.000.000	74.200	1.910.000.000	74.250	2.020.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					65.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha	Jumlah Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	0	6	6	65.000.000	6	75.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000	6	105.000.000	DINAS PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perikanan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibidang Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi (Kegiatan)													
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.150.000.000		1.150.000.000		1.210.000.000		1.210.000.000		1.210.000.000	
Meningkatnya nilai dan daya saing hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	28,8	28,9	29	1.150.000.000	29,1	1.150.000.000	29,2	1.210.000.000	29,3	1.210.000.000	29,4	1.210.000.000	DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.363.700.200		2.488.605.000		3.288.600.000		3.304.000.000		3.517.000.000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					722.441.800		1.198.105.000		1.658.100.000		1.618.500.000		1.797.000.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	120	120-111	111-127	722.441.800	127-143	1.198.105.000	143-158	1.658.100.000	158-190	1.618.500.000	190-201	1.797.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	-29,38	-15	0		10		20		30		35		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					283.442.000		800.000.000		875.000.000		880.000.000		930.000.000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	100	100	100	283.442.000	100	800.000.000	100	875.000.000	100	880.000.000	100	930.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLUNDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					0		90.000.000		320.000.000		370.000.000		370.000.000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	100	100	100	0	100	90.000.000	100	320.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					357.816.400		400.500.000		435.500.000		435.500.000		420.000.000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Orang)	100	30	60	357.816.400	90	400.500.000	120	435.500.000	130	435.500.000	150	420.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					38.215.547.235		42.920.274.079		41.239.155.721		42.810.128.282		44.574.378.683	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					30.641.819.050		34.511.594.909		32.396.245.967		33.435.086.450		34.771.909.311	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	7.870.319.050	100	11.622.594.909	100	9.389.745.967	100	10.316.086.450	100	11.490.409.311	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	22.771.500.000	100	22.889.000.000	100	23.006.500.000	100	23.119.000.000	100	23.281.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.007.890.900		3.277.210.090		3.481.270.314		3.725.486.475		3.854.220.213	
Meningkatnya populasi dan kualitas SDGH lokal dan ternak di Kabupaten Brebes	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	0	0	907.890.900	0	1.037.210.090	0	1.141.270.314	0	1.265.486.475	0	1.344.220.213	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	41,10	-5,49	1,53	2.100.000.000	1,53	2.240.000.000	1,53	2.340.000.000	1,53	2.460.000.000	1,53	2.510.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	-24,95	1,51	1,51		1,51		1,51		1,51		1,51		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	0,09	0,61	0,69		0,74		0,80		0,85		1,07		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.012.432.985		3.445.727.729		3.619.336.888		3.815.237.421		4.036.773.034	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	100	57	612.432.985	57	1.020.727.729	57	1.169.336.888	57	1.340.237.421	64	1.536.773.034	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	6.176,29	6.176,29	6.176,29	2.400.000.000	6.176,29	2.425.000.000	6.176,29	2.450.000.000	6.176,29	2.475.000.000	6.176,29	2.500.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					644.674.500		645.000.000		645.700.000		647.300.000		647.855.500	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	100	100	644.674.500	100	645.000.000	100	645.700.000	100	647.300.000	100	647.855.500	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					484.000.000		515.000.000		520.500.000		553.000.000		563.000.000	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (%)	0,35	0,36	0,37	484.000.000	0,38	515.000.000	0,4	520.500.000	0,42	553.000.000	0,43	563.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					56.949.250		65.491.638		75.315.383		86.612.691		99.604.594	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	56.949.250	100	65.491.638	100	75.315.383	100	86.612.691	100	99.604.594	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					367.780.550		460.249.713		500.787.169		547.405.245		601.016.031	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	6	4	177.780.550	4	270.249.713	4	310.787.169	4	357.405.245	4	411.016.031	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Meningkatnya kelas kelompok tani	Cakupan pembinaan kelompok tani (%)	84	84,5	85	190.000.000	86,8	190.000.000	88,6	190.000.000	90,4	190.000.000	92,2	190.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.326.665.400		5.272.000.000		6.352.000.000		7.437.000.000		8.527.000.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Terlaksananya kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kepemilikan izin perusahaan	Disparitas Harga (%)	0	0-0	0-0	0	1-1	2.000.000	1-1	2.000.000	1-1	2.000.000	1-1	2.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					3.141.225.400		5.000.000.000		6.000.000.000		7.000.000.000		8.000.000.000	
Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	29	29	3.141.225.400	29	5.000.000.000	29	6.000.000.000	29	7.000.000.000	29	8.000.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					35.440.000		45.000.000		50.000.000		60.000.000		75.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terlaksananya kegiatan pemantauan harga dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	1	1	1	35.440.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					150.000.000		225.000.000		300.000.000		375.000.000		450.000.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	150.000.000	100	225.000.000	100	300.000.000	100	375.000.000	100	450.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.535.245.818		1.965.000.000		1.925.000.000		2.035.000.000		2.045.000.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.410.045.718		1.730.000.000		1.680.000.000		1.780.000.000		1.780.000.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Realisasi nilai investasi IKM (Rupiah)	576.703	588.237	600.002	1.410.045.718	612.002	1.730.000.000	612.002	1.680.000.000	624.242	1.780.000.000	624.242	1.780.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					95.554.100		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000	
Meningkatnya kualitas perijinan berusaha sektor perindustrian	Persentase rekomendasi Ijin Usaha Industri yang diterbitkan (%)	88,07	88,2	88,3	95.554.100	88,4	150.000.000	88,5	160.000.000	88,6	170.000.000	88,7	180.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					29.646.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	2	2	2	29.646.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					80.357.000.000		82.524.850.000		84.758.500.000		87.089.300.000		89.474.200.000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					43.400.000.000		43.920.000.000		44.440.000.000		44.960.000.000		45.480.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	88	90	92	41.900.000.000	94	42.420.000.000	95	42.940.000.000	96	43.460.000.000	98	43.980.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Dokumen Laporan	100	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kinerja dan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)													
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					33.782.000.000		35.269.850.000		36.808.500.000		38.444.300.000		40.134.200.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Sekretariat Daerah (Nilai)	100	100	100	29.877.000.000	100	31.330.850.000	100	32.857.000.000	100	34.459.800.000	100	36.142.700.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100	1.755.000.000	100	1.789.000.000	100	1.801.500.000	100	1.834.500.000	100	1.841.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Prosentase rekomendasi LKPI yang ditindaklanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	0	0	100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3.175.000.000		3.335.000.000		3.510.000.000		3.685.000.000		3.860.000.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Rasio prosentase Realisasi anggaran dengan prosentase realisasi fisik (Angka)	0,99	0,99	0,99	850.000.000	0,99	850.000.000	0,99	850.000.000	0,99	850.000.000	0,99	850.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Target Dividen BUMD (Rupiah)	0	13,5	14	1.625.000.000	14,5	1.635.000.000	15	1.660.000.000	15,5	1.685.000.000	16	1.710.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	3	3	3	700.000.000	3	850.000.000	4	1.000.000.000	4	1.150.000.000	4	1.300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					73.218.238.000		81.948.563.000		86.551.924.100		85.565.615.000		90.530.685.000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					51.942.165.000		58.544.885.000		60.807.877.100		57.247.169.000		59.380.388.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	84	85	51.942.165.000	86	58.544.885.000	87	60.807.877.100	88	57.247.169.000	89	59.380.388.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					21.276.073.000		23.403.678.000		25.744.047.000		28.318.446.000		31.150.297.000	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	21.276.073.000	100	23.403.678.000	100	25.744.047.000	100	28.318.446.000	100	31.150.297.000	SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					10.015.468.566		15.229.258.000		16.297.544.000		17.295.516.000		17.364.988.000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.255.418.366		10.010.000.000		10.010.000.000		10.110.000.000		10.010.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	8.255.418.366	100	10.010.000.000	100	10.010.000.000	100	10.110.000.000	100	10.010.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					595.000.000		1.779.258.000		1.687.544.000		2.185.516.000		1.754.988.000	
Meningkatnya perencanaan kinerja perangkat daerah yang selaras dengan kinerja pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	595.000.000	100	1.779.258.000	100	1.687.544.000	100	2.185.516.000	100	1.754.988.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.165.050.200		3.440.000.000		4.600.000.000		5.000.000.000		5.600.000.000	
Meningkatnya sinergi dan kesesuaian perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	Persentase Sinergi dan Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah (%)	100	100	100	645.000.000	100	2.040.000.000	100	3.000.000.000	100	3.200.000.000	100	3.600.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya sinergi dan kesesuaian perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang PPM	Persentase Sinergi dan Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemsosbud (%)	100	100	100	520.050.200	100	1.400.000.000	100	1.600.000.000	100	1.800.000.000	100	2.000.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02 - KEUANGAN					633.818.486.411		653.296.872.108		672.781.363.606		692.351.432.994		712.973.455.629	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.868.910.843		23.967.785.943		24.639.553.953		24.832.095.003		25.494.792.285	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	9.090.010.843	100	9.275.518.943	100	9.310.518.943	100	9.275.518.943	100	9.275.518.943	BADAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0,00	0,00	90,00	13.778.900.000	92,00	14.692.267.000	94,00	15.329.035.010	96,00	15.556.576.060	98,00	16.219.273.342	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					602.147.457.300		620.236.996.165		638.870.476.953		658.064.280.710		677.835.283.053	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Penetapan APBD Dan APBD Perubahan Tepat Waktu (%)	100	100	100	2.250.000.000	100	2.317.500.000	100	2.387.025.000	100	2.458.635.750	100	2.532.394.823	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Tingkat kesesuaian SPM SKPD dengan SP2D yang diterbitkan berdasarkan SPD (%)	100	100	100	1.255.757.300	100	1.318.545.165	100	1.384.472.423	100	1.453.696.044	100	1.526.380.847	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	0	100	100	1.380.000.000	100	1.421.400.000	100	1.464.042.000	100	1.507.963.260	100	1.553.202.158	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Persentase realisasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk belanja transfer dan belanja tidak terduga (%)	0	95	96	597.008.000.000	97	614.918.240.000	98	633.365.787.200	99	652.366.760.816	99	671.937.763.640	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data melalui pemanfaatan SIPD secara optimal	Persentase perangkat daerah yang menggunakan SIPD secara aktif dan sesuai ketentuan (%)	100	100	100	253.700.000	100	261.311.000	100	269.150.330	100	277.224.840	100	285.541.585	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.903.000.000		2.990.090.000		3.079.792.700		3.172.186.481		3.267.352.075	
Meningkatnya tata kelola aset dearah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	3,86	3,5	3,5	2.903.000.000	3,5	2.990.090.000	3,5	3.079.792.700	3,5	3.172.186.481	3,5	3.267.352.075	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					5.899.118.268		6.102.000.000		6.191.540.000		6.282.870.800		6.376.028.216	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	5.899.118.268	100	6.102.000.000	100	6.191.540.000	100	6.282.870.800	100	6.376.028.216	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%)	32,65	45,08	50,11		52,44		54,50		56,70		58,83		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					39.421.000.000		39.293.000.000		39.265.000.000		39.341.000.000		39.676.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.656.000.000		34.386.000.000		34.348.000.000		34.334.000.000		34.621.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	83,4	83,41	83,42	34.656.000.000	83,43	34.386.000.000	84,44	34.348.000.000	83,45	34.334.000.000	83,46	34.621.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4.765.000.000		4.907.000.000		4.917.000.000		5.007.000.000		5.055.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79,49	79,5	79,51	4.765.000.000	79,52	4.907.000.000	79,53	4.917.000.000	79,54	5.007.000.000	79,55	5.055.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	91,45	80	80		80		80		80		80		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	98,52	90	90		90		90		90		90		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	92,92	0	85		85		85		85		85		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.350.000.000		2.470.000.000		2.470.000.000		2.525.000.000		2.580.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.350.000.000		2.470.000.000		2.470.000.000		2.525.000.000		2.580.000.000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)	75	0	75	2.350.000.000	77	2.470.000.000	78	2.470.000.000	80	2.525.000.000	80	2.580.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	75	75	80		82		83		85		85		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					367.490.300		2.120.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					367.490.300		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase riset dan pengembangan yg ditindaklanjuti (%)	100	100	100	367.490.300	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0		670.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Meningkatnya rekomendasi hasil kajian dan/atau riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil rekomendasi kajian/riset yang dimanfaatkan perencanaan (%)	100	100	100	0	100	670.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					24.269.000.000		25.262.500.000		26.056.000.000		26.849.500.000		27.623.000.000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.754.000.000		19.372.500.000		19.741.000.000		20.109.500.000		20.478.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	18.754.000.000	100	19.372.500.000	100	19.741.000.000	100	20.109.500.000	100	20.478.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.115.000.000		4.335.000.000		4.605.000.000		4.875.000.000		5.145.000.000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	94,7	94,9	95,1	4.115.000.000	95,3	4.335.000.000	95,5	4.605.000.000	95,7	4.875.000.000	95,9	5.145.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.400.000.000		1.555.000.000		1.710.000.000		1.865.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	1.400.000.000	Terintegrasi (Integrated)	1.555.000.000	Terintegrasi (Integrated)	1.710.000.000	Terintegrasi (Integrated)	1.865.000.000	Dikelola (Managed)	2.000.000.000	INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					84.103.982.320		87.029.175.570		88.231.777.570		90.511.404.570		92.171.375.570	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					77.252.160.320		79.744.106.570		80.702.168.570		82.693.418.570		84.059.019.570	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	75	77	14.944.600.000	79	15.080.400.000	81	15.155.400.000	83	15.287.400.000	85	15.289.400.000	KECAMATAN BREBES

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kelurahan Limbangan Wetan (%)	0	75	77		79		81		83		85		KECAMATAN BREBES
	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kelurahan Brebes (%)	0	75	77		79		81		83		85		KECAMATAN BREBES
	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kelurahan Gandasuli (%)	0	75	77		79		81		83		85		KECAMATAN BREBES
	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kelurahan Limbangan Kulon (%)	0	75	77		79		81		83		85		KECAMATAN BREBES
	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kelurahan Pasarbatang (%)	0	75	77		79		81		83		85		KECAMATAN BREBES
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	81	82	3.865.015.160	83	3.920.015.160	84	3.970.015.160	85	4.025.015.160	86	4.075.015.160	KECAMATAN JATIBARANG
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	90	90	4.090.639.000	90	4.273.990.000	91	4.541.190.000	91	4.737.970.000	91	4.911.670.000	KECAMATAN WANASARI
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	88	89	3.789.800.000	90	3.923.000.000	91	3.999.000.000	92	4.068.000.000	93	4.090.000.000	KECAMATAN SONGGOM
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	85,56	86	87	3.437.800.000	88	3.892.150.000	89	3.984.550.000	90	4.074.050.000	91	4.216.050.000	KECAMATAN BULAKAMBA
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	88,00	88,50	3.655.685.250	89,00	3.655.685.250	89,50	3.610.685.250	90,00	3.610.685.250	90,50	3.640.685.250	KECAMATAN TANJUNG
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	88	88,5	3.950.500.000	89	3.933.500.000	89,5	3.999.650.000	90	4.071.913.000	90,5	4.109.811.000	KECAMATAN LOSARI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	88	89	3.568.343.000	90	4.173.343.000	91	4.068.343.000	92	4.068.343.000	93	4.115.343.000	KECAMATAN KERSANA
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	88	89	3.278.500.000	90	3.312.500.000	91	3.346.500.000	92	3.380.500.000	93	3.414.500.000	KECAMATAN KETANGGUNGAN
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	88	89	4.519.200.000	90	4.539.200.000	91	4.499.200.000	92	4.509.200.000	93	4.481.200.000	KECAMATAN BANJARHARJO
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	82	84	3.881.000.000	85	3.885.000.000	88	3.885.000.000	90	3.886.000.000	91	3.880.500.000	KECAMATAN LARANGAN
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	86	87	3.664.371.750	88	3.667.180.000	89	3.649.180.000	90	3.812.180.000	91	3.764.180.000	KECAMATAN TONJONG
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	90	90	4.964.615.000	90	5.519.078.000	90	5.778.990.000	92	6.328.897.000	93	6.933.800.000	KECAMATAN BUMIAYU
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	90	91	3.856.000.000	91	3.936.400.000	92	3.996.100.000	93	4.378.000.000	94	4.442.700.000	KECAMATAN PAGUYANGAN
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	84	85	3.600.276.000	86	3.732.600.000	87	3.857.300.000	88	4.062.700.000	88	4.290.600.000	KECAMATAN SIRAMPOG
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	86	87	4.477.500.000	88	4.490.750.000	89	4.500.750.000	89	4.506.250.000	90	4.507.250.000	KECAMATAN BANTARKAWUNG
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	0	88	88,5	3.708.315.160	89	3.809.315.160	89,5	3.860.315.160	90	3.886.315.160	90,5	3.896.315.160	KECAMATAN SALEM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					993.125.000		987.065.000		1.000.333.000		1.013.826.000		1.027.060.000	
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Brebes (%)	0	88	89	46.500.000	90	46.500.000	91	46.500.000	92	46.500.000	92	46.500.000	KECAMATAN BREBES
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Jatibarang (%)	0	81	82	20.800.000	83	20.800.000	84	20.800.000	85	20.800.000	86	20.800.000	KECAMATAN JATIBARANG
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Wanasari (%)	0	90	90	63.800.000	90	63.800.000	91	63.800.000	91	63.800.000	91	63.800.000	KECAMATAN WANASARI
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Songgom (%)	0	88	89	49.000.000	90	50.000.000	91	51.500.000	92	52.000.000	92	53.000.000	KECAMATAN SONGGOM
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Bulakamba (%)	85,56	86	87	60.000.000	88	61.800.000	89	63.200.000	90	64.700.000	91	66.200.000	KECAMATAN BULAKAMBA
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Tanjung (%)	0	88,00	88,50	36.000.000	89,00	36.000.000	89,50	36.000.000	90,00	36.000.000	90,50	36.000.000	KECAMATAN TANJUNG
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Losari (%)	0	88	88,5	51.000.000	89	52.800.000	89,5	54.600.000	90	56.400.000	90,5	58.200.000	KECAMATAN LOSARI
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Kersana (%)	0	88	89	52.000.000	90	52.000.000	91	52.000.000	92	52.000.000	93	52.000.000	KECAMATAN KERSANA
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Ketanggungan (%)	0	88	89	74.500.000	90	76.500.000	91	78.500.000	92	80.500.000	93	82.500.000	KECAMATAN KETANGGUNGAN
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Banjarharjo (%)	0	88	89	65.000.000	90	65.000.000	91	65.000.000	92	65.000.000	93	65.000.000	KECAMATAN BANJARHARJO
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran Kecamatan Larangan (%)	0	82	84	55.000.000	85	55.000.000	88	55.000.000	90	55.000.000	91	55.000.000	KECAMATAN LARANGAN
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Tonjong (%)	0	86	87	118.290.000	88	98.900.000	89	98.900.000	90	98.900.000	91	98.900.000	KECAMATAN TONJONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran Kantor Kecamatan Bumiayu (%)	0	90	90	36.300.000	90	39.930.000	90	43.923.000	92	48.316.000	93	53.150.000	KECAMATAN BUMIAYU
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Paguyangan (%)	0	90	90	90.000.000	90	91.500.000	90	92.500.000	90	94.500.000	90	95.500.000	KECAMATAN PAGUYANGAN
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Sirampog (%)	0	84	85	71.610.000	86	72.710.000	87	73.810.000	88	75.110.000	88	76.210.000	KECAMATAN SIRAMPOG
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Bantarkawung (%)	0	88	88	82.525.000	88	83.025.000	88	83.500.000	88	83.500.000	88	83.500.000	KECAMATAN BANTARKAWUNG
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Kecamatan Salem (%)	0	88	88,5	20.800.000	89	20.800.000	89,5	20.800.000	90	20.800.000	90,5	20.800.000	KECAMATAN SALEM
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.496.730.000		4.765.560.000		5.056.536.000		5.348.291.000		5.642.793.000	
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama stakeholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	90	90	3.727.500.000	90	4.005.000.000	91	4.282.500.000	91	4.560.000.000	91	4.840.000.000	KECAMATAN BREBES
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama stakeholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	95	30.800.000	96	30.800.000	97	30.800.000	98	30.800.000	99	30.800.000	KECAMATAN JATIBARANG
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama stakeholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	95	73.000.000	96	74.800.000	97	76.400.000	98	78.100.000	99	79.800.000	KECAMATAN BULAKAMBA
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	95	61.000.000	96	63.000.000	97	65.000.000	98	67.000.000	99	69.000.000	KECAMATAN KETANGGUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Desa bersama steakholder terkait														
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama steakholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	95	40.000.000	96	40.000.000	97	40.000.000	98	40.000.000	99	40.000.000	KECAMATAN BANJARHARJO
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama steakholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	95	31.000.000	96	31.000.000	97	31.000.000	98	31.000.000	99	31.000.000	KECAMATAN LARANGAN
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama steakholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	95	61.600.000	96	67.760.000	97	74.536.000	98	81.991.000	99	90.193.000	KECAMATAN BUMIAYU
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama steakholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	94	47.400.000	94	47.400.000	94	47.400.000	94	47.400.000	94	47.400.000	KECAMATAN BANTARKAWUNG
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama steakholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	95	63.000.000	96	64.000.000	97	65.500.000	98	66.500.000	99	67.500.000	KECAMATAN WANASARI
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama steakholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	95	44.800.000	96	44.800.000	97	44.800.000	98	44.800.000	99	45.400.000	KECAMATAN SONGGOM
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama steakholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	90	91	36.000.000	92	36.000.000	93	36.000.000	94	36.000.000	95	36.000.000	KECAMATAN TANJUNG
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan	Persentase Usulan kegiatan kecamatan	0	94	95	46.600.000	96	47.400.000	97	48.200.000	98	49.000.000	99	49.800.000	KECAMATAN LOSARI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama stakeholder terkait	selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)													
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama stakeholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	95	31.500.000	96	31.500.000	97	31.500.000	98	31.500.000	99	31.500.000	KECAMATAN KERSANA
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama stakeholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	95	66.830.000	96	45.200.000	97	45.200.000	98	45.200.000	99	45.200.000	KECAMATAN TONJONG
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama stakeholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	85	85	67.500.000	85	68.500.000	85	69.000.000	85	70.000.000	85	70.000.000	KECAMATAN PAGUYANGAN
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama stakeholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	84	85	37.400.000	86	37.600.000	87	37.900.000	88	38.200.000	88	38.400.000	KECAMATAN SIRAMPOG
Terlaksannya Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa bersama stakeholder terkait	Persentase Usulan kegiatan kecamatan selaras dengan tema pembangunan tahunan daerah (%)	0	94	94,5	30.800.000	95	30.800.000	95,5	30.800.000	96	30.800.000	96,5	30.800.000	KECAMATAN SALEM
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					381.460.000		376.916.000		383.688.000		392.898.000		400.470.000	
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	3	3	19.200.000	3	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	1	19.200.000	KECAMATAN BREBES

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	19.300.000	3	19.300.000	2	19.300.000	1	19.300.000	1	19.300.000	KECAMATAN JATIBARANG
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	33.000.000	3	34.000.000	2	35.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	KECAMATAN WANASARI
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	7.200.000	3	7.200.000	2	7.200.000	1	7.200.000	1	8.500.000	KECAMATAN SONGGOM
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	25.500.000	3	27.000.000	2	27.900.000	1	29.000.000	1	29.900.000	KECAMATAN BULAKAMBA
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	11.000.000	3	11.000.000	2	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	KECAMATAN TANJUNG
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	9.900.000	3	9.900.000	2	9.900.000	1	9.900.000	1	9.900.000	KECAMATAN LOSARI
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	14.900.000	3	14.900.000	2	14.900.000	1	14.900.000	1	14.900.000	KECAMATAN KERSANA
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	40.500.000	3	42.500.000	2	44.500.000	1	46.500.000	1	48.500.000	KECAMATAN KETANGGUNGAN
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	19.200.000	3	19.200.000	2	19.200.000	1	19.200.000	1	19.200.000	KECAMATAN BANJARHARJO
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	12.000.000	3	12.000.000	2	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	KECAMATAN LARANGAN
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	37.900.000	3	25.200.000	2	25.200.000	1	25.200.000	1	25.200.000	KECAMATAN TONJONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kondusif di wilayah kecamatan														
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	4	21.560.000	3	23.716.000	2	26.088.000	1	28.698.000	1	31.570.000	KECAMATAN BUMIAYU
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	4	4	34.000.000	3	35.000.000	2	35.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	KECAMATAN PAGUYANGAN
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	84	85	30.500.000	86	31.000.000	87	31.500.000	88	32.000.000	89	32.500.000	KECAMATAN SIRAMPOG
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	5	5	30.700.000	5	30.700.000	5	30.700.000	5	30.700.000	5	30.700.000	KECAMATAN BANTARKAWUNG
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di wilayah kecamatan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum (Angka)	0	6	5	15.100.000	4	15.100.000	3	15.100.000	2	15.100.000	1	15.100.000	KECAMATAN SALEM
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					346.800.000		361.700.000		364.210.000		385.742.000		370.108.000	
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	90	90	90	19.500.000	90	19.500.000	90	19.500.000	90	19.500.000	90	19.500.000	KECAMATAN BREBES
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	KECAMATAN JATIBARANG
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	21.000.000	100	21.000.000	100	21.000.000	100	40.000.000	100	21.000.000	KECAMATAN WANASARI
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.800.000	KECAMATAN SONGGOM
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	16.700.000	100	16.900.000	100	17.200.000	100	17.400.000	100	17.700.000	KECAMATAN BULAKAMBA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	KECAMATAN TANJUNG
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	KECAMATAN LOSARI
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	KECAMATAN KERSANA
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	20.200.000	100	21.200.000	100	22.200.000	100	23.200.000	100	24.200.000	KECAMATAN KETANGGUNGAN
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	KECAMATAN BANJARHARJO
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	KECAMATAN LARANGAN
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	0	100	12.600.000	100	12.600.000	100	12.600.000	100	12.600.000	KECAMATAN TONJONG
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	11.000.000	100	12.100.000	100	13.310.000	100	14.642.000	100	16.108.000	KECAMATAN BUMIAYU
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	KECAMATAN PAGUYANGAN
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	84	85	65.000.000	86	65.000.000	87	65.000.000	88	65.000.000	89	65.000.000	KECAMATAN SIRAMPOG
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	KECAMATAN BANTARKAWUNG
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	90	90,5	19.200.000	91	19.200.000	91,5	19.200.000	92	19.200.000	92,5	19.200.000	KECAMATAN SALEM
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN					633.707.000		793.828.000		724.842.000		677.229.000		671.925.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	90	90	70.500.000	90	43.500.000	90	43.500.000	90	43.500.000	90	43.500.000	KECAMATAN BREBES
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	KECAMATAN JATIBARANG
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	57.000.000	100	68.000.000	100	61.000.000	100	52.000.000	100	57.200.000	KECAMATAN WANASARI
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	17.900.000	100	41.900.000	100	49.500.000	100	24.700.000	100	26.200.000	KECAMATAN SONGGOM
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	55.500.000	100	57.500.000	100	59.500.000	100	61.500.000	100	62.500.000	KECAMATAN BULAKAMBA
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	21.000.000	100	24.000.000	100	19.000.000	100	22.000.000	100	19.000.000	KECAMATAN TANJUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
akuntabel dan bebas dari penyimpangan														
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	21.900.000	100	49.700.000	100	57.300.000	100	32.600.000	100	26.400.000	KECAMATAN LOSARI
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	22.400.000	100	18.900.000	100	18.900.000	100	18.900.000	100	18.900.000	KECAMATAN KERSANA
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	42.800.000	100	45.300.000	100	47.800.000	100	50.300.000	100	52.800.000	KECAMATAN KETANGGUNGAN
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	49.300.000	100	57.300.000	100	57.300.000	100	47.300.000	100	47.300.000	KECAMATAN BANJARHARJO
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	33.000.000	100	33.000.000	100	33.000.000	100	33.000.000	100	33.000.000	KECAMATAN LARANGAN
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	0	100	8.400.000	100	61.500.000	100	18.900.000	100	18.900.000	100	18.900.000	KECAMATAN TONJONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan														
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	29.205.000	100	37.126.000	100	40.840.000	100	44.927.000	100	49.423.000	KECAMATAN BUMIAYU
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	90	90	37.000.000	90	43.000.000	90	43.000.000	90	39.000.000	90	41.000.000	KECAMATAN PAGUYANGAN
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	84	85	44.902.000	86	90.202.000	87	52.402.000	88	65.702.000	89	52.902.000	KECAMATAN SIRAMPOG
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	100	100	65.300.000	100	65.300.000	100	65.300.000	100	65.300.000	100	65.300.000	KECAMATAN BANTARKAWUNG
Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta terwujudnya pengelolaan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi desa sesuai peraturan (%)	0	95	95	28.800.000	95	28.800.000	95	28.800.000	95	28.800.000	95	28.800.000	KECAMATAN SALEM
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.547.368.000		16.547.975.000		16.597.475.000		16.613.820.000		16.744.820.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					5.608.611.000		5.606.218.000		5.613.718.000		5.564.718.000		5.612.718.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	80	80	82	5.608.611.000	83	5.606.218.000	85	5.613.718.000	87	5.564.718.000	90	5.612.718.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					1.020.000.000		1.040.000.000		1.047.000.000		1.087.000.000		1.087.000.000	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksanannya program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	0	100	100	1.020.000.000	100	1.040.000.000	100	1.047.000.000	100	1.087.000.000	100	1.087.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.932.102.000		3.912.102.000		3.912.102.000		3.912.102.000		3.932.102.000	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	0	75	78	3.932.102.000	80	3.912.102.000	85	3.912.102.000	88	3.912.102.000	90	3.932.102.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					3.806.655.000		3.806.655.000		3.806.655.000		3.830.000.000		3.830.000.000	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	0	65	68	3.806.655.000	70	3.806.655.000	73	3.806.655.000	75	3.830.000.000	78	3.830.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					273.000.000		273.000.000		305.000.000		305.000.000		367.000.000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	0	100	100	273.000.000	100	273.000.000	100	305.000.000	100	305.000.000	100	367.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE (2024)	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dilaksanakan (Persentase)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.907.000.000		1.910.000.000		1.913.000.000		1.915.000.000		1.916.000.000	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Jumlah Kejadian Konflik SARA (Kali)	8	8-7	7-7	1.907.000.000	7-7	1.910.000.000	7-7	1.913.000.000	7-6	1.915.000.000	6-6	1.916.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					4.127.655.823.961		4.036.361.414.387		3.979.773.579.925		4.006.627.393.715		4.061.039.165.602	

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan kinerja penyelenggaraan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, indikator kinerja daerah (IKD), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 02 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja Utama ini diambil dari indikator sasaran strategis RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2045 serta indikator tujuan dan/atau sasaran RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 yang telah diseleksi. Sebagai catatan, Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO₂eq) merupakan target bersama, ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan berbagai bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, dan pihak non pemerintah. Lebih lanjut, berikut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030.

Penetapan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. IKU menjadi dasar bagi penyusunan indikator kinerja perangkat daerah, sehingga terdapat kesinambungan antara perencanaan strategis tingkat kabupaten dengan pelaksanaan teknis pada setiap perangkat daerah. Dengan demikian, IKU tidak hanya berperan sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan hasil pembangunan yang terukur, berdampak, dan berkelanjutan.

TABEL 4. 124 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,38	80,50	80,80	81,20	81,50	81,80	82
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,18	70,53	71,02	71,52	72,14	72,59	72,95
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,17	5,32	5,47	5,62	5,77	5,92
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	15,6	14,13	13,78	13,13	12,48	11,83	11,18
5	PDRB Per Kapita	Rp. Juta/ Tahun	30,04	32,04	33,04	34,04	35,04	36,04	37,04
6	Rasio Gini	Indeks	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
7	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37
8	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45	4,48	4,50
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,35	7,99	7,84	7,69	7,54	7,39	7,3
10	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	9,17	9,07	8,97	8,87	8,77	8,67	8,57
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,017	3,067	3,117	3,167	3,217	3,267	3,317
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	70,46	75,39	75,43	75,47	75,52	75,56	75,60
13	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,79	79,79	80,79	81,79	82,79	83,79	84,79
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	23,1	21	20,75	20	19,25	18,5	17,75
15	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	64,29	64,79	65,29	65,79	66,29	66,79	67,29

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan. Lebih lanjut, berikut merupakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030.

TABEL 4. 125 INDIKATOR KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64
2	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	43.528,8	1.599.586	2.366.531,45	3.133.476,90	3.900.422,35	4.667.367,80	5.434.313,25
3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	9,17	9,07	8,97	8,87	8,77	8,67	8,57
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	70,46	75,39	75,43	75,47	75,52	75,56	75,60
5	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	68,20	68,41	68,61	68,82	69,03	69,23	69,44
6	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,79	79,79	80,79	81,79	82,79	83,79	84,79
7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	143,69	143,68	143,67	143,66	143,65	143,64	143,63
8	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70
9	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	81,37	82	82	82	83	83	83
10	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	21,69	22	23	24	25	26,5	28
11	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,17	5,32	5,47	5,62	5,77	5,92
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,68	70,53	71,02	71,52	72,14	72,59	72,95
3	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	31,04	32,04	33,04	34,04	35,04	36,04	37,04
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	15,60	14,13	13,78	13,13	12,48	11,83	11,18
5	Rasio Gini	Indeks	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,18	74,37	74,55	74,74	74,92	75,11	75,30
8	Tingkat Pengangqquran Terbuka	%	8,35	7,99	7,84	7,69	7,54	7,39	7,3

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,41	6,45	6,49	6,55	6,59	6,64	6,67
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,61	87,61	87,9	88,44	88,92	89,21	89,75
11	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	0	61,89	62,39	62,89	63,39	63,89	74,39
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,45	12,60	12,72	12,86	12,99	13,10	13,21
13	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	59,76	61,75	62,75	63,75	64,75	65,75	66,75
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	23,1	21	20,75	20	19,25	18,5	17,75
15	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	43,52	45.00-49.00	49.01-50.19	50.30-51.48	51.64-52.89	53.01-54.34	54.41-55.83
16	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	31	32	33	34	35	36
17	Numerasi SD/Sederajat	%	69,345	30.06-31.88	70.0246-70.84	70.0796-70.90	70.1346-70.96	70.1896-71.01	70.2446-71.07
18	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75
19	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	68,51	72.55-73.35	72.78-73.58	73.01-73.82	73.25-74.05	73.48-74.28	73.71-74.52
20	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,18	20.99-21.93	21.34-22.30	21.70-22.67	22.06-23.05	22.43-23.43	22.81-23.83
21	Numerasi SMP/Sederajat	%	69,345	30.06-31.88	70.0246-70.84	70.0796-70.90	70.1346-70.96	70.1896-71.01	70.2446-71.07
22	PDRB Sub Sektor Perikanan	Juta Rupiah	1.585.138,79	1.635.000	1.685.000	1.735.000	1.785.000	1.835.000	1.885.000
23	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,270	63,420	64,042	64,664	65,286	65,908	66,530
24	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	14,46	14,66	14,86	15,06	15,26	15,46	15,66
25	PDRB Sub Sektor Peternakan	Juta Rupiah	803.804	1.339.975,22	1.366.774,52	1.407.777,76	1.421.855,53	1.450.292,65	1.479.298,5
26	Persentase Desa Mandiri	%	14,73	15,75	17,12	18,84	20,89	23,29	26,03
27	Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	*	0	6,2	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
28	PDRB Sub Sektor Pertanian	*	16.924.495,82	17.178.363,26	17.436.038,71	17.697.579,29	17.963.042,98	18.232.488,62	18.505.975,95
29	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,31	57,31	58,81	60,31	61,81	63,31	64,81
30	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,61	87,61	87,90	88,44	88,92	89,21	89,75
31	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,44	0.44-0.43	0.43-0.42	0.42-0.41	0.41-0.40	0.40-0.39	0.39-0.37
32	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	60,75	61,75	62,75	63,75	64,75	65,75	66,75
33	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	87,2	87,35	87,55	87,75	87,95	88,10	88,15
34	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	112,51	113,00	113,50	114,00	114,50	115,00	115,50

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
35	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
36	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	84,75	100	100	100	100	100	100
37	Jumlah dimensi Pembangunan Kebudayaan yang ditingkatkan	Angka	7	7	7	7	7	7	7
38	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	63,11	63.11-64.05	64.05-64.98	64.98-65.91	65.91-66.84	66.84-67.78	67.78-68.71
39	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,41	100	100	100	100	100	100
40	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,9	100	100	100	100	100	100
41	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,56	100	100	100	100	100	100
42	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Persentase	71,86	72	72,5	73	73,5	74	75
43	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	17,5	100	100	100	100	100	100
44	Desa Siaga Aktif Mandiri	%	37,71	40	44	48	52	56	60
45	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	82,50	83,30	84,102	84,904	85,706	86,508	87,31
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Infrastruktur	Angka	84,42	85,42	86,42	87,42	88,42	89,42	90,42
2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0	0,97	0,98	0,99	1	1	1
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	44,39	45,39	46,39	47,39	48,39	49,39	50,39
4	PDRB Kabupaten Brebes Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah	%	3,5	3,5	3,568	3,636	3,704	3,772	3,84
5	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,49	3,51	3,53	3,55	3,57	3,59	3,61
6	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,14	4,20	4,23	4,26	4,29	4,33	4,34
7	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	5,52	5.61-5.72	5.74-5.86	5.87-5.99	6-6.12	6.11-6.23	6.22-6.35

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	0	0	1,8	1,8	1,9	1,9	2
9	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,04	2.04-2.06	2.05-2.08	2.06-2.10	2.08-2.12	2.09-2.14	2.10-2.17
10	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	0	76,65	77,15	77,65	78,15	78,65	79,15
11	Pertumbuhan Laju Investasi	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	19,31	19,5	19,7	20	20,2	20,5	20,7
13	Disparitas Harga	%	0	-	-	10	10	10	10
IV ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,69	80,50	80,80	81,20	81,50	81,80	82
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	0	70	71	72	73	74	75
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45	4,48	4,50
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,57	85,07	85,57	86,07	86,57	87,07	87,57
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,017	3,067	3,117	3,167	3,217	3,267	3,317
6	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Indeks	64,29	64,79	65,29	65,79	66,29	66,79	67,29
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,84	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
8	Indeks Integritas	Angka	72,45	72,55	72,65	72,75	72,85	72,95	73,05
9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37
10	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	0	6,67	6,77	6,87	6,97	7,07	7,17
11	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	66,90	67,50	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00
12	Indeks Integritas Nasional	Angka	72,45	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79
13	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	0	0	80	80,5	81	81,5	82
14	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	0	70	71	72	73	74	75
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,84	3,09	1,80	1,80	1,90	1,90	2,00
16	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	82,39	82,50	82,75	83,00	83,25	83,50	83,75
17	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Milyar Rupiah	613,89	811,52	852,09	894,70	939,44	986,40	1.035,72
18	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	3,017	3,067	3,117	3,167	3,217	3,267	3,317

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
20	Indeks Monitoring Controlling for Surveillance Prevention (MCSP)	%	97,06	97,25	97,5	97,75	98	98,25	98,5
21	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,784	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4
22	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,82	2,92	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25
23	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	16,33	16.33-18.46	18.46-20.60	20.60-22.73	22.73-24.86	24.86-26.99	26.99-29.12
24	Konektivitas Darat	Persentase	0,5	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator ini dikelompokkan berdasarkan urusan dan unsur. Berikut merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030.

TABEL 4. 126 INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA									
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	60,86	61	62	63	64	65	65
2	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,50	71	72	73	73,5	74	75
3	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	55,17	56	57	58	59	59,5	60
4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,28	64	64,5	65,5	66	67	68
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,29	64,79	65,29	65,79	66,29	66,79	67,29
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	96,66	97	97,5	97,75	98	98,5	99
7	Iklim Keamanan SD	Nilai	75,87	76	77	78	79	80	81
8	Iklim Keamanan SMP	Nilai	72,23	72,5	73	73,5	74	74,5	75
9	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	73,25	73,75	74	74,5	75	75,5	76
10	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	72,62	73	73,5	74	74,5	75	75,5
11	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	60,46	61	62	63	64	65	66
12	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	59,82	60	61	62	63	64	65
13	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	51,35	52	53	54	55	58	60
14	Sekolah Jenjang SD Terakreditasi Minimal B	%	95,14	95,7	96	96,5	96,75	97,5	98
15	Sekolah Jenjang SMP Terakreditasi Minimal B	%	79,52	80	81	82	83	84	85
16	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	70,02	73	75	78	81	82	85
17	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang SMP (Siswa/Rombel)	*	29,78	29,9	30,5	31	31,5	32	32

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
18	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah	%	96,66	97	97,5	97,75	98	98,5	99
19	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD	%	51,45	52	53	54	56	58	60
20	Persentase Guru berkualifikasi akademik minimal S1 Jenjang SD	%	97,88	98	98,5	99	99,5	100	100
21	Persentase Guru berkualifikasi akademik minimal S1 Jenjang SMP	%	95	96	97	98	99	100	100
22	Persentase Guru berkualifikasi akademik minimal S1 Jenjang TK	%	70,02	71	72	73	74	74,5	75
23	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	4,24	4.24-4.48	4.48-4.70	4.70-4.78	4.78-5.15	5.15-5.22	5.22-5.58
24	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP Sederajat	%	78,48	80	81	82	83	84	85
25	Presentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Jenjang SD	%	69,60	69,60	72	75	80	82	85
26	Presentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Jenjang SMP	%	56,80	56,80	60	65	70	72	75
27	Presentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Jenjang TK	%	41,4	45	50	53	56	58	60
28	Rasio Guru per Siswa jenjang PAUD (Guru/Siswa)	*	18,22	18,15	18	17,75	17,5	17,25	17
29	Rasio Guru per Siswa Jenjang SD (Guru/Siswa)	%	20,56	20	20	20	20	20	20
30	Rasio Guru per Siswa Jenjang SMP (Guru/Siswa)	*	18,47	18,65	18,75	19	19,5	19,75	20
31	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang Paket A	Angka	10,69	11	12	13	14	15	16
32	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang Paket B	Angka	19,57	20,5	21	22,5	23	24,5	25
33	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang Paket C	Angka	20,65	21	22	23	24	25	26
34	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang PAUD (Siswa/Rombel)	*	15,99	15,8	15,7	15,5	15,25	15	15
35	Rasio Siswa Per Rombel Jenjang SD (Siswa/Rombel)	*	24,4	25	25,75	26,5	27	28	28
36	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Sederajat	%	101,79	100	100	100	100	100	100
37	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP Sederajat	%	100,87	100	100	100	100	100	100
38	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD Sederajat	%	94,51	95	96	97	98	99	100
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
39	Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi)	*	73	73	75	78	80	82	85
40	Jumlah Mendali Kejuaraan Tingkat Provinsi	Medali	18	18	25	30	32	35	38

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
41	Jumlah Atlet yang dibina tingkat Pendidikan Dasar	Orang	347	347	36	380	400	415	420
42	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi	34	34	34	34	34	34	34
43	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor	%	49	49	50	51	52	53	54
44	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Provinsi	Orang	25	25	37	40	47	50	55
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH									
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
45	Angka Kematian Balita (Per 1000 KH)	Per 1000	15,9	15,79	14,78	14,12	13,61	13,11	12,61
46	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,4	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80
47	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	54	51	48	45	42	39	36
48	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	Per 1000	12,73	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,46
49	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	88,16	88,2	88,25	88,3	88,35	88,4	88,45
50	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	93,06	100	100	100	100	100	100
51	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	61,15	100	100	100	100	100	100
52	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,93	100	100	100	100	100	100
53	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	57,62	100	100	100	100	100	100
54	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	83,43	100	100	100	100	100	100
55	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75,23	100	100	100	100	100	100
56	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	88,81	100	100	100	100	100	100
57	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93,4	100	100	100	100	100	100
58	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	87,63	100	100	100	100	100	100
59	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	87,24	100	100	100	100	100	100
60	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K6)	%	85,8	100	100	100	100	100	100
61	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	77,75	25,5	24,5	23,5	22,5	21,5	20,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM									
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
62	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,45	82,50	82,70	82,90	83,10	83,30	83,50
63	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	80,98	82	83	84	85	86	87
64	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	62,71	64-64	76-76	82-82	85-85	87-87	88-88
65	Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	100
66	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	95,91	96	96,1	96,2	96,3	96,4	96,5
67	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
68	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	0	0	1,5	3	5	8	11
69	Jumlah Dokumen Rekomtek Persetujuan Bangunan Gedung terbit dan Sertifikat Laik Fungsi	Dokumen	445	450	450	450	450	450	450
70	Jumlah Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	21,69	22	23	24	25	26,5	28
71	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	73	75	77	79	81	83	85
72	Persentase panjang Jalan Kabupaten Kondisi Rusak tertangani	%	12,16	10,45	29,83	22,56	18,78	16,94	15,53
73	Persentase Saluran Drainase tersumbat tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
74	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah	%	78,33	79	80	81	82	83	84
1.03.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG									
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
75	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	79,4	80,4	81,4	82,4	83,4	84,4	85,4
76	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	50	55	60	65	70	75	80
77	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,15	75,15	77,15	79,15	81,15	83,15	85,15
78	Bantaran/Tanggul Sungai Dan Saluran Pembuang Berfungsi Baik	%	50	50	54	58	62	66	70
79	Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik	%	69	69	69,2	69,4	69,6	69,8	70
1.04.2.10.1.03.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
80	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	44,39	45,39	46,39	47,39	48,39	49,39	50,39
81	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	90,6	90,8	91	91,2	91,4	91,6	91,8

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
82	Persentase Pemenuhan Rumah Sehat Layak Huni	%	50,27	57,28	63,01	68,01	73,01	78,01	83,01
83	Persentase Rumah Sehat Layak Huni	%	94,49	94,73	94,96	95,2	95,44	95,68	95,92
84	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	12,57	24,78	36,99	49,20	61,40	73,61	85,82
85	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	73,5	73,8	74	74,5	74,8	75
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
86	Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	95	95	95	95	95	95	95
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
87	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	31	15	15	15	15	15	15
88	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
89	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100
90	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,90	63	64	65	66	67	68
1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
91	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
92	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
93	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	17,77	18,18	20,66	23,14	25,62	28,1	30,58
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
94	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	88,24	85	85,50	86	86,50	87	87,50
95	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,80	76,00	76,25	76,50	76,75	77,00	77,25
2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
96	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,45	77,50	77,60	77,80	77,90	80,00	80,10
97	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,22	87,00	87,30	87,60	87,90	90,20	90,50
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
98	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	75,39	75,43	75,47	75,52	75,56	75,6	75,6
99	Prosentase peningkatan IKLH	%	0	0	0,05	0,05	0,07	0,05	0,05
100	Meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah	%	0	24	25	26	27	28	29
101	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	84,57	85,07	85,57	86,07	86,57	87,07	87,57

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
102	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,29	64,79	65,29	65,79	66,29	66,79	67,29
103	Volume Limbah B3 yang dikelola	Kg	0	578.644	636.508	700.159	770.175	847.193	931.912
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
104	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	85,12	85,37	85,62	85,87	86,12	86,37	86,62
105	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	61,24	61,49	61,74	61,99	62,24	62,49	62,74
106	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,95	68,95	69,95	70,95	71,95	72,95	73,95
2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
107	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,61	85,70	85,80	86,00	86,20	86,50	87,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
108	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0.5:1	0.5:1	0.5:1	0.5:1	0.5:1	0.5:1	0.5:1
109	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	84,57	85,07	85,57	86,07	86,57	87,07	87,57
110	Kinerja Lalu Lintas (0.6 S.D. 0.8)	Skor	0,55	0,7	0,71	0,71	0,72	0,72	0,73
111	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	47,12	47,44	47,54	47,64	47,74	47,84	47,94
112	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,29	64,79	65,29	65,79	66,29	66,79	67,29
113	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Orang	235.000	250.000	265.000	280.000	295.000	310.000	325.000
114	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	%	69	72	75	78	81	84	87
2.16.2.20.2.21.02.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
115	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	93,33	93,63	93,93	94,23	94,53	94,83	95,13
116	Indeks SPBE - Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Indeks	3	3	1	1	1,5	1,5	2
117	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	85,22	85,72	86,22	86,72	87,22	87,72	88,22
118	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,35	77,45	77,85	78,15	78,65	79,05	79,50
119	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	84,02	85	86	87	88	89	90
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
120	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,58	2,58	2,78	2,78	2,98	2,98	3,18

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
121	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia	%	40	45	50	55	60	65	70
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
122	Indeks SPBE - Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Indeks	1	1	1	2	2	3	3
2.17.3.30.0.00.03.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN									
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
123	Persentase Koperasi Aktif	%	0	48	50	51	52	53	54
124	Jumlah promosi dan kemitraan	Unit	0	100	150	200	250	300	350
125	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	0	87,08	87,09	87,15	87,21	87,25	87,50
126	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	70	75	76	77	77	78
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
127	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,57	85,07	85,57	86,07	86,57	87,07	87,57
128	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	*	2.348	2.395	2.443	2.492	2.542	2.592	2.644
129	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,7	75,2	75,7	76,2	76,7	77,2	77,7
2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
130	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	82,03	82,7	83	83,5	84	84,2	85
2.24.2.23.0.00.01.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN									
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
131	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	30,34	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
132	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,04	0.16-0.19	0.19-0.25	0.22-0.30	0.26-0.35	0.29-0.40	0.32-0.44
133	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	66,80	66,80	66,90	67	67,10	67,20	67,30
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
134	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan LKD Kabupaten	Nilai	78,68	78,93	79,18	79,43	79,68	79,93	80,18
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN									
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
135	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,55	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,00
136	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,47	85,50	85,60	85,70	85,80	85,90	86,00
3.27.0.00.0.00.08.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN									
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
137	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	8.669,41	8.062,55	8.465,68	7.873,1	8.266,74	7.853,4	8.403,12
138	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86	87	87,46	87,46	87,5	87,5	87,5
139	Jumlah Produksi Telur	Ton	12.056,91	7.836,99	11.206,9	13.672,42	9.297,24	11.621,56	12.493,17
140	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,05	71	73,25	73,75	73,9	74,12	74,22
141	Produksi ternak ruminansia	Ekor	209.985	191.088	204.464	186.062	169.317	172.703	177.884
142	Produksi ternak unggas	Ekor	8.068.488	7.503.694	8.254.063	8.006.441	7.606.119	7.910.364	7.514.846
3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN									
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
143	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	84,07	84,75	85	85,25	85,5	85,75	86
144	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,60	80,62	80,65	80,67	80,70	80,72	80,75
3.31.2.07.3.32.05.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA									
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
145	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	70,25	70,5	70,7	71	71,2	71,5	71,7
146	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	92,72	92,8	92,82	92,84	92,86	92,88	93
147	Persentase tenaga kerja yang terserap di sektor industri	%	78	78,25	78,50	78,75	79	79,25	79,50
148	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,98	80	80,25	80,5	80,75	81	81,25
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
149	Prosentase pertumbuhan jumlah IKM	%	28,51	28,7	28,9	29	29,2	29,4	29,6
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD									
4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
150	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
151	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
152	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah	%	0	84	85	86	87	88	89
5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									
5.01 - PERENCANAAN									
153	Skor Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Angka	0	0	10	10	10	10	10
154	Skor Aspek Sinergi dan Aspek Kualitas Perencanaan	Angka	0	0	70	70,5	71	71,5	72
155	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,40	79,40	79,70	79,90	80,00	80,20	80,50
156	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	83,83	83,83	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
157	Skor Inovasi Perencanaan Pembangunan	Angka	0	0	7	7,2	7,4	7,6	7,8
5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
5.02 - KEUANGAN									
158	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	87,43	89	90	91	92	93	94
159	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,80	79,82	79,84	79,86	79,88	79,90	80,02
5.02.2.15.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
160	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi ideal	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.02 - KEUANGAN									
161	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,25	78,50	78,75	79,00	79,25	79,50	79,75
162	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	88,41	88,50	88,75	89,00	89,25	89,50	89,75
163	Persentase perangkat daerah yang menggunakan SIPD secara aktif dan sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
164	Penetapan APBD Dan APBD Perubahan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
165	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
166	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	3,86	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
167	Persentase realisasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk belanja transfer dan belanja tidak terduga	%	0,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00
168	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah	%	0,00	0,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
169	Tingkat kesesuaian SPM SKPD dengan SP2D yang diterbitkan berdasarkan SPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH									
5.03 - KEPEGAWAIAN									
170	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,49	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50
171	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,4	83,41	83,42	83,43	83,44	83,45	83,46
172	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	89,23	91,50	92,00	92,50	92,75	93,00	93,5
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
173	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,68	0,68	0,70	0,73	0,76	0,79	0,80
174	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	30,72	30,73	30,74	30,75	30,76	30,77	30,78
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT									
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
175	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,47	87,00	87,50	88,00	88,50	90,00	90,50

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
176	Persentase pengawasan internal yang telah dilaksanakan	%	0	90	91	92	93	94	95
177	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Telah Ditindaklanjuti	%	51,65	87	88	89	90	91	92
178	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,5	81,60	81,70	81,80	81,90	82,00	82,10
179	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Telah Ditindaklanjuti	%	92,14	92	93	94	95	96	97
180	Persentase Aduan yang Tertangani Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BREBES									
7.01 - KECAMATAN									
181	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	70	73	75	77	78	80
7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN JATIBARANG									
7.01 - KECAMATAN									
182	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,55	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50
7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN WANASARI									
7.01 - KECAMATAN									
183	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	75	76	77	77	78	78
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN SONGGOM									
7.01 - KECAMATAN									
184	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	76	77	78	79	80	81
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BULAKAMBA									
7.01 - KECAMATAN									
185	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,10	76	77	78	79	80	81
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN TANJUNG									
7.01 - KECAMATAN									
186	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,60	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN LOSARI									
7.01 - KECAMATAN									
187	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,85	76	76,5	77	77,5	78	78,5
7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN KERSANA									
7.01 - KECAMATAN									
188	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	76	77	78	79	80	81
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KETANGGUNGAN									
7.01 - KECAMATAN									
189	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	76	77	78	79	80	81

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN BANJARHARJO								
	7.01 - KECAMATAN								
190	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	76	77	78	79	80	81
	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN LARANGAN								
	7.01 - KECAMATAN								
191	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	76	76	76	77	78	80
	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TONJONG								
	7.01 - KECAMATAN								
192	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	75	79	80	81	82	83
	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN BUMIAYU								
	7.01 - KECAMATAN								
193	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	76	77	78	79	80	81
	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PAGUYANGAN								
	7.01 - KECAMATAN								
194	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	74	74	74	74	74	74
	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SIRAMPOG								
	7.01 - KECAMATAN								
195	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	75	76	77	78	79	79
	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN BANTARKAWUNG								
	7.01 - KECAMATAN								
196	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,80	76	77	78	79	80	81
	7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SALEM								
	7.01 - KECAMATAN								
197	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,75	76	76,5	77	77,5	78	78,5
	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
198	Persentase Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pendidikan Politik, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	%	0	0,20	0,39	0,59	0,72	0,92	1,12
199	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	0	60	60	63	63	65	65
201	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85,5	84	84	84	85	85	85
202	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60	61	62	63	64	65	66
203	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	8	8-7	7-7	7-7	7-7	7-6	6-6

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Brebes, 2025

Penutup



05

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan perannya sebagai implementasi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Proses penyusunan RPJMD ini telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, serta RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039. Beberapa isu yang diangkat dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 antara lain penanggulangan kemiskinan, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha, tata kelola pemerintahan, peningkatan pemberdayaan dan kemandirian desa, serta keberlanjutan pembangunan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD ini menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Strategis. Dokumen ini juga akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dengan perodesasi yang sama (tahun 2025-2029), selanjutnya Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda/Bapperida Kabupaten Brebes berkewajiban melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD untuk menjamin konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah.
3. Dalam rangka menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah, BPPKAD Kabupaten Brebes berkewajiban menyesuaikan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk nomenklatur kode rekening program perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah terkait Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 dan nomenklatur kode rekening kegiatan perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Brebes terkait Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. RPJMD ini pada akhir masa jabatan Bupati-Wakil Bupati akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPD-AMJ) Bupati-Wakil Bupati.
5. RPJMD ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah, DPRD, dan warga masyarakat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah, serta melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.

6. RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan: 1) Berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan, dan evaluasi menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat pemantauan dan evaluasi dilaksanakan 2) Hasil pengendalian, pemantauan, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat dilaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, gejolak politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi kebijakan nasional).
7. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah akan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJMD.
8. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif, setiap perangkat daerah wajib mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial ke dalam seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan.

5.2 Masa Transisi

Masa transisi merupakan masa peralihan atau pergantian. Sebagai pedoman transisi, RPJMD Kabupaten Brebes disusun berdasarkan RPJMN 2025-2029, tetapi mengingat masa jabatan kepala daerah berakhir pada Februari 2030, maka semua indikator dirancang sampai tahun 2030. Sehingga, dokumen perencanaan di tahun 2030 masih mengacu pada dokumen RPJMD saat ini sampai terpilihnya kepala daerah yang baru. Selama masa transisi, pelaksanaan pembangunan tetap mengacu pada visi jangka panjang daerah (RPJPD 2025-2045), dengan menjaga kesinambungan kebijakan, menghindari kekosongan arah pembangunan, serta memastikan keberlanjutan program strategis yang belum selesai pada masa jabatan sebelumnya.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

RPJMD Kabupaten Brebes memiliki jangka waktu lima tahun, sehingga perlu dilakukan evaluasi paruh waktu (*mid-term evaluation*) untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan program terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan yang sistematis dan berkelanjutan. Pemantauan ini dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hasil pemantauan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk penyesuaian terhadap program dan kegiatan pembangunan jika ditemukan ketidaksesuaian atau perubahan kondisi. Selain itu, pengendalian juga melibatkan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah serta evaluasi kinerja secara periodik untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini dilakukan terhadap capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD
Kabupaten Brebes
2025-2029

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Kabupaten Brebes

2025